Seri Memoria Passionis N0. 44



MILITERISASI & KRISIS KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA

Analisis, Kronik dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia Tahun 2025

Alexandro F Rangga OFM, Apriani A Amenes, Bernadus B Koten, Goklian Lumban Gaol OFM, Hendrianus K B Belolon, Hans G Yosua, Ignasius Ngari OFM, Yuliana Langowuyo

MILITERISASI
&
KRISIS KEMANUSIAAN
DI TANAH PAPUA

Undang-undang Republik Indonesia
No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak ekslusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seri Memoria Passionis N0. 44



MILITERISASI & KRISIS KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA

Analisis, Kronik dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia Tahun 2025

Alexandro F Rangga OFM, Apriani A Amenes, Bernadus B Koten, Goklian Lumban Gaol OFM, Handrianus K Belolon, Hans G Yosua, Ignasius Ngari OFM, Yuliana Langowuyo

Seri Memoria Passionis No. 44
MILITERISASI DAN KRISIS KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA ANALISIS, KRONIK, DAN REKOMENDASI HAK ASASI MANUSIA PAPUA TAHUN 2025
Copyrights©2026, JPIC OFM Papua
Cetakan I, April 2026

PENERBIT SKPKC FRANSISKAN PAPUA
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura Papua 99352
www.fransiskanpapua.org
Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis : Alexandro Rangga OFM
Apriani Anastasia Amenes
Bernadus B. Koten
Goklian PH Lumban Gaol OFM
Handrianus K. Belolon
Hans G. Yosua
Ignasius Ngari OFM
Yuliana Langowuyo
Editor : Alexandro Rangga OFM
Desain Cover : Fransina Mabel
Desain Isi : desolu

ISBN: 978-623-94589-6-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Desoluprint, Yogyakarta

SERI MEMORIA PASSIONIS

Seri *Memoria Passionis* ditulis berdasarkan kronik. Kronik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Kata kronik sendiri berasal dari bahasa Latin *Chronicus,* pinjaman dari bahasa Yunani *Chronicós,* yang merupakan turunan dari kata *Chronos,* yang berarti waktu. Kata jamak netral, *Chronica* dikembangkan untuk merujuk pada karya sejarah yang menceritakan peristiwa dalam urutan kronologis. Oleh karena itu, *Memoria Passionis* adalah karya sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa di Papua dalam urutan kronologis disertai analisis berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam arti inilah *Memoria Passionis* tidak semata-mata ingatan akan penderitaan (baca: pelanggaran HAM) tetapi catatan sejarah yang menjadi bukti tentang keberadaan suatu masyarakat atau bangsa bernama Papua. "Memoria Passionis" berasal dari bahasa Latin, di mana "Memoria" berarti "ingatan" dan "Passionis" merujuk pada "penderitaan" atau "kematian". Dalam lintasan sejarah, kronik menjadi catatan masa lampau keberadaan dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di China seperti dinasti Chou, Chin, Tang, Ming, atau Sung. Di Indonesia, kita mengenal *Kronik Revolusi Indonesia* yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, Ediati Kamil, dan Koesalah Soebagyo. Nama yang terakhir juga menyusun *Kronik Irian Barat*. *Memoria Passionis* meneruskan tradisi ini agar peristiwa Papua terekam secara baik dan rapi.

Refleksi atas *Memoria Passionis* membangun kesadaran akan kesamaan nasib, membentuk karakter dan identitas bangsa. Ingatan akan

penderitaan dapat membawa pada pengampunan politik dan keadilan-sosial. Ini juga membuka narasi baru, memimpin pada kebebasan untuk beraksi dan misi, serta transformasi. Ingatan masa lalu adalah pendidikan publik yang membantu masyarakat mencegah peristiwa serupa di masa depan. Ini menunjukkan bagaimana konsep mengingat penderitaandan harapan untuk pemulihan bisa mendorong perubahan sosial dan memperjuangkan keadilan dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR SINGKATAN

AlDP	: Aliansi Demokrasi untuk Papua
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Brimob	: Brigader Mobil
Brigjen	: Brigadir Jenderal
DAP	: Dewan Adat Papua
Danramil	: Komandan Rayon Militer
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRP	: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPO	: Daftar Pencarian Orang
dr	: Dokter
Elsham	: Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
ESDM	: Energi Sumber Daya dan Mineral
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GIDI	: Gereja Injili di Indonesia
GKI	: Gereja Kristen Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
Humas	: Hubungan Masyarakat
Irjen	: Inspektur Jenderal

ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik
JDP : Jaringan Damai Papua
JPU : Jaksa Penuntut Umum
Jerat : Jaringan Kerja Rakyat
Kabid : Kepala Bidang
Kabag : Kepala Bagian
Kadis : Kepala Dinas
Kingmi : Gereja Kemah Injil Indonesia
KKB : Kelompok Kriminal Bersenjata
KKSB : Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata
KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNPB : Komite Nasional Papua Barat
Kodap : Komando Daerah
Kodam : Komando Daerah Militer
KontraS : Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
Kombes : Komisaris Besar
Komnas : Komisi Nasional
Koramil : Komando Rayon Militer
KPK : Komisi Pemberantas Korupsi
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KWI : Konferensi Waligereja Indonesia
LBH : Lembaga Bantuan Hukum
Letkol : Letnan Kolonel
MA : Mahkamah Agung
Mayjend : Mayor Jenderal
Mabes : Markas Besar
Menko : Mentri Koordinator
Medsos : Media Sosial
MK : Mahkamah Konstitusi
MRP : Majelis Rakyat Papua
OPM : Organisasi Papua Merdeka
Otsus : Otonomi Khusus
OTK : Orang Tak Dikenal

P : Pastor/Pater
PAHAM : Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia
Pamtas : Pengamanan Perbatasan
Pangdam : Panglima Komando Daerah Militer
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pdt : Pendeta
Pemda : Pemerintah Daerah
Pemkab : Pemerintah Kabupaten
Pemprov : Pemerintah Provinsi
Pempus : Pemerintah Pusat
PSU : Pemungutan Suara Ulang
Pjs : Pejabat Sementara
Plt : Pelaksana Tugas
PN : Pengadilan Negeri
Pol : Polisi
Polri : Kepolisian Republik Indonesia
Polda : Kepolisian Daerah
Polres : Kepolisian Resor
Polsek : Kepolisian Sektor
Prada : Prajurit Dua
Pratu : Prajurit Satu
Pst : Pastor
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu : Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
RI : Republik Indonesia
Satgas : Satuan Tugas
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
Sekda : Sekretaris Daerah
Serda : Sersan Dua

Serka : Sersan Kepala
Serma : Sersan Mayor
Sertu : Sersan Satu
STFT : Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi
Tapol : Tahanan Politik
Tipikor : Tindakan Pidana Korupsi
TNI : Tentara Nasional Indonesia
TPNPB : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TPS : Tempat Pemungutan Suara
ULNWP : United Liberation National West Papua
Uncen : Universitas Cenderawasih
USTJ : Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
UU : Undang-Undang
Wabup : Wakil Bupati
Wagub : Wakil Gubernur
Wapres : Wakil Presiden
Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Yapis : Yayasan Pendidikan Islam
YPK : Yayasan Pendidikan Kristen
YPPK : Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik

DAFTAR ISI

Seri Memoria Passionis v
Daftar Singkatan vii
Daftar Isi xi
Kata Pengantar xiii
Pendahuluan xv

BAB I MILITERISASI, KEKERASAN, DAN KRISIS KEMANUSIAAN DI PAPUA
Yuliana Langowuyo dan Alexandro Rangga OFM 1

BAB II LINGKUNGAN DAN POLITIK 'TEGA'
Ignasius Ngari OFM 26

BAB III HARAPAN PELAYAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS
Bernardus B. Koten 73

BAB IV PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA: *QUO VADIS*?
Handrianus K. Belolon 165

BAB V IMPUNITAS DAN SIKLUS KEKERASAN: ANALISIS KRITIS PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA
Hans G. Yosua 210

BAB VI ORANG MUDA DI TANAH PAPUA DALAM PUSARAN NARKOBA
Goklian Paraduan Haposan OFM 247

BAB VII WAJAH PATOLOGI KEKUASAAN DI PAPUA
Handrianus K. Belolon 257

BAB VIII "SEKOLAH DIBAKAR, GURU DITEMBAK"
POLITIK KEAMANAN DAN KRISIS KEMANUSIAAN
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI TANAH PAPUA
Apriani Anastasia Amenes 287

PENUTUP 364
BIODATA PENULIS 367

Kata Pengantar

Tahun 2025 kembali memperlihatkan bahwa Tanah Papua masih berada dalam situasi yang menuntut perhatian serius dan kejujuran moral dari kita semua. Berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan hanya kompleks, tetapi juga menyentuh inti terdalam kemanusiaan: martabat manusia, keadilan, dan hak untuk hidup dalam damai. Dalam konteks inilah, *Memoria Passionis No. 44* dihadirkan sebagai bagian dari komitmen untuk terus merawat ingatan sekaligus menghadirkan suara yang jernih di tengah berbagai narasi yang sering kali saling bertentangan.

Sebagai karya dalam tradisi *Memoria Passionis*, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis. Ia berupaya menghadirkan realitas Papua secara lebih utuh—bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai pengalaman hidup manusia yang konkret. Di dalamnya, kita diundang untuk melihat lebih dalam, memahami dengan lebih jujur, dan pada akhirnya, mengambil sikap yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam semangat **Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC)**, karya ini lahir dari keyakinan bahwa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika keadilan diabaikan, perdamaian akan menjadi rapuh. Ketika ruang hidup dirusak, yang paling terdampak adalah mereka yang paling rentan. Oleh karena itu, refleksi yang dihadirkan dalam buku ini juga merupakan undangan untuk melihat keterkaitan antara berbagai persoalan tersebut secara lebih menyeluruh.

Spiritualitas Fransiskan mengajarkan kita untuk memandang dunia dengan mata belas kasih—melihat setiap manusia sebagai saudara, dan

seluruh ciptaan sebagai rumah bersama. Dari perspektif inilah, kerja-kerja dokumentasi dan advokasi tidak hanya menjadi aktivitas intelektual, tetapi juga menjadi panggilan iman: untuk tetap setia pada kebenaran, untuk berdiri bersama mereka yang menderita, dan untuk terus merawat harapan di tengah situasi yang tidak mudah.

Kami menyadari bahwa memahami Papua membutuhkan keterbukaan hati dan kesediaan untuk melampaui prasangka. Oleh karena itu, buku ini dihadirkan sebagai kontribusi untuk memperkaya ruang dialog publik—sebuah ruang yang semakin dibutuhkan agar berbagai persoalan dapat dihadapi secara jujur dan bermartabat. Tanpa dialog yang tulus, tanpa komitmen pada keadilan, dan tanpa penghormatan terhadap martabat manusia, upaya penyelesaian apa pun akan sulit mencapai akar persoalan.

Lebih dari itu, buku ini juga merupakan bentuk solidaritas—sebuah upaya untuk memastikan bahwa pengalaman dan suara masyarakat Papua tidak hilang atau dilupakan. Ingatan yang dirawat di dalamnya diharapkan dapat menjadi bagian dari kesadaran bersama, yang tidak hanya memahami masa lalu dan masa kini, tetapi juga mendorong langkah-langkah nyata menuju perubahan.

Akhirnya, kami berharap *Memoria Passionis No. 44* ini tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi panggilan untuk bertindak. Dalam semangat Fransiskan yang sederhana namun mendalam, kami percaya bahwa setiap upaya kecil untuk menegakkan keadilan, membangun perdamaian, dan merawat ciptaan adalah bagian dari kerja besar kemanusiaan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam perjalanan panjang menuju Papua yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

Jayapura, 31 Maret 2026

JPIC OFM PAPUA

Alexandro Rangga OFM
Direktur JPIC OFM Papua

PENDAHULUAN

Memoria Passionis bukan sekadar dokumentasi peristiwa, melainkan upaya merawat ingatan kolektif atas penderitaan yang terus berlangsung di Tanah Papua. Seri ini lahir dari kesadaran bahwa di balik angka-angka kronik, terdapat kehidupan manusia—komunitas, keluarga, dan individu—yang mengalami kehilangan, ketidakpastian, dan keterpinggiran secara terus-menerus. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya mencatat apa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tetapi juga berupaya membaca makna di balik peristiwa-peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas: politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Berbeda dari laporan kronologi biasa, buku ini disusun dengan pendekatan tematik-analitis yang menempatkan **militerisasi, kekerasan, dan krisis kemanusiaan** sebagai poros utama. Pilihan ini didasarkan pada temuan bahwa sepanjang tahun 2025, peningkatan kehadiran aparat keamanan, operasi militer, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya menjadi fenomena yang paling sering terjadi, tetapi juga menjadi simpul yang menghubungkan berbagai persoalan lain di Papua. Dari pengungsian internal hingga pembatasan ruang sipil, dari trauma kolektif hingga terhambatnya layanan dasar—semuanya berkelindan dalam konteks militerisasi yang semakin menguat.

Dari titik tolak tersebut, buku ini kemudian bergerak untuk menelusuri **basis material konflik**, yakni eksploitasi sumber daya alam dan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Bab tentang lingkungan menunjukkan bahwa konflik ekologis bukanlah isu yang

berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas, termasuk proyek strategis nasional dan investasi ekstraktif. Dalam banyak kasus, pengamanan terhadap proyek-proyek ini justru memperkuat kehadiran militer, sehingga memperdalam siklus konflik.

Selanjutnya, buku ini mengkaji **dimensi tata kelola dan pelayanan publik**, dengan menyoroti harapan akan hadirnya aparatur negara yang berintegritas di tengah krisis kepercayaan yang terus menguat. Korupsi, lemahnya implementasi kebijakan, serta kegagalan dalam menghadirkan layanan dasar yang adil menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak semata-mata terletak pada keamanan, tetapi juga pada kegagalan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah **dampak kemanusiaan**, khususnya dalam bidang kesehatan, yang dalam buku ini dibaca sebagai bagian dari "patologi kekuasaan." Krisis kesehatan di Papua tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik, kemiskinan struktural, pengungsian, serta marginalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, kesehatan tidak lagi dipahami semata sebagai isu teknis, tetapi sebagai cerminan dari relasi kuasa yang timpang.

Bab-bab selanjutnya memperkaya analisis dengan berbagai perspektif tematik yang saling melengkapi, mulai dari dinamika sosial, politik lokal, hingga pengalaman konkret masyarakat di lapangan. Keseluruhan struktur ini disusun secara sengaja untuk membangun suatu alur yang bergerak dari **struktur kekuasaan**, menuju **basis ekonomi dan ekologis**, lalu ke **tata kelola negara**, dan akhirnya pada **dampak kemanusiaan yang paling nyata**.

Dengan pendekatan ini, buku **Memoria Passionis No. 44: Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua** diharapkan tidak hanya menjadi arsip penderitaan, tetapi juga menjadi **dokumen reflektif dan advokatif** yang mampu mendorong perubahan. Ingatan yang dirawat dalam buku ini bukan untuk membekukan masa lalu, melainkan untuk membuka kemungkinan masa depan—masa depan di mana keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di Tanah Papua benar-benar dihormati dan diwujudkan.

BABI

MILITERISASI, KEKERASAN, DAN KRISIS KEMANUSIAAN DI PAPUA

(Oleh Yuliana Langowuyo dan Alexandro Rangga OFM)

Pendahuluan

Situasi hak asasi manusia di Tanah Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan eskalasi yang signifikan dan kompleks, ditandai oleh meningkatnya kehadiran militer, intensifikasi kekerasan terhadap warga sipil, serta meluasnya krisis kemanusiaan. Kronologi peristiwa sepanjang tahun tersebut memperlihatkan adanya peningkatan penggunaan pendekatan keamanan berbasis militer dalam merespons dinamika konflik di berbagai wilayah Papua (Amnesty International, n.d.; Human Rights Watch, n.d.).

Kronologi kekerasan militer pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi pola dominan dalam penanganan konflik. Hal ini tercermin dari meningkatnya operasi militer, penempatan pasukan secara masif, serta keterlibatan aparat keamanan dalam berbagai aspek kehidupan sipil (Galtung, 1969).

Peningkatan kehadiran militer juga ditandai dengan pembangunan struktur komando baru seperti Kodam di Provinsi Papua Selatan serta penempatan pasukan non-organik di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Yahukimo. Kebijakan ini memicu penolakan dari masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil

karena dinilai memperkuat pendekatan represif dalam tata kelola konflik (Chauvel, 2005).

Selain itu, kehadiran militer berkaitan erat dengan pengamanan proyek strategis nasional, seperti food estate di Merauke, pengelolaan sumber daya alam, serta pengamanan objek vital seperti Freeport. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin stabilitas investasi dan pembangunan ekonomi (Braithwaite et al., 2010).

Namun demikian, bagi masyarakat lokal, kehadiran militer lebih sering dipersepsikan sebagai sumber ancaman daripada perlindungan. Hal ini berkaitan dengan pengalaman panjang kekerasan, impunitas, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM (Amnesty International, n.d.).

Dalam kerangka teoritis, pendekatan securitization menjelaskan bagaimana Papua dikonstruksi sebagai ancaman keamanan, sehingga memungkinkan negara mengambil langkah-langkah luar biasa yang melampaui praktik politik normal (Buzan et al., 1998). Sementara itu, konsep kekerasan negara membantu memahami bagaimana kekerasan dilembagakan dalam struktur sosial dan kebijakan negara (Galtung, 1969). Pendekatan postkolonial juga relevan untuk membaca relasi dominasi antara pusat dan Papua sebagai wilayah periferi yang mengalami marginalisasi historis (Fanon, 1963; Said, 1978).

Dinamika Militerisasi dan Pola Data Kronik 2025

Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kronologi peristiwa sepanjang tahun 2025. Data diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama: militerisasi, kekerasan terhadap warga sipil, dampak kemanusiaan, ekonomi-politik, dan resistensi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola distribusi peristiwa serta keterkaitan antar kategori secara sistematis (Creswell, 2014; Miles et al., 2014).

Tabel 1. Rekap Kronik Militerisasi dan Situasi HAM di Tanah Papua Tahun 2025

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah (±)	Keterangan
Militerisasi	Penambahan pasukan, struktur, ranah sipil	>25	Dominan
Kekerasan	Penembakan, penganiayaan, kematian	15–18	Sistemik
Dampak	Pengungsian	>5	Krisis
Ekonomi	Konflik SDA	6–8	Strategis
Resistensi	Aksi & penolakan	>10	Konsisten

Distribusi data pada tabel menunjukkan bahwa militerisasi merupakan fenomena paling dominan sepanjang tahun 2025. Dominasi ini tidak hanya terlihat dari jumlah kejadian, tetapi juga dari variasi bentuk intervensi militer yang meluas hingga ke ranah sipil dan ekonomi. Korelasi antara militerisasi, kekerasan, dan pengungsian menunjukkan adanya keterkaitan struktural yang kuat, di mana peningkatan kehadiran militer berbanding lurus dengan meningkatnya kerentanan masyarakat sipil (Tilly, 1985).

Analisis Kritis atas Militerisasi dan Situasi HAM di Papua Tahun 2025

Bagian ini merupakan elaborasi analitis atas temuan empiris yang disajikan pada Tabel 1, yang menunjukkan dominasi militerisasi sebagai fenomena utama sepanjang tahun 2025. Militerisasi telah bertransformasi dari respons keamanan menjadi mekanisme struktural kontrol negara. Distribusi data tersebut tidak hanya mencerminkan frekuensi peristiwa, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan struktural antara kehadiran militer, praktik kekerasan, krisis kemanusiaan, serta dinamika ekonomi-politik di Papua. Oleh karena itu, analisis ini berupaya membaca pola tersebut melalui pendekatan securitization, kekerasan negara, dan postkolonial untuk memahami bagaimana militerisasi beroperasi sebagai

sistem yang saling terkait dan saling memperkuat (Buzan et al., 1998; Galtung, 1969; Said, 1978).

1. Securitization dan Normalisasi Kehadiran Militer



Laporan Project Mutatuli

Dominasi militerisasi dalam Tabel 1 menemukan bentuk konkretnya dalam berbagai kebijakan dan praktik lapangan sepanjang 2025. Salah satu contohnya adalah pembangunan struktur komando baru di wilayah Papua Selatan serta penempatan pasukan non-organik di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Nduga, dan Puncak. Pada awal 2025, penambahan personel TNI dilaporkan terjadi di Distrik Sugapa (Intan Jaya) dan Distrik Kenyam (Nduga), dengan alasan pengamanan wilayah dari kelompok bersenjata (Amnesty International, 2025).

Selain itu, pada Maret–April 2025, operasi keamanan di Kabupaten Puncak menunjukkan intensifikasi patroli militer yang masuk hingga ke kampung-kampung warga sipil. Kehadiran aparat bersenjata dalam aktivitas sehari-hari masyarakat—termasuk di sekitar gereja, sekolah, dan pasar—menunjukkan bahwa militerisasi telah melampaui fungsi pertahanan dan menjadi bagian dari ruang sosial sipil.

Fenomena ini menegaskan bahwa securitization tidak hanya berlangsung pada level wacana, tetapi juga termanifestasi dalam praktik keseharian. Papua dikonstruksi sebagai ruang ancaman permanen, sehingga kehadiran militer yang intensif menjadi "normal" dan jarang dipertanyakan (Buzan et al., 1998).

2. Kekerasan Negara dan Produksi Kerentanan Sipil

Keterkaitan antara militerisasi dan kekerasan terhadap warga sipil terlihat jelas dalam sejumlah kasus sepanjang 2025. Misalnya, pada

Februari 2025 di Kabupaten Yahukimo, dilaporkan terjadi penembakan terhadap warga sipil yang diduga terkait dengan operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata. Insiden ini mengakibatkan korban jiwa serta memicu ketakutan di kalangan masyarakat lokal (Human Rights Watch, 2025).

Kasus lain terjadi di Intan Jaya pada pertengahan 2025, di mana operasi militer menyebabkan warga dari beberapa kampung mengungsi ke hutan. Pengungsian ini bukan hanya respons terhadap kekerasan langsung, tetapi juga terhadap ketakutan akan potensi kekerasan lanjutan. Dalam banyak kasus, warga tidak dapat kembali dalam waktu lama karena situasi keamanan yang tidak stabil.

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan negara tidak hanya bersifat insidental, tetapi memiliki pola yang berulang. Dalam kerangka kekerasan struktural, kondisi ini menciptakan kerentanan sistemik yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat sipil (Galtung, 1969).

3. Militerisasi dan Kemunduran Supremasi Sipil

Implikasi dari militerisasi juga terlihat dalam meningkatnya peran militer di luar fungsi pertahanan. Salah satu contoh adalah keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek strategis nasional, seperti pengembangan food estate di Merauke sepanjang 2025. Kehadiran militer dalam proyek ini tidak hanya bersifat pengamanan, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, di beberapa wilayah seperti Nabire dan Jayapura, aparat keamanan dilaporkan terlibat dalam pengawasan aktivitas masyarakat sipil, termasuk demonstrasi damai. Pembatasan ruang ekspresi ini menunjukkan adanya pergeseran dari kontrol sipil ke dominasi militer dalam pengelolaan ruang publik.

Pengesahan UU TNI No. 34 Tahun 2025 semakin memperkuat legitimasi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa militerisasi bukan hanya praktik lapangan, tetapi juga didukung oleh kerangka regulasi formal (Mietzner, 2018).



Prajurit TNI berada di lokasi PSN sawah di Kampung Wanam, Merauke, Papua Selatan. (Sumber: Jubi)

4. Ekstraksi Sumber Daya dan Logika Postkolonial

Hubungan antara militerisasi dan eksploitasi sumber daya alam terlihat jelas dalam konflik lahan di Merauke sepanjang 2025. Proyek food estate yang didorong pemerintah pusat memicu penolakan dari masyarakat adat karena dianggap mengancam hak ulayat mereka. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan area proyek, yang justru memperkeruh konflik antara masyarakat dan negara.

Selain itu, di wilayah sekitar operasi pertambangan seperti Mimika, kehadiran aparat keamanan dalam pengamanan objek vital menunjukkan keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan militerisasi. Pengamanan terhadap perusahaan besar menjadi prioritas, sementara perlindungan terhadap masyarakat lokal sering kali terabaikan.

Fenomena ini mencerminkan pola ekstraksi sumber daya yang tidak seimbang, di mana militer berfungsi sebagai penjaga kepentingan ekonomi negara dan korporasi (Braithwaite et al., 2010).

5. Resistensi Sosial dan Krisis Legitimasi Negara

Resistensi masyarakat terhadap militerisasi terlihat dalam berbagai aksi sepanjang 2025. Misalnya, penolakan terhadap pembangunan Kodam di Papua Selatan yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil dan gereja. Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa militerisasi tidak diterima secara pasif oleh masyarakat.

Selain itu, di Jayapura dan Wamena, demonstrasi terkait isu HAM dan militerisasi beberapa kali dibubarkan oleh aparat keamanan. Tindakan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap ruang demokrasi, sekaligus memperkuat persepsi bahwa negara lebih mengedepankan pendekatan keamanan daripada dialog.

Dalam perspektif legitimasi, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara negara dan masyarakat. Ketika kebijakan negara tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka kepercayaan terhadap institusi negara akan menurun (Habermas, 1975).

6. Dampak Kemanusiaan dan Implikasi Jangka Panjang

Dampak kemanusiaan dari militerisasi terlihat paling nyata dalam kasus pengungsian di Nduga dan Intan Jaya. Sepanjang 2025, ribuan warga dilaporkan masih hidup dalam kondisi pengungsian dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar. Banyak dari mereka tinggal di hutan atau wilayah yang jauh dari layanan publik.

Di sektor pendidikan, anak-anak pengungsi mengalami gangguan serius dalam proses belajar. Sekolah-sekolah di wilayah konflik sering kali tidak beroperasi secara normal karena situasi keamanan. Hal ini berpotensi menciptakan "lost generation" yang kehilangan akses pendidikan dalam jangka panjang.

Selain itu, dampak psikologis seperti trauma dan ketakutan menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Banyak korban kekerasan yang tidak mendapatkan layanan pemulihan yang memadai, sehingga dampak konflik terus berlanjut dalam kehidupan sosial masyarakat (Farmer, 2004).

Penutup

Analisis atas dinamika militerisasi dan situasi hak asasi manusia di Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan keamanan berbasis militer telah menjadi kerangka dominan dalam tata kelola konflik. Data kronik yang disajikan memperlihatkan bahwa peningkatan kehadiran militer tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, dalam arti meluasnya fungsi militer ke ranah sipil, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa militerisasi di Papua bukan sekadar respons terhadap ancaman keamanan, melainkan bagian dari strategi negara yang lebih luas dalam mempertahankan kontrol atas wilayah dan sumber daya.

Lebih lanjut, temuan empiris menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara militerisasi dan meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil. Praktik kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga struktural, yang tercermin dalam fenomena pengungsian, hilangnya akses terhadap layanan dasar, serta meningkatnya kerentanan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, negara tidak hanya hadir sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai produsen kondisi ketidakamanan bagi warganya sendiri.

Implikasi dari militerisasi juga terlihat dalam melemahnya supremasi sipil dan menyempitnya ruang demokrasi. Perluasan peran militer dalam berbagai sektor menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip kontrol sipil terhadap militer menuju dominasi pendekatan koersif dalam penyelesaian konflik. Hal ini berpotensi menghambat proses reformasi sektor keamanan serta meningkatkan risiko pelanggaran HAM yang berulang.

Di sisi lain, keterkaitan antara militerisasi dan eksploitasi sumber daya alam memperlihatkan bahwa konflik di Papua tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas. Dalam perspektif postkolonial, kondisi ini mencerminkan pola relasi kuasa yang timpang antara pusat dan daerah, di mana Papua diposisikan sebagai ruang ekstraksi yang dikendalikan melalui mekanisme keamanan.

Meskipun demikian, resistensi masyarakat yang terus muncul menunjukkan bahwa militerisasi tidak sepenuhnya berhasil mengkonsoli-

dasikan legitimasi negara. Sebaliknya, meningkatnya aksi penolakan dan advokasi menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap negara, yang dalam jangka panjang dapat memperdalam konflik dan menghambat proses pembanguna.

Dengan demikian, militerisasi di Papua tahun 2025 harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek keamanan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Tanpa perubahan pendekatan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia, dialog politik, dan penguatan supremasi sipil, situasi ini berpotensi terus berlanjut dan bahkan memburuk. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi sektor keamanan, peningkatan akuntabilitas aparat, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas konflik di Papua.

Daftar Pustaka

Agamben, G. (2005). *State of exception*. University of Chicago Press.

Amnesty International. (2025). *Indonesia 2024/2025*. Amnesty International.

Braithwaite, J., Charlesworth, H., Reddy, P., & Dunn, L. (2010). *Reconciliation and architectures of commitment: Sequencing peace in Bougainville*. ANU Press.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.

Farmer, P. (2004). An anthropology of structural violence. *Current Anthropology, 45*(3), 305–325.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research, 6*(3), 167–191.

Habermas, J. (1975). *Legitimation crisis*. Beacon Press.

Human Rights Watch. (2025). *World report 2025: Indonesia*. Human Rights Watch.

Internal Displacement Monitoring Centre. (2024). *Global report on internal displacement 2024*. IDMC.

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture, 15*(1), 11–40.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mietzner, M. (2018). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. ISEAS Publishing.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Weber, M. (1946). Politics as a vocation. In H. H. Gerth & C. W. Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in sociology* (pp. 77–128). Oxford University Press.

Kronik Militer di Tanah Papua

08 April

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz (ODC), Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya dengan mengirimkan satu kompi personel ke wilayah tersebut. Langkah ini merupakan respons terhadap situasi keamanan yang masih mencekam sejak November 2024 hingga April 2025. Dikatakan bahwa ketegangan di Puncak Jaya yang berlangsung hingga sekarang dipicu oleh konflik antara dua kubu pendukung pasangan calon bupati nomor urut 01 dan 02 (Cenderawasih Pos).

06 Maret

Forum Komunikasi Mahasiswa/i Moni Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah di Manado, Sulawesi Utara, meminta agar TNI/ Polri menghentikan kekerasan militer di Intan Jaya. Hal itu dinyatakan mahasiswa Moni di Manado, dalam diskusi bertema "Hentikan Kekerasan Militer Terhadap Warga Sipil di Kabupaten Intan Jaya" yang digelar pada Rabu (05/03). Diskusi tersebut digelar, untuk menyikapi penembakan warga sipil yang bekerja sebagai tukang ojek jenazah bernama Goliat Sani, di Intan Jaya. *"Kami mahasiswa/i Manado Sulawesi Utara, asal Kabupaten Intan Jaya dengan tegas mendesak gabungan TNI-Polri yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya. Segera hentikan penculikan, penangkapan, pembunuhan sewenang-wenang, terhadap mas ojek anak sekolah dan masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya,"* ujar Badan Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Moni Intan Jaya, Markus Nulini, seperti dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Kamis (06/03). Mahasiswa Intan Jaya lainnya, Yanuarius Kadepa mendesak hal yang sama. Kadepa meminta Kementerian HAM dan Komnas HAM, melakukan investigasi terhadap kematian Goliat Sani. Sedangkan mahasiswa Intan Jaya lainnya, MY, meminta agar pelaku penembakan Goliat Sani segera dipecat (https://jubi.id/rilis-pers/2025/mahasiswa-manado-minta-hentikan-kekerasan-militer-di-intan-jaya/).

29 Maret

Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah (HMPT) di Kota Sorong menolak tegas undang-undang TNI No 34 Tahun 2025 dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Tanah Papua. Pernyataan penolakan tersebut disampaikan melalui aksi jumpa pers yang dilaksanakan di Asrama Agustinus, Kota Sorong pada Jumat, 28 Maret 2025. Koordinator lapangan aksi konferensi pers, Mesak Heluka menegaskan pengesahan UU TNI No. 34 Tahun 2025 atas Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilakukan secara sepihak dan ekskutif sebab tidak melibatkan partisipan publik. Ia mengungkapkan bahwa penguasaan tanpa batas melahirkan penindasan. *"Reformasi seharusnya membawa supermasi sipil dan pemisahan TNI dari ranah sipil. Dalam kurung waktu yang tidak lama UU TNI ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat sipil dan ruang demokrasi,"* tegasnya. Noak Tebai, perwakilan HMPT lainnya mengatakan pegesahan UU TNI ini membuat resah masyarakat sipil, sebab Negara berupaya mengembalikan dominasi militer seperti yang terjadi di masa orde baru. Ia menekan bahwa UU TNI ini membuka peluang pelanggaran HAM di Indonesia terlebih khususnya di Tanah Papua yang mempunyai sejarah pelanggaran HAM yang tidak pernah diusut dan diselesaikan secara tuntas oleh negara. *"Ada banyak kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terjadi di masa lalu dan saat ini. Kasus pelanggaran HAM ini belum diusut tuntas oleh pemerintah, UU TNI ini akan mengakibatkan pelanggaran HAM baru di Tanah Papua"* (https://suarapapua.com/2025/03/29/hmpt-tegas-menolak-uu-tni-dan-mbg-di-tanah-papua/).

08 April

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya dengan mengirimkan satu kompi personel ke wilayah tersebut. Langkah ini merupakan respons terhadap situasi keamanan yang masih mencekam sejak November 2024 hingga April 2025. Dikatakan bahwa ketegangan di Puncak Jaya

yang berlangsung hingga sekarang dipicu oleh konflik antara dua kubu pendukung pasangan calon bupati nomor urut 01 dan 02 (Cenderawasih Pos).

12 April

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia didesak meng-evaluasi kebijakan penanganan konflik dan pengiriman pasukan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat). Pernyataan itu disampaikan Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya, saat bertemu Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada Senin (11/04). Ketu Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya, Bartolomeus Mirip mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Yan Mandenas pihaknya menyerahkan rekomendasi berisi empat poin. Pertama, meminta pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi I mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik di Provinsi Papua dan Papua Barat, bersama Menteri Koordinator Politik Hukum HAM dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Panglima TNI dan Kapolri. Kedua, meminta pimpinan Komisi I DPR RI mengundang Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua dan Papua Barat, Pangdam XVII Cenderawasih dan Pangdam XVIII Kasuari dan beberapa bupati di Papua dan Papua Barat, untuk menggelar rapat gabungan. *"Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, Nduga, Yahukimo dan Maybrat di Provinsi Papua Barat, bersama perwakilan masyarakat mesti diundang hadir dalam rapat gabungan bersama para pihak itu,"* kata Bartolomeus Mirip melalui keterangan tertulisnya kepada Jubi, Senin (11/04). Tim Advokasi juga mendesak pemerintah segera menarik seluruh anggota keamanan TNI dan Polri non-organik yang dikirim ke Kabupaten Intan Jaya (https://jubi.id/tanah-papua/2022/dpr-ri-didesak-mengevaluasi-pasukan/).

16 April

Menyikapi situasi keamanan usai perampokan dan penganiayaan di Kabupaten Dogiyai sebanyak 71 personel digeser dari Nabire menuju Dogiyai. Terdiri dari 34 personel Polres Nabire, 25 personel Satuan Brimob

Pelopor Yon C Nabire, enam personel satuan Brimob Pelopor Pas III dan enam personel Satgas ODC (Cenderawasih Pos).

24 April

Adanya surat permintaan data mahasiswa ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerinutah Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Kodim 1707/Merauke menjadi polemic di kalangan sebagian mahasiswa yang ada di Merauke. Surat permintaan dengan nomor B/331/III/2025 itu dikeluarkan tertanggal 25 Maret 2025. Terkait dengan surat tersebut, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Jhonny Nofriady menjelaskan, Kodim 1707/Merauke sebagai satuan Pembina kewilayahan memiliki program untuk mendata semua potensi wilayah yang ada di daerah binaan (Cenderawasih Pos).

05 Mei

Kendati saat ini, tapal batas negara antara RI dan PNG di Kabsupaten Boven Digoel telah dijaga oleh satu Batalyon Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) namun aka nada lagi tambahan 1 batalyon di wilayah tersebut. *"Ini untuk menutup transaksi Narkoba khususnya ganja kering termasuk masuknya senjata api illegal dari negara tetangga PNG"*, kata Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan di Merauke (Cenderawasih Pos).

22 Mei

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya memanggil Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya untuk meminta klarifikasi terkait situasi keamanan di wilayah tersebut, guna menindak lanjuti surat dari warga Distrik Walaik yang meminta agar TNI segera ditarik dari wilayah itu. Alasan warga dari warga Distrik Walaik Kabupaten Jayawijaya meminta aparat untuk meninggalkan wilayah tersebut karena masyarakat trauma dan tak bisa berkebun lantaran merasa takut dengan kehadiran aparat TNI (Cenderawasih Pos).

11 Juni

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ibele meminta kepada aparat keamanan agar tidak melakukan razia di rumah-rumah warga, razai tersebut cukup dilakukan di setiap jalan masuk ke dalam kota wamena terhadap kendaaraan atau warga yang membawa alat tajam dan bahan berbahaya lainnya saat berada di jalanan. *"Kalau razia di setiap pintu masuk kota Wamena dengan tujuan agar warga tidak membawa alat tajam atau peralatan perang masuk ke dalam kota Wamena ini cukup baik, tapi kalua razia di rumah-rumah terhadap alat-alat seperti parang, kampak dan sekop ini juga salah karena itu digunakan untuk bekerja kebun,"* ungkap Ketua LMA Distrik Ibele Loudwik Mosib, Selasa (11/06) (Cenderawasih Pos).

13 Juni

Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IMT) Kota Studi Malang, Jawa Timur, mendesak pemerintah kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, segera menarik kembali SK penyerahan tanah pendirian Batalyon. Menurut IMT, masyarakat di kabupaten Tambrauw tidak membutuhkan pembangunan Batalyon di sana. Tetapi yang dibutuhkan adalah akses jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, akses telekomunikasi hingga pelayanan publik. *"Masyarakat Tambrauw butuh sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan tentara,"* ujar Maxi, mahasiswa asal Tambrauw melalui pesan elektronik, Jumat (13/06). Maxi bilang, kebijakan pemerintah kabupaten Tambrauw menyerahkan tanah seluas 5 hektare kepada Pangdam XVIII/Kasuari merupakan hal yang sangat keliru dalam mensejahterakan masyarakat dan bukan sebuah tuntutan mendesak bagi masyarakat Tambrauw. Maxi menegaskan, pemerintah harusnya berpikir untuk mensejahterakan masyarakat, bukan malah menciptakan persoalan baru (https://suarapapua.com/2025/06/13/tolak-psn-dan-batalyon-imt-kecam-sikap-bupati-tambrauw/).

30 Juni

Masyarakat Distrik Ibele mempertanyakan tujuan pendropingan aparat keamanan di wilayah tersebut dengan jumlah yang banyak sejak hari selasa kemarin yang langsung menyebar di perkebunan dan juga

sekitar hutan tempat warga mencari kayu bakar. Minggu (29/06) kemarin (Cenderawasih Pos).

04 Juli

Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan menjelaskan bahwa selain di Merauke akan dibentuk Kodam baru, juga akan dibentuk di beberapa daerah lainnya di Indonesia. "*Salah satunya ada di Merauke,*" Kamis (03/07) (Cenderawasih Pos).

09 Juli

Dalam rangka mendukung Program Strategi Nasional (PSN) di Merauke, apalagi berada di ibukota Provinsi Papua Selatan, maka TNI Angkatan Udara akan meningkatkan Lanud JA Dimara Merauke menjadi Lanud tipe A. Artinya, jika saat ini dipimpin oleh seorang yang berpangkat Kolonel maka nantinya akan dipimpin seorang jenderal bintang satu (Cenderawasih Pos).

15 Juli

Masuknya anggota TNI non organik ke Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya sejak Juni menuai penolakan dari masyarakat Ibele. Aspirasi itu kemudian disampaikan ke DPRK Jayawijaya karena merasa tidak nyaman. Dalam pertemuan yang dimediasi Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi, S.IP mempertemukan sejumlah tokoh masyarakat Distrik Ibele, Pemerintah Daerah, Kodim 1702/Jayawijaya, serta Polres Jayawijaya, dimana masyarkat bersepakat untuk menolak kehadiran TNI Non Organik di wilayah tersebut (Cenderawasih Pos).

22 Juli

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua meminta Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire memeriksa Indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Puncak Papua, Provinsi Papua Tengah. Pada prinsipnya pemerintah menyatakan bahwa telah ada daftar kebijakan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada kuartal I-2025. Dari 8 Kebijakan Ekonomi pada kuartal I-2025 yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah Optimalisasi penyaluran Bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025. Secara teknis sebagai realisasinya Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (Bansos) di tahun 2025 untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Beberapa bansos yang akan cair tahun ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Dana Desa, serta Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam pemberitaan tersebut, juga disebutkan terkait waktu pencairannya secara terperinci secara khusus berkaitan dengan Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga akan dilakukan dalam beberapa tahap sepanjang tahun 2025 (https://jubi.id/rilis-pers/2025/usut-dugaan-penyalahgunaan-dana-blt-oleh-aparat-di-puncak-papua/).

02 Agustus

Kodam XXIV/Mandala Trikora akan segera hadir di Provinsi Papua Selatan. Dalam 9 hari ke depan,Kodam XXIV/Mandala Trikora akan dibentuk. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito kepada wartawan di Merauke menjawab pertanyaan Ceposnonline.com mengungkapkan "kalau tidak ada halangan, rencana pembentukannya 10 Agustus2025" tandas Pangdam Rudi Puruwito. *"Pembentukan Kodam ini akan dilakukan secara bertahap. Rencananya, setiap provinsi akan ada kodam. Jadi sama dengan polda. Setiap provinsi akan ada Polda dan Kodam,"* jelasnya (Cenderawasih Pos).

18 Agustus

Pemerintah diminta segera menarik aparat TNI non-organik dari Distrik Walaik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Hal ini disampaikan Perwakilan Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, Wakol Yelipele kepada Tribun-Papua.com di Wamena, Senin (18/08). Yelipele menyebut pendropan personel TNI non-organik selama ini tanpa pemberitahuan kepada lima kepala kampung, serta kepala dsitrik di wilayah itu.

Demikian juga tanpa pemberitahuan kepada tokoh masyarakat. *"Tidak berdasarkan situasi darurat ataupun tanpa ada konflik nyata, hingga kini aparat TNI* non-organik masih berada Distrik Walaik, menempati lokasi tanah adat tanpa meminta izin, ataupun persetujuan hak ulayat melalui mekanisme dialog bersama masyarakat adat,» ujarnya. Akibatnya, masyarakat setempat mengalami gangguan psikologis. Warga merasa terganggu dan ruang gerak beraktivitas dipersempit.

24 Agustus

Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya (HPM-LJ) Kota Studi Makassar menyatakan menolak kehadiran militer non organik di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan itu disampaikan mahasiswa karena dinilai kehadiran aparat militer non organik telah merusak dan meresahkan tatanan kehidupan masyarakat sipil dan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran kemanusiaan. Pernyataan mahasiswa Lanny Jaya di Kota Studi Makassar itu disampaikan pada 21 Agustus 2025. Ketua Deki Tabuni, penangugg jawab aksi dari Badan Pengurus HPM-LJ Kota Studi Makassar mengatakan penolakan itu disampaikan mahasiswa karena adanya laporan dari Lanny Jaya bahwa, aparat non organik yang tiba di Distrik Melagineri, Guabalim, Kuyawage, Wano Barat, hingga wilayah Beam dan Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya diduga telah melakukan kekerasan, intimidasi, teror, pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, perampasan harta benda, serta pembakaran rumah warga sipil. Kabupaten Lanny Jaya sendiri kata dia selama ini dikenal sebagai tanah injil, tanah damai, dan tanah pengungsian bagi warga dari berbagai kabupaten konflik di Papua. Namun kehadiran militer non organik telah meresakan warga dengan Tindakan-tindakan represipnya. Tindakan ini justru mengancam nilai-nilai damai dan kemanusiaan yang telah lama dibangun di Kabupaten Lanny Jaya (https://suarapapua.com/2025/08/24/mahasiswa-menolak-kehadiran-aparat-militer-non-organik-di-lanny-jaya/).

28 Agustus

Prihatin atas penempatan pasukan non-organik di Kampung Ugem, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal itu disampaikan tokoh pemuda Papua Pegunungan Zhelsius Henius Asso, dalam pernyataanya kepada Suara Papua pada, Rabu (27/08). Ia menyatakan dengan kehadiran aparat militer non organik yang ditempatkan di kampung-kampung itu, ia mengtaku prihatin. Penempatan aparat militer itu juga dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah kampung, distrik, adat maupun warga local. *"Warga kampung kaget ketika aparat militer tiba di sana dengan perlengkapan persenjataan dan membangun pos militer di Puncak Gunung Ugem. Masyarakat bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan kampung kami,"* tutur Henius menceriterakan kondisi yang ada. Kampung Ugem Distrik Mugi sebelumnya merupakan wilayah adminstrasi Distrik Kurima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Setelah pemekaran, Kampung Ugem masuk wilayah administrasi Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo. Kampung Ugem dan distrik Mugi secara keseluruhan selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman tanpa gangguan keamanan. Namun sejak, Sabtu 23 Agustus 2025, sejumlah anggota TNI terlihat melakukan survei dengan menggunakan drone di wilayah perbatasan Kampung Ugem dan Ikinem (https://suarapapua.com/2025/08/28/militer-non-organik-yang-menempati-ugem-diminta-ditarik/).

04 September

Dalam rangka mengawasi tingkat kehadiran guru di sekolah, Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan kerja sama dengan TNI dan Polri. Kerja sama itu dilakukan dengan penandatanganan MoU yang dilakukan Bupati Merauke Bladib Gebze, Dandim 1707 Letkol Czi ili Eko Setyawan dan Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Rabu (03/09) (Cenderawasih Pos)

06 September

- Seorang oknum anggota Polisi Militer (PM) Pomdam XVII Cenderawasih berinisial TB berpangkat Pratu diduga terlibat dari

aksi penembakan yang menewaskan seorang tukang parkir bernama Lambert alias Obet (Cenderawasih Pos).

- Kabupaten Yahukimo pada hari Kamis (04/09) mendadak tegang. Ini setelah ribuan orang bersatu berjalan kaki sambil mengarak jenazah seorang pemuda bernama Victor Deal. Ia dikabarkan meninggal dengan sejumlah bekas luka lebam. Diduga korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal di Polsek Dekai, Yahukimo (Cenderawasih Pos).

16 September

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni atau IPMMO Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang menempuh pendidikan di Jawa dan Bali menyatakan sikap menolak pembangunan pos dan penempatan militer di semua kampung di Intan Jaya. Penolakan itu disampaikan IPMMO se-Jawa dan Bali dalam siaran pers tertulis yang diterima Redaksi Jubi, Selasa (16/09). IPMMO mengantarkan, Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam sangat besar. Kandungan mineral terbesar di wilayah ini adalah emas, dengan perkiraan cadangan di Blok Wabu mencapai lebih dari 116 juta ton bijih mineral, disertai potensi mineral lainnya seperti Perak, Nikel, dan Kobalt. Sejak 2014, potensi ini menjadi sasaran Pemerintah Indonesia untuk masuk dan menguasai kekayaan alam Intan Jaya. Namun, penolakan tegas datang dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh gereja, tokoh intelektual, pelajar, mahasiswa, hingga rakyat kecil (https://jubi.id/rilis-pers/2025/mahasiswa-moni-se-jawa-dan-bali-tolak-pembangunan-pos-militer-di-intan-jaya/).

15 Oktober

Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional, Kodim 1712/Sarmi tengah menyiapkan pembentukan Kompi Produksi, unit baru yang bertugas menggerakan kegiatan pembinaan ketahanan pangan di tingkat wilayah (Cenderawasih Pos).

10 November

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP) menggelar aksi demo damai menyingkapi situasi Tanah Papua terkait penempatan militer nonorganik di berbagai daerah di Papua dan mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil, dan pengungsian masyarakat di Intan Jaya, Puncak, Puncak, Nduga dan beberapa daerah lainnya. Aksi demo tersebut berlangsung di depan Gapura USWIM, jalan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah,Senin (10/11). Pantauan Jubi, sejak pukul 8.00 WP mahasiswa berdatangan berkumpul, mereka mengenakan almamater mereka. Sekitar pukul 9.00 WP itu mahasiswa sudah mulai berorasi menyampaikan keresahan mereka. *"Kami punya orang tua hidup di hutan, di pengungsian di Tanah sendiri. Kami dibunuh seperti binatang,"* kata seorang orator (https://jubi.id/meepago/2025/ratusan-mahasiswa-nabire-gelar-demo-tolak-militer-nonorganik-di-papua/).

13 November

Puluhan warga mengarak jenazah dari Frengky Kogoya dari RSUD Wamena menuju Kodim 1702/Jayawijaya. Ini sebagai bentuk protes sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak Kodim. Frengky diduga tewas karena dianiaya dan ditembak oleh oknum anggota Kodim 1702/ Kodim. Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza A. Mamoribo, SE, M.Han saat menerima keluarga korban di halaman Makodim 1702/ Jayawijaya mengaku adanya oknum anggota Kodim yang terlibat. Pelaku diduga Sertu SL, anggota Provost Kodim 1702/Jayawijaya. Kejadian itu sendiri terjadi pada Selasa (11/11) sekitar pukul 08.30 WIT (Cenderawasih Pos).

17 November

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah akan menambah satu Batalyon Brimob. Hal ini disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare dalam wawancara bersama awak media di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Papua Tengah, Jumat (14/11) (Cenderawasih Pos).

19 November

Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi damai di kawasan Lingkaran, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (19/11). Dalam demonstrasi damai itu, mahasiswa menyatakan menolak pelaksanaan Otonomi Khusus atau Otsus dan mendesak penarikan militer dari Tanah Papua. Mahasiswa menolakan Otsus karena kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap provinsi di Tanah Papua itu dinilai gagal menjawab persoalan dasar masyarakat Papua. Justru kekerasan militer di berbagai wilayah di sana meningkat. Selain itu, dalam proses revisi UU Otsus pada 2021 lalu, tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua. Revisi UU Otsus Papua menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 pun dianggap telah menghilangkan kewenangan MRP dalam menyetujui pemekaran daerah di Tanah Papua (https://jubi.id/polhukam/2025/mahasiswa-papua-tolak-otsus-dan-desak-penarikan-militer-dari-tanah-papua/).

29 November

Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembangunan markas Batalyon TP 860 di Kabupaten Waropen (Cenderawasih Pos).

17 Desember

- Komnas Perempuan menilai pendekatan militeristik yang terus berlangsung di Tanah Papua, memperparah kerentanan perempuan dan anak. Ini disampaikan komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti dalam peluncuran laporan situasi pelanggaran HAM di Papua 2023-2025 oleh YLBHI secara live streaming, Selasa (16/12). Yuni Asriyanti pun menilai laporan itu sangat penting di tengah semakin terbatasnya akses informasi mengenai kondisi di Tanah Papua. *"Laporan ini seperti membuka kembali mata publik terhadap realitas yang sesungguhnya terjadi di Papua,"* kata Yuni Asriyanti. Menurutnya, Komnas Perempuan juga telah lama bekerja terkait isu Papua, melalui kemitraan dengan salah satunya Persekutuan Gereja-

Gereja di Indonesia atau PGI. Dalam kerja-kerja tersebut, Komnas Perempuan mendokumentasikan secara khusus situasi perempuan Papua, termasuk berbagai bentuk kerentanan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan dan anak (https://jubi.id/perempuan-dan-anak/2025/militerisasi-perparah-kerentanan-perempuan-dan-anak-di-tanah-papua/).

- YLBHI meluncurkan laporan "Papua dalam Cengkeraman Operasi Militer". Laporan itu memotret dampak operasi militer terhadap kehidupan masyarakat sipil di Tanah Papua dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Peluncuran laporan "Papua dalam Cengkeraman Operasi Militer" dilakukan secara live streaming di YouTube YLBHI, Selasa (16/12). Aldi salah satu penulis laporan situasi HAM di Tanah Papua 2023 hingga 2025, mengatakan laporan itu terkait situasi kehidupan masyarakat di Papua hingga kini yang masih dibayangi represi negara, termasuk praktik pembunuhan di luar proses hukum. Ia mengatakan, operasi militer di Tanah Papua bukanlah masalah baru atau sementara. Akan tetapi telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan dilakukan secara sistematis, menjadikan Tanah Papua sebagai wilayah dengan operasi militer terlama dalam sejarah Indonesia. *"Laporan ini disusun untuk melaporkan berbagai temuan yang sebelumnya tersebar, baik terkait operasi militer maupun kondisi pengungsian [di Tanah Papua]. Melalui pengumpulan dan analisis data tersebut, YLBHI bersama LBH Papua berupaya melihat gambaran besar tentang bagaimana kebijakan yang dirumuskan di Jakarta berdampak langsung terhadap kondisi kemanusiaan di [Tanah] Papua,"* kata Aldi. Menurutnya proses penyusunan laporan melibatkan berbagai pihak, untuk mendalami dampak operasi militer terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua (https://jubi.id/polhukam/2025/ylbhi-luncurkan-laporan-papua-dalam-cengkeraman-operasi-militer/).

21 Desember

Menjelang perayaan Hari Raya Natal 25–26 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026, Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menghentikan

seluruh bentuk operasi militer di Tanah Papua. Desakan ini disampaikan sebagai respons atas konflik bersenjata yang dinilai terus menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil Orang Asli Papua. Juru Bicara JDP, Yan C. Warinussy, S.H., menyatakan bahwa konflik bersenjata di Papua hampir selalu menempatkan warga sipil sebagai korban utama. Mereka yang tidak terlibat dalam konflik (bukan kombatan maupun anggota TPNPB) justru mengalami dampak paling berat, mulai dari korban jiwa, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, hingga terpaksa mengungsi. "Fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga sipil Orang Papua Asli terus menjadi korban utama konflik bersenjata," kata Warinussy di Manokwari Papua Barat, Minggu (21/12) (https://jubi.id/polhukam/2025/jelang-natal-dan-tahun-baru-jdp-desak-hentikan-operasi-militer-di-tanah-papua).

23 Desember

Dewan Gereja Papua menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Kehadiran Pasukan Non-Organik dinilai telah memperpanjang kekerasan bersenjata dan menyebabkan krisis pengungsian internal yang berakibat trauma berulang dari tahun ke tahun. Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Intan Jaya pada Minggu, 21 Desember 2025, yang membawa seruan masyarakat pengungsi agar Pasukan Non-Organik ditarik dari Intan Jaya dan Tanah Papua. Berdasarkan laporan Tim Pansus, pengungsian di Intan Jaya berlangsung sejak pendropan pasukan pada Desember 2019. Sepanjang tahun 2025, berbagai peristiwa kekerasan terjadi, dengan korban warga sipil tercatat 45 orang menurut data pemerintah daerah. Dua peristiwa besar pada Mei 2025 bahkan menewaskan 24 warga sipil (https://jubi.id/polhukam/2025/jelang-natal-dewan-gereja-papua-soroti-penghilangan-nyawa-warga-sipil-papua/).

30 Desember

Komite Nasional Papua Barat atau KNPB wilayah Yahukimo menyikapi situasi yang dianggap sebagai darurat militer dan kemanusiaan

di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan seluruh Tanah Papua. Dalam siaran pers tertulisnya, Selasa (30/12), KNPB wilayah Yahukimo menyerukan beberapa poin pernyataan sikap, yiatu meminta tim operasi Damai Caztenz tidak melakukan penangkapan liar, dan pengeboman terhadap pemukiman warga sipil yang menyebabkan korban luka dari kalangan masyarakat sipil (https://jubi.id/rilis-pers/2025/knpb-wilayah-yahukimo-sikapi-situasi-darurat-militer-dan-kemanusiaan/).

BAB II

LINGKUNGAN DAN POLITIK 'TEGA'

(Oleh Ignasius Ngari OFM)

Pendahuluan

Tulisan ini menyasar pada persoalan ekologis. Ia dikembangkan sebagai sebuah analisa terhadap kronik khusus masalah lingkungan hidup. Kronik ditelaah dan darinya diberikan analisa. Analisa bersifat kritis fenomenologis. Artinya masalahnya ditelaah sedemikian gamblang dan darinya ditegakan problem-problem mendasar yang menjadi akar dari permasalahan ekologis.

Tilikan analitis ini dimaksudkan untuk memperlihatkan mendasarnya persoalan ekologis. Kedalaman persoalan ini akan berdampak luas pada bidang yang lain. Ia bisa tak tertangani. Agar dapat tertangani persoalan mendasar dikemukakan sehingga menjadi perhatian dan keprihatinan bersama.

Nadanya tentu pesimistis. Namun ini bukan pesimistis tak berdata. Harus diluruskan bahwa pesimistis hanyalah teriakan dari sebuah tuntutan maksimalisasi keadilan. Bahwa keadilan lewat PSN mungkin dan pasti sudah terjadi tetapi perlu lebih menyasar kepada mereka yang kerap dibuat tidak beruntung.

Uraian di bawah ini terbagi atas gambaran umum kronik, problem PSN, problem nikel, analisa politik dan analisa ekologis.

Gambaran Umum Kronik

Sepanjang tahun 2025, kronik bidang lingkungan JPIC OFM Papua memperlihatkan adanya 47 masalah lingkungan hidup. Dari jumlah ini, masalah tetap berkaitan dengan persoalan lingkungan tahun yang lalu. Pada tahun ini diperlihatkan kuatnya penekanan pemerintah lewat peraturan, kebijakan dan instruksi untuk terus meningkatkan proyek strategi nasional. Kebijakan ini diamankan oleh pemerintah setempat dan militer. Upaya pemerintah ini tak serba mulus dan berhasil. Di sana-sini hutan dan tanah masyarakat adat diambil atau diklaim sepihak. Bersamaan dengan masyarakat adat, NGO, Gereja, Komnas HAM, Akademisi, BRIN dan mahasiswa-mahasiswa menyuarakan deforestasi, ancaman bagi keanekaragaman hayati, hilangnya ruang hidup, ruang kultural dan perubahan kondisi alam. Upaya protes inipun dilakukan hingga menuntut perubahan undang-undang.

Dari 47 masalah ini, masalah lingkungan yang paling menonjol adalah masalah proyek strategis nasional dan tambang nikel. Dua problem ini menyasar pada dua daerah penting. Daerah PSN yang paling diekspansi secara luas adalah Papua Selatan dengan konsentrasi pada Merauke dan Boven Digoel. Persoalan nikel, terjadi di daerah taman nasional dan tempat pariwisata nan eksotik di Raja Ampat.

Realita PSN

Mengapa PSN? Proyek Strategis Nasional adalah proyek berskala ‘republik’. Proyek ini sudah ditetapkan secara legal. Legalitasnya sudah dimulai pada tahun 2016, yang direvisi pada 2017, penetapan mekanismenya 2018, pembaharuan daftar PSN pada 2020. Semua ini berada sebagai peraturan presiden. Para pembantu Presiden mengeksekusinya secara legal dalam peraturan bawahan dalam peraturan Menteri yang mengatur perencanaan dan pengendalian. Menteri Pertahanan lewat Dewan Pertahanan Nasional mendukungnya dengan melebarkan peran militer untuk melakukan penertiban Kawasan hutan.

Karena ini adalah proyek nasional, dasar hukum utamanya dan turunan terus dikembangkan dan diadaptasi berdasarkan dinamika di lapangan. Proyek ini terus ditegaskan secara sangat gamblang oleh Presiden Prabowo selama tahun 2025. Paling kurang terdapat empat kali dalam kronik JPIC OFM Papua dicatat presiden menegaskan kembali keinginannya untuk mempertahankan dan memperluas PSN. Ini disampaikan baik di dalam pidato kenegaraan dan juga dalam pertemuan dengan para pemimpin daerah se-Papua. Itu berarti proyek ini memang proyek nasional. Proyek ini memang proyek strategis. Proyek ini bernilai besar untuk kepentingan nasional.



Hutan, Savan sampai Rawa di Merauke, Papua Selatan yang dibabat untuk proyek pangan dan energy. (Sumber: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat)

Sebelum tahun 2025, PSN adalah proyek nasional yang mencakup pencetakan sawah, perkebunan tebu, kelapa sawit dan pembangunan industri bioethanol dan biodiesel. Ini berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Namun berdasarkan Perpres No 12/2025/ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029), sudah mencakup transisi energi dan hilirisasi nikel. Walaupun demikian, karena dua persoalan penting yang menonjol, nikel akan dibahas secara tersendiri. Pemerintah sudah melaksanakan dan mencanangkan 77 proyek. 48 proyek berasal dari pemerintah era Jokowi da 29 proyek baru di era pemerintah ini. Proyek ini sebagian besar di Jawa, tetapi skala yang mencengangkan juga terjadi di Papua, secara khusus di Papua Selatan dengan target 2 juta hektar, agar wilayah ini menjadi lumbung padi dan tebu (Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029, Ini Daftar Lengkapnya - Espos.id; Proyek Strategis Nasional Era

Prabowo: Jawa Jadi Pusat Pembangunan, 77 PSN Ditetapkan untuk 2025–2029).

Yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan dan melakukan transisi energi. Dalam konteks Papua ditegaskan bahwa Papua merupakan ruang strategis yang masih dianggap kosong, sehingga perlu dimaksimalkan. Strategis karena hutan dianggap sebagai lahan tidur. Dari segi pertahanan nasional, beberapa wilayah Papua dijadikan PSN karena dengan PSN ia bagian dari keseluruhan desain pembangunan demi integrasi nasional (Sophie Chao *Mega-Projects and the Politics of Development in Papua*, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 54 No. 2 (2023).

Karena ini adalah proyek strategis nasional, proyek ini dilaksanakan dengan kekuatan penuh yang melibatkan berbagai kekuatan negara dari elemen sipil maupun militer. Pelaksanaan yang berkekuatan penuh ini mendapat resisten yang tidak sedikit dari berbagai elemen kunci di dalam masyarakat. Dari masyarakat yang paling terdampak, paling kurang terdapat suku Marind di Merauke, Marind di Kimaam, Maklew, Khimaima, Yei, Kondo Digul. NGO yang ada di Papua, di tingkat nasional juga melakukan protes berulang terhadap kebijakan pemerintah yang merampas hak ulayat masyarakat adat tanpa dialog dan komunikasi yang baik atau ganti rugi yang layak. Kalangan muda khususnya mahasiswa dan Gereja di Papua melakukan protes keras terhadap kerusakan ekologis dan kerugian kultural yang luar biasa dalamnya. Dari segi hak asasi manusia, pelaksanaan PSN tidak sedikit merusak aspek ini. Komnas HAM dan Pelapor Khusus HAM PBB menunjukan dan mengindikasikan adanya pelanggaran HAM dalam bentuk perampasan hak milik, intimidasi dan berbagai kekerasan lainnya.

Realita Nikel

Berdasarkan RPJMN 2025, nikel adalah bagian dari proyek strategis nasional. Hal ini disebabkan karena cadangan nikel yang sangat besar, Saat ini terjadi peningkatan penambangan Nikel di wilayah timur Indonesia, yang mencapai 933.727 hektar.

Tujuan utamanya adalah menempatkan negara ini sebagai pemain penting di dalam transisi energi global. Untuk itu, ditetapkan di dalam UU No. 3 th 2020. Darinya dilakukan hilirisasi industri nikel dengan mendirikan smelter dan industri turunan, sehingga Indonesia tak lagi bergantung pada ekspor biji mentah (Priyaji Agung Pambudi *Environmental Pollution,* Journal, Vol. 5 No. 3 (November 2025); Dian Yesy Fatimah, Juvens Yuda Her Krissanto, M. Nur Alif Pamunga, Rio P. Nugroho, *Nickel as A Strategic Mineral and Its Potential Resources in X-Field, North Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia,* Journal of Applied Geology, Vol. 8(1), 2023, pp. 85–90).

Persoalan Nikel di Papua menyasar pada tempat yang aktual dan potensial. Persoalan Nikel di Papua mengemuka di ruang publik karena penambangan Nikel yang terjadi di daerah pariwisata eksotik, yakni Raja Ampat. Berbagai pihak turun mengecek langsung hal ini. Menteri, para ahli dan DPR turun ke lokasi. Hasilnya ditegaskan bahwa lokasi penambangan berada 40 Km di luar taman nasional tersebut. Perizinan tak dilanggar. Sementara itu, DPR RI menilai dampak negatifnya, sementara masyarakat lengkar pertambangan menyatakan bahwa jika hasilnya tak mensejahterakan masyarakat maka sebaiknya ditutup. Selain itu, berbagai pihak melakukan protes hingga ke forum nasional dan internasional. Hasilnya adalah perizinan dicabut sementara. Namun Meski salah satu perusahaan masih diizinkan untuk terus melakukan pertambangan. Karena dampak yang secara potensial akan merugikan, potensi nikel di wilayah Cyclop diproteksi sejak dini. Masyarakat adat dan mahasiswa di kabupaten Jayapura melakukan demonstrasi untuk menyatakan sikap pada pihak pemerintah bahwa ini bukan daerah tambang. Ini adalah daerah cagar alam dan cagar budaya.

Kepentingan Nasional dan Derita Masyarakat

Di sini persoalan PSN dan Nikel dilihat terlebih dahulu secara politis. Politik dalam perspektif Aristoteles tak bisa dilepaskan dari etika. Namun politik etis, ini akan dibedah berdasarkan tiga pemikir penting: Marx, Agamben dan Rawls.

Mengamati persoalan PSN langsung menggiring kita pada pertarungan kelas sebagai dasar hidup dan dinamika sosial ala Marx. Di satu sisi terdapat kelas penguasa dan kelas masyarakat proletar. Kelas penguasa, di satu sisi, memaksakan kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan transisi energi. Hal ini juga tidak terlepas dari perlombaan berbagai negara untuk memposisikan negaranya secara berdaya di hadapan negara-negara lain. Yang tak terhindarkan juga adalah keinginan pemerintah untuk melakukan peningkatan ekonomi yang dapat dibagi ke seluruh masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, dalam kaca mata Agamben, kita melihat bahwa ada orang atau kelompok orang yang dikecualikan dari hukum. Artinya orang-orang tersebut dapat dikorbankan demi kepentingan nasional. Orang-orang ini adalah *homo sacer*. Memang Agamben berbicara dalam konteks kedaruratan negara (1998; 2005). Negara Indonesia memang tidak darurat dari segi keamanan. Namun dalam konteks utang luar negeri yang besar dan tantangan tarif dari Trump, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan berada dalam kondisi darurat. Hal ini dapat dilihat lagi perubahan kehidupan manusia dewasa ini di bidang digital yang membuat sasaran pertanian, perkebunan dan industri masa lalu, kalah jauh dalam persaingan. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapat nasional dan rakyat. Hal yang tak kalah penting adalah perubahan iklim yang jelas berpengaruh pada ketahanan pangan. Kondisi-kondisi ini memperlihatkan bahwa negara darurat dari sudut pandang daya tahan ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang darurat membuat negara dapat melampaui aturan. Aturan yang dapat dilampaui termasuk hak asasi manusia, hak milik dan juga hak lingkungan. Sebagian masyarakat yang dikorbankan merupakan *homo sacer*. Mereka bukan lagi warga negara. Mereka direduksi ke tingkat biologis saja (*bare-life*). Kondisi biologis ini bukanlah kondisi manusia, tetapi kondisi binatang, sehingga fokusnya bukan pada *bios* tubuh tetapi *zoe* yang sepadan dengan *zoologi* yang merupakan ilmu yang berurusan dengan binatang. Mereka bukanlah warga yang berhak untuk secara hukum dan politik dilindungi. Mereka pantas dan layak dikorbankan karena situasinya darurat nasional.

Dalam *A Theory of Justice* dan *Political Liberalism* John Rawls ditegaskan tentang kesederajatan seluruh warga. Bahwa kebebasan dan kesempatan harus terbuka secara merata untuk seluruh masyarakat. Ketidaksetaraan hanya dapat diizinkan demi mengafirmasi mereka-mereka yang tak beruntung dalam masyarakat. Melaluinya keadilan dapat terwujud (Rawls, 1971; 1983). Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam persoalan lingkungan di Papua ini? Masyarakat suku atau adat yang keseluruhan dinamika hidup baik dari segi ekonomi, kesehatan, kebudayaan dan agama bersandar pada hukum tidak dilihat sebagai orang-orang yang paling tak beruntung. Mengapa mereka harus dilihat sebagai orang yang tak beruntung dalam kecenderungan ekonomi global dan nasional? Ini disebabkan karena dinamika ekonomi secara khusus di negara berkembang cenderung bersandar pada bidang kehutanan, kelautan dan pertanian. Hutan dilihat dalam kaca mata ekonomi saja. Hutan harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar. Lahannya harus dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi yang paling dominan dan yang paling menjanjikan pertumbuhan ekonomi. Hutan sebagai ruang hidup dalam segala dimensinya merupakan hal asing dalam perspektif ekonomi nasional dan global. Hal ini menempatkan mereka sebagai kelompok yang marginal. Mereka tak ambil bagian dalam keseluruhan kecenderungan ekonomi nasional. Karena itu, dihadapkan dengan kecenderungan arus ekonomi nasional mereka tak bisa tidak disapu.

Persis di titik ini, negara harus hadir terutama bagi yang paling tidak beruntung. Mereka perlu dilindungi sedemikian rupa sehingga ruang hidup mereka dalam segala dimensinya tetap terjamin. Bukankah di dalam Pancasila ditegaskan tentang 'keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia'. Apa itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Artinya tak ada yang dikecualikan, tak ada yang direduksi tanpa perlindungan politik dan hukum.

Tentu saja hal ini merupakan tantangan yang paling serius bagi pemerintah. Apa sebenarnya yang jarang menjadi perhatian pemerintah dalam soal ini? Pertama, proyek strategis nasional menjadi proyek yang

melibatkan semua pihak dengan dasar hukum, politik dan keamanan yang solid. Pemerintah dan seluruh elemennya seperti dikejar waktu. Akibatnya dialog, negosiasi dan ganti rugi tak diproses dan diputuskan secara baik. Tak heran terjadi penyerobotan yang membuat rakyat kecil hanya bisa protes tanpa kekuatan untuk membendung. Kedua, problem yang memperparah keadilan sosial adalah bahwa di satu sisi ada masyarakat yang dikorbankan, tetapi di sisi lain, ada masyarakat yang diuntungkan. Dalam konteks PSN terlihat jelas bahwa pihak korporat mendapat untung, mendapat perlindungan dan mendapat jaminan pelaksanaan proyek, di atas perampasan tanah, perusakan hutan dan penderitaan rakyat karena masalah lingkungan.

Soal-soal ini bukan jauh dari pemahaman pemerintah. Apalagi askes infomrasi dan perkembangan pengetahuan terbuka lebar. Ini bukan soal permasalah birokrasi yang berbelit-belit. Ini masalah di mana keadilan sosial dan masalah lingkungan tak diterima oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Yang mereka mengerti adalah proyek dan proyek. Proyek harus dikejar dan dituntaskan. Halangan harus dilibas. Ini berarti pemerintah hanya hidup berdasarkan kepalanya sendiri dan tak pernah mengerti kepala masyarakat. Pemerintah dalam kaca mata politik adalah orang yang paling mengerti apa yang terbaik bagi masyarakatnya. Namun mengapa apa yang dikerjakan pemerintah tampak membuat masyarakat merasa asing terhadap hal itu. Ini memperlihatkan pemerintah pada umumnya hanya bernama pemerintahan demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. *De facto* pemerintah adalah tirani yang mengerti negara adalah dirinya. Dirinya adalah *homo mensura*. Ia adalah ukuran segalanya. Segalanya direduksi pada pikiran dan kehendaknya. Akibatnya demokrasi merupakan demokrasi yang mengenakan mata dan telinga sebagaimana terlihat dan terdengar di media digital.

Ekologi dan Gangguan Saraf Politik

Di sini bedah lingkungan ditempatkan di dalam anologi problem kesehatan saraf dan problem perburuan babi hutan. Maksudnya problem lingkungan memperlihatkan sikap yang tak punya akal dan tak punya perasaan. Akibatnya pemerintah tampak tak punya hati. Namun keseluruhan aktivitas tampak sebagai sebuah pergerakan yang tak perduli bak babi hutan yang tertombak.

Ada sebuah kecenderungan yang terjadi secara umum bahwa masalah lingkungan hanya menjadi persoalan penting kalau soal lingkungan itu adalah bencana. Sepanjang tak ada bencana, baik masyarakat maupun pemerintah seperti terkena penyakit saraf. Penyakit sarat dapat membuat orang berada dalam keadaan *vegetable*. Tubuhnya berkembang tetapi indra, kehendak dan pemikiran sama sekali tak berfungsi.

Protes tentang lingkungan bukanlah protes tanpa akal budi, kehendak dan perasaan. Mengapa demikian? Jika anda lihat protes keras terhadap masalah banjir di Sumetera Utara dan Aceh dilakukan oleh berbagai macam ahli, akadmisi dan mahasiswi/a. Itu berarti protes itu berdasar. Protes itu keluar dari perasaan dan kehendak yang nyata terpampang melanda dan memporakporandakan kehidupan masyarakat.

Persis di 'urat' yang berurusan dengan rasa malu dan rasa salah itu, para petinggi kita bermasalah. Dalam konteks PSN di Papua terjadi destruksi yang luar biasa besar dan dalamnya. Dua juta hektar bahkan lebih yang diambil untuk kepentingan proyek nasional itu, bukan tanah kosong. Ia bukan tanpa pemilik. Ia bukan tanpa nilai. Yang diporakporandakan oleh proyek berskala nasional di tempat masyarakat berskala suku adalah ruang hidup. Artinya hutan dan rawa adalah ruang di mana segala aspek hidup itu terjadi di dalamnya.

Seperti di dalam buku Memoria Pasionis tahun 2025 lalu, di bagian lingkungan ditegaskan bahwa hutan sebagai ruang hidup merupakan hutan yang berfungsi sebagai ruang ekonomi, ruang kesehatan, ruang kultural dan ruang religius. Ini juga bukan hanya ruang yang bersifat antropologis saja.

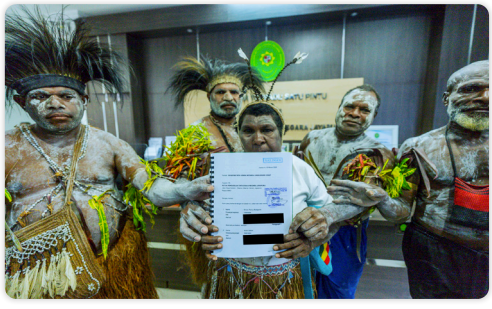
Artinya ruang ini bukan hanya ruang demi kepentingan manusia saja. Ini ruang ekologis. Artinya di dalamnya terdapat tumbuhan dan binatang yang menjadi bagian penting di dalam kehidupan suku-suku. Di dalamnya terdapat jenis dan tingkat hubungan mereka terhadap tumbuhan dan tanaman. Melaluinya diatur hubungan yang tepat dengan mereka. Ada tumbuhan dan binatang yang sama sekali tak boleh disentuh. Ada tumbuhan dan tanaman yang bisa dikonsumsi. Ada jumlah dan waktu konsumsi tertentu. Ada ruang sacral yang di mana tempat, hutan, tanah, tumbuhan dan tanaman pada wilayah tersebut yang tak bisa disentuh dan didekati.

Ketika PSN merangsek masuk ke ruang hidup masyarakat dengan sistem ekonomi, politik dan keamanan yang baru, masyarakat akan kehilangan jati diri mereka. Mereka kehilangan identitas suku. Mereka menjadi tiada di hadapan percaturan ekonomi dan politik yang baru. Ruang hidup mereka diubah, seluruh hidup mereka diubah. Tanpa dialog, persiapan dan upaya serius jangka panjang, kita hanya menimbulkan bencana ekologis, bencana budaya dan bencana bagi mayoritas masyarakat daerah PSN.

Mungkin protes tak siginifikan. Protes yang signifikan di tanah Papua dengan sempitnya ruang publik sipil dan kebebasan berekspresi maka lengkaplah marginalisasi perjuangan untuk menyelematkan masyarakat adat, hutan dan lingkungan keseluruhan dari deforestasi dan eksploitasi.



Aksi Damai Solidaritas Merauke di Depan Kementrian ATR/BPN Jakarta Selatan.
(Sumber: Suara.com)



Masyarakat Adat Malind mendaftarkan gugatan izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 KM di PTUN Jayapura, pembangunan ini untuk PSN.
(Sumber: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat)

Jadi secara keseluruhan problem lingkungan di Papua hanya memperlihatkan pemerintah yang mengalami gangguan saraf yang tak peka rasa dan tak berbudi. Namun ini adalah hal yang wajar dalam tata hubungannya dengan Papua dalam perjalanan sejarah. Aktivitasnya memperlihatkan model gerak babi hutan yang tertombak. Ia akan lari tanpa memperdulikan apa dan siapa yang ditambrak.

Penutup

Proyek Strategis nasional yang diulas di sini tak bertujuan untuk menyuarakan sebuah penolakan. Kami mengakui pentingnya. Ia penting di dalam perubahan iklim, perubahan model ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perubahan tata global mempengaruhi bagaimana ekonomi dikelola. Ini adalah keharusan dan tanggungjawab pemerintah.

Problemnya ini. Kami menyuarakan hal ini untuk memperlihatkan permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini memperlihatkan sebuah kecenderungan ketidakpedulian yang besar. Masalah terus disuarakan. Namun tak ada perubahan besar dalam penanganan masalahanya. Dialog tak terjadi. Ganti rugi tak terwujud tuntas. Intimidasi dan tekanan makin terlihat jelas dengan kehadiran militer. Ketika trauma politik yang belum berakhir, masyarakat disajikan dengan potensi kehancuran masa depan mereka. Pentingnya dialog dan kesabaran menjadi hal penting agar proyek sebesar ini, memang memenangkan hati masyarakat dan mendaratkan keadilan di bumi Cenderawasih ini.

Daftar Pustaka

Agamben, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Agamben, G. (2005). *State of exception* (K. Attell, Trans.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Chao, S. (2023). *Mega-projects and the politics of development in Papua.* Journal of Southeast Asian Studies, 54(2).

Espos.id. (2025). *Prabowo tetapkan 77 proyek strategis nasional 2025–2029*, iFatimah,

D. Y., Krissanto, J. Y. H., Pamunga, M. N. A., & Nugroho, R. P. (2023). *Nickel as a strategic mineral and its potential resources in X-Field, North Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia*. Journal of Applied Geology, 8(1), 85–90.

Pambudi, P. A. (2025, November). *Environmental pollution*. Journal, 5(3).

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Revisi Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Mekanisme penetapan Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Pembaharuan daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025–2029).

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. New York, NY: Columbia University Press.

Tempo.co. (2025). *Proyek strategis nasional era Prabowo: Jawa jadi pusat pembangunan, 77 PSN ditetapkan untuk 2025–2029.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kronik Sumber Daya Alam: Deforetasi dan Investasi

06 Februari

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pernyataan Ketua Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bahwa DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan, khususnya pelanggaran hukum oleh pengusaha kelapa sawit. Pelibatan itu dinilai menghidupkan Dwifungsi ABRI. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada 4 Februari 2025. Sjafrie mengatakan bahwa DPN akan bertugas mengobservasi seluruh permasalahan nasional di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan Sjafrie tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mengancam demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Koalisi itu terdiri dari Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Centra Initiative, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Pernyataan ini mencerminkan indikasi kembalinya praktik otoritarianisme ala Orde Baru dan Dwifungsi militer. Pelibatan DPN dalam penertiban kawasan hutan, sawit, dan seluruh permasalahan nasional lainnya sejatinya tidak sesuai dengan amanat Pasal 15 UU Pertahanan. Dalam UU Pertahanan secara eksplisit ditujukan untuk mengurus kebijakan pertahanan negara dan bukan terlibat jauh dalam urusan sipil (https://jubi.id/rilis-pers/2025/pelibatan-dewan-pertahanan-nasional-dalam-penertiban-sawit-kembalikan-dwifungsi-abri/).

24 Februari

Koordinator aksi mingguan Kaum awam Katolik Papua Chris Dogopia mengatakan pihaknya selama ini melakukan aksi setiap minggu, setelah ikut misa di Paroki yang menjadi tempat aksi. Aksi setelah misa itu memperlihatkan berbagai tulisan dan protes kepada Uskup Agung Merauke, Petrus Canisius Mandagi, MSC. Mereka memegang atau meletakkan pamflet ditanah. Ada juga spanduk mini dibentangkan di halaman gereja dan sebagainya. *"Aksi mingguan ini bentuk desakan umat atau domba kepada gembala kami untuk mengklarifikasi pernyataan dukungan pada Proyek Strategis Nasional atau PSN Merauke yang melukai hati umatnya. Dan membuka ruang dialog antara gembala dan umat supaya kita bicara dari hati ke hati begitu, hanya itu yang kami tuntut sebenarnya, kami tidak membenci justru kami menghargai Bapa Uskup Agung Merauke,"* katanya Chris kepada Jubi di Kota Jayapura, Papua, Senin (24/02). Dogopia menjelaskan bahwa pada Minggu, 23 Februari 2025, dari pukul 10:00-11:30 WP, Suara Kaum Awam Katolik Papua melakukan aksi mingguan ke-9 untuk tahun 2025 di halaman Gereja Katolik, Paroki "Gembala Baik" Abepura, Kota Jayapura, Papua (https://jubi.id/polhukam/2025/umat-katolik-papua-buat-petisi-mosi-tidak-percaya-kepada-uskup-agung-merauke/).

03 Maret

Empat perusahaan memastikan akan melakukan investasi di bidang perkebunan di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan Ulmy Listianingsih, mengungkapkan, dari 4 perusahaan tersebut 3 diantaranya akan berinvestasi di Kabupaten Boven Digoel dan 1 perusahaan lainnya akan berinvestasi di Kabupaten Merauke. *"Untuk 3 perusahaan diBoven Digoel akan investasi di perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk Merauke akan investasi di perkebunan tebu. Jadi program ketahanan pangan di Papua Selatan itu tidak hanya untuk pertanian tapi termasuk perkebunan diantaranya kelapa sawit dan tebu,"* kata Paino kepada media ini di Merauke, Jumat (28/02) lalu. Paino menjelaskan

bahwa instansi terkait baik Baperinda, Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PTSP dan Dinas Tenaga Kerja baik provinsi dan kabupaten dilibatkan dalam proses-proses yang sedang berlangsung (Cenderawasih Pos).

14 Maret

Suara penolakan dan perlawanan PSN bergema dari Merauke, Papua Selatan, provinsi paling timur Indonesia yang tengah disasar proyek cetak sawah dan kebun tebu warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek itu kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Deklarasi penolakan dan perlawanan diserukan masyarakat adat dan rakyat, yang menjadi korban sekaligus berjuang melawan kesewenang-wenangan program PSN dan berbagai proyek merusak lainnya. *"Kami menuntut penghentian total Proyek Strategis Nasional* serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Pelaku kejahatan-negara-korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional," demikian petikan deklarasi yang dibacakan perwakilan rakyat dalam pertemuan di Merauke, Papua Selatan, Jumat (14/03), sebagaimana dikutip dari siaran pers yang dikirimkan ke meja redaksi Jubi . Deklarasi tersebut adalah hasil pertemuan "Konsolidasi Solidaritas Merauke" yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke. Selama empat hari, lebih dari 250 masyarakat adat dan masyarakat lokal terdampak PSN, serta pelbagai organisasi masyarakat sipil, berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif (https://jubi.id/rilis-pers/2025/dari-merauke-masyarakat-terdampak-psn-tolak-perampasan-tanah-dan-ruang-hidup/).

17 Maret

- Ratusan warga yang mengaku menjadi korban Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama organisasi masyarakat sipil menuntut program warisan pemerintahan Presiden Jokowi tersebut dihentikan. Pernyataan terbuka ini disampaikan di hadapan pejabat pemerintah

pusat dan daerah di Kota Merauke, Papua Selatan, Jumat (14/03). Kelompok yang menamai diri "Solidaritas Merauke" menyatakan PSN yang telah dan masih berlangsung telah merusak ruang hidup mereka sekaligus menjadi biang keladi atas kerusakan lingkungan dan kekerasan terhadap masyarakat adat. "Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat," sebut pernyataan bersama. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan periode 2020-2024 telah terjadi 154 ledakan konflik akibat PSN. Konflik ini melibatkan satu juta hektar lahan, dan 103.000 keluarga menjadi korban. Pemerintah melalui Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengeklaim akan menjadikan protes ini "masukan dan kritik terhadap pemerintah". Namun, kementeriannya tak bisa mengambil sikap untuk menghentikan PSN (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpde5l58p16o).

- Proyek pangan di Merauke berupa biji-bijian padi, dicanangkan sejak pemerintahan Belanda di Kumbe tahun 1940-an pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya di era pemerintahan Indonesia lebih banyak proyek persawahan melalui program transmigrasi sampai era reformasi. Proyek terbesar memakai lahan terluas di Kabupaten Merauke, tepatnya di era pemerintah Bupati Merauke, Drs John Gluba Gebze (2000–2010). Tepatnya saat Kota Merauke berusia ke 108 pada 12 Februari 2010, proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sebanyak 32 investor diajak untuk mengelola lahan seluas 1.282.833 hektare. John Gluba Gebze merupakan bupati ke 10 dan sempat menyewa pesawat yang dijalankan oleh maskapai penerbangan Merpati Nusantara Air (MNA) yang akhirnya bangkrut dan menjadi besi tua. Selanjutnya di masa pemerintahan Bupati Romanus Mbaraka, terutama masa jabatan kedua (2021–2024) program terbaru lainnya dengan nama Proyek Strategi Nasional (PSN), terutama tanaman pangan areal persawahan dan perkebunan tebu di lahan seluas dua juta hektare, termasuk wilayah Kimaam juga jadi sasaran PSN. Bupati Mbaraka yang juga berasal dari Pulau Kimaam, ikut menolak program PSN tebu, yang hendak masuk ke

wilayah adat masyarakat Kimaam. Sebelum Mbaraka bupati Merauke periode 13 dan 14, ada pula Bupati Merauke Freddy Gebze selama periode 2016–2021, bupati Fredy periode ke-10 ini merupakan putra kandung dari Thobias Mbearme Gebze, bupati Merauke periode ke-6 dari 1984–1985 (https://jubi.id/animha/2025/proyek-pangan-di-merauke-dari-masa-ke-masa/).

18 Maret

Bagi orang Marind di Kabupaten Merauke, padi itu tanaman biji-bijian yang biasa dimakan burung, sebab mereka sudah lama hidup dengan pangan lokal dari rimbunan dusun sagu, talas, umbi-umbian, dan kumbili. Bahkan orang-orang di Pulau Kimaam menanam kumbili dengan model pertanian terapung, karena wilayah mereka berawa. *"Kita ini punya totem buah kelapa dan bukan sawit apalagi bersawah dengan menanam padi-padian yang bukan pula totem dari nenek moyang kita,"* katanya, dalam diskusi Konsolidasi Solidaritas Merauke pekan lalu di Merauke. Menurutnya, kini masyarakat harus berhadapan dengan pembukaan lahan besar-besaran untuk sawah dan perkebunan tebu. Padahal masyarakat pribumi di Bumi Animha sudah lama terbiasa dengan sagu, sebab puluhan ribu hektare sagu berada di hutan rawa sebagai benteng hidup yang menjaga keseimbangan lingkungan, terutama untuk melawan musim hujan yang panjang dan juga musim kemarau yang lama. *"Begitu pula dengan fungsi hutan pohon bush alias eucalyptus yang akan menyimpan air di kala musim kemarau, dan menahan laju derasnya air saat musim penghujan. Kondisi tanah di Papua Selatan jelas berbeda dengan Pulau Jawa yang punya gunung berapi, sehingga tak heran kalau tanah di sana subur dan cocok menjadi areal pertanian menetap terutama untuk areal persawahan. Walau demikian, tanah sesubur itu masih harus dipupuk lagi,"* katanya (https://jubi.id/animha/2025/demi-lumbung-padi-dan-kebun-tebu-merauke-sagu-dan-hutan-bush-ditebang/).

17 April

Hasil temuan pemantauan Komnas HAM menyatakan Proyek Strategis Nasional atau PSN Ketahanan Pangan dan Energi di Merauke berpotensi melanggar HAM. Komnas HAM juga menemukan penempatan

pasukan TNI di lokasi PSN membuat masyarakat adat takut, terancam dan merasa diawasi. Komnas HAM meminta pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap PSN dengan memastikan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Demikian hasil temuan pemantauan Komnas HAM terkait PSN di Merauke yang tertuang dalam surat rekomendasi bernomor 189/PM.00/R/III/2025 yang diterbitkan 17 Maret 2025 lalu. Surat rekomendasi atas temuan itu ditujukan untuk Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke ditandatangani Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Pusat, Uli Parulian Sihombing. Temuan pemantauan itu merupakan tindak lanjut Komnas HAM atas pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei yang didampingi Franky Samperante dari Yayasan Pusaka dan Teddy Wakum dari LBH Papua Pos Merauke, pada 23 Oktober 2024 lalu. Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan. Dalam pemantauan itu, Komnas HAM menemukan potensi pelanggaran HAM dalam PSN di Merauke diantaranya penetapan area konsesi dan pemberian hak kepada badan usaha swasta tanpa melibatkan masyarakat adat. Hal ini melanggar prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (https://jubi.id/animha/2025/komnas-ham-psn-di-merauke-berpotensi-langgar-ham/).

22 April

Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA, mengangkat isu krisis kemanusiaan, ekologi, dan ketidakadilan di Tanah Papua dalam Ibadat Jumat Agung pada Jumat (18/04) di Gereja Katedral Tiga Raja, Timika. Seruan tersebut mendapat tanggapan hangat dari masyarakat adat korban PSN Merauke, khususnya dari suku Malind, Anim, dan Kondo-Digoel. Ketua Forum Masyarakat Adat Malind dan Kondo Digoel, Simon Petrus Balagaize, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menilai, pada momentum Tri Hari Suci—tepat di hari Jumat Agung—

Uskup telah menyuarakan jeritan umat dari altar Gereja Katedral Timika. *"Kami, umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke, khususnya dari Kampung Wogekel, Wanam, Distrik Jagebob, Ilwayab dan sekitarnya, telah berjuang selama lebih dari satu tahun mempertahankan tanah dan hutan adat seluas dua juta hektare yang hendak dijadikan lahan proyek PSN untuk penanaman padi dan tebu sebagai lumbung pangan nasional,"* ujar Simon melalui pesan aplikasi kepada Jubi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (22/04) (https://jubi.id/meepago/2025/seruan-uskup-timika-diapresiasi-korban-psn-merauke/).

03 Mei

Koperasi Serba Usaha Inggyasasih Ghuzi dari 9 marga yang ada di Distrik Ululin Kabupaten Merauke menyatakan siap membangun plasma sawit seluas 4.600 hektar di Distrik Ululin, Kabupaten Merauke. Pengurus Koperasi dari 9 marga tersebut di damping DIrektur PT Bina Papua Luhur Karya Tulus Sianipar saat bertemu dengan Gubernur Papua Selatan Apolos Safanpo di Kantor Gubernur Papua Selatan. (Cenderawasih Pos).

23 Mei

Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan atau LHKP Provinsi Papua Barat Daya akan meninjau penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Peninjauan ke lapangan itu direncanakan setelah beredarnya potongan video aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, yang diduga mencemari lingkungan sekitar. Kepala Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, video berdurasi 4 menit yang beredar itu merupakan potongan dari video dengan durasi sekitar 16 hingga 24 menit, milik Green Peace. *"Video aslinya memperlihatkan aktivitas penambangan nikel di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Namun yang viral hanya potongandi Raja Ampat. Kami tidak tahu apa motivasinya, tetapi ini jelas bisa memengaruhi opini publik,"* kata Kelly Kambu dalam konferensi pers, Jumat (24/05). Menurut Kambu, pihaknya menjadwalkan peninjauan ke lapangan pada pekan depan, bersama mitra Dinas Pertambangan, PTSP, serta Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, dan pihak-pihak terkait (https://jubi.id/lingkungan/2025/dinas-

lhkp-papua-barat-daya-akan-tinjau-tambang-nikel-di-raja-ampat-setelah-videonya-beredar/).

31 Mei

Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) menilai Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam membohongi masyarakat Raja Ampat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Advokasi ALJARA, Ambrosius Klagilit di Sorong Sabtu, 31 Mei 2025. *"Kami menilai Bupati Raja Ampat dengan sadar telah membohongi rakyatnya sendiri. Ini bukan sekadar soal pernyataan yang tidak konsisten, ini soal integritas seorang pemimpin yang kami anggap telah mengkhianati mandat rakyat untuk melindungi tanah dan laut Raja Ampat dari kehancuran tambang,"* kata Ambrosius. Pertanyaan itu disampaikan terkait pertanyaan Bupati Raja Ampat bahwa pemerintah daerah belum pernah bertemu dengan pihak perusahaan, dan tentang seluruh kewenangan izin berada di tingkat provinsi dan pusat. *"Itu alasan klasik yang tidak berdasar. Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT MRP (PT Mulia Raymond Perkasa) yang digunakan saat ini adalah produk masa lalu yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat sebelumnya pada tahun 2013. Jadi pemerintah daerah tahu persis soal izin ini,"* ujar Ambrosius. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan izin tambang itu dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, namun karena izin Perusahaan di Kabupaten Raja Ampat telah dikeluarkan pada 2013, maka IUP tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Raja Ampat (https://jubi.id/domberai/2025/aljara-menilai-bupati-raja-ampat-membohongi-publik/).

02 Juni

Institut Usba melihat kerusakan ekologis yang sebelumnya terjadi di wilayah selatan dan pedalaman Papua, kini mulai menjalar ke Raja Ampat, kawasan yang selama ini dikenal dunia sebagai pusat pariwisata berbasis keberlanjutan dan kekayaan hayati laut. Direktur Institut Usba menegaskan jika tambang nikel dibiarkan masuk ke Raja Ampat, maka yang rusak bukan hanya ekosistemnya, tetapi juga harapan Papua akan masa depan yang berdaulat secara ekologis dan adat. Ini bukan

hanya persoalan lokal, ini krisis nasional. Alasannya, Raja Ampat adalah penyerap karbon alami sebesar 2,5 juta ton per tahun. *"Lalu tambang justru menyumbang dua juta ton CO per tahun. Ini jelas memperburuk krisis iklim dan mengkhianati komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris 2015,"* ujarnya. Masyarakat adat seperti Suku Kawei, Betew, dan Maya telah bersuara tegas. Mereka menolak tambang di wilayah adatnya melalui surat bersama 15 Kepala Suku, tapi suara mereka diabaikan. *"Sacred sites dan wilayah tangkap tradisional mereka dihancurkan. Ini adalah bentuk penjajahan modern yang berlangsung di depan mata kita sendiri,"* ujarnya (https://jubi.id/domberai/2025/institut-usba-desak-pemerintah-pusat-cabut-izin-nikel-di-papua-barat-daya/).

03 Juni

Aktivis Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Tatkala Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta, aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan *"What's the True Cost of Your Nickel?"*, serta membentangkan spanduk dengan pesan *"Nickel Mines Destroy Lives"* dan *"Save Raja Ampat from Nickel Mining"*. Bukan hanya di ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di luar ruang konferensi. Pesan-pesan lain yang berbunyi "What's the True Cost of Your Nickel", "Nickel Mines Destroy Lives", dan "Save Raja Ampat the Last Paradise" terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran. Melalui aksi damai ini, Aktivis Greenpeace ingin mengirim pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel yang meriung di acara tersebut, serta kepada publik, bahwa tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak. Industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih

menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/kritik-industrialisasi-nikel-aktivis-greenpeace-gelar-aksi-di-konferensi-nikel-internasional-di-jakarta/).

04 Juni

Sebanyak 75 keluarga Orang Asli Papua (OAP) dari Dusun Arwa, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan mengadukan penyerobatan tanah milik mereka oleh PT. Global Papua Abadi (GPA) kepada Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke (YLBHI LBH PAPUA Merauke), Selasa (27/05). *"Sebanyak 75 keluarga tersebut telah memiliki dokumen kepemilikan tanah yang legal dengan mengikuti semua prosedur pelepasan hak atas tanah dari pihak pertama yaitu Marga Balagaize sebagai pemilik hak ulayat pada tahun 1990,"* kata Direktur YLBHI LBH PAPUA Merauke, Teddy Wakum kepada Jubi, Rabu (04/06). Semua alat bukti masih disimpan dengan baik oleh 75 keluarga berupa dokumen pelepasan hak atas tanah serta dokumentasi upacara pelepasan secara adat oleh suku Malind yang disaksikan langsung oleh para saksi-saksi dari berbagai pihak yang masih hidup hingga saat ini. *"Mereka telah menempati dan mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1942 dan menjalin hubungan kekerabatan yang baik dengan pemilik ulayat dan telah berlangsung selama puluhan tahun, dan hingga di tahun 1990 barulah ada pelepasan hak secara resmi,"* jelas Wakum (https://jubi.id/animha/2025/hentikan-penyerobotan-tanah-milik-75-keluarga/).

05 Juni

Lokasi destinasi wisata internasional, Raja Ampat beberapa hari ini ramainmenjadi sorotan publik. Ini tak lepas dari beredarnya video penambangan yang menggunakan alat berat dan truk. Jika dilihat dari video udara nampak kondisi punggung pulau sangat terbuka dan rusak akibat pengerukan. Bentuk penolakan dilakukan NGO, Greenpeace Indonesia yang melakukan protes secara terbuka. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakandampak buruk

pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa dampak negative bagi lingkungan hidup dan masyarakat (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mengambil 3 langkah strategis untuk mengatasi isu tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam sekaligus untuk memastikan Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional #saverajaampat. "*Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,"* kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rilis pers di Jakarta pada Kamis, (05/06). Widiyanti Putri menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi khususnya pada sektor pariwisata. Widiyanti Putri merinci tiga langkah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat melalui sejumlah langkah konkret diantaranya, pihaknya bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat. Widiyanti menyatakan dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. *"Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,"* ujarnya (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/kementerian-pariwisata-ambil-3-langkah-strategis-atasi-isu-tambang-nikel-raja-ampat/).

07 Juni

- Dalam rangka menjawab tuntutan Aktivis dan Masyarakat Adat atas praktik eksploitasi Nikel di beberapa Pulau di Raja Ampat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel. *"Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi*

lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi". Terlepas dari itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Bahlil menegaskan, PT GAG Nikel yang melakukan praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu telah mengantongi IUP produksi sejak 2017. Selain itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa sebenarnya lokasi tambang nikel PT GAG tersebut berlokasi jauh dari destinasi pariwisata bahari yang ada di Raja Ampat. Bahkan, dia menyebut bahwa jarak tambang dan area pariwisata raja ampat mencapai 40 kilometer (Km) (https://jubi.id/lingkungan/2025/pemerintah-republik-indonesia-segera-cabut-izin-tambang-nikel-dan-hentikan-eksploitasi-nikel-di-kawasan-unesco-global-geopark-raja-ampat/).

- Aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Roberth R. Kardinal. PT Gag beroperasi di Kabupaten Raja Ampat setelah Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 diterbitkan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Perusahaan terus beroperasi melalui izin Kontrak Karya (KK) G-VII di lahan seluas 13.136 hektare berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan sikap tegas terhadap operasional tambang yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. "*Kalau memang tambang tersebut tidak ada manfaat untuk masyarakat, ya (Presiden) tutup saja,"* tegas Kardinal kepada awak media, Jum'at, (06/06). Kardinal mengungkapkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, khususnya di Distrik Waigeo Barat (yang disebut sebagai Ring 2), hanya menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebesar Rp10 juta per tahun. Jumlah tersebut dianggap jauh dari cukup dan tidak sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (https://jubi.id/

domberai/2025/tambang-nikel-di-raja-ampat-diizinkan-megawati-diperpanjang-jokowi/).

09 Juni

Koalisi selamatkan Domberai membantah pernyataan para pejabat daerah dan menteri merupakan pernyataan subjektif dan tidak dapat dibenarkan, terutama untuk menilai apakah ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. *"Seharusnya untuk menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Raja Ampat, dilakukan melalui penyelidikan yang mana kewenangannya berada pada Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K),"* kata Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malamoi, Tori Kalami dalam siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu (07/06). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *"Kehadiran Menteri ESDM ke Raja Ampat dan pernyataan para pejabat daerah Provinsi Papua Barat Daya, diduga bagian dari upaya untuk melindungi korporasi dan perusahaan-perusahaan pertambangan yang mengancam alam dan lingkungan laut Raja Ampat,* ujarnya (https://jubi.id/domberai/2025/koalisi-selamatkan-domberai-pejabat-lindungi-tambang-abaikan-ancaman/).

10 Juni

Manajemen PT Gag Nikel, tambang yang beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menyatakan lokasi penambangan mereka tidak berada di kawasan Geopark atau taman bumi. Pernyataan itu disampaikan pihak perusahaan seiring munculnya isu belakangan ini bahwa aktivitas tambang nikel oleh PT Gag Nikel merusak ekosistem Raja Ampat, yang merupakan destinasi wisata dunia. Namun pihak perusahan membantah lokasi tambang PT Gag Nikel tidak masuk di kawasan Geopark Raja Ampat. Manajer PT Gag Nikel, Rudi Sumual mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, telah melakukan kunjungan kerja wilayah operasi PT

Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat pada 7 Juni 2025 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil memastikan bahwa area tambang sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat. Menurutnya, hal itu sekaligus menepis kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan akan mengganggu kawasan wisata yang kini tengah populer dikalangan wisatawan mancanegara (https://jubi.id/lingkungan/2025/pt-gag-nikel-sebut-lokasi-tambang-di-raja-ampat-tidak-berada-di-kawasan-geopark/).

12 Juni

- Aliansi mahasiswa, Pemuda Papua Barat Daya dan mahasiswa Kota Jayapura menggelar demonstrasi damai di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (12/06). Mereka meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya atau ESDM, Bahlil Lahadalia menjaga komitmennya mencabut izin empat perusahaan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat Daya se-Kota Jayapura, Trestania Kambu mengapresiasi keputusan Presiden RI dan menteri ESDM, yang telah mencabut izin pertambangan nikel di Raja Ampat. Namun pihaknya ingin itu ada surat keputusan resmi bersifat hukum dari pemerintah sebagai bukti yang bisa dipegang untuk memperkuat pencabutan izin itu, dan masyarakat percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah. "*Karena kalau tidak ada surat bukti pencabutan izin maka ada kemungkinan untuk empat perusahaan nikel tersebut kembali beroperasi lagi,"* kata Trestania Kambu (https://jubi.id/mamta/2025/mahasiswa-dan-pemuda-minta-pemerintah-komitmen-cabut-izin-tambang-di-raja-ampat/).
- Di tengah sorak sorai publik atas pencabutan empat izin tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Institut Usba justru menyebut langkah pemerintah sebagai "kemenangan semu" bagi lingkungan dan masyarakat adat. Pasalnya, satu perusahaan tambang masih dibiarkan beroperasi di pulau kecil yang dilindungi hukum: PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam). *"Ini kemenangan semu! Selama PT Gag Nikel masih beroperasi,*

pemerintah sebetulnya sedang mengatakan kepada rakyat bahwa hukum hanya berlaku untuk perusahaan kecil. Sementara perusahaan milik negara dibiarkan melanggar," kata Direktur Institut Usba, Charles Imbir dalam siaran pers yang dikirimkan media, Kamis (12/06). Institut USBA menilai langkah pemerintah ini bukan kemenangan, melainkan bentuk kemunafikan kebijakan lingkungan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. "*Empat izin memang dicabut. Tapi selama PT Gag Nikel masih beroperasi di Pulau Gag, maka semua klaim pemerintah soal keberlanjutan dan keadilan lingkungan adalah ilusi. Ini bukan kemenangan, tapi penundaan kerusakan,"* tegas Imbir. Langkah pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yakni milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juni 2025. Keputusan ini disebut berdasarkan hasil evaluasi lintas kementerian dan tiga alasan utama:

- Pelanggaran Lingkungan: Aktivitas tambang terbukti merusak kawasan Geopark Raja Ampat, termasuk ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif.
- Lokasi dalam Geopark: Izin terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark nasional dan global oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO.
- Rekomendasi Pemda: Pemerintah daerah mendorong pencabutan IUP demi keberlanjutan sektor pariwisata berkelas dunia.

Namun, di luar keempat perusahaan tersebut, PT Gag Nikel tetap mendapat izin beroperasi, dengan dalih bahwa lokasinya berada di luar Geopark dan telah memenuhi syarat teknis serta dokumen lingkungan (https://jubi.id/domberai/2025/pt-gag-nikel-masih-menambang-institut-usba-ini-pengkhianatan-konstitusi/).

13 Juni

Komnas HAM RI menyampaikan terhadap aktivitas pertambangan Nikel di Raja Ampat, diduga kuat terjadi pelanggaran HAM dalam bidang lingkungan hidup. *"Karena mengindikasikan kerusakan lingkungan yang*

meluas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat," kata Komisioner Pemantauan, Saurlin P Siagian dalam siaran pers Komnas HAM RI yang diterima Jubi, Jumat (13/06). Ia mengatakan pernyataan ini dikeluarkan setelah Komnas HAM RI melakukan pengamatan dan berkomunikasi dengan berbagai pihak guna mendapatkan data,informasi dan fakta awal. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM RI menyampaikan dua hal: pertama,bahwa perusakan lingkungan hidup bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU HAM. *"Kedua, enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan,"* katanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/komnas-ham-duga-terjadi-pelanggaran-ham-bidang-lingkungan-hidup-di-raja-ampat/).

16 Juni

Penghentian sementara aktivitas wisata di Kampung Manyaifun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat menuai protes keras dari pemilik homestay lokal. Mereka merasa sangat dirugikan dan mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha wisata mandiri. "*Teman-teman yang bangun homestay ini sudah lama. Ini usaha mereka sendiri, bukan bantuan dari siapa-siapa. Jadi kalau ditutup, ya pemerintah harus cepat ambil langkah. Jangan lama-lama. Karena ini menyangkut hidup mereka sehari-hari,"* kata Ketua Asosiasi Homestay Lokal Raja Ampat, Kristian Sauyai kepada Jubi, Minggu (15/06). Setelah pemerintah mengumumkan penghentian sementara, asosiasi langsung menyampaikan kepada pemilik homestay yang berada di bawah naungan mereka untuk menunda kunjungan tamu dan mengembalikan uang booking. Namun tidak tergabung dalam asosiasi, sehingga koordinasi menjadi sulit. Ia berharap setelah tanggal 20 Juni ini, tidak ada lagi larangan operasional terhadap homestay lokal dan homestay dapat dibuka kembali. *"Kalau terlambat terus, kami akan tempuh*

jalur hukum. Karena ini bukan main main. Ini ekonomi rakyat, ini urusan perut keluarga," katanya (https://jubi.id/domberai/2025/warga-manyaifun-raja-ampat-protes-penutupan-homestay/).

18 Juni

Sembilan pelapor khusus PBB menyurati pemerintah Indonesia berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam surat itu, pelapor khusus PBB menduga telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam pelaksanaan PSN di Merauke. Pelapor khusus PBB juga menyurati PT Global Papua Abadi (PT GPA) selaku perusahaan yang menggarap lahan food estate di sana. Kedua surat itu dikirim pada 7 Maret 2025, dan dijawab pemerintah Indonesia pada 6 Mei 2025. Dothea Wabiser dari Solidaritas Merauke mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari jaringan internasional yang menyatakan bahwa di laman OHCHR kantor komisaris tinggi untuk HAM secara khusus dari pelapor khusus hak atas pangan, mempublikasi dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup di Merauke. *"Sembilan pelapor khusus PBB mereka mengirim surat kepada dua aktor yaitu Pemerintah Indonesia dan salah satu pimpinan perusahaan tebu yang sudah beroperasi [di Merauke] yaitu PT. Global Papua Abadi atau PT.GPA,"* kata Dorthea Wabiser dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus saat media briefing, Selasa (17/06). Menurut Dorthea, dalam surat pelapor khusus PBB itu, cukup detail melihat kronologis kehadiran perusahaan sejak 2010, saat Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE beroperasi hingga kehadiran PSN food estate pada 2024. *"Secara singkat mereka (pelapor khusus PBB) menjelaskan bahwa mereka tahu kalau sedang terjadi pengrusakan hutan dalam skala luas akibat kehadiran PSN di Merauke. Menurut mereka ini adalah ancaman serius bagi hak hidup masyarakat adat,"* ucapnya (https://jubi.id/animha/2025/sembilan-pelapor-khusus-pbb-surati-indonesia-berkaitan-dengan-dugaan-pelanggaran-psn-di-merauke/).

26 Juni

Komnas HAM menemukan adanya sejumlah pelanggaran dari kegiatan PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Mega proyek ini berfokus pada sektor ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru, dan ketahanan energi melalui perkebunan tebu dan bioetanol. Wakil Ketua Bidang Internal dan Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo kepada Jubi pada Rabu (25/06) sore, mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi empat distrik – dari sejumlah distrik yang menjadi lokasi perkebunan tebu dan bioetanol serta pencetakan sawah baru di Kabupaten Merauke. Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal proyek strategis nasional di sana. *"Hal pokok yang kami temukan selama berkunjung di Merauke ini adalah tidak adanya komunikasi yang baik di tengah masyarakat berkaitan dengan kegiatan PSN. Itulah yang menyebabkan selama ini masyarakat menolak, karena tidak pernah diajak untuk berdialog. Di samping itu juga, penghormatan terhadap hak-hak ulayat kurang diperhatikan. Ini yang kami temukan,"* kata Prabianto. Prabianto mengatakan komisioner Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke, guna meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait sejumlah temuan dan catatan dari kegiatan proyek strategis nasional di sana. Setelah pertemuan itu, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan terhadap perencanaan dan regulasi PSN. Terutama dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal (https://jubi.id/animha/2025/komnas-ham-temukan-sejumlah-pelanggaran-dari-proyek-strategis-nasional-di-merauke/).

28 Juni

Puluhan mahasiswa Papua bersama Solidaritas Rakyat Makassar Peduli Raja Ampat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Flyover, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat sore (27/06). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran investor asing di tanah Papua, khususnya penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel

oleh PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WITA dan memulai orasi pukul 15.10 WITA. Aksi berlangsung damai dan selesai pada pukul 17.00 WITA. Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan "Tanah Papua Bukan Tanah Investor" dan "Cabut IUP PT Gag Nikel dari Raja Ampat". Koordinator lapangan aksi, Wiani Kogoya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas perampasan ruang hidup masyarakat adat dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi akibat aktivitas industri ekstraktif. Mereka menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mencabut izin usaha pertambangan nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat (https://jubi.id/rilis-pers/2025/mahasiswa-papua-dan-rakyat-makassar-gelar-aksi-tolak-tambang-nikel-di-raja-ampat/).

10 Juli

- Ketua kelompok kerja atau Pokja Adat MRP, Raymond May mengatakan penambangan nikel di kawasan cagar alam Cycloop di Kabupaten Jayapura, Papua berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk, apabila wacana itu benar-benar terlaksana. Pernyataan itu disampaikan Raymond May berkaitan dengan isu rencana penambangan nikel di kawasan Cycloop yang diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir. Katanya, apabila penambangan nikel dilakukan di kawasan Cycloop, dampaknya tidak hanya mengancam ruang hidup masyarakat, juga kelestarian alam. Sebab, Cycloop merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dan kawasan ini juga menjadi kawasan cagar alam lindung. "*Gunung Cycloop ini rumah bagi habitat bebagai species tumbuhan, hewan misalnya burung cenderawasih, kasuari, kakatua, kus-kus hutan, kangguru pohon, mamalia serta reptil endemik Papua dan merusak lingkungan. Kalau tidak dilindungi semua ini akan punah,*" kata Raymond May kepada Jubi melalui panggilan telepon, Kamis (10/07) (https://jubi.id/mamta/2025/mrp-tambang-di-kawasan-cycloop-berpotensi-timbulkan-berbagai-dampak-buruk/).

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Greenpeace Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua Merauke mengeluarkan pernyataan bersama, bahwa Tanah Papua bukan Tanah kosong, hentikan perampasan wilayah adat di Papua, hentikan Proyek Strategis Nasional. Pernyataan itu dikeluarkan terkait kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Special Rapporteur On The Rights Of Indigenous Peoples), Albert K. Barume ke Tanah Papua untuk melihat dan mendengar masukan dari para korban pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, kerusakan hutan dan perampasan wilayah adat yang berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari di Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P3W) Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada 4-5 Juli 2025, Albert bertemu langsung dengan para korban pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat dan korban perampasan wilayah adat di Tanah Papua. Seperti Masyarakat Adat Suku Malind Anim di Kabupaten Merauke, Suku Awyu di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Suku Mairasi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat Suku Biak dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, perwakilan korban kekerasan dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dan Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Berbagai kesaksian disampaikan oleh para korban atas kejahatan negara terhadap eksploitasi sumber daya alam, penghilangan dan perusakan hutan, penghancuran tempat penting dan mata pencaharian tradisional, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini di tanah Papua (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/utusan-pbb-temui-korban-perampasan-tanah-adat-dan-kerusakan-hutan-di-papua/).

12 Juli

- Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik menyatakan ada kepentingan politik ekonomi dibalik tambang nikel di Indonesia. Katanya, itulah sebabnya tambang nikel marak di Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur. Hal itu dikatakan

Kiki Taufik Greenpeace saat menjadi narasumber di webinar yang diselenggaralan Dewan Gereja Papua dan STT Walter Post Sentani secara daring, Jumat (11/07). Menurut Kiki Taifuk, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada 2022, bisa dilihat persebaran tambang nikel. Konsesi nikal ada di Sulawesi, Maluku dan hingga Papua. *"Di Sulawesi Tenggara ada sekitar 193.000 hektare dengan jumlah permit 126 permit dan di Papua Barat ada 22.636 hektare dengan 2 permit kemudian di Papua ada satu permit dengan 16.000 hektare. Totalnya hampir 600.000 dilihat dengan 234 permit,"* kata Kiki Taufik. Ia mengatakan, penambangan nikel berkembang begitu cepat pada tahun berikutnya. Kini hampir 933.727 hektare dari yang awalnya 600.000 hektare, dan sebagian besar di wilayah Timur Indonesia terutama, di Sulawesi Tenggarang, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Tanah Papua, terutama di bagian 'kepala burung' (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/aktivis-greenpeace-ada-kepentingan-politik-ekonomi-dibalik-tambang-nikel-di-indonesia/).

- Kemungkinan munculnya perizinan baru penambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya patut diwaspadai. Sebab, hingga kini belum ada surat keputusan atau SK resmi berkaitan dengan empat izin yang dicabut Kementeriam Energi dan Sumber Daya Mineral. Pernyataan itu disampaikan Kiki Taufik dari Greenpeace dalam webinar tambang nikel raja Ampat dari perspektif teologi, ekologi, ekonomi politik dan sosial budaya yang digelar Dewan Gereja Papua dan Pusat Studi HAM Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura, secara daring, Jumat (11/07). "Selain itu, ada perusahaan-perusahaan yang izinnya dibatalkan pemerintah, akan tetapi masih disengketakan di pengadilan. Perusahaan ini adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Waigeo Mineral Mining dan PT Eka Kurnia Baru dan semua ada di Pulau Waigio," kata Kiki Taufik. Menurut Taufik, semua izin yang disebut telah dicabut dan dibatalkan memungkinkan untuk diterbitkan kembali. Sebab, ada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang besar dibalik itu. *"Orang-*

orang Jakarta dan orang-orang elit di daerah yang punya kepentingan besar. Banyak dari wilayah penambangan nikel saat ini atau yang mempunyai potensi di Raja Ampat berada dalam kawasan hutan negara. Secara kontroversial tetap dimungkinkan bagi perusahaan tambang nikel untuk melanjutkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH," ujarnya (https://jubi.id/domberai/2025/kemungkinan-munculnya-perizinan-baru-di-raja-ampat-patut-diwaspadai/).

15 Juli

Masyarakat adat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, tengah gelisah melihat tanah ulayat mereka secara tiba-tiba "diserbu" beragam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Mereka mencoba mempertahankan akses terhadap tanah ulayat dan segala hasil alam di sana, namun kelabakan karena harus berpacu dengan hasrat menggebu pemerintah membuka hutan demi mewujudkan proyek lumbung dan energi di Merauke. Pertengahan Juni 2025, masyarakat di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dihebohkan oleh berdirinya satu papan pengumuman di sana. Pada Sabtu (14/06), papan pengumuman terbuat dari kanvas vinil cetak digital selebar 1,5 meter itu dipaku ke papan yang menyatukan dua balok kayu yang menjadi tiang setinggi 2 meter. Warna latar kanvas vinil itu hijau, dengan tulisan berwarna kuning, khas tentara.

"TANAH MILIK TNI AD KODAM XVII CENDERAWASIH PENGAWASAN KORAMIL 1707- 02/MERAUKE KODIM 1707 MERAUKE KOREM 174/ATW,

Alas Hak: Surat Pelepasan Adat Tanggal 5 Juni 2025, Luas Lahan : 100 Hektare"

Papan pengumuman itu ditancapkan di pinggir jalan, bersebelahan dengan papan pengumuman lain yang tampak usang dan kecil, dengan papan tripleks yang dipaku di balok kayu kecil yang menjadi tiangnya. Papan pengumuman baru itu terlihat kontras dengan papan pengumuman kecil di sana yang berisi tulisan "DUSUN MUCKAI, MILIK MARGA

KWIPALO". Salah satu pemilik tanah ulayat Marga Kwipalo, Vincent Kwipalo menuturkan kemunculan papan pengumuman "TNI AD" di tanah ulayatnya itu. Ia juga membenarkan bahwa papan pengumuman kecil bertuliskan "DUSUN MUCKAI, MILIK MARGA KWIPALO" adalah papan pengumuman yang dipasang warga dusunnya. "Benar, itu kami, Marga Kwipalo, [yang] punya [hak ulayat atas] dusun [itu]," ujar Kwipalo. Menurut Kwipalo, papan pengumuman "TNI AD" itu adalah adalah papan pengumuman kedua yang dipasang aparatur negara terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menuturkan papan pengumuman pertama dipasang sekitar pertengahan Mei 2025, diikuti dengan masuknya sejumlah alat berat seperti ekskavator yang lantas merobohkan pepohonan di sana. Kwipalo yang pada Mei 2025 tengah berada di Merauke pun segera kembali ke Distrik Jagebob. *"[Ketika saya sampai, ternyata] ada alat berat yang masuk ke dalam dusun kami. Pohon-pohon yang ada dirobohkan, jaraknya 200 hingga 300 meter dari papan informasi yang ditancapkan [terkait PSN itu]. Operator dan alat berat [di sana] kami hentikan, kamp [mereka] kami bongkar,"* kata Kwipalo. Usai insiden itu, Kwipalo kembali ke Merauke, dan membahas penancapan papan pengumuman PSN pada Mei lalu bersama Forum Solidaritas Merauke. Forum itu beranggotakan para pemilik hak ulayat masyarakat adat di Merauke yang resah karena tanah ulayat mereka dijadikan lokasi pelaksanaan PSN (https://jubi.id/mendalam/2025/gelisah-masyarakat-adat-merauke-hadapi-serbuan-psn/).

21 Juli

Forum Masyarakat Peduli Cycloop menggelar unjuk rasa damai menolak penambangan nikel dikawasan cagar alam Cycloop, seperti isu yang berkembang beberapa waktu terakhir. Unjuk rasa berlangsung di Kantor Bupati Jayapura, Papua di Gunung Merah, Distrik Sentani, Senin (21/07). Puluhan demonstran itu ditemui Bupati Jayapura, Yunus Wonda dan Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard S. Yocku. Yunus Wonda mengatakan, pihaknya juga mengikuti isu rencana penambangan di kawasan Cycloop itu. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura sendiri belum tahu lokasinya, dan tidak pernah ada pihak yang datang membicarakan hal itu dengan pemerintah daerah. Katanya,

Pemerintah Kabupaten Jayapura pun memiliki sikap yang sama dengan masyarakat adat, menolak rencana penambangan nikel di kawasan Cycloop. *"Ketegasan kami terhadap [isu] tambang nikel hari ini, saya bupati dan wakil bupati, kami berdua ini tidak tahu barang ini. Kami ikuti di media, tapi kan pertama barang ini [kami] tidak pernah tahu dan tidak melihat ada di mana [lokasinya]. Selama itu rakyat menolak, mau tambang apa, mau apa saja, kami pasti akan ikut menolak,"* kata Wonda (https://jubi.id/lingkungan/2025/forum-masyarakat-peduli-cycloop-berunjuk-rasa-tolak-penambangan-nikel/).

21 Agustus

Sidang ke-III perkara Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memasuki agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, Selasa (19/08). Sidang ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya, Presiden justru menegaskan rencana ekspansi pembukaan jutaan hektar lahan pangan, termasuk di Papua, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pernyataan ini kian mempertegas arah kebijakan pemerintah yang tidak melakukan evaluasi kritis terhadap kegagalan program Food Estate sebelumnya, dan justru mengabaikan fakta kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat adat, serta terancamnya kedaulatan pangan lokal. Permohonan judicial review yang diajukan pada 4 Juli 2025 oleh delapan organisasi masyarakat sipil, 1 individu, dan 12 korban PSN, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, serta akademisi, secara khusus menggugat norma-norma dalam UU Cipta Kerja yang memberi legitimasi pada "Kemudahan dan percepatan PSN". Ketentuan tersebut tersebar di berbagai sektor hukum, antara lain dalam UU Kehutanan, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU Penataan Ruang, serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara substansi, norma-norma ini dinilai menimbulkan kerancuan hukum dan membuka celah pembajakan regulasi. Frasa "kemudahan dan percepatan PSN" bersifat abstrak dan multitafsir, sehingga memberi

kewenangan berlebihan kepada pemerintah untuk meloloskan proyek besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, ketentuan mengenai kemudahan PSN juga berimplikasi pada penyalahgunaan konsep "kepentingan umum" yang seharusnya dimaknai secara ketat (https://jubi.id/rilis-pers/2025/korban-psn-menguji-legitimasi-konstitusional-proyek-strategis-nasional/).

22 Agustus

Gerakan Selamatkan Manusia Tanah & Hutan Malamoi atau Gerakan Malamoi bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moi Maya menggelar aksi simbolik di depan gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (21/08). Dalam aksi tersebut, para pemuda adat membentangkan spanduk bertuliskan "Penjajahan Sistematis Nasional" sebagai bentuk penolakan keras terhadap proyek-proyek PSN yang menurut mereka hanyalah kedok untuk merampas tanah adat, menghancurkan hutan, dan menindas masyarakat adat Papua dan di seluruh Indonesia. Juru Kampanye Gerakan Malamoi, Fiktor Klafiyu menegaskan bahwa proyek-proyek PSN yang digadang-gadang pemerintah pusat justru membawa kehancuran, bukan kesejahteraan. Menurutnya Tulisan Penjajahan Sistematis Nasional bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan yang mereka alami. *"Proyek-proyek PSN telah menjadi mesin penghancur kehidupan kami. Masyarakat adat Papua Atas nama pembangunan, tanah kami dirampas, hutan kami dibabat, sungai kami dicemari, dan ruang hidup kami dihancurkan dan manusia Papua di perkosa di tembok di bunuh ketika masyarakat adat berbicara,"* kata Fiktor Klafiyu. Menurutnya, narasi pembangunan yang dipaksakan negara selalu menggambarkan Papua sebagai wilayah "tertinggal" yang harus didorong maju dengan investasi dan proyek nasional. Padahal, kata dia, pandangan itu keliru dan merendahkan martabat orang asli Papua (OAP) (https://jubi.id/domberai/2025/pemuda-adat-moi-tolak-proyek-psn-di-kek-sorong/).

16 September

Perampasan tanah masyarakat adat atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, penyerobotan tanah adat terjadi di tanah masyarakat adat Yei di Distrik Jagebob, Merauke, oleh PT Murni Nusantara Mandiri, bagian dari konsorsium yang menggarap PSN kebun tebu. Hal itu disampaikan Ketua LBH Papua-Merauke, Teddy Wakum melalui siaran pers Selasa. 16 September 2025. Masyarakat adat Yei, Vincen Kwipalo, menyaksikan langsung ekskavator dan buldoser yang membuka hutan adatnya untuk membangun akses jalan. Pada Senin, 15 September 2025 siang, Vincen dan kerabatnya berusaha menghentikan aktivitas perusahaan tersebut. *"Pemilik ulayat selama ini teguh mempertahankan tanah adat dan sudah berkali-kali menyatakan tidak akan melepaskan tanah. Namun orang-orang perusahaan terus datang. Itu sudah masuk kategori intimidasi, dan hal tersebut diperparah dengan penyerobotan tanah adat yang terjadi belakangan ini,"* kata Teddy Wakum, pendamping hukum Vincen Kwipalo dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke melalui siaran pers Selasa, 16 September 2025. PT MNM mengantongi izin konsesi seluas 52.700 hektare, hampir setara dengan luas Provinsi Jakarta. Saat ini, perusahaan tengah membangun jalan dari area konsesi perkebunan ke arah Distrik Jagebob XI, yang melintasi tanah marga Kwipalo. Berdasarkan pemantauan berkala yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, perusahaan perkebunan ini secara keseluruhan telah membongkar 4.912 hektare per Agustus 2025. Pada 2 September lalu, berlangsung sebuah pertemuan masyarakat adat yang juga dihadiri perwakilan perusahaan dan pemerintah. Vincen Kwipalo, kerabat, dan pendampingnya menghadiri pertemuan itu karena terpaksa setelah dijemput oleh pegawai perusahaan (https://jubi.id/animha/2025/hentikan-perampasan-tanah-adat-atas-nama-psn-merauke/).

23 September

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengevaluasi kembali pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Betala Rakyat, Franky Samperante dalam siaran pers tertulisnya yang diterima Jubi, Selasa (23/09). Fraky Samperante mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato sidang kenegaraan dan beberapa pertemuan menyampaikan ungkapan serakahnomics. Menyoroti keberadaan dan aktivitas bisnis korporasi yang dilandasi keserakahan, melakukan permainan manipulasi, tidak adil dan mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan rakyat. Presiden menyebut mereka sebagai vampir ekonomi, parasit yang menghisap darah rakyat, untuk memperoleh sumber daya dalam jumlah yang berlebihan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pidato retorik presiden nampaknya keras dan hendak mengingatkan prinsip perekonomian sebagaimana Konstitusi UUD 1945 Pasal 33 (https://jubi.id/rilis-pers/2025/yayasan-pusaka-bentala-rakyat-minta-presiden-evaluasi-psn-di-merauke/).

03 Oktober

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto diminta segera mencabut kebijakan Proyerek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang telah melegalkan PT. Murni Nusantara Mandiri menyerobot tanah adat marga Kwipalo. Permintaan itu disampaikan Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKP KC Sinode Tanah Papua, JPIC OFM Papua, Elsham Papua, Yadupa, YLBHI, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, Kontras Papua melalui siaran pers tertulisnya, Jumat (03/10). *"Presiden Republik Indonesia segera cabut kebijakan Proyek Strategis Nasional dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024 yang melegalkan PT. Murni Nusantara Mandiri melakukan tindak pidana penyerobotan dan pengelapan tanah adat marga kwipalo (Pasal 385 ayat (1) KUHP),"* kata Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Dalam siaran persnya. Koalisi juga meminta Kapolri segera memerintahkan Kapolres Merauke menghentikan praktik kriminalisasi tehadap Vinsen Kwipalo dan keluarga, yang bertindak sebagai pembela HAM untuk melindungi tanah adat marga Kwipalo. *"Ketua Komnas HAM RI dan Kepala Kantor Komnas*

HAM RI Perwakilan Papua segera lindungi Bapak Vinsen Kwipalo sebagai Pembela HAM dari ancaman Kriminalisasi yang dilakukan oleh Karyawan dan PT. Murni Nusantara Mandiri," seperti dikutip dari siaran pers Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia. Koalisi juga meminta Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke segera memerintahkan PT. Murni Nusantara Mandiri menghentikan tindak pidana penyerobotan dan pengelapan tanah adat marga Kwipalo (Pasal 385 ayat (1) KUHP) dan melindungi Vinsen Kwipalo dari ancaman kriminalisasi sesuai perintah Pasal 21, Perda Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013 (https://jubi.id/rilis-pers/2025/presiden-diminta-cabut-kebijakan-psn-yang-menyerobot-tanah-adat-marga-kwipalo/).

07 Oktober

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Merauke mendatangi Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS, Selasa (07/10), guna menyampaikan pandangan kritis dan aspirasi terkait masalah dan dampak proyek strategis nasional atau PSN terhadap masyarakat adat di Papua Selatan. Pengurus Cabang Merauke dan sejumlah pengurus pusat PMKRI diterima oleh pimpinan dan anggota MRPS, kemudian dilakukan rapat dengar pendapat di kantor Majelis Rakyat Papua Selatan di Jalan Raya Mandala, Merauke. Ketua PMKRI Cabang Merauke, Kristianus Samkakai menjelaskan bahwa pihaknya mendatangi dan melakukan rapat dengar pendapat dengan MRPS, karena adanya keresahan dan beban moral dari organisasi tersebut terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua Selatan, terlebih khusus yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. *"Terlebih khusus food estate atau ketahanan pangan. Kami melihat dinamika yang terjadi di Papua Selatan, masyarakat banyak melakukan penolakan terhadap PSN. Kami sebagai bagian dari masyarakat, datang untuk mempertanyakan sikap MRPS berkaitan dengan apa yang sudah terjadi [dampak negatif PSN terhadap masyarakat adat],"* kata Kristianus kepada wartawan (https://jubi.id/animha/2025/pmkri-sampaikan-kritik-soal-proyek-strategis-nasional-ke-mrps/).

08 Oktober

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembukaan lahan secara masif di Papua Selatan,khususnya di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel, untuk Proyek Strategi Nasional Pangan dan Energi. Hal ini dilakukan dengan menurunkan status hutan lindung serta berdampak destruktif terhadap ekosistem hutan dan hak-hak masyarakat adat. Keputusan ini berbanding terbalik dengan janji iklim di pertemuan PBB 23 September lalu. "*Proyek serakah nasional ini merupakan wajah kolonialisme, bukan hanya terhadap masyarakat adat Papua, tetapi juga ekologi di Papua. Ini adalah kejahatan bukan cuma pada masyarakat adat, tapi juga generasi mendatang,"* ujar Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional. Ekspansi agrikultur dan energi ini meliputi proyek pembukaan lahan sawah seluas 1 juta hektare di Merauke, peternakan seluas 284.745 ha, perkebunan tebu seluas ±633.000 ha di Merauke untuk produksi bioetanol, serta perkebunan kelapa sawit seluas ±382.759 ha (termasuk ±245.436 ha di Boven Digoel) untuk memproduksi biodiesel (B50). Rencana tersebut termaktub dalam revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan. Untuk memfasilitasi ekspansi di atas, termasuk PSN Pangan dan Energi, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan (SK 430/2025 dan SK 591/2025) yang secara masif meregulasi perubahan fungsi hutan dan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Merauke, Boven Digul dan Mappi. Secara total, program ini melibatkan perubahan peruntukan alias pelepasan kawasan hutan sebesar 543.575 ha dan perubahan fungsi kawasan hutan sebesar 175.009 ha. Hutan lindung juga tidak lolos dari penurunan fungsi kawasan, membuat area tersebut rentan diokupasi oleh korporasi (https://jubi.id/rilis-pers/2025/proyek-food-energy-estate-terabas-hutan-lindung-dan-ancam-masyarakat-adat/).

14 Oktober

Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante mengatakan Proyek Strategis Nasional atau PSN yang saat ini dibuka di beberapa daerah di Tanah Papua, sebenarnya upaya

kolonialisme memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komoditas ekspor. Hal itu disampaikan Franky Samperante pada webinar 'Memahami PSN, Dampaknya bagi Masyarakat Adat, dan Kerja Sama Solidaritas' yang diadakan Pusat Studi HAM, Sosial, dan Pastoral Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura (PSHSP-STT WPJ) bersama Dewan Gereja Papua melalui Zoom Meeting pada Kamis (09/10). *"Isu PSN yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua, seperti Merauke, Nabire, Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong, dan beberapa tempat lainnya mengabaikan hak-hak masyarakat adat,"* kata Samperante yang membahas 'Update PSN Merauke'. Ia mencontohkan, sejak masuknya PSN di Merauke, Papua Selatan, masyarakat adat Malind khususnya, sudah terpinggirkan akibat deforestasi proyek itu. *"Padahal bagi masyarakat adat di Papua kerusakan satu pohon saja akan memukul secara psikis, karena mereka dengan lingkungan relatif kuat, tetapi negara sering mengabaikan itu,"* ujarnya (https://jubi.id/mamta/2025/franky-samperante-psn-upaya-kolonialisme-memanfaatkan-sumber-daya-alam-papua/).

22 Oktober

Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, langkah itu tak berarti penghentian ambisi lama membuka jutaan hektare lahan di selatan Papua. Pemerintah justru meluncurkan program baru yang serupa, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan potensi dampak lingkungan yang tak kalah besar. Kebijakan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, yang mencabut sejumlah proyek dari daftar PSN, termasuk kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke. Dalam dokumen tersebut, pemerintah secara eksplisit menandai proyek itu dengan keterangan "dihapus". Namun, pada saat yang sama, beleid itu juga menambahkan sederet proyek dan program strategis baru. Salah satunya adalah Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan. Program ini berlangsung di wilayah yang sama dengan lokasi proyek sebelumnya, bahkan lebih diperluas

(https://jubi.id/mendalam/2025/ganti-baju-psn-papua-selatan-proyek-dihapus-hutan-tetap-terancam/).

06 November

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Rosita Dewi menilai pengakuan atau rekognisi terhadap masyarakat adat di Papua khususnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan masih bersifat administratif dan belum substantif. Pernyataan itu disampaikan Rosita Dewi saat webinar daring, kolaborasi pusat riset politik BRIN dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Kamis (06/11). Rosita mengatakan, proyek-proyek nasional di merauke seperti Merauke Integrated Food Estate (MIFE), Merauke Energy Estate, hingga Proyek Strategis Nasional atau PSN untuk swasembada gula dan bioetanol, telah memperluas penguasaan lahan tanpa menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. *"Pemerintah mengerahkan sumber daya alam, termasuk aparat militer untuk mendukung PSN. Namun pendekatan yang digunakan lebih menekankan kontrol daripada rekognisi terhadap masyarakat,"* kata Rosita. Menurut Rosita, kondisi tersebut sebagai paradoks pembangunan dimana kebijakan yang seharusnya menjamin hak masyarakat ada malah menyingkirkan masyarakat. Katanya, dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus nomor 21 Tahun 2001 sebenarnya sudah memberikan jaminan pengakuan terhadap hak-hak adat. Namun revisi kedua UU Otsus pada 2021, justru menunjukkan semangat desentralisasi bukan pemberdayaan daerah (https://jubi.id/animha/2025/pengakuan-terhadap-masyarakat-adat-papua-dianggap-bersifat-administratif/).

07 November

Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil (04/11). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dihadapan peserta dari delegasi berbagai negara dan organisasi internasional, menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan, *"Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis*

masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan," ujarnya. Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal, kata Raja Juli. Ibarat pepatah jauh panggang dari api, praktiknya paradigma dan otoritas negara dalam tata kelola pengaturan dan pengelolaan tanah dan hutan belum sepenuhnya berubah dan berpihak pada pemajuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta pengelolaan hutan secara adil berkelanjutan. Tanah dan hutan masih dipandang sebagai objek dan alat produksi ekonomi komersial. Hal ini terindikasi dari perubahan pengaturan rezim kehutanan dan tata ruang yang menempatkan kawasan hutan lindung dan konservasi kurang dari 40 % dan sisanya untuk kepentingan ekonomi ekstraktif. Di Provinsi Papua Selatan, daerah otonomi baru ini dipaksa merevisi RTRW Provinsi Papua Selatan guna memperluas kawasan budidaya (10.231.694 ha) untuk mengakomodasikan perluasan proyek ekstraktif atas nama Proyek Strategis Nasional. Sisanya Kawasan Lindung (3.811.438 ha) yang dapat berubah sewaktu-waktu (https://pusaka.or.id/news/jauh-panggang-dari-api-negara-tidak-serius-dalam-memenuhi-memajukan-menghormati-dan-melindungi-hak-masyarakat-adat/).

17 November

Temu ilmiah nasional yang digelar Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISMEI Wilayah XI Maluku-Papua membahas ketimpangan pembangunan dan dampak PSN terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Kegiatan ini digelar di Kota Jayapura, Papua, Senin-Rabu (17 November 2025-19 November 2025). Kali ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, yang menjadi tuan rumah. Ketua Panitia, Niel Lantipo mengatakan Kegiatan itu melibatkan sekitar 10 universitas dari Maluku, Maluku Utara, hingga Papua, dan menjadi ruang kajian ilmiah bagi mahasiswa untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pusat. *"Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terkait dengan ekonomi di pelosok lebih khusus lagi dengan adanya PSN ini*

dan dampaknya bagi masyarakat di bagian Indonesia Timur," kata Lantipo. Menurutnya, temu ilmiah ini sebagai forum diskusi bersama untuk membahas ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur. ISMEI yang hadir dari setiap daerah akan mengkaji dampak PSN, kemudian membuat brekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. *"Karena dari temuan ilmiah ini, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah, untuk ditindaklanjuti sebagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kita lihat PSN yang banyak di Papua ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat,"* ujarnya (https://jubi.id/ekonomi/2025/temu-ilmiah-ismei-maluku-papua-bahasa-dampak-psn/).

08 Desember

Masyarakat adat Malind Maklew dari Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan melakukan aksi tanam Salib Merah dan sasi adat sebagai bentuk larangan terhadap semua aktivitas PT. Johonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad atau yang biasanya dikenal sebagai Haji Isam. Aksi penanaman Salib Merah oleh masyarakat adat dilakukan pada senin (15/12), di beberapa titik yang telah digusur paksa dan diserobot oleh perusahaan untuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer, cetak sawah baru, pembangunan pelabuhan serta pembangunan bandar udara yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke. Sebelumnya pada 5 Desember 2025, masyarakat adat Papua korban PSN Merauke di Wanam seperti Marga Kahol, Basik-Basik, Moiwend, Balagaize, Gebze dan marga-marga lainya telah melakukan penancapan Salib Merah di area yang telah digusur, tepatnya di perempatan jalan yang menghubung kampung Wanam, Wogikel, Nakias dan Dermaga yang baru dibangun. *"Dalam aksi tersebut masyarakat adat membacakan pernyataan sikap penolakan dan meminta agar perusahaan segera hentikan semua aktivitas di wilayah adat,"* tulis LBH Papua Merauke dalam siaran persnya, Kamis (18/12). LBH Papua Merauke menyatakan, pelaksanaan PSN Merauke telah berlangsung lebih dari satu tahun, dan menimbulkan berbagai kontradiksi juga luka serius yang mencemaskan dan merugikan masyarakat adat. Terjadi kekerasan dan pemaksaan, penghancuran dan penghilangan sumber pangan, mata

pencaharian tradisional, kerusakan lingkungan dan kehilangan hutan dengan ekosistem penting hingga belasan ribu hektar seperti yang dialami masyarakat adat di Wanam dan beberapa wilayah lainya seperti di Nakias, Jagebob dan 75 Keluarga di Kampung Soa, Tanah Miring (https://jubi.id/rilis-pers/2025/masyarakat-adat-malind-tanam-salib-merah-sebagai-bentuk-larangan/).

11 Desember

Laporan dugaan tindak pidana perkebunan dan penyerobotan tanah adat yang dilayangkan Vincen Kwipalo, pejuang lingkungan dan Masyarakat Adat Yei, terhadap PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) kini memasuki tahap pemeriksaan bukti dan saksi. Hari ini, Vincen Kwipalo kembali datang ke kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Tim kuasa hukum turut menghadirkan dua orang, GC dan W, sebagai saksi peristiwa. Ditemui setelah melalui pemeriksaan selama 6 jam, Vincen Kwipalo mengungkapkan, *"Saya datang, karena ruang kehidupan kami hancur dirusak oleh PT MNM. Area yang diserobot perusahaan luasnya sudah hampir 48 hektare. Hutan tersebut tidak hanya hak saya pribadi, tapi juga milik anak dan cucu-cucu saya. Saya tidak ingin meninggalkan bencana bagi generasi berikutnya. Polri harus segera memberikan keadilan bagi kami dengan menghukum perusahaan."* Kuasa hukum Vincen Kwipalo dari Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay, mendesak Kepolisian serius mengusut perkara ini demi menegakkan hukum dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. *"Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini, permintaan kami tidak muluk-muluk. Kami ingin Polri segera menindaklanjuti kasus Vincen Kwipalo dengan memanggil pimpinan PT MNM untuk mempertanggungjawabkan tindakan penyerobotan tanah yang mereka lakukan. Ini adalah masalah yang penting dan mendesak untuk penegakan hukum juga pelindungan hak asasi manusia para korban PSN."* Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam tim kuasa hukum Vincen Kwipalo, Sekar Banjaran Aji, menambahkan, *"Duka atas bencana banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi kita untuk berhenti merusak hutan. Kita tentu tidak mau bencana ekologis kembali terulang. Penegak hukum punya fungsi sentral untuk*

menjaga hutan dengan menindak tegas pelaku perusakan hutan. Kasus dugaan penyerobotan tanah adat oleh PT MNM dapat menjadi panggung pembuktian, apakah Polri benar-benar mampu menegakan hukum dan melindungi hutan Papua untuk mencegah bencana berikutnya?" (https://pusaka.or.id/news/masyarakat-adat-dari-merauke-datang-ke-bareskrim-polri-untuk-beri-keterangan-dugaan-tindak-pidana-perkebunan-pt-mnm/).

17 Desember

Dalam pengarahan ke kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (16/12), Prabowo mempertegas "daerah Papua harus ditanam kelapa sawit untuk BBM, tebu dan singkong untuk etanol" semua bertujuan demi swasembada energi. Presiden Prabowo tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera, akibat dari deforestasi masif bisnis ekstraktif perkebunan sawit dan kehutanan, telah mengakibatkan 1.030 orang meninggal, 205 orang hilang, dan sekitar 7 ribu orang terluka (data BNPB hingga 16 desember 2025). Bencana Sumatera juga mendatangkan kerugian ekonomi mencapai Rp. 68,8 triliun dan kehilangan harta benda dan infrastruktur sosial ekonomi. Pernyataan "Papua harus ditanami" mencerminkan pendekatan top-down yang menafikan hak menentukan nasib sendiri atas ruang hidup. Papua kembali diposisikan sebagai objek kebijakan nasional dan mengabaikan hak masyarakat adat. Pernyataan tersebut mengandung logika kolonial: negara paling berkuasa menentukan dan mengubah kehidupan sosial rakyat dan lingkungan alam di Tanah Papua, seolah-olah Papua adalah ruang kosong yang menunggu diisi proyek negara. "*Demi ambisi swasembada pangan dan energi, Prabowo menyiapkan bencana ekologis bagi Papua. Untuk memenuhi ambisi Prabowo jutaan hutan alam Papua harus hilang untuk ditanam beras, sawit, tebu dan singkong. Prabowo juga mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat sebagai pemegang kedaulatan Tanah Papua,"* tegas Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia (https://jubi.id/rilis-pers/2025/presiden-prabowo-menyiapkan-bencana-bagi-papua/).

BAB III

HARAPAN PELAYAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS

(Oleh Bernardus B. Koten)

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari pembacaan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua sepanjang tahun 2025. Berbagai peristiwa tersebut—mulai dari dinamika politik lokal, perdebatan mengenai implementasi Otonomi Khusus, munculnya berbagai kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah, hingga respons masyarakat terhadap kebijakan pembangunan nasional—tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa tersebut membentuk suatu rangkaian dinamika yang saling berkaitan dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan.

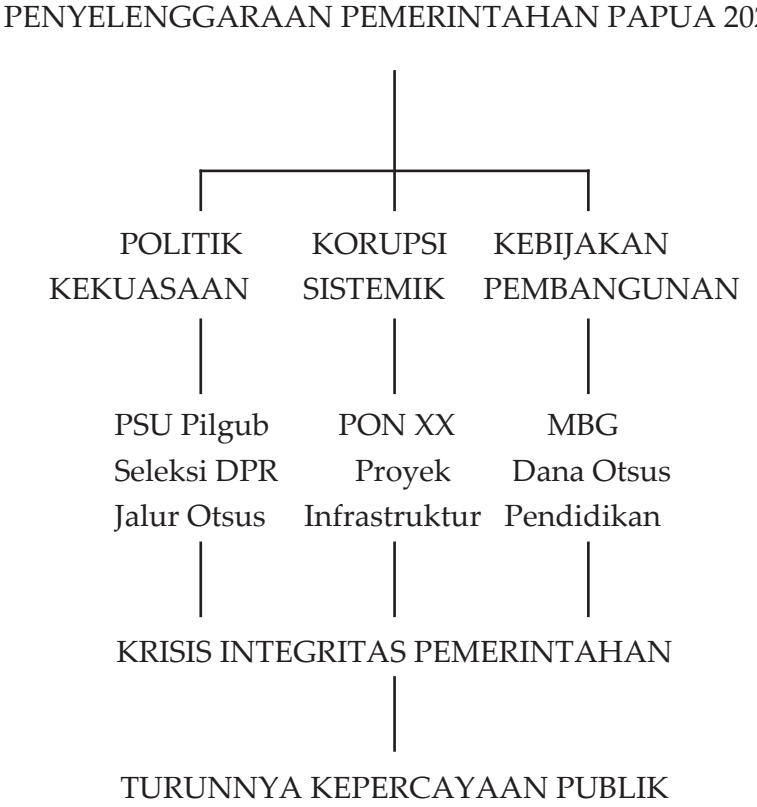
Untuk membantu membaca keterkaitan tersebut secara lebih sistematis, tulisan ini menggunakan sebuah model pemetaan analitis yang merangkum berbagai peristiwa dalam tiga bidang utama: dinamika politik kekuasaan, praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta polemik kebijakan pembangunan yang berhadapan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ketiga bidang ini saling berkelindan dan pada akhirnya memperlihatkan satu persoalan mendasar, yakni krisis integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui pemetaan tersebut dapat dilihat bahwa persoalan pemerintahan di Tanah Papua tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan pembangunan atau ketersediaan anggaran, tetapi juga dengan kualitas kepemimpinan publik, mekanisme akuntabilitas, serta relasi antara negara dan masyarakat. Ketika integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan melemah, berbagai kebijakan publik yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpotensi kehilangan orientasi dasarnya sebagai pelayanan kepada publik.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut, tulisan ini kemudian menguraikan empat bidang refleksi utama yang dianggap paling menonjol dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua. Pertama, dinamika implementasi Otonomi Khusus yang sejak awal diharapkan menjadi instrumen politik dan hukum untuk memperbaiki ketimpangan pembangunan di Papua. Kedua, persoalan korupsi dan krisis integritas yang terus muncul dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan daerah. Ketiga, polemik yang muncul dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional yang memunculkan berbagai tanggapan di masyarakat Papua. Keempat, refleksi etis mengenai makna pelayanan publik yang berintegritas sebagai dasar moral bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat bagian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua, sekaligus membuka ruang refleksi mengenai pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik. Melalui refleksi ini, harapan terhadap hadirnya pelayan publik yang berintegritas tidak hanya dipahami sebagai tuntutan moral, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Diagram Konseptual



Dinamika Otonomi Khusus Papua

Sejak tahun 2022, wilayah Papua mengalami perubahan administratif melalui pembentukan beberapa daerah otonom baru. Provinsi Papua dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sementara Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya.

Kebijakan pemekaran wilayah ini memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat Papua. Di satu sisi, pemekaran daerah dipandang sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti perebutan jabatan politik, distribusi anggaran, serta konflik kepentingan di tingkat elite politik lokal.

Secara teoritis, desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dennis A. Rondinelli menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya serta merancang kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat setempat.[1]



Masa Ikatan Mahasiswa Papua saat berunjuk rasa di Depan Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
(Sumber: Liputan6.com)

Namun dalam praktiknya, desentralisasi juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah justru membuka ruang bagi munculnya elite lokal yang memanfaatkan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Catatan kronik sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa proses seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui jalur Otonomi Khusus masih menimbulkan polemik. Proses tersebut bahkan dipertanyakan oleh sejumlah tokoh masyarakat Papua karena dinilai belum

[1] Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema, *Decentralization in Developing Countries* (Washington DC: World Bank, 1983).

sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, implementasi Otonomi Khusus sering kali lebih berfokus pada aspek penyaluran dana dibandingkan realisasi substansi kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang. Agenda penting seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penguatan kewenangan Majelis Rakyat Papua, serta pembentukan partai politik lokal belum sepenuhnya terealisasi.

Praktik Korupsi dan Krisis Integritas Pemerintahan

Selain persoalan politik dan tata kelola pemerintahan, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua. Berbagai kasus yang terungkap sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi di berbagai level pemerintahan daerah.

Dalam perspektif ekonomi politik, korupsi dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Robert Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi cenderung muncul ketika terdapat kombinasi antara kekuasaan yang besar, diskresi yang luas, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas.[2] Hubungan tersebut dirumuskan Klitgaard dalam formula yang terkenal:

Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability

Formula ini menunjukkan bahwa ketika pejabat publik memiliki kendali besar atas sumber daya publik, disertai kewenangan yang luas namun tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi terjadinya korupsi menjadi semakin tinggi.

Beberapa kasus korupsi yang mencuat di Papua menunjukkan gambaran tersebut. Di antaranya adalah dugaan pengalihan dana APBD di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp8,5 miliar, dugaan korupsi dana penyelenggaraan PON XX Papua yang menyebabkan kerugian negara

[2] Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988).

sekitar Rp204,3 miliar, serta berbagai kasus penyalahgunaan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di sejumlah daerah.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran pembangunan disalahgunakan, masyarakat pada akhirnya kehilangan hak mereka untuk memperoleh layanan publik yang layak.

Dalam refleksi sosial yang ditulis dalam buku *Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus*, David Losor OFM menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya melemahkan institusi pemerintahan, tetapi juga memperdalam ketidakadilan sosial dalam masyarakat.[3] Dengan demikian, korupsi pada akhirnya bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan integritas para penyelenggara negara.

Polemik Program Makan Bergizi Gratis

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah pusat meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa program ini diperkirakan menyerap anggaran hingga Rp12 triliun per hari.[4] Selain itu, beberapa pengamat juga menilai bahwa program tersebut perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia serta prioritas kebutuhan masyarakat.[5] Bahkan dalam beberapa kasus, muncul laporan mengenai keracunan makanan yang dialami oleh ribuan anak dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga memunculkan seruan agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap program tersebut.[6]

---

[3] Alexandro Rangga OFM (Ed.)., *Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus* (Sentani: SKPKC Fransiskan Papua, 2025).

[4] "Program Makan Bergizi Gratis Jadi Raksasa Anggaran Rp12 Triliun per Hari," *Kompas*, 9 September 2025, https://money.kompas.com/read/2025/09/09/102321026/program-makan-bergizi-gratis-jadi-raksasa-anggaran-rp-12-triliun-per-hari.

[5] "Perspektif HAM Makan Bergizi Gratis," *Tempo*, https://www.tempo.co/kolom/perspektif-ham-makan-bergizi-gratis-2074252.

[6] "Keracunan Menimpa Ribuan Anak-anak, Program MBG Perlu Dihentikan," *Detik*, https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8142036/keracunan-menimpa-ribuan-anak-anak-program-mbg-perlu-dihentikan.



Aksi demo Solidaritas Pelajar West Papua menolak MBG di Kota Jayapura, Papua.
(Sumber: Jubi)

Di Tanah Papua, program ini menimbulkan berbagai tanggapan. Di sejumlah daerah seperti Yahukimo, Paniai, dan Jayapura, masyarakat serta para pelajar melakukan aksi penolakan terhadap program tersebut. Mereka menilai bahwa kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat Papua adalah pendidikan gratis serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.

Dari perspektif pembangunan, Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses memperluas kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.[7] Oleh karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya dirancang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, respons masyarakat Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis menunjukkan pentingnya dialog yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Refleksi Etis Pelayanan Publik

Kronik penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua sepanjang tahun 2025 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kekurangan program pembangunan, melainkan krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan. Konflik politik, praktik korupsi, dan ketegangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan masih menjadi agenda mendesak bagi masa depan Papua.

---

[7] Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999).

Dalam negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku. Ilhami Bisri menjelaskan bahwa sumber hukum Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, traktat internasional, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.[8] Kerangka hukum tersebut seharusnya menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Dalam kajian administrasi publik modern, tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menekankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Merilee S. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas institusi serta integritas para pelaksana kebijakan di tingkat pemerintahan.[9] Tanpa integritas aparatur negara, berbagai program pembangunan berpotensi gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam perspektif etika sosial, pelayanan publik seharusnya berakar pada komitmen moral untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan sejatinya merupakan proses memperluas kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.[10] Dengan demikian, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada program-program teknokratis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat.

Penutup

Berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Papua menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pembangunan, tetapi juga dengan integritas

---

[8] Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
[9] Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980).
[10] Amartya Sen., *Ibid*.

para penyelenggara negara. Integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadaban. Tanpa komitmen moral yang kuat dari para pejabat publik, berbagai kebijakan pembangunan tidak akan mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak bagi masa depan Tanah Papua.

Daftar Pustaka

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Keagop, Paskalis. *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2005–2010*. Abepura: Suara Perempuan Papua, 2010.

Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.

Kompas. "Program Makan Bergizi Gratis Jadi Raksasa Anggaran Rp12 Triliun per Hari." 9 September 2025. https://money.kompas.com/read/2025/09/09/102321026/program-makan-bergizi-gratis-jadi-raksasa-anggaran-rp-12-triliun-per-hari

Rangga, Alexandro (Ed.). *Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus*. Sentani: SKPKC Fransiskan Papua, 2025.

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: World Bank, 1983.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 1999.

Tempo. "Perspektif HAM Makan Bergizi Gratis." https://www.tempo.co/kolom/perspektif-ham-makan-bergizi-gratis-2074252

Detik. "Keracunan Menimpa Ribuan Anak-anak, Program MBG Perlu Dihentikan."https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8142036/keracunan-menimpa-ribuan-anak-anak-program-mbg-perlu-dihentikan

Kronik Penyelenggaraan Pemerintahan

11 Januari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Karya Kita Anak Budak (Kaki Abu) mengecam keputusan MRP yang dianggap tak melindungi hak-hak OAP terkait kuota OAP pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pernyataan resminya, Leonardo Ijie, direktur LBH Kaki Abu, menegaskan, kebijakan MRP terkait kuota OAP, khususnya individu yang disebut "Nene Tete Papua", tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, keputusan dari MRP PBD dalam memverifikasi 86 orang CPNS di lingkungan provinsi Papua Barat Daya sangat bertolakbelakang dengan amanat UU Otonomi Khusus Papua. *"Kami sangat kecewa dengan sikap MRP. Kebijakannya tidak didukung aturan dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua maupun regulasi KemenPAN RB nomor 320, yang secara tegas mengatur kuota 80 persen untuk OAP,"* ujar Leonardo, Jumat (10/01) (https://suarapapua.com/2025/01/11/dinilai-melanggar-uu-otsus-lbh-kaki-abu-soroti-mrp-pbd-terkait-verifikasi-keaslian-orang-papua/).

06 Maret

Gustaf Kawer, Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua menyatakan Pansel Anggota DPRP Papua jalur pengangkatan tahun 2024 telah melakukan pelanggaran serius, terutama pelanggaran terhadap regulasi maupun peraturan Pansel tentang tahapan. Pelanggaran itu menurut Kawer, terutama pelanggaran regulasi yang mengatur mengenai seleksi yakni UU Otsus No. 2 Thn. 2021, PP No. 106 Thn. 2021 tentang kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Propinsi Papua. Maupun pelanggaran terhadap aturan yang dibuat Pansel terkait dengan seleksi yakni Peraturan Pansel No. 1 Thn. 2024 tentang tahapan, jadwal dan pelaksanaan pengisian Anggota DPR Papua, peraturan Pansel No. 2 Thn. 2024 tentang tata cara seleksi, materi seleksi dan indikator penilaian calon Anggota DPR Papua dan Perpansel No. 3 Thn. 2024 tentang perubahan panitia seleksi Propinsi Papua No. 2 Thn. 2024 tentang tahapan jadwal dan pelaksanaan pengisianAnggota DPR Papua.

Selain pelanggaran regulasi kata Kawer, terdapat indikasi pelanggaran administrasi (maladminitrasi) yang hampir merata dilakukan oleh Panitia Seleksi di 9 Daerah Pengangkatan yang berada di Wilayah Adat Tabi Saereri, baik daerah pengangkatan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori (https://suarapapua.com/2025/03/06/mendagri-dan-gubernur-papua-diminta-mengevaluasi-kinerja-pansel-dprp-jalur-pengangkatan/).

11 Maret

Ketua MRP Provinsi Papua Nerlince Wamuar meminta pemerintah pusat tidak memangkas anggaran Dana Otsus Papua 2025. Dana Otsus Provinsi Papua 2025 telah dipangkas pemerintah pusat Rp 19 miliar sehingga menjadi Rp 881 miliar dari rencana semula Rp 900 miliar. Wamuar mengatakan wilayah Provinsi Papua dengan topografi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi akan sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah dan pihak lain melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. *"Alokasi dana yang lain sudah dipangkas, secara khusus untuk Dana Otsus di Provinsi Papua ini, kami minta dengan hormat agar tidak dipangkas,"* ujarnya di Sentani, Senin (10/03). Wamuar menjelaskan dukungan pelayanan seluruh proses pembangunan melalui alokasi dana yang bersumber dari APBN maupun APBD di daerah masing-masing sangat membantu masyarakat Papua, termasuk melalui Dana Otsus. Kenyataan saat ini, tambahnya, dengan pemotongan melalui Inpres No 1/2025 sebagian besar sumber pembiayaan kegiatan maupun pelaksanaan program pembangunan nantinya tidak berjalan dengan baik (https://jubi.id/mamta/2025/ketua-mrp-minta-dana-otsus-2025-tidak-dipangkas/).

13 Maret

- Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) secara resmi menggugat keputusan panitia seleksi (Pansel) anggota DPR provinsi Papua Barat Daya mekanisme pengangkatan tanggal 17 Februari 2025 nomor 06/PANSEL/DPRPBD/II/2025 tentang

pengumuman penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya terpilih dan calon Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029. Gugatannya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu (12/03). Gugatan dilayangkan Lewi Sadrafle dan Yopi Saflembolo. Lewi Sadrafle adalah calon peserta seleksi dari daerah pengangkatan (Dapeng) kabupaten Sorong dan Yopi Saflembolo dari Dapeng kabupaten Sorong Selatan. Keduanya dalam surat keputusan masuk sebagai calon anggota PAW. Gugatannya terdaftar di PTUN Jayapura dengan perkara nomor 18/G/2025/PTUN.JPR tertanggal 12 Maret 2025 (https://suarapapua.com/2025/03/13/dinilai-langgar-aturan-pbhkp-gugat-pansel-dprp-pbd-ke-ptun-jayapura/).

- Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana Otsus Papua disikapi tegas Meki Nawipa, gubernur provinsi Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bahkan mempertanyakan apa artinya Otsus di Tanah Papua jika dana Otsus dipangkas pemerintah pusat. Dalam Raker dalam rangka laporan Menteri Dalam Negeri terhadap perkembangan empat DOB di Papua dan laporan empat gubernur dari Tanah Papua yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, (13/03), Meki menyampaikan keresahan masyarakat bersama pemerintah daerah seiring kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. *"Undang-undang Otonomi Khusus Papua itu kan berdiri sendiri. Jadi, kalau pangkas dana alokasi umum (DAU), sekarang ini yang terjadi adalah [dana] Otsus juga dipangkas. Selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua, kita sudah kasih Otsus dan kamu silakan jalan. Tetapi hari ini yang terjadi, dana Otsus dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas. Hari ini kami bicara evaluasi dua atau tiga tahun terakhir, kantor tidak bisa kita bangun, semua tidak bisa dibangun. Karena apa arti Otonomi Khusus itu ada kepada kita? Kalau Otonomi Khusus dikasih, ya kasih full sama kita. Jadi kita itu spesial, khusus sama dengan Aceh,"* tuturnya (https://suarapapua.com/2025/03/13/gubernur-papua-tengah-desak-jakarta-tidak-kebiri-otsus/).

22 Maret

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya menggandeng KPK dan dibantu lembaga internasional Jerman, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) melakukan perencanaan dan pengawasan Dana Otsus di Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu kegiatan adalah Training dan Lokakarya Pengawasan Dana Otsus Provinsi Papua Barat Daya yang diadakan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel di Kota Sorong selama tiga hari, Selasa-Kamis (18-20/03). Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya Alfos Kambu mengatakan training dan lokakarya tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan perencanaan Dana Otsus agar lebih tepat sasaran. *"Kami sedang mempersiapkan langkah teknis agar perencanaan Dana Otsus lebih tepat sasaran, ini langkah baru yang belum pernah dilakukan MRP Provinsi Papua Barat Daya sebelumnya, bahkan di lima provinsi lain,"* kata Kambu kepada Jubi di ruang kerjanya Gedung MRP Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (21/03). Kambu mengatakan kegiatan inisiatif tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan Dana Otsus disalurkan secara tepat waktu (https://jubi.id/domberai/2025/perkuat-pengawasan-dana-otsus-mrp-papua-barat-daya-gandeng-giz-dan-kpk/).

07 April

Beny Mawel, Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, proses seleksi anggota parlemen jalur pengkatan 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan kursi pengkatan Provinsi Papua Pegunungan telah dan sedang memasuki tahap akhir. Namun dalam proses akhir ini kata Mawel, banyak rumor dan keluhan sesama calon yang muncul. Bahkan menjadi rahasia publik bahwa oknum-oknum calon tertentu melakukan lobi politik dengan akan menyerahkan tanah adat kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik. *"Saya heran calon anggota parlemen pengangkatan gadaikan tanah adat, sementara tugas dan kewenangan anggota parlemen jalur pengamatan untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, termasuk perlindungan hak-hak atas tanah dari caplok dan klaim hilang begitu saja"*, kata Mawel dalam

pernyataannya kepada Suara Papua pada 5 April 2025 (https://suarapapua.com/2025/04/07/calon-dprp-dan-dprk-jalur-pengangkatan-tidak-gadaikan-tanah-adat/).

12 April

Septinus Lobat, Walikota Sorong, mengatakan, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Otsus pertama di kota Sorong yang berlangsung di gedung Lambert Jitmau, Kamis (10/04), membahas kebutuhan prioritas OAP di wilayah pemerintahan kota Sorong. Septinus menyatakan, hal terpenting dalam Musyawarah Otsus adalah membahas hal-hal riil dan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana Otsus. *"Kita melakukan musyawarah bersama untuk merumuskan pembangunan prioritas bagi OAP,"* ujar Septinus Lobat dalam sambutannya. Kata Septinus, dana Otsus adalah anggaran yang dialamatkan kepada OAP sebagai subjek utama, kemudian orang Papua klaster kedua yaitu mama atau bapak OAP, lalu OAP klaster ketiga adalah non OAP yang lahir besar di Tanah Papua. *"Pembangunan kepada OAP menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan semua stakeholder. Tujuan dana Otsus untuk afirmasi OAP"* (https://suarapapua.com/2025/04/12/walkot-sorong-tegaskan-musrenbang-otsus-bahas-pembangunan-prioritas-oap/).

30 April

Warga Amumngme dari empat distrik yakni Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, DIstrik Jila, dan Distrik Alama melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Selasa (29/04). Koorlap aksi, Eli Dolame menyebutkan selama akses penerbangan ditutup, masyarakat di wilayah pegunungan dari 47 kampung di 4 distrik ini kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan bahkan bahan makanan. Selain menuntut penerbangan kembali dibuka, mereka juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengembalikan stigma zona merah di 4 wilayah tersebut menjadi zona hijau (Cenderawasih Pos).

05 Mei

Belum genap tiga tahun, usulan pemekaran sejumlah kabupaten di wilayah provinsi Papua Tengah mencuat ke permukaan tatkala gubernur Meki Frits Nawipa bicara dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Timika, kabupaten Mimika, Kamis (01/05) pekan lalu. Dari delapan kabupaten yang ada di wilayah provinsi Papua Tengah, mengemuka usulan beberapa kabupaten baru. Di kabupaten Paniai, misalnya, diusulkan dua kabupaten baru. Yakni kabupaten Moni dan kabupaten Paniai Timur. Selain itu, ada enam usulan DOB di provinsi Papua Tengah. Kabupaten Sinak, pemekaran dari kabupaten Puncak; kabupaten Ilu Jaya, pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya; kabupaten Mapia Raya, pemekaran dari kabupaten Dogiyai; kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari kabupaten Mimika; kabupaten Mimika Barat Jauh, pemekaran dari kabupaten Mimika; dan kabupaten Kemandoga, pemekaran dari kabupaten Intan Jaya. Wacana pemekaran 8 kabupaten baru tersebut mengundang polemik berkepanjangan, antara pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang menilainya bukan hal urgen dilakukan saat ini (https://suarapapua.com/2025/05/05/usulkan-8-kabupaten-baru-di-papua-tengah-yance-mote-tidak-urgen/).

17 Mei

Sidang sengketa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong jalur pengangkatan periode 2024-2029 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terus berlanjut, kendati calon terpilih telah dilantik beberapa waktu lalu. Pemerintah kabupaten Sorong dinilai tidak patuh terhadap hukum karena mengabaikan keberatan dan upaya hukum yang dilakukan pihak calon anggota DPRK yang dinyatakan gugur oleh Pansel DPRK Sorong. Klois Yable, salah satu calon anggota DPRK yang dinyatakan tidak lolos seleksi dan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura, mengatakan, pasca ditetapkan tidak lolos, pihaknya telah mengajukan surat keberatan pada tanggal 7 dan 11 Februari 2025 kepada Pansel, Pemkab Sorong dan pemerintah provinsi Papua Barat Daya terkait beberapa kejanggalan yang ditemukan (https://suarapapua.

com/2025/05/17/polemik-dprk-jalur-otsus-pemkab-sorong-dinilai-tidak-taat-hukum/).

20 Mei

Hingga 24 tahun pelaksanaan Otsus Papua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tak kunjung dibentuk. Wacana pembentukan KKR selalu kontroversial, karena dikhawatirkan membuka celah bagi pelaku untuk lolos dari pemidanaan. Tapi KKR juga dibutuhkan demi pemulihan korban. Gagasan pembentukan KKR yang terkatung-katung kembali menemukan momentum pada 2019, ketika Gubernur Papua kala itu, Lukas Enembe membentuk Tim Kajian Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Tanah Papua. Tapi, setelah enam tahun berlalu, KKR di Tanah Papua belum juga terbentuk, dan kasus dugaan pelanggaran HAM baru justru terus bermunculan. Bagi Ketua Tim Kajian Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Tanah Papua, Prof Dr Melkias Hetharia, kegagalan para pemangku kepentingan Otonomi Khusus atau Otsus Papua untuk membentuk KKR merupakan bentuk pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih itu menekankan hal itu dalam lokakarya "Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban di Tanah Papua" yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) di Kota Jayapura, Papua, Rabu (14/05). Hetharia mengatakan pemerintah seharusnya menindaklanjuti pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dimandatkan dalam UU Otsus Papua tersebut. *"Secara gamblang saja saya menegaskan bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam rangka pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu,"* ujarnya (https://jubi.id/polhukam/2025/24-tahun-otsus-papua-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-tidak-kunjung-dibentuk/).

31 Mei

Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) bersama solidaritas mahasiswa Papua di kota studi Menado, Sulawesi Utara menyatakan menolak rencana pemekaran DOB Mapia Raya, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. *"Kami tegas menyatakan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera batalkan rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya. Karena kami menilai kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah itu sangat merugikan bagi masyarakat Mapia serta alam dan ekosistem yang ada di daerah Mapia, Kabupaten Dogiyai,"* tegas, Emil E Wakei, salah satu mahasiswa Mapia, sebagai koordinator dalam penyampaian pernyataan itu pada, Kamis (29/05). Ia menyatakan bahwa pihaknya dari mahasiswa dan tokoh pemuda, agama dan adat minta batalkan rencana pemekaran itu. Karena rencana itu merupakan keinginan oknum yang tidak memiliki legitimasi masyarakat Dogiyai dan Mapia secara umum (https://suarapapua.com/2025/05/31/mahasiswa-dogiyai-di-manado-tolak-rencana-pemekaran-dob-mapia-raya/).

07 Juni

Biro Hubungan Masyarakat Koordinator Wilayah Paniai (Korpan) Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) Manokwari 2025 menyatakan menolak pemekaran DOB Paniai Timur dan Delama Jaya. Pernyataan itu disampaikan mahasiswa Paniai di Manokwari, Papua Barat pada 7 Juni 2025. Menurut mereka penolakan itu dilakukan dengan dasar melindungi hak asasi, tanah adat, dan masa depan masyarakat adat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Pasalnya, pemekaran distrik, kabupaten, maupun provinsi yang dilakukan pemerintah pusat untuk menjawab persoalan di wilayah Papua, namun faktanya hanya menambah masalah di atas masalah. Sekalipun masalah-masalah yang dihadapi warga di daerah telah diakomodir, dirangkul dan disatukan dalam UU Otsus, tetapi substansi dari UU Otsus itu masih tetap tidak direalisasikan melalui program dan kebijakan-kebijakan. *"Pemekaran daerah otonomi baru adalah murni mempertahankan eksistensi, maka para pemangku kepentingan, terutama Gubernur Papua Tengah dan DPR RI Komisi II tidak*

lagi memperjuangkan pemekaran ini DOB Paniai Timur dan Delama Jaya," tegas Selpius Gobay, Ketua Koordinator Lapangan penolakan itu (https://suarapapua.com/2025/06/07/mahasiswa-paniai-tolak-pemekaran-dob-paniai-timur-dan-delama-jaya-demi-melindungi-masyarakat-adat/).

17 Juni

MRP Pegunungan minta Kementerian Dalam Negeri RI untuk mengambilali proses penetapan, pengumuman dan pelantikan anggota DPRP/DPRK jalur pengangkatan periode 2025/2030 untuk Provinsi Papua Pegunungan. *"Kami meminta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia segera mengambil alih proses penetapan, pengumuman dan pelantikan anggota DPRP/DPRK jalur pengangkatan periode 2025/2030 di provinsi Papua Pegunungan,"* kata Wakil Ketua MRP dari Unsur Agama, Benny Mawel dalam pernyataannya kepada Suara Papua pada, Sabtu (14/06). Kata Benny hal itu disampaikan pihaknya karena prosesnya berhenti pada realisasi PP 106 tahun 2021 pasal 79 angka 1-8 tentang penetapan dan pengesahan anggota DPRP mekanisme pengangkatan. Menurutnya, tim seleksi provinsi tidak membuat keputusan Pansel provinsi dan berita acara calon terpilih dan calon tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik. Tidak juga menyampaikan tembusan kepada MRP dan keputusan gubernur yang harus terbit setelah 14 hari penyampaian Timsel hingga hari ini (https://suarapapua.com/2025/06/17/mrp-pegunungan-minta-kemendagri-mengambil-alih-penetapan-dpr-jalur-pengangkatan/).

21 Juni

Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw dari jalur Otsus resmi dilantik ketua Pengadilan Negeri Sorong dalam rapat paripurna di aula DPRK Tambrauw, Jumat (20/09). Rapat raripurna dipimpin langsung ketua DPRK Tambrauw, Yan Yosef Sundoi. Ia menyampaikan apresiasinya atas kelancaran proses pelantikan serta mengucapkan selamat kepada lima anggota DPRK jalur Otsus yang merupakan representasi OAP. "*Kami menyambut dengan senang sekaligus mengucapkan selamat bergabung kepada lima anggota DPRK jalur Otsus ini. Kita bersama-sama dengan anggota memperjuangkan aspirasi masyarakat*

Tambrauw," ujar Yan Yosef Sundoi kepada Suara Papua usai acara pelantikan (https://suarapapua.com/2025/06/21/dprk-tambrauw-jalur-otsus-resmi-dilantik-dalam-rapat-paripurna/).

02 Juli

Vincentius Paulinus Baru, wakil ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, menilai Perda tentang masyarakat adat sangat mendesak untuk segera dibentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini penting mengingat banyaknya persoalan terkait investasi di wilayah adat, sehingga masyarakat adat membutuhkan dasar hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut Paulinus, MRP bersama DPR Papua Barat Daya telah menggelar pertemuan perdana guna menyamakan persepsi dan membahas sejumlah isu aktual yang dihadapi masyarakat asli Papua. Beberapa isu utama yang disoroti dalam pertemuan tersebut antara lain pendataan masyarakat adat asli Papua, kuota tenaga kerja lokal, dan pengawasan dana Otsus. Dari semua isu tersebut, disepakati bahwa urgensi utama adalah penyusunan Perda tentang masyarakat adat. *"Dari beberapa isu yang dibahas, kami sepakat bahwa yang paling mendesak adalah regulasi untuk masyarakat adat,"* jelasnya saat diwawancarai Suara Papua, Kamis (19/06) (https://suarapapua.com/2025/07/02/mrp-sepakat-dorong-perda-masyarakat-adat-di-papua-barat-daya/).

03 Juli

Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw dari jalur pengangkatan Otsus dinilai sangat strategis dalam mengawal implementasi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Yeskiel Yesnath, bupati Tambrauw, mengatakan, para anggota DPRK jalur Otsus diharapkan dapat memastika seluruh amanat Otsus, termasuk pengelolaan dana Otsus dan pelaksanaan program-program di lapangan, berjalan sebagaimana mestinya dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. *"Harapan besar kita adalah mereka bisa hadir dan terlibat aktif dalam mengawal setiap kebijakan dan program Otsus agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat,"* ujar bupati Yeskiel Yesnath saat ditemui Suara Papua setelah rapat

paripurna di gedung DPRK Tambrauw, Jumat (20/6) (https://suarapapua.com/2025/07/03/bupati-tambrauw-harap-dprk-jalur-otsus-kawal-implementasi-otsus-di-tambrauw/).

14 Juli

Mahasiswa Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan di Kota Jayapura menyatakan menolak rencana pembentukan Kabupaten Benawa, yang merupakan calon daerah otonomi baru atau DOB, pemekaran dari Kabupaten Yalimo. Pembentukan Kabupaten Benawa, merupakan satu dari 54 usulan DOB dari Tanah Papua, yang telah diplenokan Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPD RI awal Juli 2025. Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Yalimo di Jayapura, Peres Walilo mengatakan pihaknya menolak rencana pemekaran Kabupaten Yalimo, untuk membentuk DOB Benawa. Katanya, pembentukan DOB harus berdasarkan persetujuan berbagai pihak, terutama masyarakat adat setempat. Sebab merekalah yang berhak atas tanah, air dan alam bukan di sana. Bukan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. *"Kami dengar Bupati Yalimo dan juga DPR [Kabupaten Yalimo] berinisiatif melakukan komitmen dengan segelintir orang untuk melakukan wacana tersebut (pembentukan DOB Benawa). Kami mahasiswa melihat ada beberapa kejanggalan yang dilakukan pemerintah setempat, sehingga secara tegas kami menolak rencana DOB,"* kata Peres Walilo di Kota Jayapura, Papua, Minggu (13/07/2025). Menurutnya apabila ingin memekarkan Kabupaten Yalimo, mesti disepakati bersama tokoh adat, pemuda, dan tokoh gereja di sana. Bukan hanya dibicarakan dan ajukan oleh beberapa pihak saja (https://jubi.id/lapago/2025/mahasiswa-yalimo-tolak-rencana-pembentukan-dob-benawa/).

23 Juli

Generasi penerus suku Moi di kabupaten Sorong mendesak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Papua Barat Daya (PBD) untuk tak lagi membahas DOB. Penegasan tersebut disampaikan lantaran viralnya pernyataan anggota DPD RI perwakilan PBD terkait DOB. Ayub Paa, pemuda adat suku Moi menegaskan, peran

DPD RI di pusat ibarat representasi masyarakat adat yang harusnya berjuang untuk menyuarakan hak-hak masyarakat yang terabaikan selama ini. *"DPD itu bukan utusan partai politik, jadi harus sibuk bicara DOB, DPD itu murni representatif suara rakyat. Ada banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah yang harus diperjuangkan, bukan menciptakan persoalan baru untuk masyarakat,"* ujar Ayub, Rabu (23/07) (https://suarapapua.com/2025/07/24/generasi-penerus-moi-tegaskan-dpd-ri-hentikan-pembahasan-dob-malamoi/).

24 Juli

Pemuda adat distrik Klayili dan Sayosa Timur menghadang perjalanan MRP Provinsi Papua Barat Daya untuk menyerahkan aspirasi penolakan daerah otonom baru dan proyek strategis nasional. Dengan menggunakan pakaian adat, pemuda adat dari distrik Klayili dan Sayosa Timur melakukan penghadangan rombongan MRP PBD perwakilan adat, agama dan perempuan di Kampung Klatomok, Distrik Klayili, Selasa (22/07). Ayub Paa, perwakilan pemuda adat Distrik Klayili mengatakan, Malamoi untuk siapa, sudah ada kota, kabupaten Sorong dan ibu kota provinsi Papua Barat Daya di tanah Moi kenapa masih ingin DOB Malamoi lagi?. *"Sebelum melewati wilayah kami, MRP perlu menerima aspirasi dari kami. Sebab dampak dari DOB Malamoi dan PSN ini kami di sini juga akan merasakan. Kota, kabupaten dan provinsi ada di atas tanah Moi saja orang Moi terabaikan, sumber daya manusia orang Moi tidak diperhatikan, lalu untuk apa lagi mau datangkan DOB Malamoi? DOB ini untuk siapa? Siapa punya kepentingan ini?"* ujarnya di hadapan MRP perwakilan suku Moi daerah pemilihakan kota dan kabupaten Sorong (https://suarapapua.com/2025/07/24/hadang-mrp-pbd-pemuda-adat-tegaskan-tolak-dob-malamoi-dan-psn/).

31 Juli

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendukung percepatan pendataan orang asli Papua (OAP) dengan alokasi anggaran yang cukup, Rp 3 Miliar. Dana tersebut untuk lima kabupaten dan satu kota, masing-masing Rp 500 juta. Yakob Karet, penjabat Sekda

Provinsi PBD, mengatakan, pendataan OAP bagian dari roh Otsus yakni keberpihakan kepada OAP di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pembangunan jalan, dan lainnya. Tetapi selama 24 tahun Otsus ini ternyata data tentang OAP kurang jelas, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan KPK mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk pendataan OAP kembali secara by name dan by address di enam provinsi (https://suarapapua.com/2025/07/31/demi-percepat-pendataan-oap-pemprov-pbd-anggarkan-rp3-m/).

12 September

Setelah aspirasi penolakan rencana pemekaran kabupaten baru bernama Mapia Raya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah beberapa hari lalu, perjuangan masyarakat kabupaten Dogiyai untuk menyampaikan aspirasinya dilanjutkan dengan menemui gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Solidaritas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kabupaten Dogiyai mendatangi kantor gubernur Papua Tengah untuk meminta gubernur membatalkan rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor gubernur Papua Tengah, Jumat (12/09), perwakilan pelajar dan mahasiswa Dogiyai, Yomi Goo, menyampaikan harapannya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah agar harus menyuarakan aspirasi masyarakat menolak DOB Mapia Raya di kabupaten Dogiyai. Ditegaskan alasannya, rencana pemekaran kabupaten baru tersebut tak memenuhi persyaratan pemekaran DOB serta tanpa melibatkan masyarakat setempat. *"Proses pembentukan daerah otonom baru Mapia Raya itu inisiatif sekelompok orang. Dan persyaratan pembentukannya juga sama sekali tidak memenuhi persyaratan kewilayahan dan administratif. Jadi, masyarakat sudah tolak itu tolong pak gubernur perjuangkan. Itu saja maksud kami saat ini datang mau sampaikan,"* kata Yomi (https://suarapapua.com/2025/09/12/temui-gubernur-papua-tengah-rencana-dob-mapia-raya-diminta-dibatalkan/).

24 September

Perwakilan mahasiswa dan masyarakat Dogiyai bersama panitia khusus (Pansus) menyerahkan dokumen berisi aspirasi penolakan terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya kepada DPR RI di Jakarta, Selasa (23/09) sore. Penyerahan aspirasi berlangsung dari gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, diterima langsung Kusnadi, kepala sub bagian persuratan sekretariat jenderal DPR RI. Begitu dokumen aspirasi diterima, Kusnadi menjelaskan, pihaknya akan mengarsipkan surat tersebut dan diteruskan kepada pimpinan Komisi II DPR RI. *"Terima kasih. Aspirasi ini akan kami arsipkan dan sampaikan ke Komisi II DPR untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme,"* kata Kusnadi (https://suarapapua.com/2025/09/24/dokumen-aspirasi-tolak-dob-mapia-raya-diterima-dpr-ri/).

09 Oktober

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk satu lembaga yang diberi nama Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dilantik di istana negara, Jakarta, Rabu (08/10). Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 110/P tahun 2025 tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dilansir Kompas.com, terdapat 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut. Beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat. Ada pula sosok selebritis Johnson Estrella Sihasale atau terkenal dengan nama Ari Sihasale masuk dalam komite ini. Komite ini dipimpin Velix Vernando Wanggai yang sebelumnya pernah menjadi staf khusus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Selengkapnya berikut daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik presiden Prabowo:

1) Velix Vernando Wanggai (ketua)
2) John Wempi Wetipo
3) Ignatius Yogo Triyono

4) Paulus Waterpauw
5) Ribka Haluk
6) Ali Hamdan Bogra
7) Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
8) Yani
9) John Gluba Gebze
10) Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

(https://suarapapua.com/2025/10/09/lembaga-percepatan-otsus-papua-dilantik-presiden-ri-ini-pengurusnya/).

10 November

Ribuan massa aksi demo damai Mahasiswa, Pelajar, masyarakat dan mama-mama yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIMWP) yang menggelar aksi demo damai dari beberapa titik kumpul seperti di USWIM Nabire, Jepara, Karang Tumaritis, dan Siriwini. Lalu masa long march dari setiap titik tersebut menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) di Jl. Mandala Atas, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Senin (19/11). Massa menuntut MRP-PT membuka mata untuk sikapi atas situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua secara khusus di Papua Tengah. Pantauan Jubi bahwa sekitar pukul 10.00 WP massa dari titik kumpul USWIM longmarch berjalan kaki ke kantor MRP-PT kurang lebih jarak 1,5 KM. Massa berjalan sembari orasi dan yel-yelnya yang dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Nabire. Hujan rintik pun menemani massa aksi hingga membasahi sebagian tubuh mereka, tapi tak lama kemudian hujan berhenti. Sesampainya di depan gerbang Kantor MRP-PT, massa aksi dari Jepara, Karang Tumaritis, Siriwini juga datang bergabung lalu masuk ke kantor MRP-PT dan menduduki di halaman kantornya sekitar pukul 11.15 WP. Wakil Ketua 1 MRP-PT, Paulina Marei bersama sejumlah anggotanya MRP-PT lainnya keluar menemui ribuan massa aksi demo tersebut. Dan Massa pendemo menyampaikan orasi-orasi secara bergantian untuk MRP-PT mendengarkan. Salah seorang dalam orasinya menilai bahwa MRP-PT diam di saat masyarakat mengungsi, dapat tembak, pengerahan pasukan

nonorganik dalam jumlah banyak terjadi di Papua Tengah dan membuat masyarakat takut dan trauma dalam segala aktivitas. *"Bubarkan saja MRP-PT kalau tidak berpihak kepada masyarakat Orang Asli Papua,"* katanya dalam orasi (https://jubi.id/meepago/2025/darurat-militer-dan-krisis-kemanusiaan-di-papua-tengah-ribuan-massa-aksi-demo-datangi-mrp-pt/).

Kronik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

01 Januari

Kepolisian Daerah atau Polda Papua Barat sepanjang tahun 2024 menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 5,7 miliar melalui penanganan berbagai kasus korupsi. Kasus korupsi itu ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan pers akhir tahun di Markas Kepolisian Daerah Papua Barat di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (31/12). Ia menyatakan penanganan korupsi itu dilakukan di tengah kesibukan agenda Polda Papua Barat mengamankan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 (https://jubi.id/polhukam/2025/polda-papua-barat-umumkan-hasil-penanganan-sejumlah-kasus-dugaan-korupsi/).

09 Januari

Sebanyak 21 provinsi menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (09/01). Penetapan tersebut karena hasil pilkada mereka tidak dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan ada 16 provinsi yang hasil pilkadanya dipersengketakan di MK. Persengketaan tersebut meliputi 23 perkara (https://jubi.id/nusa/2025/21-provinsi-tetapkan-kepala-daerah-hasil-pilkada-2024/).

11 Januari

Tim Koordinator Damai Pasca Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan mengajak masyarakat di provinsi ini, untuk menjaga stabilitas keamanan pascapilkada. Ketua Tim Koordinator Damai Pasca Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, Theo Hesegem mengatakan, dalam proses pilkada ada potensi konflik. Namun, pihaknya melihat proses pilkada kali ini berjalan dengan baik, dan masing-masing kandidat dari gubernur hingga sampai pemilihan bupati dapat berjalan dengan baik aman dan lancar (https://jubi.id/rilis-pers/2025/warga-papua-pegunungan-diajak-jaga-perdamaian-pascapilkada/) .

06 Februari

Tim Pemantau Independen dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua 2024 mengungkapkan temuan lapangan berkaitan dengan kerja-kerja penyelenggara di tingkat bawah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang kurang memahami tugas dan kerjanya. Menurut ALDP, KPPS kebingungan dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan keterlambatan dalam rekapitulasi suara di tingkat distrik maupun tingkat Kabupaten. ALDP mendapat rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KP untuk melakukan pemantauan Pilkada. Pada Pilkada 2024 ALDP fokus memantau pilkada di sejumlah daerah di tiga provinsi, yaitu Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom, dan Kota Jayapura), Provinsi Papua Selatan (Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat), dan Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Nduga, dan Yalimo) (https://jubi.id/mamta/2025/tim-pemantau-pilkada-2024-papua-ungkap-kpps-kurang-memahami-tugas-dan-kerjanya/).

07 Februari

- Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya terpilih di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (06/02). Penetapan itu dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat Daya dalam

rapat pleno terbuka yang dihadiri para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para pejabat lainnya. Rapat pleno terbuka itu dipimpin Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu. Penetapan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya itu didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 05 Februari 2025. Putusan itu menolak permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak mengalami perubahan. Pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau meraih 144.598 suara sah atau 45,42% dari total suara sah yang masuk. Keputusan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11-BF.02.7-BA-96-2025, yang ditandatangani oleh Ketua serta Anggota KPU Papua Barat Daya (https://jubi.id/polhukam/2025/elisa-kambu-ahmad-nausrau-ditetapkan-sebagai-gubernur-dan-wakil-gubernur-papua-barat-daya-terpilih/).

- Bupati Nduga terpilih, Dinar Kelnea, menegaskan setelah penetapan bupati dan wakil bupati Nduga, tidak boleh lagi ada dendam politik. Menurutnya, kalah atau menang dalam kontestasi politik adalah hal biasa, karena dalam pemilihan kepala daerah hanya ada satu pasangan calon yang terpilih untuk memimpin daerah. Untuk itu, ia mengajak semua pihak, termasuk pasangan calon nomor urut 01, Namia Gwijangge – Obed Gwijangge (NAMED), untuk bersatu membangun Nduga agar lebih baik ke depan (https://jubi.id/polhukam/2025/bupati-nduga-terpilih-ajak-semua-pihak-bersatu-membangun-daerah/).

24 Februari

Tim Pemantau Independen Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 dari Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP menilai C Pemberitahuan atau undangan untuk pemilih adalah salah satu celah untuk mobilisasi massa mencoblos secara tidak sah di Tempat Pemungutan Suara atau TPS di Provinsi Papua. Hal itu dinyatakan

Koordinator Pemantau Independen Pilkada Papua AlDP, Muhammad Pieter Alhamid di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (22/02). Alhamid mengatakan pada Pilkada 2024 Tim Pemantau Independen AlDP memantau pemungutan suara di empat kabupaten dan kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya. Temuan pemantauan mereka yang paling menonjol adalah banyaknya C Undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih, dan banyaknya orang yang kemudian datang ke TPS dengan membawa C Undangan tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk (https://jubi.id/polhukam/2025/c-pemberitahuan-jadi-celah-mobilisasi-massa-ke-tps-pilkada-di-papua/).

26 Februari

- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jayapura pada Rabu (26/02) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun untuk evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD itu diselenggarakan di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya mengatakan FGD itu diselenggarakan berdasarkan surat KPU RI nomor 134/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025. Setiap KPU kabupaten dan kota diperintahkan untuk melakukan FGD untuk menyusun laporan evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 (https://jubi.id/polhukam/2025/kpu-kabupaten-jayapura-gelar-fgd-evaluasi-penyelenggaraan-pemilihan-umum-2024/).
- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (26/02), menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (24/02). Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, saat membuka rapat pleno yang digelar di salah satu hotel di Wamena menyatakan bersyukur seluruh tahapan proses pemilukada dapat terlaksana dengan baik, meski banyak hal yang dihadapi (https://jubi.id/lapago/2025/usai-putusan-

mk-kpu-papua-pegunungan-gelar-pleno-penetapan-gubernur-dan-wagub-terpilih/).

04 Maret

- Pemerintah Provinsi Papua, harus menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Bagaimana tidak, ada beberapa lembaga yang justru mengajukan anggaran yang cukup besar dibanding anggaran saat Pilkada pada November lalu. Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp155 miliar dan ada silpanya. *"KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar, untuk permintaan ini kami akan melakukan review,"* kata Ramses, kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) (Cenderawasih Pos).
- Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua, Nerlince Wamuar menyatakan pihaknya sangat kecewa dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua yang menganggap sepele pemalsuan dokumen calon wakil Gubernur Papua nomor urut 1. Akibatnya, muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam amar putusannya MK mendiskualifikasi calon wakil Gubernur dan diperintahkan Pemungutan Suara Ulang atau PSU dalam Pemilihan Kepala daerah atau Pilkada di Provinsi Papua (https://jubi.id/polhukam/2025/psu-pilgub-papua-mrp-nyatakan-kecewa-atas-kinerja-kpu-papua/)

05 Maret

- KPU RI menemui Penjabat Gubernur Papua, menyikapi putusan MK terkait dengan pelaksanaan PSU gubernur dan wakil gubernur, di kantor gubernur, Selasa (04/03). Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua KPU Papua Steve Dumbon, dibahas masalah anggaran termasuk tahapan pelaksanaan PSU yang mana rencananya PSU akan digelar pada 09 Agustus 2025. *"Tadi kami mendiskusikan mengenai penganggaran untuk pelaksanaan PSU tindak*

lanjut dari putusan MK," ucap anggota KPU RI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik kepada Cenderawasih Pos. Dikatakan, penganggaran harus dalam semangat efisiensi. Dan dalam pertemuan di lantai empat kantor gubernur itu, belum disepakati nominal anggaran untuk pelaksanaan PSU. *"Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,"* terangnya (Cenderawasih Pos).

- Mahkamah Konstitusi atau MK memerintah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. KPU RI meminta KPU Papua melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU itu secara profesional. Hal itu dikatakan Ketua Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota KPU RI, Idham Holik di Kantor KPU Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (4/3). Menurutnya, profesionalisme KPU Papua penting untuk mencegah perselisihan hasil PSU itu (https://jubi.id/polhukam/2025/kpu-ri-ingatkan-kpu-papua-agar-laksanakan-psu-secara-profesional/)

06 Maret

Majelis Rakyat Papua sangat kecewa dengan adanya PSU yang terjadi di Provinsi Papua. Pasalnya, PSU kali ini menelan banyak biaya, tidak hanya itu semua masyarakat juga menjadi korban dari kondisi yang terjadi. Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo melihat MRP kecewa karena melihat kinerja KPU Papua tidak berjalan dengan baik. Diakuinya, tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus. *"Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK ada lah PSU,"* katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (03/03) kemarin (Cenderawasih Pos).

07 Maret

Pemerintah Provinsi Papua bersama KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri telah menyepakati anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua sebesar Rp189 miliar. Nominalnya turun jauh dari angka yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 367 miliar untuk penyelenggara dan pihak keamanan. Hal ini setelah dilakukan penandatanganan berita acara pendanaan PSU di lantai 4 kantor gubernur, Kamis (06/03). Sebelumnya, KPU Papua mengajukan Rp170 miliar, Bawaslu Rp151 miliar, Polda Papua Rp29 miliar dan TNI Rp19 miliar. Setelah direview, disepakati anggaran KPU Rp109,9 miliar, Bawaslu Rp42,6 miliar, Polda Papua Rp22 miliar, dan TNI Rp15 miliar. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana. *"Setelah menerima proposal dari KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, kami melakukan kajian bersama agar anggaran lebih efisien. Akhirnya, disepakati dalam berita acara yang telah ditandatangani,"* ujar Ramses (Cenderawasih Pos).

25 Maret

- Pasca putusan MK untuk PSU Pemilihan Gubernur Papua, maka jajaran komisioner KPU Papua dilakukan perombakan, rolling jabatan. Yang paling menonjol, Ketua KPU Papua yang sebelumnya dijabat oleh Steve Dumbon digantikan oleh Diana Dorthea Simbiak. Dimana mantan ketua KPU Steve Dumbon kini menjadi koordinator Divisi SDM, sementara Diana Dorthea Simbiak, sebelumnya menjabat sbagai Divisi Perencanaan dan Informasi. Terkait perombakan jabatan di KPU Papua ini, sempat beredar kabar di kalangan masyarakat bahwa pergantian Ketua KPU Papua itu disebabkan banyak pertimbangan salah satunya adalah karena desakan dari paslon tertentu. Merespon isu terkait pergantian itu, Divisi Hukum KPU Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon buka suara. Ia menyampaikan bahwa pergantian tersebut merupakan hal yang biasa, sebagai bentuk

penyegaran, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat sinergitas kerja antar divisi di internal KPU (Cenderawasih Pos).

- Bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo mengaku kesulitan memenuhi permohonan dari KPU Kabupaten Boven Digoel untuk biaya pelaksanaan PSU atas pemilihan kepala daerah di Boven Digoel. Hal ini terjadi karena PSU tersebut dilakukan ditengah efisiensi anggaran yang harus dilakukan. *"Kami akan memohon petunjuk gubernur untuk PSU di Boven Digoel segera dapat dilakukan. Tapi, untuk kebutuhan anggaran PSU, saya belum bisa pastikan karena kita ketahui saat ini dalam tahap efisiensi. Sisa-sisa yang ada pada kita itu yang akan kita alokasikan untuk membiayai PSU ini,"* jelas Bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo. Menurutnya, untuk PSU tersebut pihaknya hanya mampu membiayai antara Rp15-20 miliar. Sementara sisanya, pihaknya akan minta bantuan pemerintah provinsi atau Kemendagri. Sementara biaya PSU ini, selain dari KPU Boven Digoel, juga Bawaslu dan untuk biaya pengamanan. Untuk PSU ini, KPU Boven Digoel mengajukan anggaran sebesar Rp 31 miliar. Disinggung soal keamanan selama tahap PSU, bupati memberi menjamin keamanan. Sebab, menu rutnya, masyarakat Boven Digoel cinta kedamaian. "Kami jamin proses PSU sampai pada terpilihnya bupati dan wakil bupati Boven Digoel aman. Karena masyarakat Boven Digoel adalah masyarakat yang cinta damai (Cenderawasih Pos).

24 Maret

Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua resmi menetapkan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Penetapan itu merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024, dimana KPU Papua diharuskan menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada 2025. Penetapan nomor urut tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak, di Kantor KPU Papua pada Minggu (23/3) sore dihadiri Pj Gubernur Papua Ramses Limbong, Ketua MRP Papua, serta seluruh Forkompida (https://jubi.

id/mamta/2025/penetapan-nomor-urut-paslon-gubernur-dan-wakil-gubernur-papua-mathius-fakhiri-absen/).

30 April

Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Manokwari, Papua Barat memeriksa anggota Bawaslu Provinsi Papua, Nurlaila Muhammad terkait dugaan korupsi. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasi Pidsus Kejari Manokwari Asrul, SH membenarkan pemeriksaan terhadap Anggota Bawaslu Papua Barat tersebut. Menurutnya, dugaan korupsi itu berkaitan dengan dana hibah pengawasan pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk Bawaslu Kabupaten Manokwari pada 2020 silam. Pada periode itu Nurlaila merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari. Pemeriksaan yang berlangsung sekitar enam jam itu dilakukan di kantor Kejari Manokwari, di Jalan Pahlawan, Kota Manokwari, Papua Barat pada Selasa (29/04) (https://jubi.id/domberai/2025/penyidik-kejari-manokwari-periksa-komisioner-bawaslu-papua-barat-terkait-dugaan-korupsi/).

04 Juni

Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Papua Barat kini melakukan penyelidikan dugaan korupsi Penggunaan Dana Hibah di Komisi Pemilihan umum KPU Papua Barat. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Benny Prabowo membenarkan penyelidikan dugaan korupsi saat Coffee Morning dengan Jurnalis di Manokwari Rabu (04/06) (https://jubi.id/domberai/2025/dugaan-korupsi-di-kpu-papua-barat-kabid-humas-masih-pulbaket/).

17 Juni

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Tahun 2024 pada Dana Hibah Pilkada di KPU Papua Barat kini menjadi pertaruhan antara Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan Bidang Pidana Khusus Pidsus Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua Barat. Kejati Papua Barat sedang mengagendakan pemanggilan saksi-saksi terkait penggunaan dana hibah. Sedangkan Ditreskrimsus Polda Papua Barat sejauh ini baru melakukan pengumpulan bahan keterangan Asisten Pidana Khusus Kejati

Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas mengatakan dalam waktu dekat pihaknya mengagendakan pemeriksaan saksi dari KPU Papua Barat (https://jubi.id/domberai/2025/pekan-depan-kejati-panggil-saksi-dari-kpu-papua-barat-soal-hibah-pilkada-2024/).

02 Juli

Tokoh Pemuda Arfak Yustinus Meidodga menyebut penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat sebagai momen Polda Papua Barat memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di wilayah Hukum Papua Barat. Meidodga menilai bahwa KPU merupakan lembaga independent, orang-orang di dalam harus dipastikan bersih dari masalah hukum maupun persoalan moral, sehingga di masa yang akan datang proses seleksi para Komisioner KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten, panitia seleksi perlu memperhatikan urusan hukum dan moral setiap calon dengan teliti (https://jubi.id/domberai/2025/tokoh-pemuda-arfak-kasus-hibah-kpu-jadi-ujian-citra-polda-papua-barat/).

12 Juli

KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyampaikan kesiapannya menyelenggarakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Kepala Daerah Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua. PSU dijadwalkan pada Rabu, 6 Agustus 2025 dengan target sekitar 750 ribu pemilih. PSU diselenggarakan berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada 24 Februari 2025 terkait gugatan paslon nomor urut 2 terhadap Yermias Bisai. Bisai adalah calon wakil gubernur Papua nomor urut 1 yang berpasangan dengan Benhur Tomi Mano sebagai calon gubernur. MK memutuskan mendiskualifikasi Yermias Bisai sebagai calon wagub karena tidak jujur mencantumkan alamat tempat tinggal atau domisili yang berdampak terhadap keabsahan pencalonannya (https://jubi.id/mendalam/2025/pilgub-papua-menutup-celah-agar-tak-ada-psu-jilid-2/).

14 Juli

Bawaslu Papua mengingatkan anggota DPR Kota Jayapura, untuk tidak menyalahi aturan pemilihan kepala daerah atau pilkada menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU Pilgub Papua pada Agustus 2025. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta N Kebelen berkaitan dengan beredarnya rekaman video sejumlah anggota DPR Kota Jayapura yang mengajak warga memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tertentu. Video yang diunggah di platform media sosial facebook dan tiktok itu menjadi sorotan publik sebab ajakan tersebut dilakukan di ruang sidang paripurna DPR Kota Jayapura. Bawaslu Papua menyatakan aksi tersebut menyalahi aturan pilkada, sebab dilakukan di ruang sidang paripurna DPR Kota Jayapura, karena gedung dewan itu merupakan fasilitas atau aset negara (https://jubi.id/polhukam/2025/bawaslu-papua-anggota-dpr-kota-jayapura-jangan-menyalahi-aturan-pilkada/).

20 Juli

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Papua mengingatkan pejabat daerah di wilayah itu untuk mengajukan cuti apabila terlibat kampanye pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Keerom, Izac Zet Matulessy mengatakan, pejabat daerah dapat terlibat berkampanye PSU pilgub Papua dengan mengajukan izin kampanye dan izin cuti di luar tanggungan negara. Ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada (https://jubi.id/mamta/2025/kpu-ingatkan-pejabat-keerom-wajib-cuti-jika-terlibat-kampanye-pilgub-papua/).

22 Juli

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua atau PSU pilgub Papua menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM

RI perwakilan Papua. PSU pilgub Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 itu, menjadi perhatian lembaga tersebut, sebab Komnas HAM RI perwakilan Papua memiliki sejumlah catatan buruk saat pelaksanaan pilgub Papua pada 2024 lalu. Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan untuk itulah pihaknya memberikan perhatian serius pada pelaksanaan PSU Pilgub Papua (https://jubi.id/polhukam/2025/psu-pilgub-papua-menjadi-perhatian-komnas-ham/).

02 Agustus

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua dan kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Papua, Jumat (01/08). Kedatangan Komnas HAM perwakilan Papua ke kantor KPU dan Bawaslu itu, untuk memastikan kesiapan penyelenggara menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua, 06 Agustus 2025 (https://jubi.id/mamta/2025/komnas-ham-papua-pastikan-kesiapan-kpu-dan-bawaslu-jelang-psu-pilgub-papua/).
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyatakan tak ada pemilih tambahan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua pada 6 Agustus 2025. Anggota KPU Papua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Abdul Hadi mengatakan, daftar pemilih tetap atau DPT PSU pilgub Papua menggunakan DPT saat pelaksanaan pemilih kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024 (https://jubi.id/mamta/2025/tak-ada-pemilih-tambahan-dalam-psu-pilgub-papua/).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum mengimbau tim relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, serta KPU Papua melepas alat peraga kampanye atau APK selama masa tenang. Imbaun ini disampaikan Bawaslu Papua menjelang pemungutan suara ulang PSU Pilgub Papua, 06 Agustus 2025. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan merujuk pada peraturan pemilihan kepala daerah atau pilkada, yang melakukan penertiban

APK adalah KPU. Akan tetapi dari sisi pengawasan, Bawaslu wajib mengingatkan (https://jubi.id/mamta/2025/bawaslu-papua-selama-masa-tenang-psu-pilgub-papua-apk-wajib-dilepas/).

20 Agustus

Komnas HAM RI perwakilan Papua menemukan berbagai dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua pada 06 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran itu ditemukan Komnas HAM perwakilan Papua saat melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Kepala kantor Komnas HAM RI perwakilan Papua Frist Ramanday, mengatakan dugaan pelanggaran yang ditemukan pihaknya misalnya ada tempat pemungutan suara atau TPS tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-temukan-berbagai-dugaan-pelanggaran-saat-psu-pilgub-papua/).

13 Oktober

Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan kolaborasi antara lembaga untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat di Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dilakukan pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua pada Sabtu (11/10). Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamo, mengatakan penguatan kelembagaan ini diselenggarakan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dalam hal ini kolaborasi antar lembaga untuk mewujudkan pemilihan yang bermartabat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan (https://jubi.id/lapago/2025/bawaslu-papua-pegunungan-melaksanakan-penguatan-kapasitas-kelembagaan-mewujudkan-pemilu-bermartabat/).

Kronik Program Makan Bergizi Gratis

03 Februari

Aliansi pelajar Se-Yahukimo menggelar aksi demo damai dengan sorotan tema: "Sekolah bukan warung tetapi sekolah tempat belajar", Senin, 03 Februari 2025. Aksi demo damai pelajar SD, SMP, SMA, SMK itu berlangsung selama 7 jam, pukul 09-15.00 waktu setempat. Terhitung mulai dari titik berangkat hingga masuk ke titik sentral di Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan dan dihadiri oleh pelajar tetapi dihadiri oleh setiap pihak yakni, perwakilan pemerintah, guru-guru, orangtua siswa, mahasiswa, pemuda dan komponen lainnya. Setiap perwakilan yang hadir telah menyatakan sikap lewat orasi-orasi bahwa mereka tidak sepakat adanya pemberian makanan gratis di sekolah (https://jubi.id/rilis-pers/2025/aliansi-pelajar-se-yahukimo-gelar-aksi-tolak-program-makan-gratis/).

17 Februari

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah terpilih, John Nasion Robby Gobai mengatakan program makanan bergizi gratis atau MBG di Tanah Papua, sebaiknya dilakukan melalui sekolah dan melibatkan masyarakat untuk menyiapkan makanan kepada para siswa. Pernyataan itu disampaikan John NR Gobai saat menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya, Senin (17/02). Ia mengatakan, pemberian makanan kepada siswa bukanlah program baru. Beberapa tahun silam pemerintah melakukan program serupa dengan nama Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMTAS, yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman PMTAS. Kini Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program MBG. Namun program ini, kata Gobai, masih menjadi perdebatan di Tanah Papua. Bahkan terjadi penolakan di beberapa daerah, meski di sisi lain pangan atau makanan merupakan kebutuhan manusia (https://jubi.id/polhukam/2025/gobai-program-mbg-di-tanah-papua-sebaiknya-melalui-sekolah-dan-libatkan-masyarakat/).

18 Februari

Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tetap akan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua. BGN menargetkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjangkau 1.558.000 siswa di Tanah Papua. Hal itu disampaikan Dadan menanggapi sejumlah unjuk rasa pelajar di Tanah Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis. *"Badan Gizi Nasional [tetap] fokus menyiapkan dan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis,"* kata Dadan kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Selasa (18/02). Pada Senin (17/02), para siswa di berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua menggelar demonstrasi damai menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aksi serentak yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar West Papua itu digelar di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Aksi serupa juga pernah digelar pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 3 Februari 2025 lalu. Dadan mengatakan pemerintah menghormati para siswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis. "*BGN melaksanakan program dan memberikan kepada yang berhak. Jika yang berhak menolak, BGN menghormati,"* ujarnya (https://jubi.id/polhukam/2025/badan-gizi-nasional-nyatakan-tetap-jalankan-program-makan-bergizi-gratis-di-tanah-papua/).

21 Februari

Badan Gizi Nasional atau BGN membutuhkan anggaran sekitar 8 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tanah Papua. BGN meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk menjalankan program MBG itu. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada Kamis (20/02) malam. *"Kurang lebih 8 triliun,"* kata Dadan kepada Jubi melalui pesan WhatsApp. Menurut Dadan, anggaran sekitar 8 triliun itu dibutuhkan untuk menjangkau 1.558.000 siswa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Tanah Papua. Ia

mengatakan program Makan Bergizi saat ini baru menjangkau 30.000 siswa di Tanah Papua. Dadan juga mengatakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis akan dibangun 1.004 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanah Papua. Saat ini baru 14 SPPG program Makan Bergizi Gratis yang beroperasi di Tanah Papua. "Kurang lebih 1.004 SPG [dan yang ada] baru 14 SPG," ujarnya. Dadan mengatakan 14 SPPG yang telah beroperasi itu tersebar di Provinsi Papua (2 SPPG), Papua Barat (6 SPPG), Papua Pegunungan (1 SPPG), Papua Selatan (1 SPPG) dan Papua Barat Daya (4 SPPG). Ia mengatakan pihaknya akan melibatkan sekolah dan gereja untuk program Makan Bergizi Gratis tersebut. *"Dalam agenda dan akan didorong melalui bangunan SPPG yang didanai APBN. [Dan] SPPG rata-rata bisa melayani 3000 orang,"* katanya (https://jubi.id/polhukam/2025/butuh-sekitar-8-triliun-untuk-program-mbg-di-tanah-papua/).

24 Februari

Pelajar Se Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai menggelar Longmarch sejauh 4 kilometer. Dimulai dari lapangan Karel Gobai menuju ke Kantor Bupati di Madi, Senin (24/02). Koordinator lapangan Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai Alpius Tebai mengatakan, tujuan diselenggarakan aksi itu untuk menolak program nasional makan bergizi gratis yang digadang-gadang Presiden Republik Indonesia dan wakilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tebai mengatakan yang dibutuhkan pelajar di Kabupaten Paniai adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis. *"Makanan bergizi itu selalu disiapkan oleh orang tua kami. Mereka menyiapkan kami makan sehari tiga kali. Soal makanan kami tidak susah. Karena alam juga ikut menyediakan segalanya. Yang kami susah adalah biaya pendidikan. Kami meminta pendidikan harus digratiskan,"* katanya. Koordinator lapangan umum Apornalis Domai Yogi, menyampaikan program makanan bergizi yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan siswa dan dinilai tidak efektif. *"Kami ingin pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis daripada memberikan makanan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kami,"* katanya. Yogi mengakui di sisi lain, beberapa guru dan orang tua menyayangkan aksi ini. Mereka beralasan

program itu bertujuan untuk meningkatkan gizi serta kesehatan dan kualitas belajar siswa. Yogi, mengklaim sumber dari makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa sekolah di Paniai, seperti daging dan beras, berasal dari luar Paniai. Menurutnya hal itu berisiko. Daging yang disuguhkan bisa terkontaminasi jika tidak dijaga higienitasnya. Kepala Sekolah Dasar (SD) Yegeka Enarotali Paniai Nurdiyanto mengatakan, pada hari ini, Senin 24 Januari 2025, beberapa guru di Sekolah Dasar Yegeka Enarotali ikut mengawal aspirasi dari Aliansi Siswa dan Pelajar (ASP) Paniai yang melakukan aksi demo damai "Menolak Makanan Bergizi Gratis, Menuntut Pendidikan Gratis". "*Kami sangat memahami pergumulan hati para orang tua murid, khususnya orang tua anak-anak asli Papua, terhadap program makan gratis ini. Kami memilih untuk memahami dan menghargai kegelisahan orang tua dan anak-anak siswa. Sehingga kami juga bertanggungjawab memastikan anak-anak yang ikut kegiatan itu berjalan aman,"* katanya. Aksi itu dijaga ketat aparat kepolisian Resor Paniai. Aspirasi peserta aksi diterima langsung oleh asisten 1 Soleman Boma, Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Kapolres Paniai (https://jubi.id/meepago/2025/aliansi-pelajar-se-kabupaten-paniai-tolak-program-makan-bergizi-gratis/).

4 Maret

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar makan bergizi gratis atau MBG di Tanah Papua harus disertai pendidikan gratis.Wakil Ketua DPR Papua Barat, Samsudin Seknun mengatakan, DPR Papua Barat belum menyatakan sikap apakah menolak atau menerima MBG di Tanah Papua. Meski demikian, menurut dia, MBG menjadi program andalan presiden Prabowo Subianto di Papua mestinya disertai dengan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. *"Kalau pendidikan gratis berjalan dan ditunjang dengan makan bergizi (gratis) bagi anak-anak Papua, maka saya rasa sangat lengkap agar kita membawa anak-anak Papua menuju Indonesia Emas pasti akan terwujud,"* katanya kepada wartawan usai memimpin rapat internal DPR Papua Barat di Manokwari, Selasa (04/03) (https://jubi.id/domberai/2025/dpr-papua-barat-usulkan-mbg-disertai-sekolah-gratis/).

13 Maret

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Kota Studi Jayapura secara tegas menolak pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 10 Maret 2025. Sekretaris IPMAMI, Banianus Jawame, menegaskan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pemenuhan hak pendidikan bagi generasi Papua daripada program MBG yang dinilai bukan sebagai prioritas utama. *"Kami sebagai mahasiswa yang peduli terhadap kesejahteraan generasi penerus dengan tegas menolak pelaksanaan sosialisasi MBG di Kabupaten Mimika. Kami meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penerapan program pendidikan gratis di seluruh wilayah Papua,"* ujar Jawame di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (12/03). Jawame mencontohkan bahwa di berbagai daerah di Papua, seperti Nabire, Yahukimo, Wamena, Timika, Jayapura, dan Kota Jayapura, para pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK telah melakukan aksi penolakan terhadap program MBG. Menurut mereka, pendidikan gratis jauh lebih penting dalam membangun masa depan generasi muda Papua. Dia juga menyatakan bahwa pihaknya menolak pelaksanaan program MBG jika tetap melibatkan aparat militer dalam pelaksanaannya (https://jubi.id/meepago/2025/ipmami-tolak-sosialisasi-mbg-dari-badan-gizi-nasional-di-mimika/).

18 Maret

Pokja Perempuan MRP, Febiolla Irianni Ohei menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional di Papua. Pemerintah Kota Jayapura bersama Badan Gizi Nasional melucurkan program Makan Bergizi Gratis di tiga sekolah dan satu PAUD/TK di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Selasa (18/03). Peluncuran dimulai dari PAUD/TK Juru Selamat Kotaraja, kemudian SD Inpres Kotaraja, lalu SD Negeri Kota Jayapura, dan berakhir di SD VIM 1 Kotaraja. Total jumlah siswa yang menerima MBG saat peluncuran sebanyak 1.912 orang. Peluncuran program MBG tersebut direspon oleh Pokja Perempuan MRP, Febiolla Irianni Ohei dengan menyatakan

dukungannya. "*Kami MRP hadir mendukung [program MBG] juga terus mendorong sosialisasi. Karena banyak anak-anak kita menikmati dan terlibat dalam program ini,*" katanya di Jayapura, Selasa (18/03) (https://jubi.id/mamta/2025/pokja-perempuan-mrp-dukung-peluncuran-program-mbg-di-papua/).

19 Maret

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Yohanis Manibuy, meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus paket di Bulan Ramadan pada Selasa (18/03). Paket perdana MBG khusus Ramadha di dalam kantong kemasan berisi susu, telur, buah, dan biskuit. Bupati Yohanis Manibuy mengatakan program MBG ini merupakan program pemerintah pusat untuk mewujudkan peningkatan gizi dan kesehatan. *"Ini program dari bapak presiden, kami pemerintah daerah siap mendukung, dengan adanya MBG anak – anak kita akan diperhatikan gizinya, anak anak kita sehat, dapat bersekolah, dan mempunyai pendidikan yang baik, menjadi generasi yang baik,"* kata Bupati Yohanes Manibuy kepada Wartawan, Selasa (18/03). Untuk memastikan seluruh anak didik di Teluk Bintuni mendapatkan MBG, Pemda akan melakukan monitoring secara langsung dan melakukan pendampingan. Jumlah anak didik di Teluk Bintuni sebanyak 21.538, meliputi 3.767 murid PAUD/TK, 10.235 murid SD, 4.264 siswa SMP dan 2.696 siswa SMA serta 576 siswa SMK. Di Teluk Bintuni, pelaksanaan program ini dimulai dari SD Inpres V Manimeri di Kampung Argosigemerai SP 5, Distrik Bintuni, TK Hokut dan di SMP Muhammadiyah (https://jubi.id/domberai/2025/bupati-manibuy-luncurkan-mbg-dan-paket-ramadan-anak-sekolah-di-teluk-bintuni/).

02 Mei

Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Jayapura menggelar aksi mimbar bebas untuk mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menuntut agar program tersebut digantikan dengan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah di Tanah Papua. Aksi yang diikuti sekitar 20 peserta ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIT hingga siang hari di

Perumnas III, Kota Jayapura, Jumat (02/05). Koordinator Umum aksi, Roisa Nagapani, menyatakan bahwa pelajar di Kota Jayapura dan sejumlah kabupaten di enam provinsi Tanah Papua, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK, secara tegas menolak program MBG. Aksi mimbar bebas yang digelar Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Jayapura mendesak Presiden RI mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Tanah Papua. "*Kami menolak MBG. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi di Papua,"* kata Nagapani dalam orasinya. Wakil Koordinator Lapangan, Yordan Mulikm, menambahkan bahwa anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk MBG seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan menambah jumlah guru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. *"Pelajar tidak butuh MBG. Yang dibutuhkan adalah fasilitas sekolah yang lengkap dan jumlah guru yang memadai. Itu yang harus diutamakan,"* tegasnya (https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-minta-mbg-diganti-pendidikan-gratis/).

Kronik Kunjungan Pejabat Pusat

20 Mei

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik, Merauke, Senin (19/06) (Cenderawasih Pos).

09 Juni

- Agenda tiba-tiba yang dilakukan dua Menteri Kabinet Merah Putih, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegununungan, Sabtu (07/06) mengagetkan banyak pihak. Banyak pertanyaan yang muncul soal agenda ini termasuk kenapa harus Nduga yang menjadi lokasi kunjungan kerjanya. Yang jelas kedatangan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sri Mulyani selama dua setengah jam ini salah satu tujuannya

adalah meninjau Pos Satgas Pamtas Mobile 733/Masariku di Kenyam (Cenderawasih Pos).

- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Ganggono dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Merauke dalam rangka melaksanakan peninjauan program optimalisasi lahan dan ketahanan pangan nasional yang berada di Kampunh Wogekel, Distrik Ilwayab-Merauke, Sabtu (07/06). Dandim Merauke Letkol Inf. Johny Nofriady mengatakan, kedatangan ketiga Menteri tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan PSN maupun program-program khusunya pertanian yang diturunkan ke Merauke (Cenderawasih Pos).

16 September

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri Gudang Arang di Kelurahan Kamahedoga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (16/09). Wapres Gibran didampingi Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya serta sejumlah pejabat (https://jubi.id/animha/2025/wapres-gibran-tinjau-program-mbg-di-merauke/#google_vignette).

17 September

Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Richard Yocku akan menjemput Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di SMP Negeri 2 Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu pagi (17/09) (https://jubi.id/kabupaten-jayapura/2025/bupati-jayapura-dan-wabup-akan-sambut-wapres-gibran-di-smp-negeri-2-sentani/).

18 September

- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu (17/09). Bupati Jayapura Yunus Wonda

mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani dan dilanjutkan ke UPT Puskesmas Kampung Harapan. Pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada wakil presiden karena langsung datang melihat kondisi puskesmas dan sekolah (https://jubi.id/headline/2025/wapres-gibran-tinjau-pelaksanaan-mbg-dan-pkg-di-kabupaten-jayapura/).

- Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan perdananya ke Provinsi Papua. Lokasi pertama yang ditinjau adalah SMPN 2 Jayapura, di Sentani, Kabupaten Jayapura untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG, Rabu (17/09). Wapres Gibran beserta rombongan tiba di sekolah itu sekitar pukul 11.10 WIT dan disambut antusias para siswa serta guru yang hadir. Jumlah siswa di SMP Negeri 2 Jayapura adalah 1.256 siswa (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-papua-dampingi-wapres-gibran-tinjau-program-mbg-di-smpn-2-jayapura/#google_vignette).
- Penjabat atau Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Papua di Puskesmas Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Rabu (17/09). Dalam kunjungannya, Wapres berdialog dengan masyarakat yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Seluruh poli yang ada di Puskesmas tersebut juga dikunjungi oleh Wapres (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-papua-dampingi-wapres-gibran-tinjau-cek-kesehatan-gratis-di-puskesmas-harapan/).
- Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 di Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/09). Dalam kunjungannya, Gibran memantau berbagai fasilitas pelayanan di SRMA seperti ruang kelas, ruang makan, dan asrama. Gibran menyapa para siswa-siswi dan menyampaikan motivasi kepada mereka (https://jubi.id/penkes/2025/gibran-kunjungi-sekolah-rakyat-menengah-atas-29-di-kota-jayapura/#google_vignette).

19 September

- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (18/09). Kunjungan Wapres ke PPI Hamadi disambut antusias oleh masyarakat, nelayan, dan para penjual ikan. Suasana ramai dan penuh semangat terlihat ketika Wapres berdialog langsung dengan pedagang dan nelayan setempat. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memborong ikan yang dijual masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap usaha para pedagang lokal (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-dampingi-wapres-tinjau-ppi-hamadi/).
- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke pasar tradisional Yotefa, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (18/09) (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/wapres-dan-pj-gubernur-papua-kunjungi-pasar-tradisional-yotefa/#google_vignette).

11 Oktober

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, terutama dalam hal pembangunan perumahan rakyat dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo saat menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Fakhiri-Ayoko Rumaropen di ruang kerjanya, Jalan Patiltimira, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10) (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/kementerian-pupr-siap-perkuat-kerja-sama-dengan-pemprov-papua/#google_vignette).

16 Oktober

Wakil Ketua DPD RI, Yorris Raweyai, menegaskan pentingnya Provinsi Papua Tengah membangun manusia sebelum membangun infrastruktur. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia melalui

pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama (https://jubi.id/meepago/2025/yorris-raweyai-dorong-papua-tengah-fokus-pada-pendidikan-dan-kesehatan/#google_vignette).

Kronik Korupsi

08 Januari

Untuk memastikan proses penyelidikan kasus pemotongan dana desa tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024, sejumlah perwakilan kepala kampung se-kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, mendatangi Tipikor Polda Papua di kota Jayapura, Rabu (08/01) sore. Yiben W Kogoya, Yosim Tabuni, dan Siron Morib, perwakilan kepala kampung, usai keluar dari ruang Tipikor Polda Papua, menjelaskan, tujuan mereka adalah untuk mengecek sejauhmana proses penyelidikan terhadap kasus pemindahan dana desa tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024 yang telah dikantongi pihak berwenang. *"Pada tanggal 15 November 2024 lalu, tim Tipikor Polda Papua telah menemukan bukti transaksi rekening koran di bank Papua cabang Tiom dan menemukan adanya pemindahan dana desa tanpa sepengetahuan kepala-kepala kampung sebagai pengguna anggaran,"* katanya. Tipikor Polda Papua dalam pertemuan tadi mengungkapkan progres kerjanya terkait pemeriksaan tahap pertama yang telah dilakukan kepada beberapa pihak terkait. Selanjutnya, penyelidikan tahap berikut akan digelar lagi sekaligus penjemputan paksa. Yosim Tabuni dan Yiben Kogoya mewakili kepala-kepala kampung se-kabupaten Lanny Jaya mengatakan, kasus tersebut akan digugat di pengadilan. *"Kami sudah siapkan pengacara untuk bawa kasus ini ke pengadilan. Karena kami juga punya hak yang sama untuk mencari keadilan yang bermartabat"* (https://suarapapua.com/2025/01/08/polda-papua-sedang-selidiki-dugaan-pemindahan-dana-desa-di-bank-papua-cabang-tiom/).

24 Januari

Kejaksaan Tinggi Papua Barat didesak mengusut hingga aktor utama dalam penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan

Mogoy Mardey di Teluk Bintuni yang merugikan negara Rp8,5 Miliar Anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023. *"Kami mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi mengusut aktor utama di balik pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Papua Barat Tahun 2023,"* kata Jackson Kapisa Ketua Ormas Pilar Demokrasi (Pidar) Papua Barat, Jumat (24/01) malam. Jackson menilai dari sejumlah tersangka yang telah ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi, ada dugaan aktor utama yang hendak ditutupi oleh pihak Kejaksaan Tinggi. *"Saya menilai ada indikasi kejaksaan menutupi aktor dan cenderung kejaksaan melindungi aktor,"* tegasnya. Hal yang menyebabkan kecurigaan bagi Pidar melihat penanganan perkara dugaan korupsi Pembangunan Jalan Mogoy Mardey, yakni tidak menelisik aliran dana tersebut sampai ke mana (https://jubi.id/domberai/2025/dugaan-korupsi-jalan-mogoy-mardey-kejati-papua-barat-diminta-tidak-lindungi-aktor-utama/).

22 Januari

- Penyelidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, terus bergulir. Hingga kini, sejumlah saksi telah diperiksa, dan perhitungan kerugian negara juga telah dirilis. Dana BOK di Puskesmas Amban tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp750 juta diduga disalahgunakan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat menemukan kerugian negara sekitar Rp400 juta. Meski perhitungan kerugian negara sudah ada, penyidik Polresta Manokwari hingga kini belum menetapkan tersangka. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, saat dikonfirmasi pada Selasa (22/01), mengaku pihaknya belum melakukan gelar perkara (https://jubi.id/domberai/2025/dugaan-korupsi-dana-bok-puskesmas-amban-manokwari-siapa-yang-akan-jadi-tersangka/).
- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat kembali menetapkan AYM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan

Mogoy Mardey di Teluk Bintuni Tahun 2023. AYM merupakan seorang pegawai di Puskesmas yang berperan dalam proyek pembangunan jalan tersebut sebagai penerima kuasa. AYM dalam keterangannya menyebut dari duit korupsi sekitar Rp8,5 Miliar lebih itu, Rp5 Miliar di antaranya mengalir ke rekening milik YM di Teluk Bintuni. *"Kita periksa AYM dan K sejak pukul 10 pagi, kemudian AYM ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan,"* kata Abun Hasbulloh Syambas Asisten Pidana Khusus Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua Barat di gedung Kejati Papua Barat Arfai, Manokwari Rabu (22/01) malam. Aspidsus menjelaskan peran AYM dalam perkara yang menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Papua Barat serta dua Bendahara dan dua konsultan proyek tersebut, yakni aktif meminjam bendera (perusahaan) CV Gloria Bintang Timur yang beralamat di Jayapura, Provinsi Papua (https://jubi.id/domberai/2025/aym-mengaku-duit-korupsi-jalan-mogoy-mardey-mengalir-ke-ym-di-bintuni/).

12 Februari

Pengadilan Negeri Jayapura menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 pada Rabu (12/02). Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Salah satu saksi, Andi Amiruddin (kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Papua) menyebutkan Panitia Besar (PB) PON XX belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk pelaksana PON XX dari Pemerintah Provinsi Papua sebenar Rp2,58 triliun. Ia menyebutkan permohonan pencairan dana hibah PON XX itu ditandatangani Yunus Wonda selaku ketua Harian PB PON XX Papua. Kasus korupsi ini mendudukkan empat pejabat PON XX Papua 2021 di kursi terdakwa. Mereka adalah Vera Parinussa (koordinator Venue PON XX), Reky Douglas Ambrauw (oordinator Bidang Transportasi PON XX), Theodorus Rumbiak (bendahara umum Pengurus Besar PON), dan Roy Letlora (ketua bidang II Pengurus Besar PON). Sidang ditangani majelis hakim yang diketuai Derman Parlungguan Nababan dengan anggota Nova Claudia De Lima Andi Mattalatta dan Lidia Awinero (https://jubi.id/

meepago/2025/saksi-sebut-dana-hibah-pon-xx-papua-rp258-triliun-belum-dipertanggungjawabkan/).

17 Februari

Lembaga Bantuan Hukum Papua meminta KPK dan Kejati Papua, menindaklanjuti temuan dugaan korupsi gratifikasi, dalam kasus mogok kerja 8.300 buruh PT Freeport Indonesia (PTFI). Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan, oknum pegawai dinas terkait selaku penerima gratifikasi dari PTFI, sejak menerima gratifikasi tidak pernah melaporkan ke KPK sesuai mekanismenya pada pasal 12c ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *"Pada prinsipnya persoalan mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh PTFI terhitung sejak 1 Mei 2017 sampai tahun 2025, telah diketahui dengan pasti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Provinsi Papua, sebab tujuah hari sebelum dilakukan mogok kerja telah dilayangkan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, sesuai perintah ketentuan 'sekurang-kurangnya dalam waktu tujuh hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat' sebagaimana diatur pada Pasal 140 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,"* kata Gobay melalui siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Senin (17/02) (https://jubi.id/rilis-pers/2025/kpk-dan-kejati-papua-diminta-tindak-lanjuti-dugaan-gratifikasi-ptfi/).

19 Februari

Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi atau Kompak Indonesia mendesak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua, segera menangkap dan memproses terduga pelaku dan aktor intelektual korupsi, di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa mengatakan, laporan resmi Kompak Indonesia, Nomor:21/KI/IX/2024 tanggal 23 September 2024 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung

RI perihal Dugaan Korupsi di Kabupaten Pegunungan Bintang, sudah dilimpahkan kepada Kepala Kejati Papua melalui surat Nomor:R-3413/F.2/Fd.1/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan, Dr Abd. Qohar AF dengan tembusan Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. *"Hingga saat ini belum ada proses hukumnya,"* kata Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa, melalui siaran pers yang dikutip Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (19/02). Kompak Indonesia juga mendesak KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pengawasan dan supervisi serius kepada Kepala Kejati Papua dan jajarannya, agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual korupsi di Pegunungan Bintang (https://jubi.id/rilis-pers/2025/kompak-desak-kejati-papua-tangkap-terduga-koruptor-di-pegunungan-bintang/).

26 Februari

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kelas IB Manokwari menjatuhkan vonis bebas atau melepaskan tiga terdakwa dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging), dalam perkara dugaan kasus dugaan korupsi pada pengerjaan jasa konstruksi pengembangan talent corner Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI, Kementerian Ketenagakerjaan Sorong tahun 2022. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03.02/SR-253/PW27/5/2024, 27 Agustus 2024, dalam pengerjaan jasa konstruksi talent corner BLKI terdapat kerugian sekitar Rp900 juta lebih. Proyek ini dikerjakan oleh Suryono yang meminjam perusahaan dari terdakwa Barnabas Ovide dan terdakwa lain yakni Rahman Arsyad selaku PPK atau kepala Balai. Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Berlinda Ursula Mayor SH LLM dan Hakim Anggota Pitayartanto dan Hermawanto SH. Mereka memutuskan membebaskan tiga terdakwa yakni Barnabas Ovide, Rahman Arsyad, dan Suryono dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Manokwari, Senin (24/02), majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa Barnabas Ovide dengan Nomor Perkara 27/pid sus-tpk/2024/PN Mnk, Rahman Arsyad

Perkara Nomor 26/pid sus-tpk/2024/PN Mnk, dan Suryono dengan Nomor Perkara 28/pid sus-tpk/2024/pn Mnk, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider. Selanjutnya, dalam amar putusan majelis hakim melepaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU, kemudian memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat, dan martabat (https://jubi.id/domberai/2025/tiga-terdakwa-dugaan-korupsi-blki-sorong-divonis-bebas/).

24 April

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua diminta untuk menghadirkan Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON XX Papua, Yunus Wonda dalam persidangan kasus korupsi PON XX Papua. Jaksa Penuntut Umum juga diminta menghadirkan Rafael Fakhiri dalam persidangan kasus korupsi PON XX Papua. Permintaan itu disampaikan penasehat hukum terdakwa Reky Douglas Ambrauw (Koordinator Bidang Transportasi) dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, pada Rabu (23/04). Penasehat hukum yang mendampingi terdakwa Reky Douglas Ambrauw itu adalah advokat Yulius Yansens Pardjer, advokat Erwin Hutagaol dan advokat Riko Gultom. *"Di persidangan, JPU telah menghadirkan saksi-saksi juga diluar BAP. Saksi diluar BAP [yang harus] dihadirkan juga dalam hal ini Ketua Harian PB PON XX Papua, Yunus Wonda [dan] Rafel Fakhiri,"* kata Yulius Yansens Pardjer dalam persidangan. Empat pejabat PB PON XX Papua 2021 kini duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Vera Parinussa (Koordinator Revenue), Reky Douglas Ambrauw (Koordinator Bidang Transportasi), Theodorus Rumbiak (Bendahara Umum), dan Roy Letlora (Ketua Bidang II). Jaksa Penuntut Umum mendakwa keempat terdakwa telah menyalahgunakan dana penyelenggaraan PON XX, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp204,3 miliar. Mereka didakwa dengan pasal primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (https://jubi.id/polhukam/2025/nama-sering-disebut-yunus-wonda-didesak-hadir-di-sidang-korupsi-pon-xx/).

30 April

- Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Merauke menetapkan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Katolik Santa Maria Fatima-Kelapa Lima tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke, Papua Selatan tahun anggaran 2023. Para tersangka itu berinisial MYA, PWT dan VN. Ketiganya telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Klas II B Merauke, sejak Selasa (29/04). Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Merauke, Sulta Sitohang mengatakan, penetapan dan penahanan tersangka berdasarkan perkembangan penyidikan perkara. Berdasarkan ekspose perkara, penyidik menyimpulkan telah terdapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang itu sebagai tersangka. *"Peran dari ketiganya masing-masing, tersangka M.Y.A selaku pejabat pembuat komitmen, P.W.T selaku Direktur CV. Buako dan VN alias A selaku pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari CV. Buako,"* kata Sultan Sitohang kepada wartawan, Rabu (30/04) (https://jubi.id/animha/2025/kejari-tetapkan-tiga-tersangka-dugaan-korupsi-pembangunan-gereja-kelapa-lima-merauke/).
- Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Manokwari, Papua Barat memeriksa anggota Bawaslu Provinsi Papua, Nurlaila Muhammad terkait dugaan korupsi. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasi Pidsus Kejari Manokwari Asrul, SH membenarkan pemeriksaan terhadap Anggota Bawaslu Papua Barat tersebut. Menurutnya, dugaan korupsi itu berkaitan dengan dana hibah pengawasan pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk Bawaslu Kabupaten Manokwari pada 2020 silam. Pada periode itu Nurlaila merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari. Pemeriksaan yang berlangsung sekitar enam jam itu dilakukan di kantor Kejari Manokwari, di Jalan Pahlawan, Kota Manokwari, Papua Barat pada Selasa (29/04). *"[Nurlaila] diperiksa sebagai anggota Bawaslu Manokwari*

tahun anggaran 2020. [Nurlaila] diperiksa dari jam 10 hingga jam 3 sore," kata Asrul. Katanya, ada indikasi dugaan korupsi dana hibah pengawasan pilkada ke Bawaslu Manokwari tahun anggaran 2020 silam. Sebab, lembaga pengawas pemilihan umum tersebut, belum menyampaikan sepenuhnya bukti pertanggung jawaban belanja hibah kepada pemerintah daerah (https://jubi.id/domberai/2025/penyidik-kejari-manokwari-periksa-komisioner-bawaslu-papua-barat-terkait-dugaan-korupsi/).

08 Mei

Penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian Resor Merauke atau Tipikor Polres Merauke, Papua Selatan telah memeriksa 45 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bagi PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Kepala Unit Tipikor Polres Merauke, Brigadir Kepala Reinaldhy Ocktavian kepada Jubi, Rabu (07/05), mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyalurkan dana hibah kepada Kelompok Kerja atau Pokja Bunda PAUD melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Rp8,5 miliar pada tahun anggaran 2023. Akan tetapi, berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp4.617.667.050. Penyidik Tipikor Polres Merauke pun telah memeriksa puluhan orang, diantaranya pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, pengurus Pokja Bunda PAUD hingga pihak ketiga. Namun belum ada tersangka dalam kasus ini. "*Berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP, ada potensi kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar sekian. Dalam waktu dekat kami akan ke BPKP di Jayapura, untuk memastikan lagi hasil audit tersebut. Kami juga akan memeriksa hal yang lainnya, termasuk aliran dana ini ke mana saja,"* kata Reinaldhy. Reinaldhy mengatakan dari puluhan orang yang telah diperiksa, hanya YM selaku Bendahara Bunda PAUD Papua Selatan yang terakhir yang akan dimintai keterangan (https://jubi.id/animha/2025/polres-merauke-periksa-45-orang-terkait-dugaan-korupsi-dana-paud/).

09 Mei

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura akhirnya menjatuhkan putusan terhadap mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabuoaten Mappi Budi Margono dan pihak ketiga Andi Hasan Aco dalam kasus korupsi pengadaan speed boat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mappi tahun anggaran 2016 (Cenderawasih Pos).

28 Mei

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan bagi empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua dalam sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (28/05). Keempat terdakwa itu dituntut dengan hukuman penjara, uang pengganti, dan denda yang berbeda-beda. Keempat terdakwa yang mengikuti sidang pembacaan tuntutan pada Rabu adalah para pejabat Panitia Besar PON XX Papua. Mereka adalah Vera Parinussa (Koordinator Revenue), Reky Douglas Ambrauw (Koordinator Bidang Transportasi), Theodorus Rumbiak (Bendahara Umum), dan Roy Letlora (Ketua Bidang II). Dalam tuntutannya terhadap terdakwa Vera Parinussa, Jaksa Natalia Ramma menyatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp18.699.747.000. Jaksa Natalia Ramma menyatakan Vera Parinussa turut serta melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang atas perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (https://jubi.id/polhukam/2025/4-terdakwa-korupsi-pon-papua-dituntut-pidana-penjara-uang-pengganti-dan-denda/).

12 Juni

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR

Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021. Penetapan dan penahanan empat tersangka dilakukan setelah keempatnya menjalani pemeriksaan di Kejati Papua, Rabu (11/06) malam. Keempat tersangka adalah PJK selaku Direktur PT Karya Mandiri Permai (Penyedia Jasa Konstruksi), RK Direktur PT Mulya Cipta Perkasa (Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan), S yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DRHM sebagai Pengguna Anggaran (PA). Nilai proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika itu Rp Rp79 miliar 134 juta dengan perkiraan kerugian negara Rp31 miliar 303 juta (https://jubi.id/polhukam/2025/kejati-papua-tahan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-pembangunan-aerosport-mimika/).

13 Juni

Massa dari Ormas Pilar Pemuda Rakyat atau Pidar Papua mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat Kamis (12/06). Massa menggunakan mobil komando melakukan orasi di depan Kantor Kejati di Arfai Manokwari Papua Barat. Aksi dikawal oleh aparat Kepolisian dan personil TNI yang menjaga Kantor Kejaksaan. Tuntutan massa berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan rangka baja proyek pembangunan jembatan kali Wasian tahap II di Distrik Beimes Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Manokwari. Koordinator aksi massa, Jackson Kapisa meminta Kejaksaan menghadirkan pelaku Simon Dowansiba, Anshar Nurdin yang seharusnya jadi pelaku, tetapi masih menjadi saksi. Anshar merupakan direktur utama PT Nusa Marga Raya. Selain itu mantan kepala Dinas PUPR Andreas Tomi Tulak hingga saat ini bersama bendahara Dinas PUPR tak pernah dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum atau JPU selama persidangan. Aksi itu juga dihadiri keluarga Terdakwa Jhony Koromad selaku PPK dalam proyek pengadaan dengan jumlah uang sekitar Rp3,8 Miliar. Dalam perkara tersebut terdapat dua orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, keduanya yakni Fredy Parubak selaku pihak yang meminjam bendera dari Anshar Nurdin Politikus Golkar yang juga pemilik PT Nusa Marga Raya (https://jubi.

id/domberai/2025/kantor-kejati-papua-barat-digeruduk-massa-desak-penetapan-mantan-kadis-pupr-bintuni-tersangka/).

14 Juni

Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua kembali menetapkan satu tersangka dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua pada 2021 lalu. Sebelumnya penyidik Kejati Papua menetapkan PJK, RK, S, dan DRHM sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu, (11/06). Tim penyidik Pidana Khusus atau Pidsus Kejati Papua, kembali menetapkan satu tersangka berinisial AJ, Jumat (13/06) malam. AJ merupakan Tenaga Ahli Pembantuan Perencanaan PT Mulya Cipta Perkasa. Proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport senilai Rp79.134.000.000 dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp31.302.287.038.04, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (https://jubi.id/polhukam/2025/kejati-papua-kembali-tetapkan-satu-tersangka-dugaan-korupsi-dana-pon-xx/).

17 Juni

Akalius Yunus Misiro alias AYM, seorang Pegawai Puskesmas yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Pembangunan Jalan Mogoy Mardey mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp2 Miliar ke JPU Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Akalius berperan dalam kasus ini sebagai kontraktor. Total pengembalian dalam perkara ini sebesar Rp5,4 Miliar dari total kerugian Negara Rp7,3 Miliar lebih. *"Pengembalian ke JPU di Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni pada Senin (16/06),"* kata Asisten Pidana Khusus Aspidsus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Syambas Selasa (17/06) didampingi Asisten Intelijen Kejati dan Kasi Pidsus Kejari Bintuni di Kantor Kejati Papua Barat. Sementara saat ini berkas perkara Tersangka Akalius dengan Nomor Perkara 21/Pid.Sus.TPK/2025/Pn.Mnk, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manokwari dan menunggu agenda sidang dakwaan yang dijadwalkan Rabu (18/06) (https://jubi.id/

bomberai/2025/pegawai-puskesmas-di-teluk-bintuni-kembalikan-rp2-miliar-uang-korupsi-jalan-mogoy-mardey/).

28 Juni

Bendahara (REW) dan Sekretaris (MI) KPU Kabupaten Fakfak diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat di ruangan penyidik Markas Polda Papua Barat Sabtu (28/06). Penyidik menyita dokumen berupa Rekening Koran Hibah dari APBD untuk Pilkada Kabupaten Fakfak, Rekening Koran APBN untuk Pemilu 2024 dan rekening koran Dana Sharing Pilkada dari KPU Papua Barat. KPU Papua Barat menerima dana hibah dari Pemerintah Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp200,032 Miliar. Dari Total Anggaran itu, setiap KPU di 7 Kabupaten mendapatkan dana sharing dari KPU Provinsi Papua Barat, untuk Kabupaten Fakfak sekitar Rp12 Miliar. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Fakfak KPU juga mendapat dana hibah sekitar Rp39 Miliar. Bendahara maupun Sekretaris KPU Fakfak diperiksa dalam rangkaian pengungkapan dugaan korupsi pemberian dana hibah Pilkada di Kabupaten Fakfak dan Papua Barat serta Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 (https://jubi.id/bomberai/2025/bendahara-dan-sekretaris-kpu-fakfak-diperiksa-polda-sita-dokumen-anggaran/).

02 Juli

Tokoh Pemuda Arfak Yustinus Meidodga menyebut penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada di KPU Papua Barat sebagai momen Polda Papua Barat memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di wilayah Hukum Papua Barat. *"Saya kira penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Papua Barat jadi momen Tipikor Polda memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di Papua Barat,"* kata Yustinus Meidodga dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79, Rabu (02/07). Meidodga menilai bahwa KPU merupakan lembaga independent, orang-orang di dalam harus dipastikan bersih dari masalah hukum maupun persoalan moral, sehingga di masa yang akan datang proses seleksi para Komisioner KPU di tingkat

provinsi maupun kabupaten, panitia seleksi perlu memperhatikan urusan hukum dan moral setiap calon dengan teliti (https://jubi.id/domberai/2025/tokoh-pemuda-arfak-kasus-hibah-kpu-jadi-ujian-citra-polda-papua-barat/).

09 Juli

Tak hanya kasus Korupsi PON yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua. Ada sejumlah kasus korupsi menonjol lainnya yang sedang "digarap", salah satunya adalah penyidikan terhadap tiga kasus tindak pidana korupsi. Tiga kasus itu meliputi dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Itu untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di tingkat konsumen periode tahun 2020 hingga tahun 2023, di kantor Bulog Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Lalu pengelolaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) T.A 2021 dan penyimpangan uang pengganti dang anti uang persediaan pada Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua. Kemudian ketiga adalah penanganan kasusu korupsi pada salah satu bank daerah di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah (Cenderawasih Pos).

16 Juli

Penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Penyalahgunaan dana hibah untuk renovasi Masjid At-taqwa di SP5 Kampung Argosigomerai Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat ke Pengadilan Tipikor Manokwari. Perkara ini ditangani oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni dengan menetapkan tersangka tunggal yang menjabat sebagai bendahara renovasi Masjid At-taqwa. *"Tersangka AM saat ini kita titip di Rutan Teluk Bintuni, dalam waktu dekat kita akan pindahkan ke lapas Manokwari,"* kata Kasi Pidsus. Kasi pidsus menjelaskan bahwa perkara ini masuk dalam tindak pidana korupsi karena dana bersumber dari Uang negara atau Hibah Biro Kesra Pemprov Papua Barat (https://jubi.id/bomberai/2025/kasus-korupsi-dana-hibah-masjid-at-taqwa-dilimpahkan-ke-tipikor-manokwari/).

18 Juli

Kejaksaan Negeri Jayawajiya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas di Distrik Nipsam, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan tahun 2018. Dua orang tersangka tersebut masing-masing EH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT.MAP berinisial BGT, selaku pelaksana pekerjaan dalam kegiatan pembanguna Puskesmas Distrik Nipsam (Cenderawasih Pos).

22 Juli

Penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di distrik Beoga, kabupaten Puncak, provinsi Papua Tengah, diduga diintervensi oknum aparat keamanan (Apkam). Mereka bahkan meminta "jatah", meski secara aturan tak dibenarkan. Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP SKP KC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Papua, ELSHAM Papua, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, dan KontraS Papua, menyatakan, realisasi dana BLT diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu dengan sejumlah kriteria. Sayangnya, seperti terjadi di Distrik Beoga, sudah melanggar regulasi, sehingga perlu diselidiki dan apabola ditemukan fakta, maka wajib diproses hukum. *"Publik telah mengikuti sebuah video viral, bahwa terdengar seorang oknum polisi yang mengatakan "Ini ada rekan-rekan dari Satgas, dari Koramil dengan Polsek, silakan atur. Ya, atur untuk keamanan punya silakan ambil, isi di dalam ini, selesai langsung bawa ke masyarakat masing-masing. Bisa?". Okum aparat keamanan yang diduga terlibat dalam pungutan dana BLT tersebut harus diselidiki dan diproses hukum bila terbukti benar,"* ujarnya dalam siaran pers, Selasa (22/07). Dalam video viral itu, seorang aparat kampung yang ada di sekitar itu menjawab,"Jadi begini bapak. Yang bagi uang ini saya tahu, saya sudah pernah, saya sudah pengalaman. Saya sendiri buka di meja. Saya sendiri bagi-bagi ke masyarakat." Setelahnya oknum polisi menyanggah, "Bagi di sini to, hormat itu yang betul." Pada prinsipnya semua percakapan itu maupun kondisi saat percakapan itu berlangsung semuannya terekam dalam

video berjudul "BLT di Beoga Kab. Puncak Papua Tengah" sebagaimana diungah dalam link https://www.youtube.com/watch?v=cFed0-nQVtE (https://suarapapua.com/2025/07/22/oknum-apkam-diduga-terlibat-ambil-dana-blt-di-kabupaten-puncak-wajib-diproses/).

24 Juli

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan pentingnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hukum sekaligus kejahatan moral yang turut merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat kemajuan daerah. Saat membuka kegiatan sosialisasi jaga desa, Tipikor, dan mitigasi resiko kerugian keuangan negara di wilayah pemerintah provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan Kamis (24/07), Gubernur Meki Nawipa menyatakan, setiap peluang terjadi penyalahgunaan keuangan negara harus dicegah dan itu harus menjadi komitmen bersama untuk menyatakan lawan terhadap tindakan pidana korupsi. *"Saudara-saudari sekalian, korupsi harus dicegah jangan sampai terjadi. Bukan sekedar pelanggaran hukum saja, korupsi itu juga tindakan kejahatan moral yang merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasannya merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus canangkan gerakan budaya anti korupsi,"* tegasnya menyampaikan sambutan di aula kantor gubernur Papua Tengah (https://suarapapua.com/2025/07/24/gubernur-papua-tengah-serukan-komitmen-bersama-berantas-korupsi/).

26 Juli

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Nabire sejak 2024 hingga Mei 2025 ditaksir Rp10 Miliar. Itu ditemukan setelah proses penyelidikan yang kini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sebagaimana dipastikan Kejari Nabire. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nabire, Chrispo Simanjuntak, menyatakan, prosesnya terus berlanjut dan tim penyidik mendapati sejumlah indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD Nabire. Kata Chrispo, penyidikan dilakukan berdasarkan surat

perintah penyidikan yang diterbitkan kepala Kejari Nabire. *"Sudah ada temuan beberapa tindakan yang diduga merugikan keuangan negara mencapai sepuluh miliar rupiah. Itu terhitung dari tahun 2024 sampai Mei 2025. Nah, sekarang kami membutuhkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban untuk memperjelas aliran dana dan realisasi anggarannya. Kasus ini sedang ditangani,"* ujarnya saat dikonfirmasi di Nabire, Sabtu (26/07) (https://suarapapua.com/2025/07/26/dugaan-korupsi-di-rsud-nabire-rp10-miliar-kejari-pastikan-naik-tahap-penyidikan/).

29 Juli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah hotel dan tempat usaha yang menunggak pajak daerah di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (29/07) siang. Tepat Pukul 14.45 WIT, kepala satuan tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK, Dian Patria didampingi pemerintah kota Sorong turun lapangan melakukan tindakan tegas dengan menempel stiker dan memasang poster peringatan. "Pemberitahuan objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah", bunyi plang yang ditempel di dinding kaca M hotel dan spanduk diikat di depan pintu masuk hotel tersebut. Dian Patria mengatakan, M Hotel berkali-kali melakukan penunggakan dalam membayar pajak daerah. *"Hotel ini berkali-kali menunggak pajak. Kali ini tunggakan 1,4 miliar,"* jelasnya kepada Suara Papua, Selasa (29/07). Dian menyebut tunggakan tersebut tergolong besar. Jika tak dibayar dalam waktu tiga hari, kata Dian, pelayanan publik akan diblokir dan tempatnya ditutup sementara. *"Dalam tiga hari tidak dibayar, maka tempat ditutup sementara,"* ujarnya. Menurut Dian, ada 19 wajib pajak daerah belum dibayar dengan total nilai Rp12.297.193.333 atau mencapai 12,3 miliar rupiah (https://suarapapua.com/2025/07/29/utang-pajak-senilai-rp14-miliar-m-hotel-disegel-kpk/).

04 Agustus

Dua terdakwa kasus korupsi Jalan Simiei Obo di Distrik Kuri, Teluk Bintuni Papua Barat divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari. Keduanya dibebaskan dari dakwaan Primer Jaksa penuntut umum atau JPU. Majelis Hakim yang dipimpin

Helmin Somalay SH MH menjatuhkan vonis kepada terdakwa Suradi dan Muhlis 1 tahun denda Rp100.000.000,- subsider 2 bulan penjara. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum," ucap ketua majelis Hakim dalam persidangan. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni satu tahun enam bulan kepada dua terdakwa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya (https://jubi.id/polhukam/2025/dua-terdakwa-korupsi-jalan-simiei-obo-divonis-1-tahun-penjara/).

19 Agustus

Praktisi Hukum Simon Banundi mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi Penyalahgunaan beasiswa di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 yang selama ini ditangani oleh Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat. Simon dalam keterangan pers meminta Kapolda Papua Barat seharusnya transparan terhadap kinerja yang dijalankan selama ini. *"Masalah ini kami dapat informasi bahwa sudah dilakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan, mengapa tak ada kelanjutan,"* kata Simon Banundi, Selasa (19/08). Simon menyebut bahwa terdapat sekitar 300 penerima bantuan pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2023 yang diduga sebagian besar tidak tepat sasaran. Besaran dana yang diperuntukan kepada para penerima beasiswa beragama sesuai klasifikasi strata para mahasiswa dengan kisaran sekitar Rp5 Miliar (https://jubi.id/domberai/2025/kasus-dugaan-korupsi-beasiswa-papua-barat-mandek-praktisi-hukum-minta-kepastian/).

06 September

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy mempertanyakan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Kaimana–Wasior tahun anggaran 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp149 miliar. *"Saya merasa heran dan curiga kenapa saudara Kajati Papua Barat*

dan jajarannya belum juga menindaklanjuti perkara dugaan Tipidkor pada proyek pembangunan Jalan Kaimana dan Wasior tersebut," ucapnya. Pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh dua perusahaan, yakni PT Venus Inari dan PT Ana Cenderawasih Permai, yang diduga dimiliki oleh seorang pengusaha berinisial WH. *"Sejauh yang saya ketahui, pekerjaan proyek besar tersebut sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat, utamanya antara Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana,"* kata melalui pesan WhatsApp Kepada Jubi (06/09) (https://jubi.id/bomberai/2025/warinussy-kejati-papua-barat-diduga-abaikan-kasus-korupsi-jalan-kaimana-wasior/).

15 September

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Dermaga Speedboat di Kawasan Marampa Sowi, Manokwari ditaksir mencapai Rp19 Miliar dari dua mata anggaran yakni 2016 dan 2017 di Dinas Perhubungan Papua Barat. Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Muhammad Bardan mengatakan, proses penanganan perkara ini masih menunggu hasil hitung kerugian negara dari BPKP Papua Barat. *"[Dermaga] Marampa itu sudah ekspos di BPKP. Nah disela ekspos itu kan ada kekurangan yang diminta untuk dilengkapi,"* kata Muhammad Bardan Senin (15/09). Proyek Dermaga Speedboat Marampa dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat pada Tahun 2016 dengan anggaran Rp19 Miliar. Pada Tahun 201,7 indikasi progres pekerjaan hanya Rp2,7 miliar dari total anggaran Rp4,7 Miliar. Anggaran yang begitu besar hanya menyisakan dermaga yang mangkrak bertahun-tahun (https://jubi.id/domberai/2025/korupsi-dermaga-speedboat-marampa-manokwari-capai-rp19-miliar/).

26 September

Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2022-2024 Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, akhirnya terkuak. Sedikitnya 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu dirilis Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kamis (25/09). Dugaan korupsi tersebut diadukan beberapa waktu lalu. Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrige

Rudolf Renwarin mengatakan, dugaan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp168.172.682.675. Dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Keuangan Pemerintah (APKKN). Kata Renwarin, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua telah menetapkan 9 orang tersangka dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah kabupaten Lanny Jaya dan pihak Bank Papua. *"Total keuntungan yang diperoleh para tersangka dilaporkan mencapai lebih dari Rp168 miliar,"* ujar Kapolda Papua. Lanjut dijelaskan, modus operandi penyalahgunaan dana desa diawali dengan adanya surat permintaan pemindahbukuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Lanny Jaya kepada kepala Bank Papua cabang Tiom (https://suarapapua.com/2025/09/26/polda-papua-tahan-9-orang-terkait-korupsi-dd-dan-add-rp168-m/, https://jubi.id/polhukam/2025/polda-papua-ungkap-korupsi-dana-desa-rp168-miliar-di-kabupaten-lanny-jaya/ dan Cendewasih Pos).

09 Oktober

Dugaan Korupsi Dana Hibah di Yayasan Pendidikan Sains Imanuel atau YPSI, kini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari total Anggaran Rp7,35 Miliar pada 2023 dan 2024 terdapat indikasi kerugian negara mencapai Rp6,308 Miliar.Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan tinggi yang menaungi sebuah kampus swasta di Manokwari Papua Barat. Peningkatan status penyidikan setelah penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Papua Barat melakukan gelar perkara. *"Sesuai hasil gelar perkara di tingkat menjadi Penyidikan,"* kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignatius Benny Prabowo, Kamis (09/10). Lebih lanjut Benny Prabowo merincikan bahwa Pada tahun 2023 dan 2024, YPSI Manokwari mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kesbangpol sebesar Rp 7.350.000.000,- dengan rincian Tahun 2023 sebesar Rp 2.350.000.000,- dan Tahun 2024 sebesar Rp5.Miliar (https://jubi.id/domberai/2025/dugaan-korupsi-dana-hibah-rp63-miliar-di-ypsi-manokwari-masuk-tahap-penyidikan/).

15 Oktober

Setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang sejak awal 2025, kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Kabupaten Merauke, Papua Selatan akhirnya menemukan titik terang. Kepolisian Resor Merauke resmi menetapkan satu orang berinisial YM sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan mantan bendahara Bunda PAUD Papua Selatan itu sebagai tersangka disampaikan setelah penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Merauke di akhir September 2025 lalu. Leonardo Yoga berujar kendati baru satu tersangka yang ditetapkan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang akan menyusul. Karena hingga saat ini penyidik Polres Merauke masih melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus korupsi tersebut (https://jubi.id/animha/2025/polisi-tetapkan-ym-sebagai-terduga-korupsi-dana-paud-di-merauke/).

21 Oktober

Kejaksaan Negeri Merauke menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana air bersih di Kampung Firiwage, Distrik Firiwage Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan pada tahun anggaran 2023. Tersangka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Boven Digoel, FT, yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Boven Digoel. Tersangka lain berinisial K, Wakil Direktur CV Bangun Sarana Papua. Kedua tersangka ditahan selama 20 hari di rumah tahanan negara atau Rutan Klas II B Merauke, berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan pada tanggal yang sama. Penahanan ini untuk memastikan proses penuntutan berjalan lancar dan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti. Donny menerangkan kasus ini berawal dari Dinas PUPR Boven Digoel mendapat alokasi dana Otonomi Khusus untuk pembangunan sarana air bersih di Kampung Firiwage sebesar Rp3.340.768.000 di 2023. Proyek ini dilelang pada 8 September 2023

melalui LPSE di sana (https://jubi.id/animha/2025/jaksa-tahan-dua-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-air-bersih-di-boven-digoel/ dan Cenderawasih Pos).

25 Oktober

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, menetapkan mantan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan anggaran tahun 2019-2021. Selain menetapkan Ketua LPMP dengan inisial AH sebagai tersangka, dua tersangka lainnya adalah bendahara pengeluaran berinisial AI dan bendahara penerima berinisial ER (Cenderawasih Pos).

30 Oktober

Babak baru dugaan kasus korupsi pembangunan Venue Aerosport Mimika, untuk pelaksanaan PON XX Papua 2021 menetapkan empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka. Keempatnya disebut terlibat dalam dugaan korupsi, dengan nilai kontrak p79 miliar. Para tersangka tersebut berinisial DJ selaku Ketua Pokja Pengadaan II, M, HW dan RJ masing-masing berstatus sebagai anggota (Cenderawasih Pos).

31 Oktober

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan tiga pejabat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Papua sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran tahun 2019–2021 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp43 miliar. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 24 Oktober 2025, setelah penyidik menemukan lebih dari dua alat bukti yang cukup. Ketiga tersangka itu ialah AH selaku Kepala LPMP Papua, AI sebagai Bendahara Pengeluaran, dan R sebagai Bendahara Penerima. *"Penyidik menemukan bukti kuat terkait penyimpangan dalam pengelolaan anggaran LPMP Papua selama dua tahun terakhir,"* ujar Nixon di Jayapura, pada Kamis, 30 Oktober 2025, didampingi Kepala Seksi Penyidikan, Valery Dedy Sawaki. Kerugian negara senilai Rp43 miliar itu berasal dari dua sumber dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

sebesar Rp34 miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp8 miliar. Modusnya antara lain berupa penagihan anggaran melebihi nilai seharusnya, serta penggunaan dana yang tidak disetorkan ke kas negara. Penyidik juga menemukan praktik belanja fiktif serta pengeluaran pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan dana APBN (https://jubi.id/polhukam/2025/tiga-pejabat-lpmp-papua-jadi-tersangka-korupsi-rp43-miliar/).

06 November

Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan HJT mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Sorong dan BEPM selaku Bendahara BPKAD Kota Sorong Papua Barat Daya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat tulis kantor ATK di Pemerintah Kota Sorong Tahun 2017. HJT dan BEPM langsung menggunakan rompi tahanan Jaksa kemudian dibawa menggunakan Mobil tahanan ke Lapas Sorong Kota, Kamis (06/11). Asisten Pidana Khusus Aspidsus Kejati Papua Barat, Agustiawan Umar mengatakan dua pejabat Pemkot Sorong yang ditetapkan tersangka dugaan korupsi berinisial HJT berdasarkan surat penetapan nomor: TAP-02/R.2.1/ Fd.2/11/2025 tanggal 6 November 2025. Kemudian tersangka BEPM menjabat sebagai Bendahara Barang BPKAD Kota Sorong, ditetapkan berdasarkan surat penetapan nomor: TAP-03/R.2.1/Fd.2/11/2025 tanggal 6 November 2025. “Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian proses penyidikan yang telah berlangsung,” kata Agustiawan. BPKAD Kota Sorong di masa kepemimpinan Wali Kota Lambertus Jitmau Tahun 2017 mengalokasikan anggaran Rp1,3 Miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil DBH Pajak/bukan pajak dalam abad induk untuk belanja barang dan jasa alat tulis kantor ATK (https://jubi.id/domberai/2025/eks-kepala-bpkad-kota-sorong-dan-bendahara-jadi-tersangka-korupsi/).

10 November

Kejaksaan Tinggi Papua Barat menerima pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan yang berpotensi ke arah tindak pidana korupsi anggaran makan minum untuk Kepala Daerah Tahun 2024 yang diadukan oleh

Organisasi Masyarakat Ormas Pilar Demokrasi Rakyat atau Pidar Papua Barat di sentra pelayanan publik Kejaksaan Tinggi Papua Barat. *"Kami sudah menyerahkan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi berharap kepala kejaksaan tinggi dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut,"* kata Ketua Pidar Papua Barat Jackson Kapisa dalam keterangan pers Senin (10/11). "Berdasarkan aduan masyarakat ada pemalangan ruangan Benset karena terjadi keterlambatan Bendahara Benset Papua Barat menginput gaji pegawai Setda sehingga awal bulan tanggal 1 sampai dengan 5, Pegawai Sekda belum menerima gaji" katanya. Jackson Kapisa menyebut bahwa adanya operasional bagi kepala daerah atau KDH dan wakil kepala daerah atau WKDH dan belanja makan/minum, belanja fasilitas kunjungan tamu, *"ada indikasi pembayaran dobol (ganda) yang merugikan negara. Kami Ormas Pilar Pemuda Rakyat sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Bendahara sekretaris daerah Bensed Papua Barat,"* katanya. Sebagai Ormas, Jackson menegaskan bahwa peranya mengawal Pemerintah dalam mengelolah keuangan daerah secara baik dan transparan. Kapisa menegaskan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi merupakan hasil temuan BPK Tahun 2024 dimana terdapat belanja makan minum yang dibayar dua kali (https://jubi.id/domberai/2025/pidar-laporkan-dugaan-korupsi-anggaran-makan-minum-ke-kejati-papua-barat/).

15 November

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang menduga penyaluran Bansos di wilayah itu tidak transparan. Wakil Ketua II DPRK Pegubin, Yanus Delka mengatakan dana Bansos yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, diduga kuat telah digunakan secara sistematis oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. DPRK Pegubin pun mendesak pihak berwajib segera melakukan audit investigasi menyeluruh, membongkar praktik dugaan korupsi yang terstruktur sejak 2021 hingga 2025. Selama ini pihak DPRK merasa dipermainkan oleh Dinas Sosial Pegubin dan Kantor Pos Oksibil terkait penyaluran dana Bansos. Dinsos dan kantor Pos Oksibil dinilai tidak transparan dan sengaja menutup-nutupi informasi yang seharusnya menjadi hak publik. *"Setiap kali kami meminta data dan informasi terkait Bansos, mereka selalu memberikan*

jawaban yang berbelit-belit dan tidak jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ini kan tidak bisa dibiarkan," kata Yanus Delka dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Sabtu (15/11). Yunus Delka menegaskan, dana bansos adalah hak masyarakat tak mampu di Kabupaten Pegubin, bukan hak oknum-oknum tertentu untuk dikorupsi. Ia pun mengecam dugaan praktik pungli dan penyelewengan yang diduga dilakukan oleh kepala distrik dalam penyaluran bansos (https://jubi.id/rilis-pers/2025/dprk-menduga-penyaluran-dana-bansos-di-pegubin-tidak-transparan/ dan Cenderawasih Pos).

17 Desember

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi di Provinsi Papua selama 2025, mencapai Rp 422,4 miliar. Kerugian terbesar berasal dari kasus Pekan olahraga Nasional (PON) Papua, Bank Papua, serta sejumlah proyek infrastruktur di daerah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse mengatakan selama 2025 pihaknya menerima 27 laporan dugaan korupsi dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kejaksaan Agung. *"Dari laporan tersebut, sebagian sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan, sementara lainnya dilimpahkan ke kejaksaan negeri,"* kata Nixon Mahuse di Kota Jayapura, Papua, Selasa (16/12). Dalam tahap penyelidikan, ujar Nixon, Kejati Papua menangani 12 kasus perkara dan telah menyelesaikan empat diantaranya. Sedangkan tahap penyidikan, ada 13 perkara, dengan sembilan di antaranya telah dilimpahkan ke pengadilan. Kasus PON Papua menjadi penyumbang kerugian negara terbesar, yakni Rp204,3 miliar. Disusul Bank Papua Rp120,6 miliar, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Rp38 miliar, proyek di Kabupaten Mimika Rp31,3 miliar, dan Bulog Wamena Rp27,3 miliar (https://jubi.id/polhukam/2025/kerugian-korupsi-di-papua-tembus-rp422-miliar-selama-2025/).

18 Desember

Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengumpulkan para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dipimpin Plh Kejati Papua Barat di Manokwari Kamis (18/12). Raker Tahun 2025 dengan tema, Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Kejaksaan untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern menuju Indonesia Emas menghadirkan para Kepala Kejaksaan Negeri di Papua Barat dan Papua Barat Daya serta para Koordinator dan Asisten. Plh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Luhur Istighfar SH MH mengatakan bahwa tujuan Pelaksanaan Rakerda Agar dapat membuat Perencanaan dan Anggaran dan Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah. *"Dalam hal Penegakan Hukum untuk dapat dilakukan evaluasi dan merumuskan strategi untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara di bidang pidana umum, pidana khusus, dan perdata/tata usaha negara (Datun), termasuk percepatan penyelesaian tunggakan perkara,"* kata Plh Kejati Papua Barat, Luhur Istighfar (https://jubi.id/domberai/2025/raker-kejati-papua-barat-para-kejari-bahas-penanganan-korupsi-hingga-pidana-umum/).

30 Desember

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Merauke akhirnya menetapkan Ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan berinisial AI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah Pemprov Papua Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar RP 4,6 miliar (Cenderawasih Pos).

Kronik Daerah Otonomi Baru, Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua

11 Januari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Karya Kita Anak Budak (Kaki Abu) mengecam keputusan MRP yang dianggap tak melindungi hak-hak OAP terkait kuota OAP pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pernyataan resminya, Leonardo Ijie, direktur LBH Kaki Abu, menegaskan, kebijakan MRP terkait kuota OAP,

khususnya individu yang disebut "Nene Tete Papua", tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, keputusan dari MRP PBD dalam memverifikasi 86 orang CPNS di lingkungan provinsi Papua Barat Daya sangat bertolakbelakang dengan amanat UU Otonomi Khusus Papua. *"Kami sangat kecewa dengan sikap MRP. Kebijakannya tidak didukung aturan dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua maupun regulasi KemenPAN RB nomor 320, yang secara tegas mengatur kuota 80 persen untuk OAP,"* ujar Leonardo, Jumat (10/01) (https://suarapapua.com/2025/01/11/dinilai-melanggar-uu-otsus-lbh-kaki-abu-soroti-mrp-pbd-terkait-verifikasi-keaslian-orang-papua/).

06 Maret

Gustaf Kawer, Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua menyatakan Pansel Anggota DPRP Papua jalur pengangkatan tahun 2024 telah melakukan pelanggaran serius, terutama pelanggaran terhadap regulasi maupun peraturan Pansel tentang tahapan. Pelanggaran itu menurut Kawer, terutama pelanggaran regulasi yang mengatur mengenai seleksi yakni UU Otsus No. 2 Thn. 2021, PP No. 106 Thn. 2021 tentang kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Propinsi Papua. Maupun pelanggaran terhadap aturan yang dibuat Pansel terkait dengan seleksi yakni Peraturan Pansel No. 1 Thn. 2024 tentang tahapan, jadwal dan pelaksanaan pengisian Anggota DPR Papua, peraturan Pansel No. 2 Thn. 2024 tentang tata cara seleksi, materi seleksi dan indikator penilaian calon Anggota DPR Papua dan Perpansel No. 3 Thn. 2024 tentang perubahan panitia seleksi Propinsi Papua No. 2 Thn. 2024 tentang tahapan jadwal dan pelaksanaan pengisianAnggota DPR Papua. Selain pelanggaran regulasi kata Kawer, terdapat indikasi pelanggaran administrasi (maladminitrasi) yang hampir merata dilakukan oleh Panitia Seleksi di 9 Daerah Pengangkatan yang berada di Wilayah Adat Tabi Saereri, baik daerah pengangkatan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori (https://suarapapua.com/2025/03/06/mendagri-dan-

gubernur-papua-diminta-mengevaluasi-kinerja-pansel-dprp-jalur-pengangkatan/).

11 Maret

Ketua MRP Provinsi Papua Nerlince Wamuar meminta pemerintah pusat tidak memangkas anggaran Dana Otsus Papua 2025. Dana Otsus Provinsi Papua 2025 telah dipangkas pemerintah pusat Rp 19 miliar sehingga menjadi Rp 881 miliar dari rencana semula Rp 900 miliar. Wamuar mengatakan wilayah Provinsi Papua dengan topografi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi akan sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah dan pihak lain melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. *"Alokasi dana yang lain sudah dipangkas, secara khusus untuk Dana Otsus di Provinsi Papua ini, kami minta dengan hormat agar tidak dipangkas,"* ujarnya di Sentani, Senin (10/03). Wamuar menjelaskan dukungan pelayanan seluruh proses pembangunan melalui alokasi dana yang bersumber dari APBN maupun APBD di daerah masing-masing sangat membantu masyarakat Papua, termasuk melalui Dana Otsus. Kenyataan saat ini, tambahnya, dengan pemotongan melalui Inpres No 1/2025 sebagian besar sumber pembiayaan kegiatan maupun pelaksanaan program pembangunan nantinya tidak berjalan dengan baik (https://jubi.id/mamta/2025/ketua-mrp-minta-dana-otsus-2025-tidak-dipangkas/).

13 Maret

- Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) secara resmi menggugat keputusan panitia seleksi (Pansel) anggota DPR provinsi Papua Barat Daya mekanisme pengangkatan tanggal 17 Februari 2025 nomor 06/PANSEL/DPRPBD/II/2025 tentang pengumuman penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya terpilih dan calon Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029. Gugatannya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu (12/03). Gugatan dilayangkan Lewi Sadrafle dan Yopi Saflembolo. Lewi Sadrafle adalah calon peserta seleksi dari daerah pengangkatan (Dapeng) kabupaten Sorong dan Yopi Saflembolo dari

Dapeng kabupaten Sorong Selatan. Keduanya dalam surat keputusan masuk sebagai calon anggota PAW. Gugatannya terdaftar di PTUN Jayapura dengan perkara nomor 18/G/2025/PTUN.JPR tertanggal 12 Maret 2025 (https://suarapapua.com/2025/03/13/dinilai-langgar-aturan-pbhkp-gugat-pansel-dprp-pbd-ke-ptun-jayapura/).

- Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana Otsus Papua disikapi tegas Meki Nawipa, gubernur provinsi Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bahkan mempertanyakan apa artinya Otsus di Tanah Papua jika dana Otsus dipangkas pemerintah pusat. Dalam Raker dalam rangka laporan Menteri Dalam Negeri terhadap perkembangan empat DOB di Papua dan laporan empat gubernur dari Tanah Papua yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, (13/03), Meki menyampaikan keresahan masyarakat bersama pemerintah daerah seiring kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. *"Undang-undang Otonomi Khusus Papua itu kan berdiri sendiri. Jadi, kalau pangkas dana alokasi umum (DAU), sekarang ini yang terjadi adalah [dana] Otsus juga dipangkas. Selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua, kita sudah kasih Otsus dan kamu silakan jalan. Tetapi hari ini yang terjadi, dana Otsus dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas. Hari ini kami bicara evaluasi dua atau tiga tahun terakhir, kantor tidak bisa kita bangun, semua tidak bisa dibangun. Karena apa arti Otonomi Khusus itu ada kepada kita? Kalau Otonomi Khusus dikasih, ya kasih full sama kita. Jadi kita itu spesial, khusus sama dengan Aceh,"* tuturnya (https://suarapapua.com/2025/03/13/gubernur-papua-tengah-desak-jakarta-tidak-kebiri-otsus/).

22 Maret

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya menggandeng KPK dan dibantu lembaga internasional Jerman, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) melakukan perencanaan dan pengawasan Dana Otsus di Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu kegiatan adalah Training dan Lokakarya Pengawasan Dana Otsus Provinsi Papua Barat Daya yang diadakan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel di Kota Sorong selama

tiga hari, Selasa-Kamis (18-20/03). Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya Alfos Kambu mengatakan training dan lokakarya tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan perencanaan Dana Otsus agar lebih tepat sasaran. *"Kami sedang mempersiapkan langkah teknis agar perencanaan Dana Otsus lebih tepat sasaran, ini langkah baru yang belum pernah dilakukan MRP Provinsi Papua Barat Daya sebelumnya, bahkan di lima provinsi lain,"* kata Kambu kepada Jubi di ruang kerjanya Gedung MRP Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (21/03). Kambu mengatakan kegiatan inisiatif tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan Dana Otsus disalurkan secara tepat waktu (https://jubi.id/domberai/2025/perkuat-pengawasan-dana-otsus-mrp-papua-barat-daya-gandeng-giz-dan-kpk/).

07 April

Beny Mawel, Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, proses seleksi anggota parlemen jalur pengkatan 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan kursi pengkatan Provinsi Papua Pegunungan telah dan sedang memasuki tahap akhir. Namun dalam proses akhir ini kata Mawel, banyak rumor dan keluhan sesama calon yang muncul. Bahkan menjadi rahasia publik bahwa oknum-oknum calon tertentu melakukan lobi politik dengan akan menyerahkan tanah adat kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik. *"Saya heran calon anggota parlemen pengangkatan gadaikan tanah adat, sementara tugas dan kewenangan anggota parlemen jalur pengamatan untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, termasuk perlindungan hak-hak atas tanah dari caplok dan klaim hilang begitu saja",* kata Mawel dalam pernyataannya kepada Suara Papua pada 5 April 2025 (https://suarapapua.com/2025/04/07/calon-dprp-dan-dprk-jalur-pengangkatan-tidak-gadaikan-tanah-adat/).

12 April

Septinus Lobat, walikota kota Sorong, mengatakan, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Otsus pertama di kota Sorong yang berlangsung di gedung Lambert Jitmau, Kamis (10/04), membahas kebutuhan prioritas OAP di wilayah pemerintahan kota Sorong. Septinus

menyatakan, hal terpenting dalam Musyawarah Otsus adalah membahas hal-hal riil dan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana Otsus. *"Kita melakukan musyawarah bersama untuk merumuskan pembangunan prioritas bagi OAP,"* ujar Septinus Lobat dalam sambutannya. Kata Septinus, dana Otsus adalah anggaran yang dialamatkan kepada OAP sebagai subjek utama, kemudian orang Papua klaster kedua yaitu mama atau bapak OAP, lalu OAP klaster ketiga adalah non OAP yang lahir besar di Tanah Papua. *"Pembangunan kepada OAP menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan semua stakeholder. Tujuan dana Otsus untuk afirmasi OAP"* (https://suarapapua.com/2025/04/12/walkot-sorong-tegaskan-musrenbang-otsus-bahas-pembangunan-prioritas-oap/).

05 Mei

Belum genap tiga tahun, usulan pemekaran sejumlah kabupaten di wilayah provinsi Papua Tengah mencuat ke permukaan tatkala gubernur Meki Frits Nawipa bicara dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Timika, kabupaten Mimika, Kamis (01/05) pekan lalu. Dari delapan kabupaten yang ada di wilayah provinsi Papua Tengah, mengemuka usulan beberapa kabupaten baru. Di kabupaten Paniai, misalnya, diusulkan dua kabupaten baru. Yakni kabupaten Moni dan kabupaten Paniai Timur. Selain itu, ada enam usulan DOB di provinsi Papua Tengah. Kabupaten Sinak, pemekaran dari kabupaten Puncak; kabupaten Ilu Jaya, pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya; kabupaten Mapia Raya, pemekaran dari kabupaten Dogiyai; kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari kabupaten Mimika; kabupaten Mimika Barat Jauh, pemekaran dari kabupaten Mimika; dan kabupaten Kemandoga, pemekaran dari kabupaten Intan Jaya. Wacana pemekaran 8 kabupaten baru tersebut mengundang polemik berkepanjangan, antara pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang menilainya bukan hal urgen dilakukan saat ini (https://suarapapua.com/2025/05/05/usulkan-8-kabupaten-baru-di-papua-tengah-yance-mote-tidak-urgen/).

17 Mei

Sidang sengketa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong jalur pengangkatan periode 2024-2029 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terus berlanjut, kendati calon terpilih telah dilantik beberapa waktu lalu. Pemerintah kabupaten Sorong dinilai tidak patuh terhadap hukum karena mengabaikan keberatan dan upaya hukum yang dilakukan pihak calon anggota DPRK yang dinyatakan gugur oleh Pansel DPRK Sorong. Klois Yable, salah satu calon anggota DPRK yang dinyatakan tidak lolos seleksi dan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura, mengatakan, pasca ditetapkan tidak lolos, pihaknya telah mengajukan surat keberatan pada tanggal 7 dan 11 Februari 2025 kepada Pansel, Pemkab Sorong dan pemerintah provinsi Papua Barat Daya terkait beberapa kejanggalan yang ditemukan (https://suarapapua.com/2025/05/17/polemik-dprk-jalur-otsus-pemkab-sorong-dinilai-tidak-taat-hukum/).

20 Mei

Hingga 24 tahun pelaksanaan Otsus Papua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tak kunjung dibentuk. Wacana pembentukan KKR selalu kontroversial, karena dikhawatirkan membuka celah bagi pelaku untuk lolos dari pemidanaan. Tapi KKR juga dibutuhkan demi pemulihan korban. Gagasan pembentukan KKR yang terkatung-katung kembali menemukan momentum pada 2019, ketika Gubernur Papua kala itu, Lukas Enembe membentuk Tim Kajian Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Tanah Papua. Tapi, setelah enam tahun berlalu, KKR di Tanah Papua belum juga terbentuk, dan kasus dugaan pelanggaran HAM baru justru terus bermunculan. Bagi Ketua Tim Kajian Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Tanah Papua, Prof Dr Melkias Hetharia, kegagalan para pemangku kepentingan Otonomi Khusus atau Otsus Papua untuk membentuk KKR merupakan bentuk pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih itu menekankan hal itu dalam lokakarya "Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban di Tanah Papua" yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) di Kota Jayapura, Papua, Rabu (14/05). Hetharia mengatakan pemerintah seharusnya menindaklanjuti pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dimandatkan dalam UU Otsus Papua tersebut. *"Secara gamblang saja saya menegaskan bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam rangka pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu,"* ujarnya (https://jubi.id/polhukam/2025/24-tahun-otsus-papua-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-tidak-kunjung-dibentuk/).

31 Mei

Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) bersama solidaritas mahasiswa Papua di kota studi Menado, Sulawesi Utara menyatakan menolak rencana pemekaran DOB Mapia Raya, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. *"Kami tegas menyatakan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera batalkan rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya. Karena kami menilai kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah itu sangat merugikan bagi masyarakat Mapia serta alam dan ekosistem yang ada di daerah Mapia, Kabupaten Dogiyai,"* tegas, Emil E Wakei, salah satu mahasiswa Mapia, sebagai koordinator dalam penyampaian pernyataan itu pada, Kamis (29/05). Ia menyatakan bahwa pihaknya dari mahasiswa dan tokoh pemuda, agama dan adat minta batalkan rencana pemekaran itu. Karena rencana itu merupakan keinginan oknum yang tidak memiliki legitimasi masyarakat Dogiyai dan Mapia secara umum (https://suarapapua.com/2025/05/31/mahasiswa-dogiyai-di-manado-tolak-rencana-pemekaran-dob-mapia-raya/).

07 Juni

Biro Hubungan Masyarakat Koordinator Wilayah Paniai (Korpan) Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) Manokwari 2025 menyatakan menolak pemekaran DOB Paniai Timur dan Delama Jaya. Pernyataan itu disampaikan mahasiswa Paniai di Manokwari, Papua

Barat pada 7 Juni 2025. Menurut mereka penolakan itu dilakukan dengan dasar melindungi hak asasi, tanah adat, dan masa depan masyarakat adat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Pasalnya, pemekaran distrik, kabupaten, maupun provinsi yang dilakukan pemerintah pusat untuk menjawab persoalan di wilayah Papua, namun faktanya hanya menambah masalah di atas masalah. Sekalipun masalah-masalah yang dihadapi warga di daerah telah diakomodir, dirangkul dan disatukan dalam UU Otsus, tetapi substansi dari UU Otsus itu masih tetap tidak direalisasikan melalui program dan kebijakan-kebijakan. *"Pemekaran daerah otonomi baru adalah murni mempertahankan eksistensi, maka para pemangku kepentingan, terutama Gubernur Papua Tengah dan DPR RI Komisi II tidak lagi memperjuangkan pemekaran ini DOB Paniai Timur dan Delama Jaya,"* tegas Selpius Gobay, Ketua Koordinator Lapangan penolakan itu (https://suarapapua.com/2025/06/07/mahasiswa-paniai-tolak-pemekaran-dob-paniai-timur-dan-delama-jaya-demi-melindungi-masyarakat-adat/).

17 Juni

Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan minta Kementerian Dalam Negeri RI untuk mengambilali proses penetapan, pengumuman dan pelantikan anggota DPRP/DPRK jalur pengangkatan periode 2025/2030 untuk Provinsi Papua Pegunungan. *"Kami meminta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia segera mengambil alih proses penetapan, pengumuman dan pelantikan anggota DPRP/DPRK jalur pengangkatan periode 2025/2030 di provinsi Papua Pegunungan,"* kata Wakil Ketua MRP dari Unsur Agama, Benny Mawel dalam pernyataannya kepada Suara Papua pada, Sabtu (14/06). Kata Benny hal itu disampaikan pihaknya karena prosesnya berhenti pada realisasi PP 106 tahun 2021 pasal 79 angka 1-8 tentang penetapan dan pengesahan anggota DPRP mekanisme pengangkatan. Menurutnya, tim seleksi provinsi tidak membuat keputusan Pansel provinsi dan berita acara calon terpilih dan calon tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik. Tidak juga menyampaikan tembusan kepada MRP dan keputusan gubernur yang harus terbit setelah 14 hari penyampaian Timsel hingga hari ini (https://suarapapua.com/2025/06/17/

mrp-pegunungan-minta-kemendagri-mengambil-alih-penetapan-dpr-jalur-pengangkatan/).

21 Juni

Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw dari jalur Otsus resmi dilantik ketua Pengadilan Negeri Sorong dalam rapat paripurna di aula DPRK Tambrauw, Jumat (20/09). Rapat raripurna dipimpin langsung ketua DPRK Tambrauw, Yan Yosef Sundoi. Ia menyampaikan apresiasinya atas kelancaran proses pelantikan serta mengucapkan selamat kepada lima anggota DPRK jalur Otsus yang merupakan representasi OAP. "*Kami menyambut dengan senang sekaligus mengucapkan selamat bergabung kepada lima anggota DPRK jalur Otsus ini. Kita bersama-sama dengan anggota memperjuangkan aspirasi masyarakat Tambrauw,"* ujar Yan Yosef Sundoi kepada Suara Papua usai acara pelantikan (https://suarapapua.com/2025/06/21/dprk-tambrauw-jalur-otsus-resmi-dilantik-dalam-rapat-paripurna/).

02 Juli

Vincentius Paulinus Baru, wakil ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, menilai Perda tentang masyarakat adat sangat mendesak untuk segera dibentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini penting mengingat banyaknya persoalan terkait investasi di wilayah adat, sehingga masyarakat adat membutuhkan dasar hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut Paulinus, MRP bersama DPR Papua Barat Daya telah menggelar pertemuan perdana guna menyamakan persepsi dan membahas sejumlah isu aktual yang dihadapi masyarakat asli Papua. Beberapa isu utama yang disoroti dalam pertemuan tersebut antara lain pendataan masyarakat adat asli Papua, kuota tenaga kerja lokal, dan pengawasan dana Otsus. Dari semua isu tersebut, disepakati bahwa urgensi utama adalah penyusunan Perda tentang masyarakat adat. *"Dari beberapa isu yang dibahas, kami sepakat bahwa yang paling mendesak adalah regulasi untuk masyarakat adat,"* jelasnya saat diwawancarai Suara Papua, Kamis (19/06) (https://suarapapua.com/2025/07/02/mrp-sepakat-dorong-perda-masyarakat-adat-di-papua-barat-daya/).

03 Juli

Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw dari jalur pengangkatan Otsus dinilai sangat strategis dalam mengawal implementasi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Yeskiel Yesnath, bupati Tambrauw, mengatakan, para anggota DPRK jalur Otsus diharapkan dapat memastika seluruh amanat Otsus, termasuk pengelolaan dana Otsus dan pelaksanaan program-program di lapangan, berjalan sebagaimana mestinya dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. *"Harapan besar kita adalah mereka bisa hadir dan terlibat aktif dalam mengawal setiap kebijakan dan program Otsus agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat,"* ujar bupati Yeskiel Yesnath saat ditemui Suara Papua setelah rapat paripurna di gedung DPRK Tambrauw, Jumat (20/6) (https://suarapapua.com/2025/07/03/bupati-tambrauw-harap-dprk-jalur-otsus-kawal-implementasi-otsus-di-tambrauw/).

14 Juli

Mahasiswa Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan di Kota Jayapura menyatakan menolak rencana pembentukan Kabupaten Benawa, yang merupakan calon daerah otonomi baru atau DOB, pemekaran dari Kabupaten Yalimo. Pembentukan Kabupaten Benawa, merupakan satu dari 54 usulan DOB dari Tanah Papua, yang telah diplenokan Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPD RI awal Juli 2025. Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Yalimo di Jayapura, Peres Walilo mengatakan pihaknya menolak rencana pemekaran Kabupaten Yalimo, untuk membentuk DOB Benawa. Katanya, pembentukan DOB harus berdasarkan persetujuan berbagai pihak, terutama masyarakat adat setempat. Sebab merekalah yang berhak atas tanah, air dan alam bukan di sana. Bukan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. *"Kami dengar Bupati Yalimo dan juga DPR [Kabupaten Yalimo] berinisiatif melakukan komitmen dengan segelintir orang untuk melakukan wacana tersebut (pembentukan DOB Benawa). Kami mahasiswa melihat ada beberapa kejanggalan yang dilakukan pemerintah setempat, sehingga secara tegas kami*

menolak rencana DOB," kata Peres Walilo di Kota Jayapura, Papua, Minggu (13/07/2025). Menurutnya apabila ingin memekarkan Kabupaten Yalimo, mesti disepakati bersama tokoh adat, pemuda, dan tokoh gereja di sana. Bukan hanya dibicarakan dan ajukan oleh beberapa pihak saja (https://jubi.id/lapago/2025/mahasiswa-yalimo-tolak-rencana-pembentukan-dob-benawa/).

23 Juli

Generasi penerus suku Moi di kabupaten Sorong mendesak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Papua Barat Daya (PBD) untuk tak lagi membahas DOB. Penegasan tersebut disampaikan lantaran viralnya pernyataan anggota DPD RI perwakilan PBD terkait DOB. Ayub Paa, pemuda adat suku Moi menegaskan, peran DPD RI di pusat ibarat representasi masyarakat adat yang harusnya berjuang untuk menyuarakan hak-hak masyarakat yang terabaikan selama ini. *"DPD itu bukan utusan partai politik, jadi harus sibuk bicara DOB, DPD itu murni representatif suara rakyat. Ada banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah yang harus diperjuangkan, bukan menciptakan persoalan baru untuk masyarakat,"* ujar Ayub, Rabu (23/07) (https://suarapapua.com/2025/07/24/generasi-penerus-moi-tegaskan-dpd-ri-hentikan-pembahasan-dob-malamoi/).

24 Juli

Pemuda adat distrik Klayili dan Sayosa Timur menghadang perjalanan MRP Provinsi Papua Barat Daya untuk menyerahkan aspirasi penolakan daerah otonom baru dan proyek strategis nasional. Dengan menggunakan pakaian adat, pemuda adat dari distrik Klayili dan Sayosa Timur melakukan penghadangan rombongan MRP PBD perwakilan adat, agama dan perempuan di Kampung Klatomok, Distrik Klayili, Selasa (22/07). Ayub Paa, perwakilan pemuda adat Distrik Klayili mengatakan, Malamoi untuk siapa, sudah ada kota, kabupaten Sorong dan ibu kota provinsi Papua Barat Daya di tanah Moi kenapa masih ingin DOB Malamoi lagi?. *"Sebelum melewati wilayah kami, MRP perlu menerima aspirasi dari kami. Sebab dampak dari DOB Malamoi dan PSN ini kami di sini*

juga akan merasakan. Kota, kabupaten dan provinsi ada di atas tanah Moi saja orang Moi terabaikan, sumber daya manusia orang Moi tidak diperhatikan, lalu untuk apa lagi mau datangkan DOB Malamoi? DOB ini untuk siapa? Siapa punya kepentingan ini?" ujarnya di hadapan MRP perwakilan suku Moi daerah pemilihakan kota dan kabupaten Sorong (https://suarapapua.com/2025/07/24/hadang-mrp-pbd-pemuda-adat-tegaskan-tolak-dob-malamoi-dan-psn/).

31 Juli

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendukung percepatan pendataan orang asli Papua (OAP) dengan alokasi anggaran yang cukup, Rp 3 Miliar. Dana tersebut untuk lima kabupaten dan satu kota, masing-masing Rp 500 juta. Yakob Karet, penjabat Sekda Provinsi PBD, mengatakan, pendataan OAP bagian dari roh Otsus yakni keberpihakan kepada OAP di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pembangunan jalan, dan lainnya. Tetapi selama 24 tahun Otsus ini ternyata data tentang OAP kurang jelas, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan KPK mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk pendataan OAP kembali secara by name dan by address di enam provinsi (https://suarapapua.com/2025/07/31/demi-percepat-pendataan-oap-pemprov-pbd-anggarkan-rp3-m/).

12 September

Setelah aspirasi penolakan rencana pemekaran kabupaten baru bernama Mapia Raya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah beberapa hari lalu, perjuangan masyarakat kabupaten Dogiyai untuk menyampaikan aspirasinya dilanjutkan dengan menemui gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Solidaritas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kabupaten Dogiyai mendatangi kantor gubernur Papua Tengah untuk meminta gubernur membatalkan rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor gubernur Papua Tengah, Jumat (12/09), perwakilan pelajar dan mahasiswa

Dogiyai, Yomi Goo, menyampaikan harapannya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah agar harus menyuarakan aspirasi masyarakat menolak DOB Mapia Raya di kabupaten Dogiyai. Ditegaskan alasannya, rencana pemekaran kabupaten baru tersebut tak memenuhi persyaratan pemekaran DOB serta tanpa melibatkan masyarakat setempat. *"Proses pembentukan daerah otonom baru Mapia Raya itu inisiatif sekelompok orang. Dan persyaratan pembentukannya juga sama sekali tidak memenuhi persyaratan kewilayahan dan administratif. Jadi, masyarakat sudah tolak itu tolong pak gubernur perjuangkan. Itu saja maksud kami saat ini datang mau sampaikan,"* kata Yomi (https://suarapapua.com/2025/09/12/temui-gubernur-papua-tengah-rencana-dob-mapia-raya-diminta-dibatalkan/).

24 September

Perwakilan mahasiswa dan masyarakat Dogiyai bersama panitia khusus (Pansus) menyerahkan dokumen berisi aspirasi penolakan terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya kepada DPR RI di Jakarta, Selasa (23/09) sore. Penyerahan aspirasi berlangsung dari gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, diterima langsung Kusnadi, kepala sub bagian persuratan sekretariat jenderal DPR RI. Begitu dokumen aspirasi diterima, Kusnadi menjelaskan, pihaknya akan mengarsipkan surat tersebut dan diteruskan kepada pimpinan Komisi II DPR RI. *"Terima kasih. Aspirasi ini akan kami arsipkan dan sampaikan ke Komisi II DPR untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme,"* kata Kusnadi (https://suarapapua.com/2025/09/24/dokumen-aspirasi-tolak-dob-mapia-raya-diterima-dpr-ri/).

09 Oktober

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk satu lembaga yang diberi nama Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dilantik di istana negara, Jakarta, Rabu (08/10). Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 110/P tahun 2025 tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dilansir Kompas.com, terdapat 10 orang yang dilantik dalam

komite tersebut. Beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat. Ada pula sosok selebritis Johnson Estrella Sihasale atau terkenal dengan nama Ari Sihasale masuk dalam komite ini. Komite ini dipimpin Velix Vernando Wanggai yang sebelumnya pernah menjadi staf khusus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Selengkapnya berikut daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik presiden Prabowo:

1) Velix Vernando Wanggai (ketua)
2) John Wempi Wetipo
3) Ignatius Yogo Triyono
4) Paulus Waterpauw
5) Ribka Haluk
6) Ali Hamdan Bogra
7) Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
8) Yani
9) John Gluba Gebze
10) Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

(https://suarapapua.com/2025/10/09/lembaga-percepatan-otsus-papua-dilantik-presiden-ri-ini-pengurusnya/).

10 November

Ribuan massa aksi demo damai Mahasiswa, Pelajar, masyarakat dan mama-mama yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIMWP) yang menggelar aksi demo damai dari beberapa titik kumpul seperti di USWIM Nabire, Jepara, Karang Tumaritis, dan Siriwini. Lalu masa long march dari setiap titik tersebut menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) di Jl. Mandala Atas, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Senin (19/11). Massa menuntut MRP-PT membuka mata untuk sikapi atas situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua secara khusus di Papua Tengah. Pantauan Jubi bahwa sekitar pukul 10.00 WP massa dari titik kumpul USWIM longmarch berjalan kaki ke kantor MRP-PT kurang lebih jarak 1,5 KM.

Massa berjalan sembari orasi dan yel-yelnya yang dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Nabire. Hujan rintik pun menemani massa aksi hingga membasahi sebagian tubuh mereka, tapi tak lama kemudian hujan berhenti. Sesampainya di depan gerbang Kantor MRP-PT, massa aksi dari Jepara, Karang Tumaritis, Siriwini juga datang bergabung lalu masuk ke kantor MRP-PT dan menduduki di halaman kantornya sekitar pukul 11.15 WP. Wakil Ketua 1 MRP-PT, Paulina Marei bersama sejumlah anggotanya MRP-PT lainnya keluar menemui ribuan massa aksi demo tersebut. Dan Massa pendemo menyampaikan orasi-orasi secara bergantian untuk MRP-PT mendengarkan. Salah seorang dalam orasinya menilai bahwa MRP-PT diam di saat masyarakat mengungsi, dapat tembak, pengerahan pasukan nonorganik dalam jumlah banyak terjadi di Papua Tengah dan membuat masyarakat takut dan trauma dalam segala aktivitas. *"Bubarkan saja MRP-PT kalau tidak berpihak kepada masyarakat Orang Asli Papua,"* katanya dalam orasi (https://jubi.id/meepago/2025/darurat-militer-dan-krisis-kemanusia-an-di-papua-tengah-ribuan-massa-aksi-demo-datangi-mrp-pt/).

Kronik Kunjungan Pejabat Pusat

20 Mei

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik, Merauke, Senin (19/06) (Cenderawasih Pos).

09 Juni

- Agenda tiba-tiba yang dilakukan dua Menteri Kabinet Merah Putih, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegununungan, Sabtu (07/06) mengagetkan banyak pihak. Banyak pertanyaan yang muncul soal agenda ini termasuk kenapa harus Nduga yang menjadi lokasi kunjungan kerjanya. Yang jelas kedatangan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sri Mulyani selama dua setengah jam ini salah satu tujuannya

adalah meninjau Pos Satgas Pamtas Mobile 733/Masariku di Kenyam (Cenderawasih Pos).

- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Ganggono dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Merauke dalam rangka melaksanakan peninjauan program optimalisasi lahan dan ketahanan pangan nasional yang berada di Kampunh Wogekel, Distrik Ilwayab-Merauke, Sabtu (07/06). Dandim Merauke Letkol Inf. Johny Nofriady mengatakan, kedatangan ketiga Menteri tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan PSN maupun program-program khususnya pertanian yang diturunkan ke Merauke (Cenderawasih Pos).

16 September

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri Gudang Arang di Kelurahan Kamahedoga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (16/9). Wapres Gibran didampingi Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya serta sejumlah pejabat (https://jubi.id/animha/2025/wapres-gibran-tinjau-program-mbg-di-merauke/#google_vignette).

17 September

Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wabup Haris Richard Yocku akan menjemput Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di SMP Negeri 2 Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu pagi (17/9) (https://jubi.id/kabupaten-jayapura/2025/bupati-jayapura-dan-wabup-akan-sambut-wapres-gibran-di-smp-negeri-2-sentani/).

18 September

- Wakil Presiden atau Wapres, Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu (17/9). Bupati

Jayapura, Dr. Yunus wonda, SH.MH mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani dan dilanjutkan ke UPT Puskesmas Kampung Harapan. Pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada wakil presiden karena langsung datang melihat kondisi puskesmas dan sekolah (https://jubi.id/headline/2025/wapres-gibran-tinjau-pelaksanaan-mbg-dan-pkg-di-kabupaten-jayapura/).

- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden atau Wapres, Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan perdananya ke Provinsi Papua. Lokasi pertama yang ditinjau adalah SMP Negeri (SMPN) 2 Jayapura, di Sentani, Kabupaten Jayapura untuk melihat langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Rabu (17/09). Wapres Gibran beserta rombongan tiba di sekolah itu sekitar pukul 11.10 WIT dan disambut antusias para siswa serta guru yang hadir. Jumlah siswa di SMP Negeri 2 Jayapura adalah 1.256 siswa (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-papua-dampingi-wapres-gibran-tinjau-program-mbg-di-smpn-2-jayapura/#google_vignette).
- Penjabat atau Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Papua di Puskesmas Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Rabu (17/09). Dalam kunjungannya, Wapres berdialog dengan masyarakat yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Seluruh poli yang ada di Puskesmas tersebut juga dikunjungi oleh Wapres (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-papua-dampingi-wapres-gibran-tinjau-cek-kesehatan-gratis-di-puskesmas-harapan/).
- Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 di Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/9). Dalam kunjungannya, Gibran memantau berbagai fasilitas pelayanan di SRMA seperti ruang kelas, ruang makan, dan asrama. Gibran menyapa para siswa-siswi dan menyampaikan motivasi

kepada mereka (https://jubi.id/penkes/2025/gibran-kunjungi-sekolah-rakyat-menengah-atas-29-di-kota-jayapura/#google_vignette).

19 September

- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (18/9). Kunjungan Wapres ke PPI Hamadi disambut antusias oleh masyarakat, nelayan, dan para penjual ikan. Suasana ramai dan penuh semangat terlihat ketika Wapres berdialog langsung dengan pedagang dan nelayan setempat. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memborong ikan yang dijual masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap usaha para pedagang lokal (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/pj-gubernur-dampingi-wapres-tinjau-ppi-hamadi/).
- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke pasar tradisional Yotefa, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (18/09) (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/wapres-dan-pj-gubernur-papua-kunjungi-pasar-tradisional-yotefa/#google_vignette).

11 Oktober

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, terutama dalam hal pembangunan perumahan rakyat dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo saat menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Fakhiri-Ayoko Rumaropen di ruang kerjanya, Jalan Patiltimira, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10) (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/kementerian-pupr-siap-perkuat-kerja-sama-dengan-pemprov-papua/#google_vignette).

16 Oktober

Wakil Ketua DPD RI, Yorris Raweyai, menegaskan pentingnya Provinsi Papua Tengah membangun manusia sebelum membangun infrastruktur. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama (https://jubi.id/meepago/2025/yorris-raweyai-dorong-papua-tengah-fokus-pada-pendidikan-dan-kesehatan/#google_vignette).

BAB IV

PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA: *QUO VADIS*?

(Oleh Handrianus K. Belolon)

Pendahuluan

Pendidikan selalu ditempatkan sebagai janji besar dalam setiap narasi pembangunan. Ia bukan sekadar urusan sekolah, guru, atau kurikulum, melainkan fondasi utama bagi masa depan manusia dan peradaban. Di atas kertas, negara telah memberikan tempat yang sangat terhormat bagi pendidikan—baik melalui konstitusi, kebijakan nasional, maupun komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: ketika pendidikan telah dijanjikan sebagai hak setiap warga negara, mengapa dalam praktiknya masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak tersebut?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menoleh ke Tanah Papua. Di satu sisi, berbagai regulasi dan kebijakan telah dirancang secara komprehensif untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan, bahkan dengan afirmasi khusus melalui Otonomi Khusus. Namun di sisi lain, realitas di lapangan memperlihatkan wajah yang berbeda—ketimpangan akses, krisis tenaga pendidik, konflik bersenjata, hingga persoalan tata kelola yang terus berulang.

Tulisan ini berangkat dari ketegangan antara janji normatif negara dan realitas empiris yang dihadapi masyarakat. Dengan membaca berbagai peristiwa sepanjang tahun 2025, tulisan ini berupaya menelusuri

arah perjalanan pendidikan di Tanah Papua: apakah ia benar-benar bergerak menuju cita-cita keadilan dan kemajuan, atau justru terjebak dalam krisis yang terus berulang. Pertanyaan "quo vadis"—hendak ke mana pendidikan Papua diarahkan—menjadi titik tolak refleksi sekaligus kritik dalam tulisan ini.

Janji Konstitusi

Membincangkan berbagai diskursus pembangunan di aras lokal maupun global, isu pendidikan selalu menjadi pilar transformasi. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan fondasi utama pembangunan manusia, demokrasi, dan peradaban. Artinya, pendidikan secara universal diakui sebagai hak asasi manusia sekaligus fondasi utama membangun peradaban serta menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial.

Dalam agenda pembangunan global, yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), pendidikan ditegaskan secara khusus dalam SDG 4: *Quality Education*, yang menargetkan pendidikan inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan masyarakat. Jika dibaca secara utuh, agenda *Quality Education* juga berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak (SDG 8), hingga pengurangan ketimpangan sosial (SDG 10). Dengan kata lain, pendidikan adalah kunci utama yang memungkinkan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dapat tercapai. Tanpa pendidikan yang inklusif dan berkualitas, kampanye tentang pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan adalah retorika kosong.

Dalam konteks pembanguan di Indonesia, komitmen global tersebut juga menemukan relevansinya dalam berbagai perangkat hukum dan kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Secara konstitusional, komitmen terhadap pendidikan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1), serta

mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2) dengan alokasi dana sekurang-kurangnya 20% anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan (Pasal 31 ayat 4). Amanat konstitusi tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keagamaan, serta kebudayaan.



Anak-Anak Sekolah dari Kampung Endokisi, Distrik Yokari, Papua menggunakan perahu motor ke sekolah di Depapre. (Sumber: JPIC OFM Papua)

Di aras lokal, komitmen pemerintah terhadap pendidikan juga memperoleh penegasan khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan ruang afirmatif bagi peningkatan kualitas pendidikan orang asli Papua dengan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 30%. Secara normatif, Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pembangunan serta rehabilitasi sarana-prasarana sekolah, pemberian beasiswa, hingga penguatan pendidikan berbasis budaya lokal.

Di atas kertas, deretan design kebijakan tersebut terlihat komprehensif. Hak atas pendidikan dijamin konstitusi. Alokasi anggaran untuk pendidikan cukup besar. Beasiswa afirmatif untuk mahasiswa Papua terus diluncurkan. Program rekrutmen dan peningkatan kompetensi guru selalu disediakan. Pembangunan fasilitas sekolah dan digitalisasi pendidikan kian gencar. Akan tetapi, ketimpangan pendidikan di

atas Tanah Papua tetap tinggi. Pertanyaannya adalah: ke manakah semua regulasi dan anggaran tersebut membawa pendidikan dan masa depan anak-anak Papua?

Wajah Pendidikan Papua Hari Ini

Sepanjang tahun 2025, sejumlah pemberitaan media massa dan hasil kajian akademik, memperlihatkan secara gamblang bahwa pendidikan di Tanah Papua masih berada dalam situasi darurat multidimensi. Sejak Januari-November 2025, problem pendidikan tidak berdiri sendiri sebagai isu teknis terkait layanan publik, tetapi membentuk rangkaian masalah yang saling berkelindan; mulai dari krisis guru dan fasilitas pendidikan, sengketa tanah adat, krisis tata kelola pemerintahan, ketimpangan kebijakan nasional, macetnya aktivitas sekolah akibat konflik bersenjata, isu kesejahteraan guru, hingga munculnya inisiatif lokal dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Papua ketika negara absen dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya.

Di Kabupaten Waropen, misalnya, sekitar 60 murid SD Negeri Aniboi belajar dengan fasilitas minim dan hanya dilayani oleh empat guru. Menanggapi situasi tersebut, anak-anak muda Papua yang tergabung dalam Komunitas Film Dokumenter Andy Nussy Project dan Komunitas Anak Muda Pengusaha Kepiting Bakau Aifa Community, berkolaborasi menggalang donasi untuk mendukung kebutuhan para siswa. Donasi yang dikumpulkan berupa alat tulis, buku bacaan, seragam sekolah layak pakai, serta pakaian rumah yang kemudian disalurkan langsung kepada para murid. Mereka merasa prihatin karena semangat dan minat belajar anak-anak begitu tinggi, tetapi tidak ditopang oleh ketersediaan tenaga pengajar maupun sarana penunjang belajar yang memadai.[11]

Persoalan kekurangan tenaga guru yang menyebabkan proses belajar-mengajar tidak berjalan maksimal, juga terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Jayawijaya, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya adalah SD Inpres Abusa yang ada di Distrik Kurulu. “Saya

[11] https://jubi.id/mamta/2025/prihatin-kondisi-pendidikan-di-pedalaman-waropen-dua-komunitas-lokal-galang-donasi/ diakses pada 19 Februari 2026

melihat langsung kondisi SD Inpres Abusa. [Di sana] hanya tiga guru yang mengajar kelas 1 hingga kelas 6", ungkap seorang anggota DPR Papua Pegunungan.[12]

Masih tentang buruknya layanan pendidikan di pusat kota pemerintahan, anggota DPRK Nduga, Nus Ganikmeye, mengaku prihatin dengan kondisi SMP Negeri 1 Kenyam yang tepat berada di pusat ibu kota Kabupaten Nduga; mulai dari minimnya tenaga pengajar hingga fasilitas dasar yang tidak memadai. "Banyak persoalan yang dialami guru-guru di Nduga, terutama di sekolah-sekolah di Kenyam. Rata-rata yang aktif hanya guru honorer, sementara guru tetap tidak berada di tempat, tetapi gajinya tetap jalan." Keluhan serupa datang dari guru SMK Pertanian Kenyam, Markus Sonda. Ia mengakui bahwa sekolahnya kekurangan tenaga pendidik di mata pelajaran inti. "Kami harus saling bahu-membahu mengajar pelajaran yang sebenarnya bukan jurusan kami, karena guru pertanian, bahasa Indonesia, dan seni budaya masih kurang."[13]

Lain hal dengan Waropen, Jayawiaya dan Nduga; di Yahukimo, kegiatan belajar-mengajar di SD Inpres Amuma, Distrik Amuma, macet total akibat ketiadaan tenaga guru, sehingga para murid tidak pernah mengikuti ujian selama sembilan tahun, terhitung sejak 2016 hingga 2025.[14] Sementara itu, di Kabupaten Jayapura, terjadi rentetan aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan guru sejak pertengahan hingga akhir Desember 2024. Mereka menuntut kekurangan upah yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sejak 2023.[15]

Di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, tragedi yang mengancam dunia pendidikan terus terjadi. Konflik bersenjata yang berujung pada pembakaran gedung SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Sinak pada 21 Oktober 2024 dan 22 November 2024 kembali terulang pada 14 Februari 2025. Padahal kedua sekolahh tersebut juga menampung para siswa dari dua distrik yang berbeda, yakni Distrik Agandugume dan Pogoma.

---

[12] https://jubi.id/lapago/2025/legislator-papua-pegunungan-temukan-ada-sekolah-di-jayawijaya-kekurangan-tenaga-pengajar/ diakses pada 20 Februari 2026.
[13] https://jubi.id/lapago/2025/sekolah-di-kenyam-nduga-kekurangan-guru-rumah-dinas-dihuni-15-orang/ diakses pada 20 Februari 2026.
[14] Cenderawasih Pos (04/08/2025)
[15] https://jubi.id/penkes/2025/tunggakan-hak-tak-kunjung-dibayar-para-guru-tetap-bekerja-demi-penuhi-panggilan-hati/ diakses pada 20 Februari 2026.

Selain sekolah, gudang logistik di Bandara Tapulinik, yang menyimpan persediaan bahan bangunan dan bahan makanan, juga turut dibakar.[16] Sebby Sambon, Juru Bicara TPNPB-OPM, dalam siaran persnya pada 18 Februari 2025, mengumumkan kepada semua sekolah di Papua, terutama di wilayah konflik bersenjata, untuk mogok belajar selama TNI/Polri menjadikan sekolah sebagai pos militer. TPNPB-OPM menduga, selain menjadi guru, TNI/Polri juga mengambil alih tugas sebagai tenaga kesehatan atau dokter di daerah Papua.[17] Itulah alasan kenapa pusat layanan pendidikan dan kesehatan ikut lumpuh.

Sebulan setelah terjadi pembakaran fasilitas pendidikan dan Kesehatan di Sinak, kekerasan kembali menyasar tenaga pendidikik di Kabupaten Yahukimo. Pada 21 dan 22 Maret 2025, enam guru dan satu tenaga kesehatan yang bertugas di Dsitrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, diserang oleh kelompok bersenjata TPNPB, dan menyebabkan satu orang guru atas nama Rosalina Rerek Soge meninggal dunia.[18] Tragedi serupa terulang pada 10 Oktober 2025 ketika Melani Wamea, seorang guru yang bertugas di Distrik Holuwon, dibunuh oleh orang tak dikenal. Menurut kesaksian warga, pembunuhan terhadap guru di dua wilayah tersebut merupakan peristiwa pertama sejak era misionaris hingga guru-guru lokal masuk ke wilayah tersebut.[19]

Konflik bersenjata yang berdampak buruk terhadap dunia pendidikan juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sejak 2019 silam. Situasi mencekam akibat kontak senjata nyaris terjadi setiap hari sehingga mengganggu psikologi peserta didik SD maupun SMP dan SMA. Akibatnya, banyak anak ikut orang tua mengungsi demi keselamatan. Bahkan sudah banyak anak sekolah tewas terkena peluru. Mereka benar-benar kehilangan kesempatan belajar.[20]

---

[16] https://jubi.id/polhukam/2025/aksi-pembakaran-perburuk-kondisi-layanan-publik-di-sinak/ diakses pada 19 Februari 2026

[17] https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-opm-umumkan-mogok-belajar-di-papua/ diakses pada 19 Februari 2026

[18] https://jubi.id/polhukam/2025/tpnpb-serang-guru-dan-tenaga-kesehatan-di-yahukimo-1-tewas-dan-6-terluka/ diakses pada 19 Februari 2026

[19] https://jubi.id/tanah-papua/2025/gereja-dan-masyarakat-holuwon-berduka-atas-kematian-ibu-guru-melani/ diakses pada 19 Februari 2026

[20] https://suarapapua.com/2025/10/29/konflik-bersenjata-membunuh-masa-depan-generasi-intan-jaya/ diakses pada 20 Februari 2026.

Berbeda dengan Intan Jaya, di Kabupaten Puncak Jaya, kegiatan belajar-mengajar di Kota Mulia terhenti akibat rentetan bentrokan antar pendukung pasangan calon Bupati–Wakil Bupati Puncak Jaya, yakni nomor urut 1 (Yuni Wonda–Mus Kogoya) dan nomor urut 2 (Miren Kogoya–Mendi Wonerengga). Situasi keamanan yang belum kondusif menyebabkan pelayanan publik lumpuh total, termasuk kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Anak-anak dilaporkan takut datang ke sekolah, sementara sebagian besar guru memilih mengungsi ke luar kota demi keselamatan.[21]

Tak hanya soal konflik bersenjata. Kasus pemalangan sekolah di beberapa wilayah juga turut mewarnai wajah pendidikan di Tanah Papua. Pada 4 Januari 2025, SD Negeri 1 Sentani di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dipalang oleh pemilik hak ulayat dan menyebabkan aktivitas belajar-mengajar berhenti total.[22] Kejadian serupa juga menimpa SD Negeri Inpres Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur pada 13 Maret 2025,[23] SMA Negeri 3 Buper pada 17 April 2025,[24] dan SMA Negeri 3 Merauke pada 16 Mei 2025. Pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pemilik hak ulayat memalang dan menyegel sekolah serta menuntut ganti rugi.[25] Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sengketa lahan sekolah bukan insiden sporadis, melainkan persoalan struktural yang terus berulang dan turut mencoreng wajah pendidikan di Tanah Papua.

Di tengah carut-marutnya persoalan pendidikan di Tanah Papua, ratusan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Kabupaten Yahukimo, termasuk Solidaritas Pelajar West Papua di Jayapura, turun ke jalan pada awal Februari dan Mei 2025. Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dan menuntut pendidikan gratis karena banyak pelajar yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.[26]

---

[21] https://jubi.id/polhukam/2025/pelayanan-publik-dan-sekolah-di-mulia-puncak-jaya-lumpuh-akibat-bentrok-antar-massa-paslon-bupati-wakil-bupati/ diakses pada 20 Februari 2026

[22] https://jubi.id/penkes/2025/sd-negeri-1-sentani-dipalang-anak-anak-sedih-karena-tak-sekolah/ diakses pada 20 Februari 2026.

[23] https://jubi.id/penkes/2025/pemalangan-sekolah-masih-jadi-problematika-pendidikan-di-kabupaten-jayapura/

[24] Cenderawasih Pos (17/04/2025)

[25] Cenderawasih Pos (16/05/2025); Cenderawasih Pos (23/10/2025)

[26] https://suarapapua.com/2025/02/04/tolak-program-makan-bergizi-gratis-ratusan-pelajar-di-yahukimo-

"Kami menolak MBG. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi di Papua," ungkap Koordinator Umum aksi, Roisa Nagapani dalam orasinya.[27]

Mereka menilai program MBG tidak menjawab kebutuhan utama pelajar Papua, di tengah keterbatasan akses dan biaya pendidikan. Sebagai misal, sekitar 20-an mahasiswa asal Kabupaten Waropen di Kota Jayapura, kesulitan membayar sewa pondokan akibat kapasitas ruangan di Pemondokan Satu Mahasiswa Waropen yang disediakan pemerintah daerah, tidak lagi mampu menampung semua mahasiwa asal Waropen.[28]

Persoalan aksesibilitas dan biaya pendidikan juga ditemukan oleh tim riset JPIC OFM Papua pada November 2025 di Kampung Endokisi, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil laporan riset, ditemukan bahwa keberlangsungan pendidikan di Kampung Endokisi lebih banyak ditopang oleh inisiatif masyarakat lokal sebagai akibat dari absennya negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warganya. Akses beasiswa sulit dijangkau, sehingga warga setempat memanfaatkan kearifan lokal seperti tradisi makan sumbang dan sasi laut untuk menggalang dukungan kolektif demi menopang biaya pendidikan anak-anak Endokisi. Bahkan, guru-guru PAUD di sana pun hanya dihargai satu juta rupiah per tahun, sementara siswa SMP dan SMA setiap hari harus menyeberangi lautan untuk bisa bersekolah.[29]

---

tuntut-pendidikan-gratis/; https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-desak-prabowo-berikan-pendidikan-gratis-istana-itu-hak-mereka/ diakses pada 20 Februari 2026.

[27] https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-minta-mbg-diganti-pendidikan-gratis/ diakses pada 20 Februari 2026.

[28] https://jubi.id/mamta/2025/pemkab-tak-ada-solusi-puluhan-mahasiswa-asal-waropen-kesulitan-biaya-pondokan/ diakses pada 20 Februari 2026.

[29] Lihat Belolon, H.K., dkk. (2025). Potret Pendidikan di Pundak Warga: Analisis Pembangunan Partisipatif atas Tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut di Kampung Endokisi. Jayapura: JPIC OFM Papua.



Aksi Demo Pelajar tolak Program MBG di Kantor Gubernur Papua Pegunungan (JW Noken)

Dari Janji Konstitusi ke Tuntutan Hak Konstitusional

Jika kita merujuk pada deretan kebijakan di sektor pendidikan yang telah diulas pada bagian awal tulisan ini, ditemukan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan administratif, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pemerintah Indonesia bahkan secara berulang menekankan agenda pembangunan sumber daya manusia yang unggul, bonus demografi, transformasi ekonomi digital, hingga visi Indonesia Emas 2045; seluruhnya bertumpu pada kualitas pendidikan. Itu artinya bahwa pendidikan adalah fondasi strategis sekaligus prasyarat kemajuan bangsa dalam seluruh design arsitektur pembangunan nasional.

Rentetan cerita yang merekam wajah pendidikan Papua seperti yang diulas di atas, memperlihatkan adanya jurang pemisah antara norma hukum dan praktik kebijakan. Dunia pendidikan di Papua terus dibiarkan berada dalam tekanan tiga dimensi utama, yakni gangguan keamanan, kegagalan tata kelola, dan ketimpangan keadilan sosial. Karena itu, krisis pendidikan di Papua tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rangkaian peristiwa sporadis, tetapi sebagai problem sistemik yang akut, tertanam kuat dalam design kebijakan dan tata kelola pemerintahan, serta berdampak secara signifikan terhadap eskalasi konflik horizontal dan hilangnya keberpihakan pada martabat pendidikan.

Peristiwa pembakaran gedung sekolah dan pembunuhan guru yang berakibat langsung pada macetnya aktivitas belajar-mengajar dan timbulnya rasa takut serta trauma di kalangan guru maupun peserta didik, sesungguhnya memperlihatkan bahwa ruang pendidikan di Papua tidak lagi aman. Sekolah seharusnya dilindungi sebagai zona sipil yang netral dan bebas dari konflik. Dalam konteks ini, pemerintah perlu merancang dan menetapkan pedoman komprehensif yang berisi langkah-langkah perlindungan terhadap sekolah yang berada di wilayah rawan konflik. Misalnya, pemetaan dan pemantauan ancaman terhadap pendidikan; penguatan kebijakan perlindungan sekolah beserta mitigasi risikonya; penyediaan skema pembelajaran alternatif saat darurat; pemberian dukungan psikososial dan perlindungan bagi siswa, guru, dan keluarga terdampak; hingga pembentukan mekanisme pengawasan jangka panjang dalam sistem pendidikan nasional.[30] Ini menjadi langkah strategis sekaligus mendesak guna mencegah reproduksi ketertinggalan pendidikan dan menjamin terciptanya iklim pendidikan Papua yang aman dan netral.

Selain itu, dalam "Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua (2001-2021)", Anggi Afriansyah (2022) menunjukkan adanya tiga persoalan utama. Pertama, kualitas layanan dan akses pendidikan yang tidak merata, di mana sarana-prasarana, dan tenaga pendidik yang hanya terkonsentrasi di perkotaan, sementara wilayah pedalaman masih mengalami kekurangan. Kedua, buruknya birokrasi dan tata kelola anggaran, menyebabkan dana otonomi khusus tidak memberi dampak signifikan bagi dunia pendidikan di Papua. Ketiga, implementasi kebijakan yang tidak mengakomodir tantangan geografis dan karakteristik sosial-budaya orang Papua.[31]

Persoalan serupa juga ditemukan oleh Simon Yanuarius Konorop. Dalam penelitiannya pada tahun 2025, Konorop menunjukkan bahwa implementasi Otonomi Khusus di Papua lebih fokus pada peningkatkan

[30] Bdk. GCPEA. (2015). *What Ministries Can Do to Protect Education from Attack and Schools from Military Use: A Menu of Actions.* https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_what_ministries.pdf

[31] Afriansyah, A. (2022). Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua (2001-2021). *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 48(1), 63–77._

akses dan infrastruktur di wilayah perkotaan, dan belum mampu mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah pedalaman. Hambatan geografis, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya pelibatan masyarakat adat juga menjadi faktor utama yang memperparah ketimpangan pendidikan di Papua.[32] Dengan demikian, kebijakan otonomi khusus di Papua mutlak perlu untuk dievaluasi dan diaudit secara menyeluruh demi memenuhi hak-hak dasar orang asli Papua.

Sementara itu, aksi para pelajar yang menolak program MBG dan menuntut pendidikan gratis adalah bentuk kritik pedas yang memperlihatkan bahwa kebijakan pusat tidak sinkron dengan kebutuhan di aras lokal. Data Dinas Pendidikan Papua Tengah yang menyebut sekitar 205.000 anak belum bersekolah[33] adalah bukti bahwa persoalan pendidikan di Papua adalah tentang akses dan biaya, bukan nutrisi makanan. Dalam konteks teori keadilan distributif, kebijakan publik seharusnya menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Langkah sejumlah pemerintah daerah seperti Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Sorong Selatan, yang mencanangkan pendidikan gratis[34] patut diapresiasi, tetapi perlu juga dikawal secara serius demi menjaga keberlanjutan fiskal dan kualitas layanan. Demikian pula, pembangunan 274 bangunan sekolah di Yahukimo[35] perlu ditunjang juga dengan ketersediaan guru disertai program peningkatan kompetensi maupun jaminan keamanan, agar tidak berisiko menjadi tindakan simbolik semata.

Oleh karena itu, diskusi tentang pendidikan di Tanah Papua harus selalu ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, keadilan distributif, dan tanggung jawab negara. Hari ini, Papua butuh pembangunan pendidikan yang integratif, yakni menjamin keamanan sekolah, keter-

---

[32] Konorop, S. Y. (2025). Tantangan dan Perkembangan Otonomi Khusus dalam Peningkatan Pendidikan Dasar di Papua Selatan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(4), 1560–1572. https://doi.org/10.63822/0j8xkv05

[33] https://suarapapua.com/2025/07/25/kurangi-jumlah-anak-putus-sekolah-solusi-terapkan-pendidikan-gratis/ diakses pada 20 Februari 2026.

[34] https://suarapapua.com/2025/04/18/gubernur-meki-nawipa-canangkan-program-pendidikan-gratis-di-papua-tengah/; https://jubi.id/penkes/2025/pendidikan-gratis-diluncurkan-di-sorong-selatan/; https://suarapapua.com/2025/07/25/kurangi-jumlah-anak-putus-sekolah-solusi-terapkan-pendidikan-gratis/; https://jubi.id/papua-tengah/2025/dpr-papua-tengah-nilai-pencanangan-pendidikan-gratis-karena-kepedulian/

[35] https://jubi.id/penkes/2025/bupati-yahukimo-resmikan-274-bangunan-penunjang-pendidikan/ diakses pada 20 Februari 2026.

sediaan dan kesejahteraan guru, kurikulum yang kontekstual, serta aksesibilitas dan biaya pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan bukan sekadar program administratif atau proyek anggaran, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Papua butuh keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama yang di dalamnya terkandung mandat moral sekaligus tanggung jawab politik negara untuk menjamin keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara bermartabat.

Penutup

Membaca keseluruhan dinamika pendidikan di Tanah Papua memperlihatkan satu kesimpulan mendasar: persoalan pendidikan bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa, tata kelola pemerintahan, serta prioritas kebijakan negara. Ketimpangan akses, krisis guru, konflik bersenjata, hingga sengketa lahan menunjukkan bahwa pendidikan di Papua sedang berada dalam tekanan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.

Jarak antara janji konstitusi dan realitas di lapangan memperlihatkan adanya kegagalan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik yang berpihak pada masyarakat. Ketika sekolah dibakar, guru terbunuh, dan anak-anak kehilangan ruang belajar, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan pendidikan, tetapi juga masa depan kemanusiaan di Tanah Papua.

Dalam konteks ini, pendidikan harus ditempatkan kembali sebagai hak asasi yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Negara dituntut tidak hanya hadir melalui kebijakan dan anggaran, tetapi juga melalui keberpihakan nyata yang menjamin keamanan, aksesibilitas, dan keadilan dalam pendidikan. Tanpa itu, seluruh narasi tentang pembangunan manusia, bonus demografi, dan Indonesia Emas hanya akan menjadi retorika yang jauh dari kenyataan.

Pada akhirnya, pertanyaan "Pendidikan di Tanah Papua: quo vadis?" bukan sekadar pertanyaan akademik, melainkan panggilan moral dan

politik. Ia menuntut keberanian untuk mengevaluasi, membenahi, dan mengubah arah kebijakan secara mendasar. Sebab masa depan Papua—dan juga masa depan Indonesia—ditentukan oleh sejauh mana pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman, adil, dan bermartabat bagi setiap anak bangsa.

Daftar Pustaka

Afriansyah, A. (2022). Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua (2001-2021). *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 48(1), 63–77.

Belolon, H. K., dkk. (2025). *Potret Pendidikan di Pundak Warga: Analisis Pembangunan Partisipatif Atas Tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut di Kampung Endokisi*. JPIC OFM Papua.

Cenderawasih Pos. (2025, April 17).

Cenderawasih Pos. (2025, Mei 16).

Cenderawasih Pos. (2025, Agustus 4).

Cenderawasih Pos. (2025, Oktober 23).

Global Coalition to Protect Education from Attack. (2015). *What Ministries Can Do to Protect Education from Attack and Schools from Military Use: A Menu of Actions*. https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_what_ministries.pdf

Jubi. (2025). *Aksi Pembakaran Perburuk Kondisi Layanan Publik di Sinak*. https://jubi.id/polhukam/2025/aksi-pembakaran-perburuk-kondisi-layanan-publik-di-sinak/

Jubi. (2025). *Bupati Yahukimo Resmikan 274 Bangunan Penunjang Pendidikan*. https://jubi.id/penkes/2025/bupati-yahukimo-resmikan-274-bangunan-penunjang-pendidikan/

Jubi. (2025). *Gereja dan Masyarakat Holuwon Berduka Atas Kematian Ibu Guru Melani*. https://jubi.id/tanah-papua/2025/gereja-dan-masyarakat-holuwon-berduka-atas-kematian-ibu-guru-melani/

Jubi. (2025). *Legislator Papua Pegunungan Temukan Ada Sekolah di Jayawijaya Kekurangan Tenaga Pengajar*. https://jubi.id/lapago/2025/

legislator-papua-pegunungan-temukan-ada-sekolah-di-jayawijaya-kekurangan-tenaga-pengajar/

Jubi. (2025). *Pelajar Papua Desak Prabowo Berikan Pendidikan Gratis, Istana Itu Hak Mereka*. https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-desak-prabowo-berikan-pendidikan-gratis-istana-itu-hak-mereka/

Jubi. (2025). *Pelajar Papua Minta MBG Diganti Pendidikan Gratis*. https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-minta-mbg-diganti-pendidikan-gratis/

Jubi. (2025). *Pelayanan Publik dan Sekolah di Mulia Puncak Jaya Lumpuh Akibat Bentrok Antar Massa Paslon Bupati–Wakil Bupati*. https://jubi.id/polhukam/2025/pelayanan-publik-dan-sekolah-di-mulia-puncak-jaya-lumpuh-akibat-bentrok-antar-massa-paslon-bupati-wakil-bupati/

Jubi. (2025). *Pemalangan Sekolah Masih Jadi Problematika Pendidikan di Kabupaten Jayapura*. https://jubi.id/penkes/2025/pemalangan-sekolah-masih-jadi-problematika-pendidikan-di-kabupaten-jayapura/

Jubi. (2025). *Pemkab Tak Ada Solusi, Puluhan Mahasiswa Asal Waropen Kesulitan Biaya Pondokan*. https://jubi.id/mamta/2025/pemkab-tak-ada-solusi-puluhan-mahasiswa-asal-waropen-kesulitan-biaya-pondokan/

Jubi. (2025). *Pribatin Kondisi Pendidikan di Pedalaman Waropen, Dua Komunitas Lokal Galang Donasi*. https://jubi.id/mamta/2025/prihatin-kondisi-pendidikan-di-pedalaman-waropen-dua-komunitas-lokal-galang-donasi/

Jubi. (2025). *SD Negeri 1 Sentani Dipalang, Anak-Anak Sedih Karena Tak Sekolah*. https://jubi.id/penkes/2025/sd-negeri-1-sentani-dipalang-anak-anak-sedih-karena-tak-sekolah/

Jubi. (2025). *Sekolah di Kenyam Nduga Kekurangan Guru, Rumah Dinas Dihuni 15 Orang*. https://jubi.id/lapago/2025/sekolah-di-kenyam-nduga-kekurangan-guru-rumah-dinas-dihuni-15-orang/

Jubi. (2025). *TPNPB-OPM umumkan mogok belajar di Papua*. https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-opm-umumkan-mogok-belajar-di-papua/

Jubi. (2025). *TPNPB Serang Guru dan Tenaga Kesehatan di Yahukimo, 1 Tewas Dan 6 Terluka*. https://jubi.id/polhukam/2025/tpnpb-serang-guru-dan-tenaga-kesehatan-di-yahukimo-1-tewas-dan-6-terluka/

Jubi. (2025). *Tunggakan Hak Tak Kunjung Dibayar, Para Guru Tetap Bekerja Demi Penuhi Panggilan Hati*. https://jubi.id/penkes/2025/tunggakan-hak-tak-kunjung-dibayar-para-guru-tetap-bekerja-demi-penuhi-panggilan-hati/

Konorop, S. Y. (2025). Tantangan dan Perkembangan Otonomi Khusus Dalam Peningkatan Pendidikan Dasar di Papua Selatan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(4), 1560–1572. https://doi.org/10.63822/0j8xkv05

Suara Papua. (2025). *Gubernur Meki Nawipa Canangkan Program Pendidikan Gratis di Papua Tengah*. https://suarapapua.com/2025/04/18/gubernur-meki-nawipa-canangkan-program-pendidikan-gratis-di-papua-tengah/

Suara Papua. (2025). *Kurangi Jumlah Anak Putus Sekolah, Solusi Terapkan Pendidikan Gratis*. https://suarapapua.com/2025/07/25/kurangi-jumlah-anak-putus-sekolah-solusi-terapkan-pendidikan-gratis/

Suara Papua. (2025). *Konflik Bersenjata Membunuh Masa Depan Generasi Intan Jaya*. https://suarapapua.com/2025/10/29/konflik-bersenjata-membunuh-masa-depan-generasi-intan-jaya/

Suara Papua. (2025). *Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Ratusan Pelajar di Yahukimo Tuntut Pendidikan Gratis*. https://suarapapua.com/2025/02/04/tolak-program-makan-bergizi-gratis-ratusan-pelajar-di-yahukimo-tuntut-pendidikan-gratis/

Kronik Pendidikan

13 Januari

Rasa peduli terhadap kondisi pendidikan di wilayah pedalaman Kabupaten Waropen, Papua, menginspirasi anak-anak muda Papua yang tergabung pada dua komunitas lokal di Jayapura dan Waropen, untuk berkolaborasi menggalang donasi. Penggalangan donasi itu berupa barang-barang kebutuhan seperti alat tulis, buku-buku, seragam sekolah layak pakai, serta baju rumah layak pakai, untuk diserahkan kepada para murid di SD Negeri Aniboi di Kampung Aiwa, Distrik Demba, Kabupaten Waropen, Papua. Koordinator umum kegiatan penggalangan donasi, Andy Nussy menuturkan kedua komunitas yang terlibat penggalangan donasi yakni Komunitas Film Dokumenter Andy Nussy Project yang beranggotakan lima orang dan berbasis di Kota Jayapura, dan Komunitas Anak Muda Pengusaha Kepiting Bakau Aifa Community yang berbasis di Kabupaten Waropen. Penggalangan donasi diadakan di tiga lokasi yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nussy menjelaskan, sekitar 60 murid yang bersekolah di SD Negeri Aniboi itu kekurangan buku cetak dan alat tulis serta seragam. Menurutnya minat belajar para murid sangat tinggi namun fasilitas penunjang belajar sangat terbatas. Tenaga pengajar di sana hanya empat orang, tiga di antaranya merupakan guru honorer dan kepala sekolahnya yang seorang pegawai negeri sipil (PNS). *"Selain mereka kekurangan fasilitas, jumlah guru di sana hanya empat orang dan itu sangat memprihatinkan, kalau hanya ada empat guru, bagaimana mereka memberikan kualitas belajar mengajar yang baik kepada 60 murid dari kelas satu sampai kelas enam itu,"* ujarnya. Nussy mengatakan, akses transportasi dari Kabupaten Waropen ke Distrik Demba memakan waktu sekitar 1–2 jam menggunakan kendaraan laut seperti perahu atau speed boat, yang menyeberangi selat Saireri (https://jubi.id/mamta/2025/prihatin-kondisi-pendidikan-di-pedalaman-waropen-dua-komunitas-lokal-galang-donasi/).

19 Januari

Serangkaian pembakaran terhadap fasilitas umum melanda Distrik Sinak di Kabupaten Puncak pada tahun lalu. Aksi tersebut merugikan masyarakat karena mengganggu layanan publik. Anggota DPR Papua Tengah Anis Labene mengatakan Sinak menjadi daerah tumpuan bagi sejumlah distrik di sekitarnya. Beberapa layanan publik di wilayah tersebut terpusat di Sinak. *"Saya benar-benar kecewa [atas aksi pembakaran tersebut]. Layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terhambat di Sinak,"* kata Labene, Kamis (16/01). Berdasarkan data Polres Puncak, aksi pembakaran terhadap fasilitas publik, di antaranya menimpa gedung SMA Negeri 1 Sinak, dan gedung SMP Negeri 1 Sinak. Gedung SMA Negeri 1 dibakar pada 21 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 Waktu Papua. Adapun Gedung SMP Negeri 1 Sinak dibakar pada 22 November 2024, sekitar pukul 02.30 Waktu Papua. Polisi mengidentifikasi para pelaku pembakaran sebagai kelompok bersenjata pimpinan Kalenak Murib. Kelompok yang sama pun diduga merusak mobil operasional Puskesmas Sinak. Pembakaran juga menyasar gudang logistik di Bandara Tapulinik pada 3 Februari, dan kantor Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) pada 14 Agustus. Pelaku pembakarannya belum teridentifikasi. *"Gudang logistik itu menjadi sandaran bagi masyarakat Sinak, Agandugume, dan Pogoma. Mereka punya bahan bangunan dan bahan makanan disimpan di situ,"* kata Labene. Selain fasilitas gudang logistik, layanan pendidikan di Distrik Agandugume, dan Distrik Pogoma juga masih bergantung kepada Sinak. Karena itu, banyak siswa dari kedua distrik tersebut bersekolah di SMP Negeri 1 Sinak dan SMA Negeri 1 Sinak (https://jubi.id/polhukam/2025/aksi-pembakaran-perburuk-kondisi-layanan-publik-di-sinak/).

21 Januari

SD Negeri 1 Sentani di Jalan Dunlop, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sudah dipalang atau ditutup akses jalannya oleh pemilik hak ulayat Suku Kopeuw sejak 4 Januari 2025. Aktivitas belajar mengajar di sekolah itu terhenti total, dan rumput di halaman sekolah tumbuh setinggi lutut. Pelaku pemalangan menumpukan batu pasir dan balok

kayu di gerbang sekolah. Sejumlah pelajar dan guru SDN 1 Sentani setiap pagi datang ke sekolah, tapi mereka tidak bisa masuk ke sekolah. Di luar pagar sekolah, para guru memberikan tugas kepada murid untuk belajar mandiri di rumah. Siswa kelas 4, Aliando mengatakan ia kecewa dengan pemalangan sekolahnya. Ia mengeluh tidak bisa belajar seperti biasanya. Pemalangan itu membuat Aliando dan teman-teman tidak bisa bertemu dengan para guru. Ia mengaku rindu untuk belajar di sekolah. *"[Saya berharap] palang ini bisa dibuka, supaya kami bisa sekolah di sekolah. Sementara ini, kami datang [ke sekolah]. Tapi [kami hanya bisa berada] di luar [pagar], guru kasih PR saja, baru pulang. Jadi saya punya harapan, palang ini tolong buka kembali,"* kata Aliando. Luis Yoku, pelajar kelas 4 SD Negeri 1 Sentani, juga sedih dengan pemalangan itu. Menurutnya, para murid dirugikan karena tidak bisa bisa belajar seperti biasanya. *"Saya rasa sedih sa pu sekolah tutup karena dipalang. Saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan ibu guru. Saya sedih, saya tidak bisa belajar di sekolah seperti [para siswa] sekolah lain,"* ujarnya Yoku (https://jubi.id/penkes/2025/sd-negeri-1-sentani-dipalang-anak-anak-sedih-karena-tak-sekolah/).

04 Februari

Ratusan pelajar dari kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hari Senin (03/02) turun jalan di Dekai, untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di masa kepemimpinannya. Program MBG tersebut ditolak anak-anak sekolah dengan alasan bukan satu kebutuhan urgen bagi generasi Papua di kabupaten Yahukimo. Para pelajar justru menuntut pemberlakuan pendidikan gratis. Dalam aksi demonstrasi damai yang dipusatkan di depan kantor Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo, para pelajar mengenakan seragam sekolah menyampaikan sejumlah pernyataan sikapnya. Pada intinya mereka menyatakan tidak menerima program MBG yang mulai diberlakukan sejak beberapa waktu lalu. Selain pelajar SMA, dalam aksi Aliansi Pelajar Kabupaten Yahukimo itu diikuti juga ratusan murid SD dan SMP yang ada di kabupaten Yahukimo. Mereka pajangkan spanduk dan pamfet berisi sejumlah aspirasi, antara lain menolak progam MBG dan menuntut

pemberlakuan pendidikan gratis. *"Kami mendesak pemerintah memperhatikan pendidikan dengan kebijakan tanpa biaya. Ya, pendidikan gratis. Program makan siang gratis itu kami tolak,"* ujar salah satu pelajar dalam orasinya (https://suarapapua.com/2025/02/04/tolak-program-makan-bergizi-gratis-ratusan-pelajar-di-yahukimo-tuntut-pendidikan-gratis/).

17 Februari

Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) di Kota Jayapura mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis di Tanah Papua. Mereka menilai pendidikan gratis lebih mendesak dibandingkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), karena banyak pelajar yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. *"Harapan kami, pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dapat mendengarkan seruan kami. Kami di Tanah Papua butuh pendidikan gratis, bukan MBG,"* kata Fernando Ahayon, pelajar SMA Negeri 7 Jayapura, saat aksi di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin (17/02). Fernando menjelaskan, SPWP menolak program makan siang gratis dan meminta agar anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurutnya, aksi ini telah diberitahukan secara resmi kepada pihak keamanan dan disertai surat penolakan terhadap MBG. *"Tapi saat kami hendak aksi, aparat kepolisian menghadang di beberapa sekolah dan berjaga di titik-titik kumpul SPWP yang hendak menuju Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi kami,"* ujar Fernando (https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-desak-prabowo-berikan-pendidikan-gratis-istana-itu-hak-mereka/).

18 Februari

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengumumkan kepada semua sekolah di Papua, terutama di wilayah konflik bersenjata, untuk mogok belajar selama TNI/Polri menjadikan sekolah sebagai pos militer. TPNPB-OPM menduga, selain menjadi guru, TNI/Polri juga akan bertugas sebagai tenaga kesehatan atau dokter di daerah Papua, sehingga sekolah-sekolah harus dikosongkan. Hal tersebut dinyatakan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Selasa

(18/02). *"Markas Pusat Komnas TPNPB juga telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap Sinak pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025 bahwa TPNPB Kodap Sinak siap bertanggung jawab atas pembakaran sebuah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Agandugume di Sinak, Kabupaten Puncak yang dibakar sekitar jam 19.00 malam pada Jumat, 14 Februari 2025,"* katanya. Sambom mengatakan, TPNPB-OPM membakar gedung SMP Agandugume di Sinak, karena sekolah tersebut dicurigai telah digunakan TNI/Polri, selama melakukan operasi militernya. *"Pasukan TPNPB Kodap Sinak lebih lanjut melaporkan bahwa aparat militer Pemerintah Indonesia sedang melakukan operasi militer di Kampung Timobut, Kabupaten Puncak sejak kemarin dan sudah mengambil alih rumah-rumah warga sipil, untuk dijadikan pos militer setelah lebih dari 450 aparat militer memasuki wilayah perang di Kabupaten Puncak sejak Rabu (05/02). Sampai saat ini mereka terus melakukan operasi di kampung-kampung warga sipil,"* katanya (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-opm-umumkan-mogok-belajar-di-papua/).

27 Februari

Sekitar 20-an mahasiswa asal Waropen Tengah, Kabupaten Waropen yang kuliah di Kota Jayapura kesulitan membayar sewa pondokan yang mereka tempati di Padang Bulan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mereka mengadu ke Pemkab Waropen, namun tidak ada solusi. Pondokan yang dinamai 'Pemondokan Dua Mahasiswa Waropen' itu disewa sejak lima tahun lalu, setelah Pemkab Waropen membongkar Asrama Putra Waropen yang berada di Belakang Denzipur pada 2019 dan membangun asrama baru di Perumnas IV. Lokasi asrama baru itu kurang strategis karena berada di perbukitan yang rawan longsor. Meski bangunannya sudah selesai, hingga kini asrama itu belum diresmikan. Staf Ahli Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Waropen (IMaWar) Kota Studi Jayapura Godlif Woisiri kepada Jubi, Rabu (26/02) menceritakan, setelah asrama dirubuhkan, Pemkab Waropen menyediakan satu rumah di Perumnas II Waena untuk pondokan. Pondokan itu kemudian dikenal sebagai "Pemondokan Satu Mahasiswa Waropen" Namun setahun setelah menempati pondokan itu, para mahasiswa merasa kapasitas ruangan di sana tidak mampu menampung mereka semuanya. Akhirnya sebagian

mahasiswa, umumnya dari dari Waropen Tengah, berupaya mencari pondokan lain. Waktu itu anggota DPR Papua melalui kursi pengangkatan Otsus, Yonas Nussy, berinisiatif menyewa sebuah rumah untuk sekretariat mahasiswa wilayah Waropen Tengah di Jayapura yang bisa dijadikan pondokan tambahan. Pondokan itu kemudian dikenal dengan nama "Pemondokan Dua Mahasiswa Waropen" (https://jubi.id/mamta/2025/pemkab-tak-ada-solusi-puluhan-mahasiswa-asal-waropen-kesulitan-biaya-pondokan/).

05 Maret

Bentrokan antar massa pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 (Yuni Wonda – Mus Kogoya) dan pasangan nomor 2 (Miren Kogoya – Mendi Wonerengga) kembali terjadi pada Senin (03/03) di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Hal itu membuat pelayanan publik di kantor pemerintahan dan kegiatan belajar mengajar di Mulia lumpuh. Sejumlah warga juga dilaporkan mengungsi ke kompleks Komando Distrik Militer 1714/Puncak Jaya, Kepolisian Resort atau Polres Puncak Jaya dan Aula Pertemuan Klasis Mulia Puncak Jaya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Amir Wonda, pada Rabu (05/03) mengatakan, aktivitas pelayanan publik di kantor pemerintahan, kegiatan belajar mengajar di sekolah di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya terhenti dikarenakan keamanan belum kondusif. "*Semua aktivitas perkantoran maupun aktivitas masyarakat lumpuh total. Pendidikan pun sama tidak berjalan. Ada warga yang mengungsi,"* kata Wonda kepada Jubi melalui panggilan telepon. Wonda mengatakan bentrok antara massa pasangan calon Bupati-Wakil Bupati membuat siswa maupun guru tidak berani untuk masuk sekolah. Proses belajar mengajar tidak bisa berjalan. Keamanan tidak belum kondusif. Sejumlah guru juga telah mengungsi menghindari bentrok tersebut. *"Anak-anak ketakutan untuk datang ke sekolah [dan] kebanyakan guru-guru mengungsi ke luar kota, sebagian ada di Kota Mulia. Saya [juga] mengungsi di tempat lain. Sementara pertikaian masih berlanjut,"* ujarnya (https://jubi.id/polhukam/2025/pelayanan-publik-dan-sekolah-di-mulia-puncak-jaya-lumpuh-akibat-bentrok-antar-massa-paslon-bupati-wakil-bupati/).

13 Maret

Sengketa kepemilikan lahan sekolah masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Jayapura. Proses belajar-mengajar menjadi terhenti akibat tuntutan kepemilikan lahan dari pemilik ulayat. Kejadian itu, di antaranya menimpa SD Negeri Inpres Kampung Harapan di Distrik Sentani Timur. Pemilik ulayat lahan menyegel atau memalang sekolah sejak beberapa hari lalu karena menuntut penyelesaian ganti rugi. Menyikapi problematika itu, DPR Kabupaten Jayapura menggelar rapat dengar pendapat, Rabu (12/03). Mereka mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk mencari solusi penyelesaiannya. Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura Muhammad Akbar berharap proses belajar mengajar tetap berjalan di SD Negeri Inpres Kampung Harapan. Mereka tidak ingin pemalangan mengganggu agenda ujian akhir sekolah pada Mei mendatang. *"Lahan seluas 6.932 meter persegi [yang ditempati SD Negeri Inpres Kampung Harapan] telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Kabupaten [Pemkab] Jayapura. Saran kami, Pemkab Jayapura menyurati pihak keamanan untuk membuka pemalangan,"* kata Akbar (https://jubi.id/penkes/2025/pemalangan-sekolah-masih-jadi-problematika-pendidikan-di-kabupaten-jayapura/).

18 Maret

- *"Ada guru yang betah tinggal di tempat tugas hingga bertahun-tahun, ada juga yang aktif setiap hari ke sekolah walaupun jarak rumahnya sangat jauh [dari] sekolah sangat jauh. Semua karena panggilan hati yang tulus untuk mencerdaskan generasi penerus,"* ujar Popi Lenora Wadi, salah satu guru SD di Kemtuk Gresi, Selasa (18/03). Pernyataan Ibu Guru Popi, sapaan akrab Popi Lenora Wadi, itu bukan tanpa alasan. Dari rentetan aksi demonstrasi damai ratusan guru di Kabupaten Jayapura pada pertengahan dan akhir Desember 2024 hingga kini, tuntutan para guru itu belum lagi dipenuhi. Padahal, yang dituntut para guru adalah kekurangan upah mereka yang belum dibayar oleh pemerintah sejak 2023. Aksi demonstrasi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jayapura. Pada demonstrasi kedua yang

berlangsung akhir Desember 2024, para guru itu ditemui Penjabat Bupati Jayapura di Aula Kantor Bupati Jayapura. "*Pemerintah daerah melalui penjabat bupati mengatakan bahwa soal hak-hak kami [guru] sementara proses di bagian keuangan,"* kata Ibu Guru Popi. Popi menjadi guru honorer sejak 2021, mengajar di SD Negeri Braso, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Ia lantas mengikuti seleksi serta mendapat SK Pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K TMT pada 1 April 2022. "[Namun] sampai hari ini belum ada kejelasan soal hak-hak yang kami tuntut," kata Popi (https://jubi.id/penkes/2025/tunggakan-hak-tak-kunjung-dibayar-para-guru-tetap-bekerja-demi-penuhi-panggilan-hati/).

- Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta serta pemuda melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Selasa (18/03). Mereka meminta penerapan sekolah gratis di Papua Barat. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengapresiasi langkah mahasiswa dan pemuda yang turut mengawal pembangunan di Papua Barat. Apalagi mereka peduli terhadap masalah pendidikan. *"Saya terima aspirasi adik-adik, dan akan saya bawa ke komisi [DPR Papua Barat] yang membidangi pendidikan. [Saya] juga [akan] menyampaikannya kepada pemerintah pusat,"* kata Mandacan pada Selasa. Thomas Ricky Sanadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia mengaku ia bersama para mahasiswa dari berbagai kampus memang meminta Gubenur Papua Barat menyelenggarakan sekolah gratis di Papua Barat. Ia senang karena Mandacan membuka diri untuk menerima aspirasi mahasiswa dan pemuda tentang sekolah gratis (https://jubi.id/penkes/2025/temui-gubernur-mahasiswa-dan-pemuda-dorong-sekolah-gratis-di-papua-barat/).

04 April

Wakil Bupati Sarmi Hj Jumriati SH bersama dinas terkait melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, perwakilan Kemensos RI Jhin Herman Mampioper dalam rangka Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di

Kabupaten Sarmi (23/03). Pertemuan tersebut sekaligus meninjau lokasi rencana pembanguna Sekolah Rakyat tersebut (Cenderawasih Pos).

16 April

Akses jalan menuju SMKN 8 Kota Jayapura terancam putus. Pihak sekolah bahkan sudah ikut menyuarakan persoalan itu, bahkan berulangkali sudah menyurati pemerintah. Melalui Kepada Dinas PUPR kota Jayapura, Nofdy J. Rampi menyebut, masalah pokoknya ada pada longsoran tebing di tepi jalan. Di mana menurut Nofdi, masalah tersebut menjadi tanggungjawab dari pihak Balai Wilayah Sungai Papua. Namun hingga saat ini belum ada respon dari pihak BWS (Cenderawasih Pos).

17 April

- Ketua Komis V DPR Papua, Dina Laura Rumbiak mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan kasus pemalangan terhadap SMA Negeri 3 Buper yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat. Pasalnya hingga kini, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut masih terhenti akibat aksi pemalangan (Cenderawasih Pos).
- Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley mencanangkan program pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini diambil untuk meletakkan pondasi yang kuat di bidang pendidikan, memperkuat identitas, mengangkat martabat, serta membentuk generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal dan mampu bersaing secara global. Sebagai bagian dari langkah awal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar dialog terbuka pendidikan gratis dengan tema "Merumuskan Kebijakan Bersama, Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan", yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (17/04). *"Pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan berkelanjutan. Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, mulai dari akses yang tidak merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di wilayah terpencil, hingga kesenjangan ekonomi yang*

menyebabkan banyak anak tak dapat melanjutkan pendidikan," ujar Gubernur Nawipa dalam sambutannya (https://jubi.id/papua-tengah/2025/meki-nawipa-tegaskan-komitmen-pendidikan-gratis/).

18 April

Di awal kepemimpinannya, gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan wakil gubernur Deinas Geley mencanangkan program pendidikan gratis di provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini bertujuan meletakkan fondasi pertama di bidang pendidikan demi memperkuat identitas, mengangkat martabat dan mencetak generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal agar nantinya mampu bersaing secara global. Dalam rangka itu, pemerintah provinsi Papua Tengah menggelar dialog terbuka terkait kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah, Kamis (17/04). Dialog bertema "Merumuskan Kebijakan Bersama, Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan" itu diadakan di aula kantor gubernur Papua Tengah. *"Pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan yang berkelanjutan. Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, seperti akses pendidikan yang tidak merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil, serta disparitas ekonomi yang menyebabkan banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan,"* kata gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya, sebagaimana siaran pers dari Humas Pemprov Papua Tengah (https://suarapapua.com/2025/04/18/gubernur-meki-nawipa-canangkan-program-pendidikan-gratis-di-papua-tengah/).

28 April

SD Inpres Tobati terbilang berada di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, namun saat ini jalan utama masuk ke sekolah tersebut mengalami rusak parah, berlubang, berlumut dan licin (Cenderawasih Pos).

02 Mei

Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Jayapura menggelar aksi mimbar bebas untuk mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Me-

reka menuntut agar program tersebut digantikan dengan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah di Tanah Papua. Aksi yang diikuti sekitar 20 peserta ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIT hingga siang hari di Perumnas III, Kota Jayapura, Jumat (02/05). Koordinator Umum aksi, Roisa Nagapani, menyatakan bahwa pelajar di Kota Jayapura dan sejumlah kabupaten di enam provinsi Tanah Papua, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK, secara tegas menolak program MBG. Aksi mimbar bebas yang digelar Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Jayapura mendesak Presiden RI mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Tanah Papua. Aksi ini berlangsung di Perumnas III, Kota Jayapura, Papua, Jumat (02/05). *"Kami menolak MBG. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi di Papua,"* kata Nagapani dalam orasinya. Ia juga meminta Presiden Prabowo mengevaluasi program MBG, yang dinilai tidak menjawab kebutuhan utama pelajar Papua, terutama terkait keterbatasan akses dan biaya pendidikan (https://jubi.id/mamta/2025/pelajar-papua-minta-mbg-diganti-pendidikan-gratis/).

03 Mei

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama wali kota Sorong Septinus Lobat secara resmi meluncurkan program sekolah gratis di wilayah kota Sorong. Peluncuran itu dilakukan bertepatan dengan perayaan hari pendidikan nasional (Hardiknas), Jumat (02/05). Peluncuran program ini ditandai dengan prosesi pelepasan balon merah, putih, dan biru yang membawa flyer bertuliskan launching sekolah gratis oleh gubernur dan wali kota Sorong. Momentum simbolis ini menggambarkan harapan dan tekad pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi semua anak bangsa. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengapresiasi langkah progresif dari Pemkot Sorong. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret bahwa negara hadir melalui pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar warga Negara (https://suarapapua.com/2025/05/03/pemprov-pbd-dan-pemkot-sorong-resmikan-pendidikan-gratis/).

14 Mei

Pendidikan adat (Wun) Nhosa Bongklasiak di wilayah adat sub suku Moi Klabra dan Moi Salkma, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, secara resmi dibuka. Pendidikan Wun dibuka bersamaan dengan pelantikan dewan adat tingkat distrik yang diadakan di kampung Tarsa, distrik Konhir, kabupaten Sorong, Senin (12/05). Acara ini disaksikan langsung perwakilan pemerintah kabupaten Sorong, perwakilan MRP suku Moi jalur adat, DPRK Sorong jalur pengangkatan, perwakilan Polres Aimas, serta masyarakat adat suku Moi. Robert Urini, ketua panitia pelaksana pendidikan Wun Nhosa Bongklasiak, mengatakan pendidikan adat tersebut meliputi empat distrik yaitu distrik Konhir, Wemak, Hobart, dan Klabra. Kegiatan akan dilaksanakan selama dua tahun. *"Kami target siswa baru sebanyak 200 orang, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan berkurang atau bertambah kita tunggu di akhir pendidikan,"* ujarnya (https://suarapapua.com/2025/05/14/pendidikan-wun-nhosa-bongklasiak-resmi-dibuka/).

15 Mei

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memprioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, di Kota Sorong, Kamis (15/05). Dalam sambutannya, Elisa Kambu mengatakan, seluruh kebijakan yang dirancang harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia Papua, khususnya di wilayah 'kepala burung'. *"Kalau kita ingin menciptakan generasi Papua yang unggul 20 tahun ke depan, maka hari ini kita harus mulai dari hal mendasar: ibu hamil, anak-anak, lingkungan yang sehat, dan akses pendidikan yang layak,"* kata Elisa Kambu. Ia juga mengkritik rendahnya kinerja sebagian pimpinan disektor kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai garda terdepan (https://

jubi.id/domberai/2025/kesehatan-dan-pendidikan-jadi-prioritas-dalam-musrenbang-otsus-dan-rkpd-2026-pemprov-papua-barat-daya/).

16 Mei

Untuk kesekian kalinya, SMA Negeri 3 Merauke yang berada di jalan Kamizaun, Kelurahan Rimbaya Jaya Merauke, dipalang dengan memasang daun kelapa muda pada pintu utama pihak yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat dari tanah tersebut, Simon Teotra, Kamis (15/05). Pemalangan pada pintu utama itu sempat membuat Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Kabupaten Merauke Agustinus Sugiarta dan kepolisian turun tangan untuk membuka palang tersebut. Pihak pemalang menuntut ganti rugi atas tanah tersebut lebih dari Rp 12 miliar (Cenderawasih Pos).

20 Mei

Legislator Papua Pegunungan, Fransina Daby menyatakan sejumlah sekolah di Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan kekurangan tenaga pengajar. Menurut, Sekretaris Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Pegunungan itu, kekurangan guru di sejumlah sekolah ditemukan pihaknya, saat bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan atau TP PKK Papua Pegunungan, Yuliana Kobak berkunjung ke Kampung Abusa, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Senin (19/05). Katanya, kekurangan tenaga guru di sejumlah sekolah menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. *"Saya melihat langsung kondisi SD (Sekolah Dasar) Inpres Abusa, Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya. [Di sana] hanya tiga guru yang mengajar kelas 1 hingga kelas 6,"* kata Fransina Daby dalam siaran persnya yang diterima Jubi, Selasa (20/05) (https://jubi.id/lapago/2025/legislator-papua-pegunungan-temukan-ada-sekolah-di-jayawijaya-kekurangan-tenaga-pengajar/).

24 Mei

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meluncurkan program pendidikan gratis, Jumat (23/05). Peluncuran

dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu bersama Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak ditandai pelepasan balon di Lapangan Trinarti Teminabuan, ibu kota Sorong Selatan. Dalam peluncuran itu, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sorong Selatan juga melakukan penandatanganan kesepahaman atau MoU dengan tiga negara dalam rangka pembiayaan kuliah gratis di negara itu. Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Sorong Selatan juga menyerahkan penghargaan dari Pemkab Sorong kepada guru penggerak, guru purna bhakti, guru dengan pengabdian dan dedikasi terbaik sebanyak 30 orang. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam sambutanya mengatakan, ini merupakan momentum yang sangat istimewa. Bukan hanya tonggak sejarah, juga wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Papua Barat Daya (https://jubi.id/penkes/2025/pendidikan-gratis-diluncurkan-di-sorong-selatan/).

11 Juni

- Kepala Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau BAN PDM Papua, Siti Amanah menyatakan pihaknya menargetkan 1.102 satuan pendidikan di Tanah Papua terakreditasi tahun ini. *"Rincian satuan yang harus diakreditasi tahun ini, PAUD sebanyak 291 satuan, Pendidikan Kesetaraan atau PKBM paket A,B, dan C sebanyak 263 satuan. Kemudian Sekolah Madrasah sebanyak 548 satuan, totalnya 1.102 satuan yang jadi target kami tahun 2025,"* ujar Siti Amanah kepada Jubi saat ditemui di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/06). Siti mengatakan, pihaknya menghadapi tantangan dalam upaya mengakreditasikan satuan pendidikan di Papua. Tantangan itu adalah kondisi medan dan cuaca yang tidak mendukung data satuan pendidikan yang dituju tidak akurat atau belum valid, dan satuan pendidikan yang memiliki data lengkap dalam Dapodik namun tidak memiliki bangunan fisik. *"Tantangan dari kondisi lapangan juga, paling tidak memungkinan untuk dilakukan visitasi oleh asesor kami. Misalnya seperti di Kabupaten Nduga [Papua Pegunungan], Intan Jaya [Papua Tengah], dan Puncak Jaya [Papua Tengah] yang rata-rata adalah daerah*

rawan kontak senjata, sehingga tidak mungkin kami menugaskan asesor dan asesor juga tidak mungkin mau ditugaskan," ucapnya (https://jubi.id/penkes/2025/1-102-satuan-pendidikan-di-tanah-papua-ditargetkan-terakreditasi-tahun-ini/).

- Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan, Didimus Yahuli meresmikan 274 bangunan penunjang pendidikan di wilayah pemerintahannya. Peresmian ratusan bangunan itu dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 4 Kwaserama, di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Selasa (10/06). Bangun yang diresmikan adalah gedung sekolah, ruang kelas, kantor, perumahan guru, perpusatakaan, toilet, dan laboratorium di 90 satuan pendidikan negeri maupun swasata mulai dari pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak atau PAUD/TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, asrama mahasiswa dan mahasiswi. Ratusan bangunan yang diresmikan itu pembangunannya dikerjakan pada 2019-2024 atau periode pertama pemerintahan Bupati Yahukimo dan Wakil Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli-Esau Miran. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli bersyukur kepada Tuhan karena pembangunan ratusan bangunan itu dapat terlaksana, meski ada berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan. Salah satunya kondisi geografis yang sulit. Sebab, sebagian besar distrik dan kampung di Kabupaten Yahukimo hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara. Selain itu, faktor keamanan juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah (https://jubi.id/penkes/2025/bupati-yahukimo-resmikan-274-bangunan-penunjang-pendidikan/).

19 Juni

Ketua Yayasan Serafim, Nehes Jon Fallo, mengungkapkan bahwa pasca penyerangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 21 Maret 2025 lalu, proses pembelajaran di wilayah tersebut tidak berjalan normal. Situasi keamanan yang belum kondusif menjadi alasan utama dihentikannya aktivitas belajar mengajar secara langsung. Para siswa tetap

diberi tugas dan materi belajar melalui WhatsApp agar nilai akhir tetap bisa diperoleh (Cenderawasih Pos).

22 Juni

Demi masa depan generasi penerus, satu kebijakan diambil bupati Jayawijaya Athenius Murip, SH, MH. Sedikitnya 50 orang anak jalanan di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dikirim ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk belajar. Anak-anak tersebut dilepas secara resmi oleh bupati Athenius Murip dari halaman kantor bupati Jayawijaya, Kamis (19/06) lalu. Saat acara pelepasan, mereka mengenakan pakaian seragam bertulisan "Komunitas Lintas Batas – Murni – Bangkit bersama membangun Jayawijaya – Nit Meke". Keberangkannya dibagian dua kloter. 20 anak diberangkatkan duluan, disusul 30 anak lainnya. *"Pemerintah daerah mengirim anak-anak kami ini ke Yogyakarta demi masa depan mereka. Harapannya, 50 anak ini belajar baik di Yogyakarta,"* kata Atenius. Diakuinya, kebijakan proteksi ini merupakan bagian dari visi dan misinya selama masa kepemimpinan bersama wakil bupati Ronny Elopere periode 2024-2029 (https://suarapapua.com/2025/06/22/bupati-jayawijaya-kirim-50-anak-jalanan-belajar-di-yogyakarta/).

23 Juni

Ketua Tim Penggerak Sekolah Adat di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Manu Hisage menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan program sekolah rakyat yang diprogramkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Manu Hisage kepada Jubi melalui aplikasi pesan singkatnya, Senin (23/06). Manu Hisage menjelaskan bahwa pihak telah membuka enam sekolah adat dan kini sedang diproses oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Sekolah adat berada di Distrik Itlayhisage, Walelagama dan Siepkosi. Menurutnya Sekolah adat yang digagas tersebut, sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam menangani krisis pendidikan dan kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia. *"Sejak Januari hingga April 2024, sekelompok masyarakat di Kampung Yogonima dan Sumunikama, Distrik Itlayhisage telah membuka sekolah adat. Lalu masyarakat di Kampung Walelagama, Distrik Walegama dan Kampung*

Sekan dan Kamoung Sekan Dalam, Distrik Siepkosi juga buka sekolah adat," kata Tim pengerak sekolah adat itu. Hisage menuturkan, sejak Rabu, 18 Juni 2025 pihaknya telah menerima SK Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. *"Sekolah adat di wilayah ini lebih menekankan pada pendidikan nonformal yang berkolaborasi dengan pendidikan formal. Dimana tujuannya adalah mempermudah akses bagi anak-anak yang putus sekolah, nganggur, kawin di bawah umur dan menginginkan agar memiliki ijasah hingga melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang perguruan tinggi,"* ujarnya (https://jubi.id/penkes/2025/sekolah-adat-di-jayawijaya-siap-berkolaborasi-dengan-program-sekolah-rakyat/).

03 Juli

Ratusan mahasiswa asrama Putra Lanny Jaya di Kota studi Jayapura, Papua mendesak pemerintah kabupaten atau Pemkab Lanny Jaya, Papua Pengunungan merealisasikan dana operasional asrama. Desakan itu disampaikan mahasiswa, sebab menurut mereka, Pemkab Lanny Jaya tidak lagi akan memberikan bantuan dana operasional kepada asrama putra Lanny Jaya di kota studi Jayapura. Katanya, keputusan itu diambil oleh Pemkab Lanny Jaya saat melakukan evaluasi di Wamena, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Mei 2025. Ketua asrama putra Lanny Jaya, Ass Wanimbo mengatakan, selama ini pihaknya mendapat operasional asrama dari pemkab Lanny Jaya setiap tahunnya Rp 45 juta. *Pemutusan bantuan itu disampaikan langsung bapak Plt (pelaksana tugas) kepala Dinas Pendidikan Lanny Jaya, Saiman Yigibalom. Kami mahasiswa ratusan orang ini mendesak mengapa hal itu dilakukan. Harus transparan sampaikan alasan jelasnya,"* kata Wanimbo di Asrama Putra Lanny Jaya, Kota Jayapura, Papua, Kamis (03/07) (https://jubi.id/lapago/2025/mahasiswa-desak-pemkab-lanny-jaya-realisasikan-dana-operasional-asrama/).

04 Juli

Anak-anak berusia sekolah dari daerah-daerah konflik tak memiliki masa depan seperti halnya anak-anak di daerah lain. Ikut orang tua mengamankan diri dari kemungkinan terdampak konflik lagi, mereka otomatis tak mendapatkan haknya: belajar. Cerahnya masa depan mereka

kian suram akibat konflik berkepanjangan di kampungnya mereka seakan tiada berujung. Fakta ironis, sudah cukup banyak anak yang seharusnya sedang bersekolah, justru ada di kamp pengungsian lantaran daerahnya dilanda konflik bersenjata antara dua kubu: TNI/Polri versus TPNPB. Otomatis, mereka tak ada lagi ruang untuk mengembangkan potensi, belajar dan menggapai impiannya. Gubernur provinsi Papua Tengah Meki Nawipa tak rela nasib anak-anak itu pupus karena konflik. Segala upaya terus dilakukan bersama delapan kepala daerah di Papua Tengah, guna memastikan akses pendidikan bagi anak-anak yang terdampak konflik. Kali ini gubernur memboyong sejumlah bupati ke Jakarta untuk mengajukan model Sekolah Rakyat (SR) kepada Kementerian Sosial (https://suarapapua.com/2025/07/04/gubernur-meki-nawipa-tegaskan-pentingnya-pendidikan-anak-anak-terdampak-konflik/).

25 Juli

- Komitmen gubernur Meki Fritz Nawipa dan wakil gubernur Deinas Geley menerapkan program pendidikan sekolah gratis sebagai bagian dari visi dan misinya akan ditindaklanjuti dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan diawali kegiatan sosialisasi, koordinasi, validasi data dan penyusunan rencana aksi. Yulianus Kuayo, pelaksana tugas kepala bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan pada dinas Dikbud provinsi Papua Tengah, mengungkapkan hal itu dalam sambutan pembukaan pada rapat koordinasi dan validasi data program pendidikan sekolah gratis jenjang SMA/SMK sederajat kabupaten Mimika, Puncak dan Puncak Jaya di Timika, Jumat (25/07) malam. Di hadapan para kepala sekolah dan guru SMA/SMK se-Papua Tengah, Kuayo mewakili mewakili Plt kepala dinas Dikbud provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, mengemukakan, program sekolah gratis merupakan bagian dari komitmen kepala daerah yang telah disampaikan sejak masa kampanye, dan akan segera diimplementasikan secara bertahap. *"Pendidikan gratis ini program nyata yang telah dirancang untuk diimplementasikan dengan tujuan mengatasi berbagai masalah mendasar, seperti anak putus sekolah, buta huruf, hingga kesenjangan akses di daerah-*

daerah terpencil," ujarnya. Berdasarkan data Dapodik dan hasil analisis internal, sebut Kuayo, terdapat sekitar 205.000 anak di wilayah provinsi Papua Tengah yang belum mengenyam pendidikan atau tidak sedang bersekolah (https://suarapapua.com/2025/07/25/kurangi-jumlah-anak-putus-sekolah-solusi-terapkan-pendidikan-gratis/).

- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Indonesia dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengadakan diskusi mengenai perkembangan kebijakan berdasarkan prioritas dan peluang bersama untuk meningkatkan sinergi bilateral jangka panjang pada Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Indonesia–Australia pertama tentang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian. Dialog ini diselenggarakan di Kemdiktisaintek, Jakarta, pada 23 Juli 2025. Dipimpin oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia, Fauzan, bersama dengan Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, dialog kebijakan ini merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan. *"Inisiatif ini bukan hanya tentang kebijakan dan perjanjian formal, tetapi juga tentang membuka peluang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Kita harus memastikan keberlanjutan program kerja sama kita dalam jangka panjang,"* tegas Wakil Menteri Fauzan, demikian keterangan pers yang diterima jubi.id dari Public-Affairs-JAKT@dfat.gov.au, Jumat (25/07) (https://jubi.id/pasifik/2025/indonesia-dan-australia-perkuat-kemitraan-riset-dan-pendidikan-tinggi-lewat-dialog-tingkat-tinggi/).

04 Agustus

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Theo Hesegem Theimenyebut aktivitas belajar mengajar di SD Inpres Amuma, Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan mengalami kevakuman. Penyampaian Theo ini setelah pihaknya menerima laporan dari seorang pemerhati pendidikan yaitu Usha Layge Payage. Dalam laporannya, SD di Distrik Amuma mengalami kevakuman. Hal ini membuat generasi yang ada di distrik tersebut tidak mengikuti ujian

selama 9 tahun yaitu sejak tahun 2013 hingga 2025. *"Kevakuman ini disebabkan tidak adanya tenaga guru, dan menurut laporan guru-guru tidak pernah aktif dilapangan. Sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan dengan lancar,"* ungkapnya (Cenderawasih Pos).

21 Agustus

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, Petrus Izaach Suripatty mengatakan pencanangan program pendidikan gratis oleh Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley merupakan hal positif perlu diapresiasi sebagai anak-anak daerah yang peduli Sumber Daya Manusia atau SDM Papua untuk memperoleh hak pendidikan dengan biaya minim. Demikian hal itu disampaikan Petrus Izaach Suripatty di Kantor DPR Drs. Carel Gobai, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa (19/08). Petrus Suripatty menuturkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang layak. Sebenarnya Pak Gubernur yang peduli dengan pendidikan ini sehingga dalam beberapa kesempatan beliau sampaikan bahwa anak-anak daerah khususnya di tanah ini menjadi tuan di negerinya melalui pendidikan yang merupakan salah satu sarana menjadi tuan di tanah sendiri. *"Salah satu alat untuk kita bisa menjadi Tuan dan Nyonya di negeri kita ini melalui pendidikan. bagi saya Program pendidikan gratis itu hal yang positif,"* ujarnya (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dpr-papua-tengah-nilai-pencanangan-pendidikan-gratis-karena-kepedulian/).

28 Agustus

Mahasiswa asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat yang menempuh pendidikan di Kota Jayapura, Papua butuh dukungan beasiswa dari pemerintah kabupaten atau pemkab daerah asal mereka. Ketua Asrama Mahasiswa Manokwari di Kota Jayapura, Solfin Meidodga mengatakan, sejak 2019 hingga kini mereka tidak pernah mendapat beasiswa. Pemkab Manokwari pernah menyalurkan bantuan pendidikan beberapa tahun lalu. Namun mahasiswa menyatakan bantuan pendidikan itu berbeda dengan beasiswa. *"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Manokwari agar merealisasikan beasiswa kepada mahasiswa di Kota Jayapura, karena kami butuh*

beasiswa untuk studi kami," kata Solfin Meidodga di Kota Jayapura, Papua, Rabu (27/08). Menurutnya, beasiswa mestinya menjadi salah satu fokus program pemkab setiap tahunnya lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (https://jubi.id/penkes/2025/mahasiswa-manokwari-di-kota-jayapura-butuh-beasiswa-dari-pemkab/).

01 September

Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw melalui Kepala Bidang Pendidikan SMP melaunching kurikulum lokal berbasis konservasi dan budaya suku Abun untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Sausapor distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Kegiatan launching itu dilakukan pada hari, Rabu 30 Agustus 2025. Tenia Kurniawati, Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw menjelaskan, pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya Tambrauw tidak terlepas dari kondisi wilayah kabupaten yang 80 persen merupakan kawasan hutan konservasi. Konservasi tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam, tetapi juga meliputi budaya dan kearifan lokal, terutama lima suku di wilayah adat Tambrauw. Landasan lain dari pengembangan kurikulum ini kata dia adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tambrauw Nomor 6/37/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta Perda Konservasi Nomor 5 Tahun 2018. *"Launching kurikulum berbasis konservasi suku Abun merupakan produk turunan dari Perda MHA dan Perda Konservasi. Saya menjabarkannya dalam bentuk buku sebagai bahan ajar bagi siswa SMP agar menjadi generasi penerus pelestarian budaya dan alam Tambrauw,"* jelas Tenia kepada Suara Papua pada, Minggu (31/08) (https://suarapapua.com/2025/09/01/dinas-pendidikan-tambrauw-launching-kurikulum-lokal-berbasis-konservasi-dan-budaya-suku-abun/).

04 September

Pemerintah kabupaten Dogiyai berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan meski masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana, manajemen sekolah, kedisiplinan

guru dan siswa, hingga minimnya peran orang tua mendukung anak, mesti menjadi fokus pembenahan bersama. Hal tersebut dikemukakan Benediktus Goo, kepala bidang SD, SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Dogiyai, saat pertemuan membahas berbagai persoalan pendidikan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Dogiyai, Kamis (28/08*). "Perlu upaya yang harus kita lakukan supaya sekolah-sekolah semakin bermutu, pertama kita merujuk kebijakan dari Kementerian melalui perubahan kurikulum Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025. Di dalamnya ada empat program prioritas dan dua program tambahan, yakni pembelajaran mendalam, literasi dan numerasi dengan sains, coding dengan artificial intelligence, serta tes kemampuan akademik,"* jelasnya. Kata Benediktus, sejumlah langkah akan diupayakan terfokus untuk pembenahan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah. Antara lain pelatihan khusus untuk guru-guru akan diadakan secara bertahap dengan mendatangkan narasumber dari pusat, serta dilanjutkan dengan pendampingan oleh Balai Guru Penggerak (BGP) dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) provinsi (https://suarapapua.com/2025/09/04/pemkab-dogiyai-benahi-pendidikan-para-guru-dibekali-kurikulum-terbaru/).

11 September

Kondisi pendidikan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan masih memprihatinkan. Dari jenjang SD hingga SMA/SMK, ketimpangan layanan pendidikan terasa mulai dari minimnya tenaga pengajar hingga fasilitas dasar yang tidak memadai. Wakil Ketua II DPRK Nduga, Nus Ganikmeye, menyoroti langsung situasi ini saat berkunjung ke SMP Negeri 1 Kenyam, Kamis (11/09). Ia mengaku prihatin melihat kondisi sekolah di ibu kota kabupaten itu. *"Banyak persoalan yang dialami guru-guru di Nduga, terutama di sekolah-sekolah di Kenyam. Rata-rata yang aktif hanya guru honorer, sementara guru tetap tidak berada di tempat, tetapi gajinya tetap jalan,"* kata Nus kepada Jubi. Politikus Nasdem itu mendesak Pemkab Nduga segera bertindak. *"Kami minta Pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan memprioritaskan kebutuhan sekolah, baik pembangunan fisik maupun kesejahteraan guru. Pendidikan ini layanan dasar, tidak boleh main-*

main," katanya. Keluhan serupa datang dari guru SMK Pertanian Kenyam, Markus Sonda. Ia mengatakan sekolah kekurangan tenaga pendidik di mata pelajaran inti. *"Kami harus saling bahu-membahu mengajar pelajaran yang sebenarnya bukan jurusan kami, karena guru pertanian, bahasa Indonesia, dan seni budaya masih kurang,"* ujarnya (https://jubi.id/lapago/2025/sekolah-di-kenyam-nduga-kekurangan-guru-rumah-dinas-dihuni-15-orang/).

18 September

Komitmen bupati Yudas Tebai dan wakil bupati Yulten Anouw menyiapkan SDM putra-putri 10 distrik diperlihatkan sejak tahun pertama memimpin kabupaten Dogiyai. Terbukti dengan puluhan mahasiswa dan pelajar Dogiyai dikirim ke berbagai kota studi, baik dalam maupun luar negeri. Anak-anak generasi penerus itu telah diberikan beasiswa selama mereka menempuh pendidikan tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Pemerintah kabupaten Dogiyai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga maupun instansi lainnya mengambil kebijakan cerdas, yakni menyiapkan beasiswa bagi putra-putri asli 10 distrik. Jumlahnya bukan main, tercatat 71 mahasiswa dan pelajar yang telah dikirim ke luar Papua hingga luar negeri untuk menempuh pendidikan. Data yang dihimpun Suara Papua, beasiswa bagi anak-anak asli Dogiyai diakomodir dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, jumlah mahasiswa dan pelajar yang dibiayai mulai tahun ini ada 15 orang sedang belajar di Sekolah GenIUS, 14 orang beasiswa ke luar negeri yakni 12 orang studi di India dan 2 lainnya di Rusia, serta 12 orang lagi lolos program ADEM tahun akademik 2025/2026. Kemudian, disusul 30 orang yang baru saja dikirimkan ke Surabaya, Jawa Timur. Mereka akan menempuh pendidikan kesehatan di Universitas Anwar Medika (UAM) Surabaya. Dikirim Dinas Kesehatan kabupaten Dogiyai, mereka akan kuliah di dua jurusan berbeda. Sebanyak 15 orang di jurusan Farmasi, dan 15 lainnya jurusan Analis Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) (https://suarapapua.com/2025/09/18/tahun-pertama-kepemimpinan-yudas-yuliten-biayai-71-mahasiswa-dan-pelajar/).

19 September

Pemerintah provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi membuka kesempatan bagi tenaga guru kontrak dengan target akan ditugaskan di wilayah 3T tahun 2025. Program ini dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal itu dikemukakan Nurhaidah, pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Papua Tengah, menjelaskan kebijakannya merekrut tenaga guru yang akan ditempatkan di daerah 3T pada tahun ini. Kata Nurhaidah, program rekrutmen ini merupakan langkah strategis untuk menjawab keterbatasan tenaga guru di wilayah pelosok, baik kepulauan, pesisir pantai, pinggiran kota, maupun daerah pedalaman. *"Oleh karena masih ada keterbasan, sehingga kami akan merekrut guru-guru kontrak. Untuk itu, kami mengundang putra-putri terbaik Papua Tengah untuk ikut kesempatan ini agar turut membangun pendidikan, terutama di daerah 3T,"* ajak Nurhaidah. Dalam seluruh proses rekrutmen tenaga guru kontrak, tegas Nurhaidah, sama sekali tak dikenakan biaya alias gratis. Nurhaidah menambahkan, program rekrutmen tersebut diberi nama "Mapega" atau "Majukan Pendidikan Gratis Anak" (https://suarapapua.com/2025/09/19/pemprov-papua-tengah-rekrut-guru-kontrak-3t-ini-syarat-dan-ketentuannya/).

24 September

Pemprov Papua Tengah menandatangani MoU atau nota kesepahaman bersama Universitas Papua atau UNIPA untuk pendampingan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Papua Tengah. Pernandatangan berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Bandara Lama, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa (23/09). *"Saya sampaikan Terima kasih kepada Kampus UNIPA yang datang bekerja demi Papua Tengah ini. Dengan ini anak-anak bisa bebas dari kebodohan. Karena hanya pendidikan yang bisa membebaskan itu, tiada lain. saya harapkan semoga semua ini terjadi sesuai rencana Tuhan,"* kata Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Rektor UNIPA Hugo Warami menyampaikan UNIPA menawarkan program pengembangan pendidikan khusus dalam rangka

mengintervensi pendidikan dasar dalam Program SSH. Hal ini disambut baik dari Pemprov yang dipayungi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan untuk ke delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah (https://jubi.id/papua-tengah/2025/pemprov-papua-tengah-dan-universitas-papua-teken-mou-sekolah-sepanjang-hari/).

25 September

Satu kebijakan cerdas kembali ditorehkan Meki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan menghadirkan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Ini setelah menggandeng Universitas Papua (Unipa) Manokwari. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama antara pemerintah provinsi Papua Tengah dengan Unipa, Selasa (23/09) siang. Dengan MoU yang telah ditandatangani dari ruang kerja gubernur, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap tim Unipa mendampingi pelaksanaan program SSH bagi anak-anak Papua Tengah di delapan kabupaten mulai tahun ini. Gubernur Meki Nawipa mengaku bersyukur karena rencana kerja sama dengan Unipa yang digagas beberapa waktu lalu itu akhirnya bisa direalisasikan hari ini. Menurut Meki, gagasan tersebut boleh terwujud atas restu Tuhan. Dan, dengan MoU yang telah ditandatangani itu menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan di provinsi Papua Tengah. *"Kita bersyukur karena pada hari ini pemerintah provinsi Papua Tengah dan Unipa Manokwari bisa membuat sejarah baru demi meletakkan fondasi pendidikan yang kuat di provinsi ini. Dengan program SSH, kita harap agar anak-anak kita ke depan menjadi pintar, jenius, dan mampu bersaing di era teknologi. Ini satu kebijakan strategis kami untuk menjawab tuntutan perkembangan global,"* tuturnya (https://suarapapua.com/2025/09/23/gandeng-unipa-gubernur-meki-nawipa-hadirkan-program-ssh-di-papua-tengah/).

01 Oktober

Komisi V DPR Papua Tengah yang membidangi pendidikan menilai penyelenggaraan sekolah unggulan berpola berasrama Mepa Boarding School merupakan sebuah wadah strategis yang akan menjadi solusi besar

untuk menciptakan sumber daya manusia Papua Tengah yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Selasa (30/09). Anis Labene mengatakan pihaknya mendukung dan menyambut baik program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah seperti sekolah gratis, Sekolah Sepanjang Hari atau SSH, sekolah berpola asrama, dan Mepa Boarding School. Semua program bidang pendidikan itu telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Tengah dan akan dilaksanakan. *"Mepa Boarding School sudah di-launching, artinya kita sudah satu langkah ke depan. Apa yang dijanjikan [Gubernur Papua Tengah] itu bisa terakomodasi dengan baik. Mepa Boarding School menjadi solusi besar dan solusi SDM di Papua Tengah. Kami sebagai wakil rakyat di Komisi V menyambut baik,"* kata Labene (https://jubi.id/papua-tengah/2025/komisi-v-dpr-papua-tengah-sebut-mepa-boarding-school-solusi-pendidikan-di-papua-tengah/).

04 Oktober

Wakil Bupati atau Wabup Jayapura, Haris Richard Yocku menyatakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Jayapura berkonsentrasi dan fokus dalam membangun dunia pendidikan. *"Mewakili pemerintah, saya dan pak Bupati Yunus Wonda sangat berkosentrasi dengan pendidikan. Anak-anak muda harus mengisi waktu dengan kegiatan positif, terutama lewat gereja dan pendidikan. Jangan isi dengan hal-hal negatif,"* kata Wabup Haris Yocku ketika menghadiri syukuran wisuda dua mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) yang berlangsung di belakang Lapangan Auri, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis (02/10). Pemerintah Kabupaten Jayapura, kata dia membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan, termasuk dengan menyiapkan anggaran beasiswa di tahun mendatang. *"Kalau ada yang butuh beasiswa, saya dan Pak Bupati sudah berupaya agar tahun depan disiapkan anggaran beasiswa bagi anak-anak Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Jadi kesempatan itu terbuka bagi semua,"* ujarnya (https://jubi.id/kabupaten-jayapura/2025/haris-richard-yocku-pemkab-jayapura-berkonsentrasi-terhadap-pendidikan/).

14 Oktober

Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri mengatakan di bawah pemerintahannya mulai 2026 akan fokus membangun sumber daya manusia Papua terkait kesehatan dan pendidikan. "Ini faktor utama yang kami utamakan dalam membangun Provinsi Papua yang kemudian akan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur," katanya pada malam silahturahmi yang digelar di Jakarta usai ia dan Aryoko Rumaropen dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, Rabu (8/10). Tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai, kata Fakhiri, hal itu akan menyebabkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi di Papua (https://jubi.id/mamta/2025/mathius-fakhiri-mulai-2026-fokus-bangun-sdm-papua-terkait-kesehatan-dan-pendidikan/#google_vignette).

16 Oktober

Wakil Ketua DPD RI, Yorris Raweyai, menegaskan pentingnya Provinsi Papua Tengah membangun manusia sebelum membangun infrastruktur. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. "Papua Tengah harus muncul sebagai provinsi yang membangun SDM melalui pendidikan, dan meningkatkan angka harapan hidup lewat kesehatan. Dua program ini harus dipacu bersama karena sangat berguna bagi anak cucu ke depan," ujar Yorris saat kunjungan kerja di Nabire, Rabu (15/10). Dalam kunjungan tersebut, Yorris didampingi anggota DPD RI Lis Tabuni serta pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah. Mereka mengunjungi sejumlah instansi dan lembaga daerah untuk meninjau langsung kondisi pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Yorris menjelaskan, kunjungan itu juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah Presiden Prabowo-Gibran, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan koperasi merah putih. Selain mendukung, ia juga menyerap aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah pusat (https://jubi.id/meepago/2025/yorris-raweyai-dorong-papua-tengah-fokus-pada-pendidikan-dan-kesehatan/).

23 Oktober

Untuk kesekian kalinya, SMAN 3 Merauke yang berada di Jalan Kamizaun, Kelurahan Rimba Jaya Merauke dipalang. Pemalangan terakhir terjadi pada 15 Mei 2025 atau sekita 5 bulam lalu. Pemalangan yang sama kembali terjadi Rabu (22/10) pagi kemarin (Cenderawasih Pos).

25 Oktober

Penatua Simon Wonemseba didaulat membawa Baki, kotak berisi Alkitab tua saat tiba di Pelabuhan Kaibi Distrik Wondiboy menuju Mie Distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. Simon membawa Kitab Tua yang dibungkus dengan kain putih. Diiringi ratusan orang, kitab tua dibawa dari Distrik Roon dengan pawai laut, Jumat (24/10) (https://jubi.id/domberai/2025/al-kitab-tua-dari-roon-jadi-terang-di-momen-100-tahun-pendidikan-modern-papua/#google_vignette).

27 Oktober

Pendidikan di Tanah Papua sudah dimulai sejak akhir 1800-an oleh para misionaris. Tetapi pendidikan formal atau modern di Tanah Papua di mulai oleh Zending pada 25 Oktober 1925. Saat itu sekolah guru dibuka di Teluk Wondama, tepatnya di Kampung Miei, Distrik Wasior Kota. Memperingati satu abad peradaban modern di Papua pada 25 Oktober 2025, Jubi menulis profil salah satu perempuan Papua pertama yang mengikuti pendidikan modern ketika Tanah Papua masih dikuasai Kerajaan Belanda. Namanya, Marthina Damimetouw (https://jubi.id/penkes/2025/saat-pendidikan-berasrama-menjadi-poros-pendidikan-di-tanah-papua/).

29 Oktober

Dampak dari konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sejak 2019 sangat terasa di sektor pendidikan. Hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak tak berjalan mulus, bahkan anak-anak sudah tak bersekolah lagi. Anak-anak generasi penerus masa depan Intan Jaya merasakan dampak buruk dari konflik berkepanjangan itu. Kerinduan untuk belajar kembali tak mungkin tergapai lantaran situasi

belum kondusif. *"Konflik ini sudah bunuh masa depan anak-anak sekolah. Tidak ada masa depan yang bagus karena anak-anak tidak bisa belajar lagi gara-gara tiap hari selalu ada bunyi tembakan. Bikin takut sekali, jadi tidak bisa ke sekolah,"* ujar salah satu bapak dalam orasinya di lapangan Yokatapa, distrik Sugapa, Selasa (28/10). Situasi mencekam yang terjadi nyaris tiap hari berdampak terhadap psikologi murid sekolah dasar (SD) maupun siswa-siswi SMP dan SMA. Apalagi, ia akui sudah banyak anak sekolah terdampak konflik bahkan tewas terkena peluru. "Psikologi anak-anak sangat terganggu karena tiap hari ada kontak senjata. Banyak anak ikut orang tua mengungsi. Kasihan sekali dengan masa depan anak-anak kami," tuturnya. Bagi anak-anak yang bertahan bersama orang tua di rumah mereka meski situasi tiap hari selalu berubah lantaran terjadi insiden penembakan, tak mungkin lagi pergi ke sekolah. Mereka benar-benar kehilangan kesempatan belajar (https://suarapapua.com/2025/10/29/konflik-bersenjata-membunuh-masa-depan-generasi-intan-jaya/).

31 Oktober

- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida S.E, menyampaikan bahwa hasil Rapat Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan memutuskan perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) yang menetapkan Hari Kamis sebagai hari wajib menggunakan tas noken dan berbahasa daerah. Keputusan ini diambil untuk mengimplementasikan dan menyinkronkan program prioritas pendidikan dan pelestarian budaya lokal dalam kegiatan Rakor di Nabire, Papua Tengah, Kamis (30/10) (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dinas-pendidikan-papua-tengah-usulkan-pergub-hari-noken-dan-bahasa-daerah/).
- PT Freeport Indonesia menyerahkan bagian pendidikan untuk Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Kristen Injili (GKI) di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. "Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen PTFI dalam pendidikan anak-anak Papua. Karena kami percaya pendidikan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas," kata Direktur dan Executive Vice President Sustainable Development PTFI Claus

Wamafma (https://jubi.id/advertorial/2025/dukung-pendidikan-di-tanah-papua-freeport-indonesia-serahkan-bantuan-pendidikan-untuk-ypk-gki/).

12 November

Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri menyampaikan enam poin usulan yang dianggap strategis untuk pembangunan pendidikan di Papua kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (11/11). Keenam usulan strategis yang disampaikan itu adalah pertama, pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua, yaitu sekolah berpola asrama di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen dan Supiori. Kedua, pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua melalui sekolah khusus wilayah perbatasan dengan kurikulum yang menyesuaikan dengan posisi strategis Provinsi Papua dan Indonesia di wilayah Pasifik. Ketiga, pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua yang memperhatikan kebutuhan dasar, berupa revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di wilayah dengan aksesibiltas pelayanan Pendidikan yang terbatas (https://jubi.id/penkes/2025/gubernur-sampaikan-enam-poin-strategis-pendidikan-papua-kepada-mendikdasmen/#google_vignette).

BAB V

IMPUNITAS DAN SIKLUS KEKERASAN: ANALISIS KRITIS PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA

(Oleh Hans G. Yosua)

Pendahuluan

Situasi kekerasan dan pelanggaran HAM seakan menjadi masalah yang terus berulang di Tanah Papua. Peristiwa penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang masih terjadi sepanjang tahun 2025. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 60 pengaduan kasus dari Tanah Papua.[36] Pada sisi lain peristiwa pelanggaran berat HAM di Tanah Papua juga tidak kunjung tuntas. Hingga kini proses kasasi dari peristiwa Paniai masih mandek di Mahkamah Agung, sementara proses penyidikan peristiwa Wasior dan Wamena oleh Kejaksaan Agung masih meninggalkan tanda tanya.

Selain itu, Masyarakat adat di berbagai wilayah di Tanah Papua kini terancam akibat program Pembangunan pemerintah. Proyek-proyek pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan serta membuat ruang hidup Masyarakat adat tergerus. Pembangunan juga dilangsungkan tanpa partisipasi bermakna dari Masyarakat adat.

[36] Jubi, https://jubi.id/polhukam/2025/selama-2025-komnas-ham-ri-terima-60-pengaduan-kasus-dari-tanah-papua/).

Situasi HAM yang masih jauh dari ideal juga tercermin dari indeks kebebasan pers di Tanah Papua. Aliansi Jurnalis Independen Jayapura mencatat bahwa indeks kebebasan pers di Tanah Papua selalu buruk bahkan menempati peringkat terbawah dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.[37] Ancaman terhadap kebebasan pers merupakan tanda adanya iklim demokrasi yang bermasalah. Masalah tersebut juga tercermin dari penggunaan kekuatan secara berlebihan atau eksesif terhadap penyampaian di muka umum oleh warga yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun 2025.

Tulisan ini akan menganalisis berbagaI persoalan mengenai perlindungan dan penghormatan HAM di Tanah Papua. Mandeknya penuntasan pelanggaran berat HAM, siklus kekerasan terhadap warga sipil yang terus berulang, pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat adat serta tak kunjung dibentuknya pengadilan HAM di Tanah Papua akan menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini.

Impunitas dan Mandeknya Penuntasan Pelanggaran Berat HAM di Tanah Papua

Peristiwa Paniai berdarah adalah peristiwa pelanggaran HAM pertama yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 di Kabupaten Paniai yang kala itu masih menjadi bagian dari provinsi Papua. Peristiwa Paniai telah ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM oleh Komnas HAM pada tahun 2019, dan pada Desember 2022 majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar memutus bebas terdakwa tunggal kasus Paniai. Proses persidangan peristiwa Paniai dilakukan di Pengadilan HAM Makassar, sebab belum terdapat satu pun Pengadilan HAM yang "berdiri" di Tanah Papua. Akibatnya, peristiwa pelanggaran berat HAM di Tanah Papua seperti peristiwa Paniai (dan persitiwa Abepura berdarah yang diadili pada tahun 2004) harus diadili di Makassar.

[37] Jubi,https://jubi.id/polhukam/2025/indeks-kebebasan-pers-di-papua-selalu-terendah-butuh-dukungan-semua-pihak/

Pasca putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sayangnya, pada saat itu Mahkamah Agung tidak memiliki hakim *ad hoc* HAM sehingga proses kasasi peristiwa Paniai tidak dapat dilanjutkan. Penundaan proses kasasi tersebut berlangsung hingga sekarang, dengan kata lain proses kasasi dari peristiwa Paniai telah *mandek* selama nyaris empat tahun.

Hingga tahun 2025, Komisi Yudisial telah empat kali menyelenggarakan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung dan mengirimkan 12 nama untuk mengikuti *fit and proper test* calon Hakim Agung ke DPR-RI. Sayangnya, beberapa calon yang diloloskan oleh Komisi Yudisial memiliki pengetahuan yang buruk terkait pelanggaran berat HAM, bahkan terdapat calon yang sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang HAM.

Selain itu, semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke DPR-RI juga ditolak dengan beberapa alasan penolakan yang sembrono. Hingga kini, DPR-RI baru meloloskan satu orang sebagai calon hakim *ad hoc* HAM, padahal agar proses kasasi pelanggaran berat HAM dapat berjalan dibutuhkan tiga orang hakim *ad hoc* HAM. Itu berarti bahwa proses kasasi peristiwa Paniai akan kembali tertunda tanpa batas waktu yang jelas (*undue delay*).

Selain peristiwa Paniai, kasus Wasior dan Wamena juga tak jelas nasibnya hingga kini. Dua peristiwa tersebut telah ditetapkan oleh Komnas HAM RI pada tahun 2004 dan berkas penyelidikannya telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyeledikan tersebut masing-masing pada 29 November 2016 dan 23 November 2019. Hingga kini kelanjutan dari penyidikan peristiwa Wasior dan Wamena tak ada kejelasan.Padahal pada awal tahun 2023 melalui pidatonya, Presiden mengungkapkan pengakuan terhadap 12 kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia, termasuk peristiwa Wasior-Wamena.[38] Pengakuan tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Sayangnya, tiga tahun setelah

[38] Kompas, "Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-ini-daftarnya?page=all

tim tersebut dibentuk, tindak lanjut dari program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat tidak menunjukkan hasil yang nyata kepada korban pelanggaran berat HAM di Tanah Papua.

Berbagai organisasi Masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua pada Januari 2025 menyatakan bahwa pelaksanaan program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masih menyisakan pertanyaan dari para korban khususnya korban Wasior berdarah dan Wamena berdarah.[39] Tidak tuntasnya proses persidangan melalui pengadilan HAM, serta ketidakjelasan penyelesaian secara non-yudisial dalam kasus pelanggaran berat HAM di Tanah Papua menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memutus rantai impunitas di Tanah Papua dan hak atas keadilan serta pengungkapan kebenaran bagi korban pelanggaran berat HAM di Tanah Papua masih belum terwujud.



Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-794 di seberang Istana Merdeka, Jakarta (Sumber: Antara Foto)

[39] Jubi https://jubi.id/polhukam/2025/setop-impunitas-terhadap-penjahat-ham/

Ketiadaan Pengadilan HAM di Tanah Papua

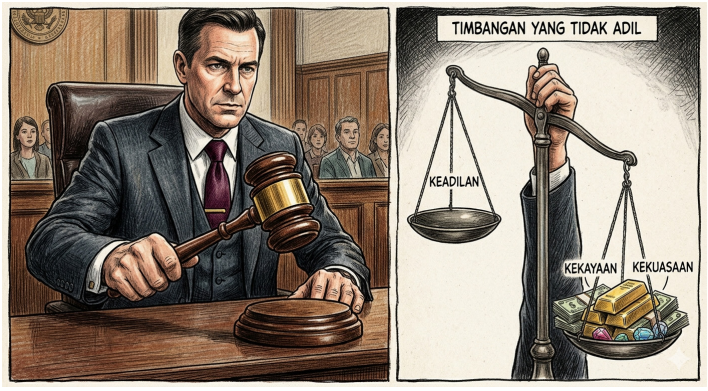
Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua secara tegas mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu. Mandat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian integral dari desain politik hukum Otonomi Khusus yang bertujuan merespons konflik, ketidakadilan historis, serta tuntutan akan pengakuan dan perlindungan HAM di Papua.



Ilustrasi Penyiksaan Warga Papua. (Sumber: Jubi)

Namun demikian, dua dekade sejak diberlakukannya Otonomi Khusus—termasuk setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Otonomi Khusus Jilid II)—mandat tersebut belum juga direalisasikan. Perubahan regulasi dalam Otsus Jilid II yang diklaim memperkuat afirmasi bagi Orang Asli Papua justru tidak diiringi dengan langkah konkret dalam membangun infrastruktur keadilan transisional, khususnya Pengadilan HAM dan KKR. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara komitmen normatif negara dan implementasi kebijakan di lapangan.

Ketiadaan Pengadilan HAM di Tanah Papua memiliki implikasi serius terhadap akses keadilan bagi korban. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Abepura (2000) dan Paniai (2014) harus diadili di Pengadilan HAM Makassar, yang secara geografis dan sosial jauh dari komunitas korban. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan partisipasi korban dan saksi, tetapi juga mengurangi sensitivitas konteks lokal dalam proses peradilan. Dalam perspektif *victim-centered justice*, situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan akses keadilan yang setara dan bermakna.



lustrasi Hukum yang berlaku secara Adil (AI).
(Sumber: Jubi)

Lebih jauh, dalam kerangka Otonomi Khusus Jilid II, kegagalan membentuk Pengadilan HAM dan KKR juga memperlihatkan bahwa pendekatan negara masih cenderung berorientasi pada desentralisasi administratif dan fiskal, tanpa diimbangi dengan penguatan aspek keadilan dan rekonsiliasi. Padahal, tanpa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebijakan pembangunan dan otonomi berisiko kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat Papua.

Dengan demikian, pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua bukan sekadar pemenuhan mandat undang-undang, melainkan merupakan prasyarat fundamental bagi pemulihan kepercayaan publik, pengungkapan kebenaran, serta pemutusan rantai impunitas. Tanpa langkah ini, Otonomi Khusus—termasuk dalam fase Jilid II—akan terus berada dalam paradoks: di satu sisi menjanjikan keadilan dan kesejahteraan, namun di sisi lain mengabaikan fondasi utama keadilan itu sendiri.

Siklus Kekerasan yang Terus Berulang

Pelanggaran HAM di Tanah Papua juga ditandai dengan siklus kekerasan yang terus berulang. Catatan hari HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendokumentasikan sepanjang tahun 2025 terjadi setidaknya 53 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua.[40] Berbagai peristiwa tersebut menyebabkan 38 orang terluka dan 39 orang meninggal dunia. Pemantauan yang sama menunjukkan sebanyak 25 peristiwa melibatkan prajurit TNI dan 19 peristiwa lainnya melibatkan anggota Polri.

[40] KontraS, Catatan Hari HAM 2025: Katastrofe Hak Asasi Manusia, (KontraS: Jakarta, 2025), 64

Tindak kekerasan yang dialami oleh warga sipil di Tanah Papua pun beragam, mulai dari mulai dari tindak penembakan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*) hingga penangkapan sewenang-wenang. Wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi dua wilayah dengan angka peristiwa kekerasan tertinggi.

Salah satu peristiwa penembakan terjadi di wilayah Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh Satgas Habema kepada tiga orang anak yang masing-masing berusia 13 tahun, 2 tahun dan 15 tahun di Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Agustus 2015.[41] Peristiwa semacam itu kembali terjadi di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 11 Desember 2025.[42] Peristiwa di Gearek menyebabkan seorang anak berusia 7 tahun Bernama Arestina Giban meninggal dunia pasca prajurit TNI melakukan penembakan ke wilayah pemukiman warga.

Sebelumnya, peristiwa *extrajudicial killing* juga terjadi pada Maret 2025 di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dengan korban warga sipil bernama Abral Wandikbo. Sebelum menjadi korban pembunuhan, Abral mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh prajurit TNI. Perlu digarisbawahi bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, TNI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap warga sipil. Peristiwa yang dialami oleh Abral, selain merupakan pelanggaran serius terhadap HAM juga merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap mekanisme hukum pidana yang berlaku.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan (*security approach*) melalui keberadaan pasukan non-organik di Tanah Papua seringkali berbanding lurus dengan peristiwa pelanggaran HAM yang dialami oleh warga sipil. Dalam berbagai peristiwa, seringkali para pelaku melenggang tanpa mendapatkan sanksi, sementara korban tidak menerima pemulihan yang layak dari pemerintah, dengan kata lain siklus impunitas turut memperparah pelanggaran HAM yang dialami oleh warga Papua.

---

[41] Jubi, https://jubi.id/lapago/2025/tiga-orang-anak-di-puncak-jaya-diduga-menjadi-korban-penyalahgunaan-senjata-api/

[42] Jubi, https://jubi.id/rilis-pers/2025/anak-7-tahun-arestina-giban-tertembak-di-nduga-dan-jasadnya-tidak-ditemukan/

Hal tersebut memantik *memoria passionis* warga akan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi agar keberadaan aparat keamanan di Tanah Papua tidak terus menerus berkontribusi terhadap situasi kekerasan dan menyebabkan warga sipil menjadi korban. Pengawasan serta sanksi harus diberikan secara tegas kepada pelaku pelanggaran HAM untuk memutus rantai impunitas.

Peristiwa kekerasan di Tanah Papua, dalam beberapa kasus juga dialami oleh warga yang mempraktikkan hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada bulan Februari 2025, Kepolisian melakukan penangkapan massal kepada siswa yang menolak MBG. Sementara pada September 2025, Komnas HAM mengungkapkan indikasi penggunaan kekuatan secara berlebihan serta pelanggaran HAM yang menyebabkan luka serius bagi warga sipil dalam demonstrasi penolakan pemindahan empat narapidana dari Sorong ke Makassar. Peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang dialami oleh warga menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi masih dipandang sebagai gangguan keamanan.

Pembangunan Menggerus Hak Masyarakat Adat

Potensi akan pelanggaran HAM di Tanah Papua juga disebabkan oleh masifnya proyek pembangunan pemerintah melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Berbagai wilayah di Tanah Papua kini menjadi target proyek strategis. Salah satunya Papua Selatan yang menjadi target pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.[43] Menteri Koordinator bidang Pangan menyatakan bahwa luasan pembukaan lahan di Merauke, Papua Selatan bisa mencapai 3 juta hektar.[44]

Sebagian besar dari wilayah pelepasan hutan tersebut merupakan wilayah perkampungan yang dihuni oleh penduduk asli dari berbagai marga adat di Papua Selatan. Pembangunan proyek tersebut dilakukan

[43] WALHI, *PSN Pangan dan Energi di Papua: Kekerasan Terbuka Negara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat Papua*, https://www.walhi.or.id/psn-pangan-dan-energi-di-papua-kekerasan-terbuka-negara-terhadap-lingkungan-dan-masyarakat-adat-papua

[44] BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyxrp9kyx8o

tanpa adanya konsultasi dan partisipasi bermakna dari masyarakat adat serta berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Akibatnya proyek tersebut pun mendapatkan penolakan dari masyarakat adat.

Ancaman kerusakan lingkungan serta perampasan ruang hidup yang dialami oleh masyarakat adat di Tanah Papua tersebut mendapatkan respon dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume, yang menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat.[45] Rencana pembangunan PSN tersebut akan merampas wilayah adat Suku Malind, Maklew, Khimaima, Yei dari marga Gebze, Moiwend, Gebze, Balagaize, Basikbasik, dan marga Kwipalo.

Pembangunan PSN juga telah memicu konflik horizontal antar-marga dalam satu suku yang sama di Tanah Papua. Contohnya, pada Oktober 2025 rumah Vincen Kwipalo salah satu anggota masyarakat adat yang menentang PSN diserang dengan menggunakan anak panah.

Situasi tersebut diperburuk dengan pengerahan pasukan melalui skema Batalyon Teritorial Pembangunan untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Di Merauke sendiri, telah terbentuk setidaknya tiga Batalyon Teritorial Pembangunan. Lagi-lagi kehadiran militer akan membangkitkan *memoria passionis* warga akan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, serta berpotensi memperuncing konflik dengan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah adatnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pembangunan yang kini dikerjakan oleh pemerintah di Tanah Papua beresiko untuk dijalankan dengan pendekatan militeristik.

Terbaru, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia telah menyatakan sikap untuk mendukung masyarakat adat, serta menolak pembangunan PSN serta militerisasi di Tanah Papua.

Idealnya, setiap proyek pembangunan pemerintah yang berdampak pada masyarakat adat harus melewati proses *free, prior and informed consent* (FPIC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) atau Deklarasi PBB tentang

[45] BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyxrp9kyx8o

Hak-hak Masyarakat Adat yang ikut ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2007. Lebih lanjut, UNDRIP mengatur bahwa dalam konteks pembangunan yang melibatkan aktivitas militer maka pemerintah harus melakukan *effective consultation* dengan masyarakat adat. Berbagai kritik serta penolakan masyarakat adat terhadap PSN menunjukkan bahwa dua proses tersebut belum dilakukan oleh pemerintah secara efektif dan holistik.

Pemerintah seharusnya mengevaluasi PSN di Tanah Papua, apalagi jika proyek tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak masyarakat adat. Suara penolakan dari masyarakat adat serta lembaga-lembaga keagamaan seharusnya dihormati, sebagaimana negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak warganya. Pengerahan pasukan dan pemaksaan kepada masyarakat adat untuk menerima PSN menunjukkan cara pandang pemerintah yang masih didasarkan pada kepentingan akumulai kapital, bukan kelestarian lingkungan serta pemeliharaan alam Papua yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat.

Penutup

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Tanah Papua masih menjadi "pekerjaan rumah" pemerintah yang belum tuntas. Alih-alih melakukan evaluasi kebijakan, pemerintah justru melanjutkan pendekatan keamanan serta proyek pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut berpotensi menyebabkan situasi kekerasan serta pelanggaran hak warga sipil terus berlanjut.

Untuk memutus impunitas serta pelanggaran HAM yang terus berulang, evaluasi terhadap pendekatan kemanan harus dilakukan, pengiriman pasukan non-organik harus dihentikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk pelanggaran berat HAM harus diselesaikan secara menyeluruh. Undang-undang sudah memberikan mekanisme terkait dengan proses penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan, kini saatnya pemerintah untuk secara serius menempuh langkah tersebut.

Pelaku harus diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku dan hak korban atas pengungkapan kebenaran serta pemulihan harus diberikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pada sisi lain, pengadilan HAM harus dibentuk di Tanah Papua untuk mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang masih mandek. Kelanjutan proses dari kasasi peristiwa Paniai juga harus menjadi perhatian serius agar dapat segera terselesaikan setelah terhenti selama nyaris empat tahun.

Pada sisi lain, pemerintah harus segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang mendapatkan penolakan dari masyarakat adat. Suara masyarakat adat harus didengarkan serta dipertimbangkan. Ruang hidup masyarakat adat serta kelestarian alam Papua tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi dan pembangunan.

Untuk menjamin iklim demokrasi yang sehat di Tanah Papua, pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers serta keselamatan dari jurnalis yang bertugas di Tanah Papua. Lebih lanjut, penyampaian pendapat di muka umum tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan keamanan melainkan sebagai bagian dari hak warga yang dijamin oleh Konstitusi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.

Laporan dan Dokumen Resmi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2025). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2025*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2025). *Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2025: Katastrofe Hak Asasi Manusia*. Jakarta: KontraS.

Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2025*. Jakarta: AJI Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025). *PSN pangan dan energi di Papua: Kekerasan terbuka negara terhadap lingkungan dan masyarakat adat Papua*. Baca laporan WALHI

United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations.

Kronik Hukum di Tanah Papua

24 Februari

Juru Bicara Internasional KNPB, Victor Yeimo, menyoroti absennya keadilan hukum bagi orang Papua, yang dapat dinilai dari ketimpangan penegakan hukum terhadap orang Papua dibanding aparat keamanan. Menurutnya, ketika pelaku pelanggaran hukum adalah pihak aparat keamanan seringkali kasusnya dibiarkan lama, atau pelaku tidak diburu secepatnya. Sementara ketika pelakunya orang Papua, penangkapan dan peradilan begitu cepat dilakukan. *"[Contohnya] Bripda Aske Mabel yang sembunyi dalam hutan bisa ditangkap dan ditembak, sementara Tobias Silak (Staf Bawaslu Yahukimo) yang ditembak mati oleh 4 anggota Satgas Damai Cartenz (20/08) di depan Pos Polisi [baru] dua orang ditangkap dua orang lagi belum ditangkap,"* katanya kepada Jubi melalui layanan pesan Whatsapp, Minggu (23/02). Yeimo juga mengatakan Briptu EP masih bebas setelah diadukan keluarga korban rudapaksa dua anak di sel Polres Kaimana. Polisi lambat, bahkan tidak langsung menangkap pelaku dan dimasukkan ke sel, kata Yeimo. "Kemudian ada lima anggota TNI yang membunuh Abner Kareth di Sorong (16/02) belum ditangkap. TNI bilang akan menangkap pelakunya tetapi belum ditangkap. Kekerasan terhadap orang Papua terus berlanjut, ini sangat ironi,"katanya. Yeimo juga menyebut keterlambatan TNI mengungkap keterlibatan kedua anggotanya yang melempar bom molotov di kantor media Jubi. *"Dua anggota TNI pelaku pemboman Kantor Jubi juga belum diungkap oleh TNI. Ini juga keadilan absen bagi orang Papua, terutama pekerja pers di Tanah Papua,"* katanya. Yeimo menuding negara ingin mempertahankan Papua sebagai situs tanah berdarah atau tanah konflik. Kata dia, konflik seperti diciptakan, rakyat terbunuh, para pelaku dari pihak TNI atau polisi kerap kali dibiarkan lama baru ditahan, itupun apabila ada desakan dari gerakan rakyat (https://jubi.id/polhukam/2025/knpb-tidak-ada-keadilan-bagi-orang-papua-penegakan-hukum-diskriminatif/).

21 Mei

Seorang warga Kota Sorong, Papua Barat Daya diduga dianiaya sejumlah anggota polisi saat ditahan di Kepolisian Resor Kota atau Polresta Sorong, setelah ditangkap pada 15 Maret 2025, berkaitan dengan kasus pencurian sepeda motor. Korban bernama Ortizan F. Tarage (34 tahun) menjelaskan, ia ditangkap tiga anggota polisi sekira jam 11.00 Waktu Papua saat sedang memancing di kolam belakang Kompleks Diklat, Jalan Pendidikan, Kilometer 8, Kota Sorong, tanpa mendapat penjelasan. "*Saya kaget, langsung berontak dan melompat ke kolam, tapi dua polisi ikut lompat dan seret saya keluar. Setelah itu saya diborgol dan dibawa ke Polresta Sorong Kota,"* kata Ortizan Tarage kepada Jubi, Selasa (20/05) malam. Menurut Tarage, setibanya di Mapolresta Sorong ia dibawa ke sel tahanan di bagian belakang. Di sanalah ia mendapat kekerasan fisik sejak siang hingga sore hari. Ia mengaku dipukul menggunakan kayu, bambu, selang, dan besi sebesar ibu jari. Akibatnya, Ortizan Tarage mengalami luka serius di bagian wajah, betis, paha, bahu, dan tangan (https://jubi.id/domberai/2025/seorang-warga-kota-sorong-diduga-dianiaya-dalam-sel-tahanan-polisi/).

23 Mei

Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan beberapa anggota polisi terhadap Ortizan F. Tarage (34 tahun), saat korban ditahan di sel Kepolisian Resor Kota atau Polresta Sorong, Papua Barat Daya awal Mei 2025. Direktur LBH Kaki Abu, Leonardo Ijie dalam siaran pers yang diterima Jubi, Jumat (23/05), mengatakan pihaknya mendampingi korban melaporkan penganiayaan yang diduga dilakukan beberapa anggota polisi itu kepada Polresta Sorong. *"Kami melaporankan [penganiyaan yang diduga dilakukan anggota polisi] secara resmi ke Polresta Sorong yang teregister pada 22 Mei 2025 dengan Nomor: LP/B/341/V/2025/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA,"* kata Leonardo Ijie. LBH Kaki Abu yang memberikan pendampingan hukum kepada korban, mendesak agar para anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan diproses

hukum. Sebab, tindakan yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota polisi dinilai tidak hanya melanggar hukum, juga mencederai prinsip hak asasi manusia. *"Kami mengecam keras tindak kekerasan yang dialami oleh klien kami, Ortizan F. Tarage. Polisi bukan penegak dendam, mereka penegak hukum. Apa yang terjadi adalah pelanggaran berat,"* ujarnya (https://jubi.id/domberai/2025/lbh-kaki-abu-laporkan-penganiayaan-terhadap-tahanan-di-sel-polresta-sorong/).

09 Agustus

Pemberian amnesti kepada salah satu tahanan politik (Tapol), Viktor Makamuke menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI oleh Presiden Prabowo Subianto, dianggap pencitraan dan pembohongan kepada publik. Hal disampaikan Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Anum Siregar kepada Jubi melalui panggilan telepon di Nabire, Papua Tengah pada Jumat (08/08). Pengacara Hak Asasi Manusia atau HAM Anum Siregar menjelaskan sebagaimana diperoleh informasi dari media, bahwa pada awal Agustus 2025 bahwa Presiden Republik Indonesia akan memberikan amnesti kepada enam orang Tahanan Politik (Tapol), satu orang terpidana dari di Ambon dan lima orang terpidana dari Papua. Empat terpidana dari Lapas Kelas I Makassar dan satu di Lapas Kelas IIB Manokwari yaitu Viktor Makamuke. Anum menjelaskan, Viktor Makamuke telah menjalani masa hukuman selama 24 bulan, yang berarti lebih dari dua pertiga dari total masa pidananya, sehingga ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika total masa hukuman adalah 30 bulan, maka dua pertiganya adalah 20 bulan. Viktor sudah menjalani lebih dari 20 bulan, sehingga seharusnya ia sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, namun justru hak tersebut sudah terlambat diberikan. *"Kalau hitungannya seperti itu, Viktor bukan mendapatkan amnesti tapi pembebasan bersyarat atau hak PB-nya. Jadi pemerintah itu jangan mengatakan bahwa memberikan amnesti tetapi sebenarnya itu dia posisinya di PB, dan Itu haknya untuk mendapatkan itu. Bahkan terlambat itu belum dihitung kalau dia mendapatkan remisi pada saat Natal sama 17 Agustus begitu,"* ujarnya. Anum mengatakan hal yang sama juga terjadi pada tiga orang terpidana lainnya di Lapas Kelas I Makassar, selain

Yance Kambuaya. Alex Bless, Adolof Nauw dan Hilkia Isir itu satu kasus, mereka ditahan sejak 27 November 2022 dan pidananya 4 tahun. Saat ini mereka sudah menjalani masa tahanan pidana, dan jika dihitung, saat ini waktunya untuk mereka mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). *"Yang mereka dapatkan karena mereka sudah menjalani 2/3 masa hukuman itu kalau merujuk tata cara pemberian PB dan sebagainya, untuk keluarga binaan itu pakai rujukannya peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan,"* katanya. Menurut Anum saat ini terdapat beberapa terpidana dengan masa pidana belasan tahun yang mestinya mendapatkan amnesti, tetapi justru tidak mendapatkan amnesti. Misalnya yang sekarang di Lapas Kelas I Makassar terdapat tujuh tahanan dengan masa pidana belasan tahun, mulai dari 12 hingga 14 tahun (https://jubi.id/polhukam/2025/pemberian-amnesti-kepada-tapol-papua-dianggap-pembohongan-publik/).

07 September

Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Sorong melaporkan dugaan penyiksaan seorang warga sipil bernama Ortizan F. Tarage oleh aparat Kepolisian Resor Sorong Kota, Papua Barat Daya kepada Komnas HAM RI perwakilan Papua, Jumat (05/09). Direktur LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Klagilit menilai peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang harus segera diproses hukum. Menurut LBH, peristiwa penyiksaan itu terjadi pada 10 Mei 2025. Saat itu Ortizan bersama istrinya sedang memancing di belakang kantor Diklat, yang kini menjadi Kantor DPRP Papua Barat Daya. Sekitar pukul 10.30 WP, datang sekelompok orang berpakaian preman. *"Mereka belakangan diketahui adalah anggota polisi, tetapi tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Mereka langsung menangkap Ortizan,"* ujar Ambrosius kepada Jubi Sabtu (06/09). LBH kemudian mengetahui penangkapan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/135/V/RES.1.8./2025/Satreskrim. *"Namun cara penangkapan tersebut jelas sewenang-wenang dan melanggar hukum, karena tanpa prosedur sah dan penuh intimidasi,"* katanya. Ortizan lalu dibawa ke kantor polisi dan dipaksa mengaku mencuri dua unit sepeda

motor. "*Korban dipaksa mengaku mencuri motor sebagaimana tertuang dalam laporan polisi Nomor LP/B/90/IV/2025/SPKT/Polsek Sorong Timur/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya, tanggal 16 April 2025. Padahal korban menolak, karena ia tidak pernah melakukan pencurian itu,"* jelas Ambrosius. Karena menolak tuduhan, korban disiksa (https://jubi.id/domberai/2025/lbh-papua-sorong-laporkan-penyiksaan-warga-sipil-ke-komnas-ham/).

02 Oktober

Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP dan Imparsial menyatakan ganti rugi berupa uang tidak boleh mengakhiri proses hukum terhadap pelaku yang diduga dari Satgas Yonif 123/Rajawali dan menembak empat warga Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada 27 September 2025. Pernyataan itu disampaikan Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar dan Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Rabu (01/10) malam. Latifah Anum Siregar mengatakan, pihaknya mendesak negara harus mengadili pelaku penyiksaan, penganiayaan, dan pembunuhan oleh aparat keamanan. *"Kasus tidak boleh ditutup dengan ganti rugi uang atau restorative justice. Uang hanya boleh sebagai restitusi kebutuhan mendesak korban/keluarga,"* kata Anum Siregar. AlDP dan Imparsial juga mendesak reformasi kebijakan keamanan, khususnya pasukan non-organik TNI di Tanah Papua, yang dianggap sebagai keebutuhan mendesak, dan penarikan pasukan untuk memberi ruang publik bagi masyarakat sipil (https://jubi.id/rilis-pers/2025/ganti-rugi-tidak-boleh-digunakan-mengakhiri-proses-hukum-penembakan-terhadap-warga-asmat/).

03 Oktober

Empat terdakwa dalam kasus penembakan yang menewaskan Tobias Silak dan melukai Naro Dapla di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 20 Agustus 2024, dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tuntutan itu dibacakan JPU, Boston Siahaan saat sidang lanjutan dengan agenda tuntutan jaksa yang dipimpin Hakim Ketua Hirmawan Wicaksono di Pengadilan Negeri Kelas II B Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (02/09). Keempat

terdakwa dalam kasus itu adalah Brigadir Dua Fernando Aufa, Brigadir Kepala Ferdy M.Koromath yang merupakan anggota polres Yahukimo, Ajun Inspektur Satu Jadmiko dari Polres Merauke, dan Brigadir Kepala Muh. Kurniawan yang merupakan anggota Brimob Polda Gorontalo. JPU menyatakan, terdakwa Muh. Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan kekerasan terhadap anak (https://jubi.id/rilis-pers/2025/empat-terdakwa-penembak-tobias-silak-dituntut-12-tahun-penjara/).

14 Oktober

Pemerintah sering memindah tahanan dan narapidana politik untuk disidang atau menjalani masa hukuman penjara di luar Tanah Papua. Kebijakan itu terutama dijalankan terhadap terdakwa atau terpidana kasus makar. Kebijakan itu membuat biaya pendampingan hukum menjadi mahal, dan mempersulit tahanan atau narapidana untuk mendapatkan atau menjalankan haknya. Kasus terbaru menimpa empat orang yang menyatakan diri sebagai anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB); yakni Abraham Goram Gaman (55); Maksi Sangkek (39); Piter Robaha (54); dan Nikson Mai (56). Mereka ditangkap Polresta Sorong Kota pada 28 April 2025, karena membagikan surat undangan dialog damai ke berbagai lembaga pemerintah di Kota Sorong. Polisi menetapkan keempat anggota NFRPB tersebut sebagai tersangka makar, dengan sangkaan melanggar Pasal 106 jo Pasal 187 jo Pasal 53 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 45 A (2) jo Pasal 28 (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka dipindahkan dan menjalani persidangan di Makassar, Sulawesi Selatan sejak 27 Agustus 2025. Pemindahan tahanan atau narapidana politik kasus makar bukan pertama kali terjadi. Organisasi Tapol mencatat sejak 2020 hingga 2025 setidaknya terdapat 39 tahanan/narapidana politik Papua dipindahkan ke luar Papua. Puluhan tahanan/narapidana politik itu menjalankan persidangan di Balikpapan, dan Sulawesi Selatan. Pemindahan tahanan/narapidana politik Papua sangat merugikan para terdakwa maupun keluarga terdakwa. Terdakwa dijauhkan dari keluarga,

keluarga tidak bisa mendampingi mereka selama persidangan, dan tidak bisa menjenguk mereka saat menjalani hukuman (https://jubi.id/indepth-stories/2025/berulang-dan-berulang-pemindahan-tahanan-narapidana-politik-ke-luar-tanah-papua/).

16 Oktober

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tahanan Politik se-Indonesia turun ke jalan pada Rabu (15/10), menuntut aparat Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota mengusut tuntas dua kasus kekerasan yang menimpa warga Kota Soronggm Ortisan Tarage dan Maikel Welerubun. Koordinator aksi, menegaskan bahwa masyarakat Papua sudah muak dengan kekerasan aparat yang berulang dan impunitas tanpa keadilan. *"Kami tidak akan berhenti bicara sampai pelaku penyiksaan terhadap saudara Ortisan Tarage ditetapkan sebagai tersangka. Ini soal nyawa dan martabat manusia Papua,"* ujarnya di depan barikade polisi. Menurut Jenner, kasus penyiksaan terhadap Ortisan Tarage bukan peristiwa tunggal. Ia menilai kekerasan aparat telah menjadi pola yang dibiarkan terus berlangsung. *"Sudah terlalu banyak tubuh anak muda Papua yang disiksa, dipukul, disetrum, lalu dibunuh. Pelakunya dilindungi oleh institusi. Itu bukan penegakan hukum—itu kejahatan negara,"* tegasnya. Jenner juga menuding pihak kepolisian tidak memiliki hati nurani. *"Jangan cuma klarifikasi di media. Kalau Kapolda punya hati nurani, tetapkan tersangka dan buka penyidikan secara terbuka,"* katanya lantang (https://jubi.id/domberai/2025/massa-desak-kapolda-pbd-tetapkan-tersangka-penyiksa-ortisan-dan-penembak-maikel/).

21 Oktober

Lembaga Bantuan Hukum Papua mendatangi Polda Papua pada Senin (20/10) untuk melaporkan dugaan pidana penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh aparat kepolisian saat penanganan aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada 15 Oktober 2025 yang menyebabkan Ebenius Tabuni tertembak di bagian perut. Ebenius Tabuni adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih atau FISIP Uncen yang ikut aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli

Tanah Adat. Ia bersama ratusan mahasiswa lain menggelar aksi menolak militerisme, investasi di seluruh Tanah Papua, dan pembebasan tahanan politik. Reinhard Kmur, pendamping hukum (PH) korban Ebenius Tabuni dari LBH Papua, mengatakan kasus dugaan pidana pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh aparat kepolisian terhadap Tabuni itu, sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Papua pada Rabu, 15 Oktober 2025, sekitar pukul 07.00 Waktu Papua (WP) (https://jubi.id/polhukam/2025/mahasiswa-tertembak-lbh-papua-lapor-dugaan-penyalahgunaan-senjata-api-ke-polda-papua/).

04 November

Sidang tuntutan terhadap empat tahanan politik atau Tapol Papua Abraham Goram Gaman, Piter Robaha, Nikson May, dan Maksi Sangkek, dinilai berlangsung tidak transparan setelah aparat membatasi akses publik di ruang sidang. Proses sidang yang seharusnya terbuka itu dijaga ketat oleh anggota polisi, intel, dan ormas, sementara Jaksa menuntut masing-masing terdakwa delapan bulan penjara dan denda Rp5.000. Hal itu disampaikan Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/i Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) yang setiap kali hadir dalam persidangan empat aktivis Papua yang di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Selasa (04/11). Koordinator Lapangan FSPM-PRP Kota Studi Makassar, Susan Lilbit mengatakan aksi pengawalan sidang empat Tapol Papua oleh Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/i Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) berlangsung di bawah tekanan ketat aparat keamanan. Jadi Sejak pukul tujuh pagi polisi sudah memenuhi area asrama. *"Aparat kepolisian tampak duduk di warkop, di CK, bahkan di pinggir jalan. "Kami tahu ini bukan pengamanan biasa, tapi intimidasi,"* ujar Koordinator Lapangan FSPM-PRP Kota Studi Makassar, Susan Lilbit dalam rilis pers yang diterima JUBI (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/empat-tapol-papua-dituntut-delapan-bulan-sidang-dijaga-ketat-aparat/).

19 November

Amnesty International Indonesia menilai vonis tujuh bulan penjara terhadap empat tahanan politik atau tapol asal Sorong, Papua Barat Daya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Tanah Papua. Pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim, Herbert Harefa terhadap keempat terdakwa dengan tuduhan makar itu, berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (19/11) siang. Menanggapi putusan itu, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan hukuman penjara atas tuduhan makar kepada empat aktivis tersebut kembali menegaskan pola kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Tanah Papua. *"Mereka dikriminalisasi hanya karena menyampaikan aspirasi politik secara damai dengan mendatangi sejumlah kantor pemerintah di Kota Sorong,"* kata Wirya Adiwena dalam siaran pers tertulisnya, Rabu (19/11) malam (https://jubi.id/rilis-pers/2025/vonis-empat-tapol-asal-sorong-kriminalisasi-terhadap-kebebasan-berekspresi/).

Kronik Kebebasan Berekspresi dan Pers

06 Februari

Indeks kebebasan pers di Papua masih rendah. Untuk dapat meningkatkannya perlu dukungan dari semua pihak, karena kebebasan pers bukan hanya tanggung jawab media atau wartawan saja. Hal itu dikatakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Lucky Ireeuw, saat diwawancarai usai siaran podcast yang disiarkan oleh Jubi di Kota Jayapura, Papua pada Kamis, (06/02), dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari. *"Kita punya kebebasan pers di Papua harus naik urutan [setidaknya] ke lima dari bawah, yang belum pernah kita capai, jangan [Papua] di urutan terakhirlah,"* katanya. Menurut Ireeuw, Indek Kebebasan Pers di Papua, yang berada di urutan terakhir itu, ditandai oleh jurnalis dan perusahaan medianya yang belum sepenuhnya merasakan kebebasan dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Jurnalis di Papua masih rentan menerima intervensi saat liputan juga belum mendapatkan

perlindungan hukum secara baik (https://jubi.id/polhukam/2025/indeks-kebebasan-pers-di-papua-selalu-terendah-butuh-dukungan-semua-pihak/).

20 Februari

Aksi Demonstrasi Damai dengan tuntutan Tolak Program Makan Bergizi Gratis dan Mendesak Pendidikan Gratis yang dilakukan oleh Pelajar Papua di beberapa kota besar di Papua pada tanggal 17 Februari 2025, mendapatkan berbagai bentuk tindakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia oleh aparat keamanan. Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay pada siaran persnya, Kamis, 20 Februari 2025 membeberkan sejumlah temuan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan saat aksi itu berlangsung. **Pertama,** saat aksi Pelajar Papua digelar di Kota Jayapura, saat berkumpul langsung dibubarkan dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Sehingga ada beberapa Pelajar Papua yang mengalami luka-luka dan ada 15 orang Pelajar Papua yang ditangkap secara sewenang-wenang dan dibawa ke Polsek Heram. Sementara itu, masa aksi Pelajar Papua di Kabupaten Jayapura yang sedang melakukan long march di depan Toko Borobudur Sentani, dihentikan oleh Pihak Kepolisian Resort Jayapura selanjutnya ditangkap secara sewenang-wenang dan diangkut dalam Truk Polisi dan dibawa ke Mako Polres Jayapura di Doyo. **Kedua,** Aksi Pelajar Papua di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Awalnya sempat terjadi kericuhan di depan Jalan Hom-Hom. Namun berhasil mereda dan selanjutnya massa Pelajar Papua mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya dan menyampaikan aspirasinya yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, di Kabupaten Yalimo aksi massa Pelajar Papua dibubarkan dengan pendekatan militeristik yang dilakukan dengan cara melakukan penembakan ke berbagai arah menggunakan senjata laras panjang dengan peluru tajam sehingga massa Aksi Pelajar Papua berlarian. **Ketiga,** Aksi Pelajar Papua di wilayah Provinsi Papua Tengah diselenggarakan di Kabupaten Nabire. Dalam perjalanannya massa aksi dibubarkan oleh aparat keamanan. Semuanya diangkut ke Mako Polres Nabire. Selanjutnya para pelajar disuruh duduk di halaman di bawah

terik matahari siang dan diambil keterangan. Setelah itu, ada seorang ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang Pelajar Papua yang sedang duduk (https://jubi.id/mamta/2025/lbh-papua-beberkan-temuan-dugaan-pelanggaran-ham-oleh-aparat-keamanan-saat-aksi-pelajar-papua/).

21 Februari

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Papua untuk menangkap dan memproses secara hukum aparat kepolisian di sejumlah Polres yang diduga melakukan pelanggaran HAM kepada sejumlah pelajar SMA dan SMP yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah lokasi di Tanah Papua pada Senin (17/02). Direktur LBH Papua juga meminta Bupati Nabire memberikan sanksi dan mencopot jabatan seorang ASN yang diduga melakukan tindak kekerasan di depan Polres Nabire terhadap pelajar peserta unjuk rasa. *"Aksi damai pelajar Papua menolak makan bergizi gratis dan meminta pendidikan gratis diwarnai tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, dan penyalahgunaan senjata api, karena itu kami meminta Kapolri memerintahkan Kapolda menangkap dan memproses hukum oknum aparat keamanan pelakunya,"* kata Gobay kepada Jubi melalui WhatsApp, Kamis (20/02) (https://jubi.id/polhukam/2025/lbh-papua-minta-kapolri-proses-aparat-pelaku-kekerasan-terhadap-pelajar-demo/).

05 Mei

Aparat TNI dan Polri paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis atau media sepanjang 2024. Terkait hal ini, negara harus hadir memberikan perlindungan bagi kebebasan pers di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Bidang Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia Erick Tanjung dalam diskusi publik 'Melawan Teror Terhadap Jurnalis dan Media di Indonesia' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Minggu (04/05). Diskusi publik tersebut bagian dari acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 yang berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu (03-04/05), yang diselenggarakan Komite Tanggung Jawab

Platform Digital dan Indonesian Institute of Journalism. Diskusi juga menghadirkan narasumber lain, yakni Jurnalis Senior Papua Victor C Mambor, Jurnalis Tempo Stefanus Pramono, dan Pengacara Publik LBH Pers Gema Gita Persada. Erick Tanjung menjelaskan berdasarkan data AJI Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan polisi paling banyak sebagai pelaku kekerasan, yaitu 19 kasus dan disusul TNI 11 kasus (https://jubi.id/polhukam/2025/tentara-dan-polisi-paling-banyak-lakukan-kekerasan-terhadap-jurnalis/).

17 Mei

Genap enam bulan satu hari sejak terjadinya aksi terror tterhadap Media Jubi pada 18 Oktober 2024. Kasus tersebut hingga kini juga belum terungkap. Dua unit mobil milik redaksi Jubi menjadi sasaran dalam insiden tersebut, namun identitas pelaku maupun motif kasi teror masih menjadi misteri. Pihak kepolisian Papua telah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap pelaku, mulai dari olah TKP hingga penyidikan lanjutan. Dan hasil penyidikan mengarah kepada keterlibatan oknm anggota TNI. Berdasarkan temuan tersebut, pada 22 Januari 2024, penyidik Polda Papua melimpahkan berkas perkara ke Kodam XVII/Cenderawasih untuk ditindak lanjuti. Kodam XVII/Cenderawasih pun merespon pelimpahan tersebut dengan melakukan investigasi internal. Namun, hasil investigasi menyatakan tidak ada bukti yang mengindikasikan keterlibatan anggota TNI dalam aksi terror tersebut. Atas perbedaan hasil penyelidikan dua institusi tersebut, DPR Papua mengmbil sikap tegas dengan mendorong agar kasus ini ditangani oleh Mabes TNI dan Mabes Polri (Cenderawasih Pos).

23 Mei

Aksi demonstrasi berujung ricuh terjadi di depan Gapura Kampus Uncen Waena, Kamis (22/05). Ini terjadi antara hampir 300 mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih versus aparat keamanan. Bentrok ini mengakibatkan empat orang aparat kepolisian mengalami luka serius dan 1 unit truk Dalmas ikut

dibakar. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipimpim Milinut Gwijangge dan Yusak Gobay (Cenderawasih Pos).

31 Mei

Sejumlah wartawan dikabarkan diusir salah satu komisioner KPU Kota Jayapura saat meliput kegiatan di Kantor KPU Kota Jayapura, Rabu (28/05). Pengusiran tersebut diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Desy Itaat kepada sejumlah jurnalis saat meliput kegiatan pelantikan dan bimbinga teknis (Bimtek) Panitia Pemilisan Distrik (PPD) se-Kota Jayapura, di Kantor KPU Tanah Hitam.Abepura (Cenderawasih Pos).

16 Juli

Teror dan Intimidasi terhadap mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan dan berada di luar Papua terus meningkat. Setelah di-alami mahasiswa Papua di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kini kota studi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan juga melaporkan hal serupa. Dua mahasiswa Puncak Jaya berinisial AS dan NW mendapat paket berisi dua surat ancaman yang diantar oleh kurir JNE Express, Minggu 15 Juni 2025, pukul 12:30 WITA. Kemudian pada Senin, 14 Juli 2025, mahasiswa Papua dikagetkan dengan pemasangan poster propaganda yang tempel di lingkungan kampus dan tempat tempat umum berisi hasutan untuk membenci mahasiswa Papua dan organisasi mahasiswa Papua yang dituduh sebagai pemberontak yang melanggar hukum. *"Kami sebagai mahasiswa kaum intelektual, terdidik akan hadir untuk membela rakyat yang tertindas dan ditindas oleh sistem negara republik indonesia hari ini,"* kata Ketua 1 KNPB Konsulat Wilayah Makassar, Niswan Wanimbo dalam rilis yang dikirim ke Jubi, Selasa (15/7/2025). Sebelumnya terror juga terjadi jelang peringatan 1 Mei 2025. Saat itu tersebar poster berisi ancaman pencabutan beasiswa bagi mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Dan penye-baran foto-for mahasiswa di media sosial facebook serta hasutan dan tuduhan yang memprovokasi. Sebagai mahasiswa yang lahir di daerah konflik, tumbuh bersama konflik, mereka paham betul apa yang terjadi dan terus memperjuangkan dan menyuarakan apa yang dialami rakyat

Papua (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/setelah-surabaya-teror-intimidasi-menyasar-mahasiswa-papua-di-makassar/).

24 Agustus

Massa dari Gerakan Solidaritas Pro Demokrasi Sorong Raya menggelar aksi menolak rencana pemindahan sidang empat tahanan politik Papua dari Kota Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sejak pagi hingga sore, Jumat (22/08). Koordinator Umum Solidaritas, Simon Nauw, menegaskan penolakan itu bukan main-main. *"Kami menolak pemindahan persidangan ke Makassar karena tidak punya dasar hukum. Itu hanya alasan mengada-ada yang dipaksakan Forkopimda Papua Barat Daya,"* ujarnya dalam orasi. Empat tahanan politik Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB itu adalah Abraham G. Gamam, Nikson Mai, Piter Robaha, dan Maksi Sangkek yang ditangkap pada April 2025. Dalam pernyataan sikap, Solidaritas Papua Sorong Raya mengajukan enam tuntutan. Pertama, menolak pemindahan persidangan ke Makassar. Kedua, mendesak Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Forkopimda mencabut rekomendasi yang dinilai penuh manipulasi. Ketiga, meminta keempat tahanan politik dipindahkan dari Rutan Polresta ke Pengadilan Negeri Sorong karena penahanan sudah melewati batas waktu penyelidikan. Tuntutan keempat ditujukan kepada Kejaksaan Agung agar membatalkan fatwa persidangan yang dianggap cacat hukum. Kelima, membebaskan empat tahanan politik tanpa syarat karena tidak ada bukti sahih. Terakhir, keenam, memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat (https://jubi.id/domberai/2025/solidaritas-papua-sorong-raya-tolak-pemindahan-sidang-empat-tapol-ke-makassar/).

27 Agustus

Badan Pekerja Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menyatakan sikap tuntutan dan himbauan kepada seluruh Rakyat Papua, Kepolisian Kolonial Indonesia dan Rakyat Papua di Sorong Raya terkait Pemindahan perkara 4 Orang Tahanan Politik Papua Barat atau Aktivis NFRPB ke Makassar pada 27 Agustus 2025 agar bersolidaritas kepada

pejuang rakyat di Wilayah Sorong. *"Jadi kami KNPB menyampaikan kepada seluruh Rakyat Papua, Kepolisian Kolonial Indonesia dan Rakyat Papua di Sorong Raya terkait Pemindahan perkara 4 Orang Tahanan Politik Papua Barat atau Aktivis NFRPB ke Makassar pada 27 Agustus 2025 agar bersolidaritas kepada pejuang rakyat di Wilayah Sorong,"* ujar Jubir Nasional KNPB Ogram Wanimbo dalam pernyataanya kepada Suara Papua pada, Rabu (27/08). Oleh sebab itu KNPB menyatakan;

- Bebaskan 4 Tahanan Politik dari NFRPB yang dipindahkan dari Sorong ke Makassar tanpa syarat.
- Meminta kepada pihak aparat kepolisian Indonesia untuk tidak menangkap pejuang Rakyat Papua di Wilayah Sorong.
- KNPB meminta kepada seluruh Rakyat untuk bersolidaritas bersama kawan-kawan pejuang di Sorong.
- KNPB mengutuk keras tindakan aparat kepolisian Indonesia yang melakukan tindakan represif terhadap semua pejuang dan masyarakat yang bersolidaritas di Wilayah Sorong.

02 September

Massa dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat di Manokwari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menyebut menggelar aksi di kawasan jalan gunung salju Makalow Manokwari. Massa menyita perhatian hingga Gubernur dan DPRPB serta Kapolda hadir mendengar orasi para Mahasiswa. Massa menuntut bubarkan DPRRI hingga Isu pelanggaran HAM dan MBG. Hal ini disampaikan para orator saat aksi di Jalan Gunung Salju Pertigaan Makalow Manokwari Selasa (02/09). Massa secara bergantian melakukan orasi sejak pukul 10.00 WP, yang terbagi di dua lokasi yakni Amban dan kawasan Makalow. Massa kemudian ditemui Gubernur, Ketua DPR Papua Barat, Wakil Ketua DPRK Manokwari Sekda Papua Barat dan Plt Sekda Manokwari. Aksi tersebut menyebabkan akses utama jalan Gunung Salju lumpuh total terutama dari arah Makalow ke Amban. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unipa, Yenuson Rumaikew mengatakan seluruh mahasiswa di Indonesia menggelar aksi menuntut bubarkan DPR RI. *"Tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM di Tanah Papua dan di Indonesia serta bubarkan Institusi*

pelanggaran HAM," kata Yenuson (https://jubi.id/domberai/2025/aksi-mahasiswa-di-manokwari-hadirkan-gubernur-dan-dprpb-di-makalow/).

03 September

Amnesty Internasional mendesak para pihak terkait mengusut penembakan terhadap warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 27 Agustus 2025 dan kematian seorang warga sipil di Manokwari, 28 Agustus 2025. Aksi penangkapan penangkapan, penembakan gas air mata yang menyebabkan seorang warga sipil terluka parah di Kota Sorong terjadi ketika warga di sana berdemonstrasi memprotes pemindahan empat tahanan politik atau tapol ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani persidangan. Aksi itu pun direspon aparat keamanan secara berlebihan. Sementara itu, di Manokwari, Papua Barat Daya seorang warga bernama Septinus Sesa meninggal saat aksi blokade di kawasan Wirsi dan Jalan Yosudarso, Kamis (28/07) malam. Korban diduga meninggal dunia akibat tembakan gas air mata. Namun Kapolda Papua Barat, Johnny Eddizon Isir membantah korban hal itu, karena tembakan gas air mata diklaim tidak mematikan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya mengutuk keras sikap brutal aparat keamanan dalam aksi demonstrasi di Kota Sorong dan Manokwari. *"Tidak ada seorang pun yang boleh kehilangan nyawa ataupun terluka hanya karena mengikuti demonstrasi ataupun ikut menyaksikan jalannya aksi penyampaian pendapat saat berada di sekitar aksi demonstrasi,"* kata Usman Hamid dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Rabu (03/09) malam (https://jubi.id/rilis-pers/2025/amnesty-internasional-desak-usut-penembakan-di-sorong-dan-kematian-warga-manokwari/).

17 September

Komnas HAM menemukan indikasi kuat adanya tekanan politik dalam penetapan tersangka, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, serta dugaan pelanggaran HAM berat yang menimbulkan korban jiwa maupun luka serius pada aksi unjuk rasa penolakan pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2025. Hal itu terungkap dalam laporan hasil pemantauan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua terkait aksi unjuk rasa penolakan pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2025. Komnas HAM menyatakan peristiwa ini telah dicatat sebagai pengaduan proaktif dengan Nomor Kasus: 1516/PK-HAM/VIII/2025. Pemantauan dilakukan lewat monitoring media dan kunjungan langsung ke Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari pada 3–7 September 2025, dengan melibatkan koordinasi bersama pihak-pihak terkait dan peninjauan lokasi aksi. "Penetapan Abraham Goram Gaman, Maksi Sangkek, Piter Robaha, dan Nikson Mai sebagai tersangka makar pada 28 April 2025 tidak lepas dari tekanan politik," kata Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey melalui liris persnya Kepada media, Rabu (17/09) (https://jubi.id/domberai/2025/komnas-ham-temukan-indikasi-tekanan-politik-dan-pelanggaran-ham-dalam-aksi-tolak-pemindahan-tahanan-di-sorong/).

15 Oktober

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tahanan Politik se-Indonesia menggelar aksi long march di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (15/10). Sejak pukul 09.00 WP, peserta aksi berjalan dari Yohan hingga depan Toko Elin sambil membawa spanduk dan menyerukan tuntutan pembebasan seluruh tahanan politik di Indonesia dan Tanah Papua. *"Kami datang dengan satu suara. Segera bebaskan seluruh tahanan politik di Indonesia dan Tanah Papua,"* tegas Koordinator Lapangan, Jenner Naa, di tengah kawalan aparat keamanan. Di sekitar titik aksi tampak satu mobil Patwal, tiga polisi berseragam lengkap, serta belasan intel berpakaian preman yang berjaga di tepi jalan. Namun, massa tetap berorasi dengan tertib. *"Kami tidak takut intimidasi! Kami datang dengan kesadaran politik, bukan untuk membuat kekacauan,"* ujar Jenner (https://jubi.id/domberai/2025/ratusan-massa-di-sorong-tuntut-pembebasan-tapol-dan-hentikan-militerisasi-di-papua/).

24 Oktober

Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/i Peduli Rakyat Papua atau FSPM-PRP kota studi Makassar, Sulawesi Selatan kembali mendesak pembebasan bagi empat tahanan politik atau tapol asal Sorong, Papua Barat Daya yang kini menjalani proses persidangan di Makassar. Desakan itu dilakukan mahasiswa lewat aksi damai di depan Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (23/10), dengan pengawasan aparat keamanan. Dalam siaran pers tertulisnya, Kamis (23/10) malam, FSPM-PRP kota studi Makassar menyatakan aksi mereka berjalan damai dan tertib sejak pagi hingga siang hari. Namun menurut mereka, ketika solidaritas Indonesia berupaya masuk ke ruang sidang untuk mengawasi jalannya sidang dan memberikan dukungan moral kepada empat tahanan politik, aparat kepolisian melakukan pembatasan dengan alasan perintah atasan (https://jubi.id/rilis-pers/2025/mahasiswa-papua-di-makassar-desak-bebaskan-empat-tapol/).

19 November

Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi damai di kawasan Lingkaran, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (19/11). Dalam demonstrasi damai itu, mahasiswa menyatakan menolak pelaksanaan Otonomi Khusus atau Otsus dan mendesak penarikan militer dari Tanah Papua. Mahasiswa menolakan Otsus karena kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap provinsi di Tanah Papua itu dinilai gagal menjawab persoalan dasar masyarakat Papua. Justru kekerasan militer di berbagai wilayah di sana meningkat. Selain itu, dalam proses revisi Undang-Undang atau UU Otsus pada 2021 lalu, tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua. Revisi UU Otsus Papua menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 pun dianggap telah menghilangkan kewenangan MRP dalam menyetujui pemekaran daerah di Tanah Papua. "*Setelah perubahan UU Otsus 2021, pemekaran sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Ini mengurangi representasi masyarakat adat,"* kata koordinator lapangan aksi, Enes Y Dapla saat membacakan pernyataan sikap demonstran

(https://jubi.id/polhukam/2025/mahasiswa-papua-tolak-otsus-dan-desak-penarikan-militer-dari-tanah-papua/).

11 Desember

Kepolisian Daerah atau Polda Papua harus segera menuntaskan kasus pelemparan bom molotov ke Kantor Redaksi Jubi pada 16 Oktober 2024 lalu. Pembiaran atas kasus molotov Jubi hanya akan memperpanjang daftar impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dan secara khusus di Tanah Papua. Kasus itu tak kunjung terselesaikan karena diduga ada upaya melindungi dua orang prajurit TNI yang menjadi terduga pelaku. Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi Jubi, Jean Bisay dalam diskusi Membumikan Temuan Pengalaman Dari Berbagai Komunitas di Tanah Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (10/12). Diskusi itu bagian dari rangkaian acara memperingati hari Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kaki Abu sejak 7 Desember 2025 lalu. *"Kenapa barang ini [lama]. Dua [terduga] sudah ada. Kenapa dong dua [TNI dan Polri tidak] urus sama-sama. Dong [baku] lempar-lempar,"* ujar Bisay (https://jubi.id/polhukam/2025/polda-papua-harus-tuntaskan-kasus-molotov-jubi/).

Kronik Politik Papua Merdeka

29 Januari

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo, menolak mediator negosisiasi damai antara kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua dengan pihak Pemerintah Indonesia yang kabarnya diajukan oleh Juha Christensen, mantan juru damai konflik Aceh-Papua. Menurut Wetipo, KNPB secara organisasi menolak peran aktivis resolusi konflik asal Finlandia itu menjadi fasilitator bagi agenda dialog antara Pemerintah Indonesia dengan kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). *"Kami tidak sepakat dengan Pace Juha itu [Juha Christensen], karena dia tidak netral. Dia ada di pihak Pemerintah Indonesia, karena kami ikuti pengalaman perundingan*

Helsinki antara GAM dan Indonesia. Juha adalah salah satu fasilitator yang berupaya keras membujuk dan berhasil memediasi para tokoh diplomat Aceh di luar negeri, hingga kemudian Aceh hari ini masuk dalam 'karung politik Juha dan Jawa-Jakarta'. Mereka satu paket, sehingga kami tolak," katanya kepada Jubi melalui layanan aplikasi percakapan, Selasa (28/01). Wetipo juga meminta kepada pihak TPNPB-OPM agar tidak terikut 'rayuan gombal' yang ditawarkan Juha Christensen (https://jubi.id/polhukam/2025/knpb-tpnpb-dan-wpa-tolak-mantan-juru-damai-aceh-asal-finlandia-mediasi-dialog-papua-jakarta/).

18 Februari

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengumumkan kepada semua sekolah di Papua, terutama di wilayah konflik bersenjata, untuk mogok belajar selama TNI/Polri menjadikan sekolah sebagai pos militer. TPNPB-OPM menduga, selain menjadi guru, TNI/Polri juga akan bertugas sebagai tenaga kesehatan atau dokter di daerah Papua, sehingga sekolah-sekolah harus dikosongkan. Hal tersebut dinyatakan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Selasa (18/02*). "Markas Pusat Komnas TPNPB juga telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap Sinak pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025 bahwa TPNPB Kodap Sinak siap bertanggung jawab atas pembakaran sebuah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Agandugume di Sinak, Kabupaten Puncak yang dibakar sekitar jam 19.00 malam pada Jumat, 14 Februari 2025,"* katanya. Sambom mengatakan, TPNPB-OPM membakar gedung SMP Agandugume di Sinak, karena sekolah tersebut dicurigai telah digunakan TNI/Polri, selama melakukan operasi militernya (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-opm-umumkan-mogok-belajar-di-papua/).

15 Maret

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) resmi mengubah struktur komandonya dalam Konferensi Wilayah yang berlangsung pada 26–28 Februari 2025. Dalam konferensi ini, batalyon Dullamo dinaikkan statusnya menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) III D

Dulla. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi konflik dan ancaman terhadap sumber daya alam Papua. Brigadir Jenderal Aibon Kogoya, yang ditunjuk sebagai Panglima Kodam III D Dulla, mengumumkan perubahan ini dalam siaran pers bernomor 001/ STPS/TPN-K3D/III/2025 yang diterima oleh Jubi pada Sabtu (15/03). Menurutnya, perubahan struktur ini bertujuan memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Dalam struktur yang baru, Kodam III D Dulla menaungi tiga batalyon dengan komando teritorial yang lebih luas. *"Tiga batalyon tersebut adalah Batalyon 1 Hetobia yang beroperasi di wilayah Hegenagai-Kampung Agisiga, Batalyon 2 Ayopaa di wilayah Sugapa-Agisiga, dan Batalyon 3 Beogong yang mengamankan kawasan Beoga. Masing-masing batalyon memiliki tiga kompi,"* ungkap Kogoya (https://jubi.id/polhukam/2025/tpn-pb-kodam-iii-d-dulla-perubahan-struktur-dan-tekad-lawan-kapitalisme-di-tanah-papua/).

19 Juni

Dua organisasi internasional memimpin seruan agar Melanesian Spearhead Group (MSG) meningkatkan status keanggotaan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) pada pertemuan puncak mendatang mereka di Honiara pada September. Sampai saat ini, ULMWP masih berstatus sebagai pengamat dalam keanggotaan MSG. Demikian laporan jurnalis RNZ Pasifik di Port Moresby, Scott Waide, yang dikutip Jubi.id, Kamis (19/06). Kelompok yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) dan Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) kembali menyoroti kebutuhan mendesak untuk pengawasan internasional yang lebih besar dan keterlibatan diplomatik di wilayah Papua Barat. Adapun kelompok berpengaruh ini termasuk Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, dan mantan anggota parlemen Partai Hijau Selandia Baru, Catherine Delahunty. ULMWP saat ini memegang status pengamat dalam MSG, badan regional yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak dan Kaledonia

Baru (https://jubi.id/pasifik/2025/dua-organisasi-pro-papua-barat-merdeka-desak-msg-tingkatkan-keanggotaan-ulmwp/).

27 September

Duta Besar Republik Indonesia di Suva, Fiji, Dupito Simamora, menyebut isu Papua Barat sebagai masalah internal Indonesia. Ia mendesak negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) menghormati kedaulatan Indonesia, sekaligus menyoroti kontribusi Jakarta bagi inisiatif perdamaian dan keamanan regional. Indonesia menegaskan Papua Barat tidak akan menjadi topik bahasan dalam diskusi Strategi Perdamaian dan Keamanan MSG. Demikian dilaporkan jubi.id mengutip laman fijisun.com.fj, Sabtu (27/09). Saat ditanya apakah isu Papua Barat diangkat dalam pertemuan Strategi Perdamaian dan Keamanan MSG pada Senin (23/09), Simamora menegaskan: *"Isu yang Anda minati itu bukanlah isu yang akan dibahas, dan tentu saja itu merupakan masalah internal Indonesia.*" Papua Barat telah lama menjadi isu yang memecah belah MSG, dengan sebagian negara Pasifik mendukung gerakan kemerdekaan, sementara yang lain memilih mempertahankan hubungan erat dengan Jakarta (https://jubi.id/pasifik/2025/indonesia-nyatakan-papua-barat-sebagai-masalah-internal-dalam-perundingan-damai-msg/).

Kronik Penembakan, Intimidasi dan Penyiksaan Warga Sipil

26 Agustus

Tiga orang anak di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah diduga menjadi korban penyalahgunaan senjata api oleh Satuan Tugas atau Satgas Habema yang bertugas di sana pada awal Agustus 2025. Direktur Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI Wilayah Papua, Emanuel Gobay mengatakan tiga anak yang mengalami luka berat adalah YK (13 tahun), JG (2 tahun) dan TW (15 tahun) diduga akibat tertembak pada 7 Agustus 2025. Katanya, YK awalnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Puncak Jaya sejak 8-14 Agustus 2025. Namun karena kekurangan peralatan medis, ia dirujuk kesalah satu rumah sakit di Kota

Jayapura, Papua. "Kami temukan [dirawat] di salah satu rumah sakit di Kota Jayapura. Korban [adalah anak perempuan berusia 13 tahun] terkena peluru di bagian kaki kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ada benda asing di dalam tubuh YK. Dua [anak] lainnya melakukan peng_ obatan secara tradisional di hutan," kata Emanuel Gobay saat menggelar konferensi pers bersama komunitas mahasiswa Puncak Jaya, di Kota Jayapura, Papua, Senin (25/08) (https://jubi.id/lapago/2025/tiga-orang-anak-di-puncak-jaya-diduga-menjadi-korban-penyalahgunaan-senjata-api/).

03 September

Amnesty Internasional mendesak para pihak terkait mengusut penembakan terhadap warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 27 Agustus 2025 dan kematian seorang warga sipil di Manokwari, 28 Agustus 2025. Aksi penangkapan penangkapan, penembakan gas air mata yang menyebabkan seorang warga sipil terluka parah di Kota Sorong terjadi ketika warga di sana berdemonstrasi memprotes pemindahan empat tahanan politik atau tapol ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani persidangan. Aksi itu pun direspon aparat keamanan secara berlebihan. Sementara itu, di Manokwari, Papua Barat Daya seorang warga bernama Septinus Sesa meninggal saat aksi blokade di kawasan Wirsi dan Jalan Yosudarso, Kamis (28/07) malam. Korban diduga meninggal dunia akibat tembakan gas air mata. Namun Kapolda Papua Barat, Johnny Eddizon Isir membantah korban hal itu, karena tembakan gas air mata diklaim tidak mematikan (https://jubi.id/rilis-pers/2025/amnesty-internasional-desak-usut-penembakan-di-sorong-dan-kematian-warga-manokwari/).

05 September

Ratusan warga Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dari 12 Suku di sana membawa jenazah Vector Deyal ke halaman kantor Polres Yahukimo, Kamis (04/09). Vector Deyal diduga tewas akibat dianiaya anggota polisi dari Kepolisia Sektor atau Polsek Dekai Kota, Rabu (03/09). Kepala Suku, Kea Busup mengatakan kejadian yang menimpa Deyal merupakan kesekian kalinya terjadi di Yahukimo. Selama ini sudah ada

banyak korban di sana akibat kesewenangan-wenangan aparat kepolisian. *"[Terduga pelaku] kadang tidak diadili. Pembunuhan seperti ini setiap kapolres ada (terjadi), kemarin [Agustus 2024] kasus penembakan (terhadap] Tobias Silak yang [diduga] dilakukan oleh polisi dan masih proses hukum di Pengadilan Wamena belum selesai. Hari ini kasus Vector Deyal dibunuh oleh Polisi. Polisi ada karena ada rakyat tapi kenapa terjadi seperti ini bapak Kapolres? Bapak-bapak Polisi datang jangan cari pangkat ya. Kerja jujur dan benar,"* kata Kea Busup di depan Mapolres Yahukimo (https://jubi.id/lapago/2025/ratusan-warga-bawa-jenazah-vector-deyal/).

13 Oktober

Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge meminta aparat keamanan segera membebaskan seorang warga sipil, Mumak Nirigi yang ditangkap anggota TNI pos Wisigi, Kabupaten Nduga, Jumat (03/10). *"Beliau keluar pukul 07.00 pagi ke kebun, untuk mencari bahan makanan. Tapi hingga sore hari tidak kembali. Keluarga akhirnya mencari ke kebun, namun yang ditemukan hanya baju, topi petei, bahan makanan yang digali, juga ada jejak sepatu lars. Hingga saat ini belum ditemukan,"* kata Gwijangge diwawancarai awak media, Minggu (12/10). Ia menjelaskan keluarga Pemerintah Kabupaten Nduga. *"Kami juga sudah menyampaikan informasi ini kepada Dandim dan Kapolres Nduga untuk pengembalian warga sipil tersebut dalam keadaan hidup. Namun belum ada respon dari pihak keamanan,"* katanya (https://jubi.id/lapago/2025/dprk-nduga-desak-aparat-bebaskan-warga-sipil-yang-ditangkap-saat-ke-kebun/).

27 Oktober

Pasca operasi militer yang terjadi pada 5 Oktober 2025 di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama tim kemanusiaan memasang sejumlah baliho berisi pesan larangan perang di area sipil di lima distrik terdampak konflik bersenjata. Pemasangan baliho dilakukan pada 25 Oktober 2025 di Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage, dan Goa Balim, sebagai bentuk seruan agar aparat TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif kemanusiaan untuk melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah tersebut.

30 Oktober

Penembakan belasan orang yang menewaskan belasan orang di Kabupaten Intan Jaya, Papua Pegunungan pada 15 Oktober 2025, diadakan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua, Kamis (30/10). Pengaduan ke Komnas HAM perwakilan Papua disampaikan oleh mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, didampingi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua. Mahasiswa melaporkan dugaan pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi dalam operasi Satuan Tugas atau Satgas Rajawali I, II Habema dan Satgas 712/WT di Kampung Soanggama distrik Hitadipa, Papua Tengah pertengahan Oktober 2025.Tim LBH Papua, Raindhart Mur mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari keluarga korban akan terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM (https://jubi.id/polhukam/2025/penembakan-yang-menewaskan-belasan-orang-di-intan-jaya-diadukan-ke-komnas-ham-papua/).

BAB VI

ORANG MUDA DI TANAH PAPUA DALAM PUSARAN NARKOBA

(Oleh Goklian Paraduan Haposan OFM)

Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa hingga saat ini narkoba menjadi salah satu sumber persoalan besar bagi banyak negara di dunia. Di Meksiko misalnya, Presiden Claudia Sheinbaum secara tegas menyatakan perang terbuka terhadap kartel narkoba yang selama bertahun-tahun menguasai jaringan peredaran narkotika di negara tersebut.[46] Kebijakan tersebut diwujudkan melalui operasi militer besar-besaran terhadap jaringan kartel narkoba.

Di Indonesia, persoalan narkoba juga merupakan masalah serius. Kompleksitas persoalan ini semakin meningkat ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru terlibat dalam kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik antara lain keterlibatan Irjen Pol. Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu, serta kasus yang menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro yang diduga menerima suap dari bandar narkoba. Selain itu, sejumlah aparat kepolisian di berbagai daerah juga pernah ditangkap karena diduga menerima setoran dari jaringan peredaran narkotika.[47]

[46] Warta Kota, "Presiden Meksiko Perang Terbuka dengan Kartel Narkoba," 2026. https://shorturl.at/oJzKO
[47] https://shorturl.at/seMOn

Realitas ini menunjukkan bahwa narkoba dapat menimpa siapa saja tanpa memandang profesi maupun status sosial. Di Papua sendiri, berbagai kasus narkotika menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan terlibat dalam pusaran narkoba adalah kalangan orang muda. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan karena orang muda merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan masyarakat Papua.

Tulisan ini berusaha mengungkap fenomena keterlibatan orang muda dalam kasus narkotika di Papua dengan menelaah berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Orang Muda dalam Pusaran Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Psikotro_ pika adalah zat psikoaktif yang memengaruhi sistem saraf pusat dan kondisi mental seseorang, sedangkan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang dapat menimbulkan kecanduan meskipun tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika.[48]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan.[49]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba memberikan dampak serius terhadap kesehatan, psikologis, serta kehidupan sosial para penggunanya.[50] Oleh karena itu, penggunaan dan peredaran narkotika secara ilegal merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum di Indonesia.

Data yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional serta laporan kepolisian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di

[48] Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Kriminologi Indonesia* (2012).
[49] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[50] Novita, Noor, dan Zulfiani, "Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba," 2018.

kalangan remaja dan generasi muda di Indonesia berada pada tingkat yang memprihatinkan. Pada tahun 2026 diperkirakan terdapat sekitar 312.000 remaja berusia 15–25 tahun yang telah terpapar narkotika.[51]

Situasi serupa juga terlihat di Papua. Berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika berasal dari kalangan orang muda yang berada pada usia produktif.

Beberapa kasus yang tercatat antara lain:

Tanggal	Lokasi	Pelaku	Usia	Keterangan
8 April	Merauke	RSJ, FF	17, 18	Pelajar SMP dan SMA menjadi pengedar ganja
11 April	Bandara Sentani	SKY	-	Penumpang pesawat membawa ganja ke Timika
21 April	Sentani	RTB	20	Mahasiswa ditangkap karena ganja
22 April	Bandara Sentani	NW	21	Membawa 10 paket ganja
23 April	Jayapura	RTM, RSM	19, 20	Dua pemuda ditangkap dengan 4,3 kg ganja
7 Mei	Merauke	AF, AB, H, RA	14-17	Empat pelajar ditangkap terkait ganja
14 Mei	Bandara Sentani	AT	24	Membawa 3 paket ganja
20 Juni	Holtekamp	JS, MAP, SAS	18-24	Tiga pelaku membawa ganja
17 Juli	Sentani	ES	-	Pemuda membawa dua paket ganja
18 Juli	Jayapura	JM, JF	21-22	Dua pemuda membawa ganja
22 Juli	Keerom	TA, KOS	20-25	Tersangka peredaran ganja
21 Agustus	Jayapura	BP	26	Membawa ganja 400 gram

[51] https://shorturl.at/JXcyU

Tanggal	Lokasi	Pelaku	Usia	Keterangan
2 September	Jayapura	Pelajar	-	5–10 siswa positif ganja
19 September	Wamena	BH	22	Pengguna dan pengedar ganja
27 September	Pelabuhan	NM, SK, RD, NS	16-31	Penumpang kapal membawa ganja
31 Oktober	Jayawijaya	KE, EH	17-20	Dua pemuda membawa ganja
26 November	Mimika	AN, I	27-29	Pengedar sabu ditangkap
29 November	Jayapura	13 siswa SMP	-	Positif ganja
15 Desember	Pelabuhan Jayapura	IH	22	Membawa 3,9 kg ganja
30 Desember	Jayapura	FT, FD	18, 24	Kasus ganja di pelabuhan dan Abepura

Dari kronikalia kasus yang dihimpun, sekitar 31 pelaku berusia antara 14–25 tahun, yang menunjukkan dominasi keterlibatan orang muda dalam kasus narkotika di Papua. Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 133 kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti mencapai 97,35 kilogram ganja. Selain itu, sebanyak 167 tersangka telah ditahan, termasuk 15 warga negara asing (WNA).

Jenis narkotika yang paling banyak ditemukan adalah ganja. Kondisi ini berkaitan dengan faktor geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Jalur perbatasan yang panjang dan sulit diawasi sering dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika.

Analisis Sosial dan Rekomendasi

Keterlibatan orang muda dalam kasus narkotika dapat dipahami melalui berbagai perspektif sosial. Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan struktural dalam masyarakat dapat mendorong individu mencari alternatif jalan untuk mencapai tujuan hidupnya, termasuk melalui aktivitas ilega.[52] Dalam situasi ketika kesempatan ekonomi terbatas sementara tuntutan sosial untuk mencapai keberhasilan tetap tinggi, sebagian individu dapat memilih jalan-jalan yang menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan tersebut.

Kajian sosiologi pemuda juga menunjukkan bahwa masa muda merupakan periode transisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial.[53] Dalam fase ini, relasi pertemanan dan pengaruh kelompok sebaya memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam konteks Papua, keterbatasan peluang ekonomi, kesenjangan pembangunan, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat dapat menciptakan tekanan sosial bagi sebagian orang muda. Dalam situasi tertentu, keterlibatan dalam jaringan narkotika bahkan dapat dipandang sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan atau pengakuan sosial.

Selain faktor sosial tersebut, kondisi geografis Papua juga memengaruhi dinamika peredaran narkotika. Papua memiliki garis perbatasan sepanjang lebih dari 700 kilometer dengan negara Papua New Guinea (PNG). Sebagian besar wilayah perbatasan tersebut berupa hutan dan daerah pegunungan yang sulit diawasi secara maksimal. Kondisi ini membuka peluang bagi aktivitas penyelundupan narkotika, khususnya ganja, yang kemudian didistribusikan ke berbagai kota di Papua seperti Jayapura, Sentani, Wamena, dan Merauke. Hubungan kekerabatan antar komunitas di wilayah perbatasan yang telah berlangsung lama juga menyebabkan mobilitas orang dan barang terjadi secara intensif, sehingga pengawasan terhadap peredaran narkotika menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

---

[52] Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (1968).
[53] Andy Furlong, Youth Studies (2013).

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat. Keterlibatan orang muda dalam penyalahgunaan narkotika berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan produktivitas generasi muda dapat terganggu sehingga masa depan mereka sebagai generasi penerus menjadi terancam. Dalam banyak kasus, ketergantungan terhadap narkotika juga mendorong munculnya tindakan kriminalitas. Kebutuhan untuk memperoleh uang guna membeli narkotika sering kali membuat pelaku terlibat dalam berbagai tindakan seperti pencurian, kekerasan, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan apabila dikaitkan dengan keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Tanah Papua. Hingga saat ini, pusat-pusat rehabilitasi masih relatif terbatas, sementara jumlah pengguna narkotika menunjukkan kecenderungan meningkat. Ketidakseimbangan antara meningkatnya jumlah pengguna dengan ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi tantangan serius dalam penanganan persoalan narkotika di wilayah ini.

Dalam perspektif hak asasi manusia, persoalan narkotika tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda. Orang muda memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat, aman, dan memungkinkan mereka mengembangkan potensi secara optimal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkotika perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menekankan bahwa orang muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.

Berdasarkan situasi tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan perlu meningkatkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, terutama pada jalur-jalur tidak resmi yang selama ini

diduga menjadi pintu masuk penyelundupan ganja ke Papua. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu digalakkan secara lebih luas di lingkungan sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat. Banyak orang muda yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko penyalahgunaan narkotika, sehingga kampanye edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pendidikan, diskusi publik, dan program pemberdayaan masyarakat.

Upaya pencegahan tersebut juga perlu disertai dengan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Pusat rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, tetapi juga sebagai ruang pembinaan sosial agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif. Dalam konteks Papua, pengembangan pusat rehabilitasi sebaiknya tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi menjadi lebih mudah.

Dengan pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan sosial, pendidikan, serta rehabilitasi, diharapkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Papua dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penutup

Narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Di Papua, berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa orang muda menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam pusaran narkotika.

Melindungi generasi muda dari bahaya narkoba berarti menjaga masa depan masyarakat Papua. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, serta organisasi masyarakat sipil untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkotika di Papua.

Daftar Pustaka

Furlong, Andy. *Youth Studies: An Introduction.* London: Routledge, 2013.

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure.* New York: Free Press, 1968.

Novita, I., M. Noor, dan D. Zulfiani. "Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda." *E-Journal Administrasi Negara* 6 (2018): 8170–8184.

Ricardo, P. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 3 (2012): 10–25.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Warta Kota. "Sosok Presiden Wanita Pertama Meksiko yang Perang Terbuka dengan Kartel Narkoba." Diakses Februari 2026.

Kronik Narkoba dan Miras

08 April

Tiga pelajar di Merauke yang masih duduk di bangku SMP dan SLTA menjadi pengedar Narkotika jenis ganja. Ketiga pelajar tersebut ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Untuk 2 pelaku RSJ (17) dan FF (18) ditangkap di jalan Prajurit I gang 3 pada Jumat (04/04). Kemudian dari hasil pengembangan, Sat Narkoba Polres Merauke kembali berhasil menangkap pengedar lainnya pada Sabtu (05/04) di jalan Pelayaran Baru (Cenderawasih Pos).

11 April

Seorang calon penumpang pesawat komersila tujuan Timika, Papua Tengah diamankan tim Aviation Security (Avsec) di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis (10/04). Calon penumpang berinisial SKY itu ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bagasi yang akan diselundupkan ke Timika (Cenderawasih Pos).

21 April

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dalam sebuah operasi yang dilakukan pada Jumat (18/04) siang di kawasan BTN Sosial, Sentani, Kabupaten Jayapura, Terduga pelaku diketahui berinisial RTB (20), seorang mahasiswa yang merupakan warga BTN Permai, Sentani (Cenderawasih Pos).

22 April

Upaya penyelundupan narkotika jenis daun ganja kering berhasil digagalkan aparat gabungan dari Polsek kawasan Bandara Sentani dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP Papua). Kapolsek Kawasan Bandara Sentani, Iptu Wajedi, menjelaskan tersangka berinisial N.W (21) warga yang berdomisili di Asrama Yahukimo, diamankan bersama10 paket besar daun ganja kering yang dikemas dalam plastic bening (Cenderawasih Pos).

23 April

Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura berhasil mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 4,3 kilogram. Kedua pemuda ini berinisial RTM (19) mahasiswa dan RSM (20) tidak bekerja yang diamankan bersama dengan barang bukti (Cenderawasih Pos).

07 Mei

Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke kembali menangkap 4 pelajar terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja. Keempat pelajat tersebut yang ditangkap yakni AF (14), AB (15), H (16) dan RA (17). Keempat pelajar ini ditangkap di Jalan Raya Mandala tepatnya di sekitar area Spadem Merauke pada Sabtu dan Minggu (03-04 Mei 2025) (Cenderawasih Pos).

14 Mei

"Penumpang AT (24) merupakan penumpang transit yang kedapatan membawa 3 paket Narkotika jenis daun ganja kering dalam kemasan bungkusan besar maupun kecil berwarna bening saat hendak berangkat dari Jayapura menuju Sorong," jelas Kapolsek Kawasan Bandara Sentani, IPTU Wajedi (Cenderawasih Pos).

20 Juni

Tim Opsnal Satuan Resrse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil membekuk tiga orang pelaku pembawa narkotika jenis ganja di jalan Hanurata, Holtekamp, Distrik Muara Tami, Rabu (18/06). Salah satu dari pelaku merupakan warga negara asing asal Papua Nugini (PNG) berinisial JS (18). Sementara dua pelakun lainnya adalah warga negara Indoensia, yakni MAP (24) dan SAS (21), keduanya berasal dari Jayapura (Cenderawasih Pos).

BAB VII

WAJAH PATOLOGI KEKUASAAN DI PAPUA

(Oleh Handrianus K. Belolon)

Pendahuluan

Membicarakan kesehatan di Tanah Papua sering kali dimulai dari angka—jumlah penderita HIV/AIDS, kasus malaria, atau tingkat kematian ibu dan anak. Angka-angka tersebut kemudian dibaca sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan layanan kesehatan. Namun, pertanyaan yang jarang diajukan adalah: apakah persoalan kesehatan di Papua benar-benar hanya soal medis, atau justru mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dan struktural?

Tulisan ini berangkat dari kritik terhadap cara pandang yang cenderung reduksionis dalam membaca persoalan kesehatan. Ketika penyakit dipahami semata-mata sebagai persoalan biologis, maka kita berisiko mengabaikan relasi kuasa, kebijakan pembangunan, dan struktur sosial yang turut membentuk kerentanan masyarakat. Dalam konteks Papua, berbagai krisis kesehatan yang terus berulang justru memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara penderitaan manusia dengan cara negara mengelola kekuasaan dan sumber daya.

Melalui pembacaan terhadap berbagai data, laporan jurnalistik, dan kajian akademik sepanjang tahun 2025, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di Papua tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika ekonomi politik, kebijakan pembangunan, serta ketimpangan sosial yang terus berlangsung. Dengan demikian, memahami

kesehatan di Papua berarti juga membaca wajah kekuasaan itu sendiri—sebuah kekuasaan yang, dalam banyak hal, justru memproduksi kerentanan alih-alih melindungi kehidupan.

Cara Pandang yang Reduksionis: Sebuah Kritik

Sampai dengan tahun 2025, sejumlah media lokal kembali melaporkan berbagai persoalan kesehatan di Tanah Papua yang tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya; mulai dari meningginya angka HIV/AIDS, penyakit malaria yang terus melonjak, sampai pada kasus kematian ibu dan anak serta meninggalnya 50 orang dalam jangka waktu 3 bulan. Sebagai wilayah yang dikenal luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah, laporan jurnalistik justru memperlihatkan sebuah paradoks yang tajam. Secara umum, publik sekadar membacanya sebagai persoalan medis atau hanya kegagalan teknis pelayanan kesehatan. Padahal, ada persoalan lain yang jauh lebih kompleks, terselubung, dan patut untuk ditelusuri lebih jauh sebagai persoalan yang sistemik.

Ketika kita lebih cenderung menyederhanakan penyakit dan kematian hanya sebagai persoalan teknis atau sebagai catatan angka statistik terkait masalah biologis, apalagi menanggapinya sebagai akibat dari perilaku tidak sehat, takdir kehidupan atau bahkan sebagai ancaman sosial, maka kita sedang jatuh dan terjebak dalam cara pandang yang reduksionis. Menyitir Paul Farmer, penyakit dan kematian tidak hanya berbicara tentang patologi biologis, tetapi juga patologi kekuasaan, karena persoalan di dunia kesehatan selalu punya korelasi dengan konteks sosial, dan setiap penderitaan yang dialami tidak bisa dipisahkan dari struktur politik kekuasaan yang menindas.[54]

HIV/AIDS dan Potensi Rasialisasi Epidemi

Isadora Ravenska Lewaherilla dalam opininya bertajuk "Jangan Tutup Mata, Permasalahan HIV/AIDS di Papua Butuh Aksi Nyata", yang terbit di Tabloid Jubi pada 4 Juni 2025, mengungkapkan kekhawatirannya

[54] Farmer, P. (2003). Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. University of California Press.

terhadap angka HIV/AIDS di Papua yang terus meningkat. Dengan merujuk pada data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023, dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2025, Lewaherilla ingin memperlihatkan bahwa Papua memiliki tingkat penderita HIV tertinggi di seluruh Indonesia. Prevalensi kasusnya telah mencapai 2,3 persen dari total jumlah penduduk, atau 5 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 0,5 persen. Persentase angka tersebut bukan sekedar data statistik. Ada persoalan nyata yang terus mengancam generasi Papua karena hampir setiap hari ada orang asli Papua yang kehilangan nyawanya karena HIV/AIDS.[55]

Pada 1 Desember 2025, Plt. Sekda Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, mengatakan bahwa HIV/AIDS masih menjadi persoalan serius di wilayahnya. Hingga tahun 2025 tercatat 5.995 orang terinfeksi HIV/AIDS, dengan 740 di antaranya meninggal dunia. Penyebaran kasus telah menjangkau seluruh distrik dan tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, tetapi juga anak-anak muda. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah rendahnya layanan komprehensif, keberlanjutan terapi ARV yang belum optimal, serta kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).[56] Sementara itu, di Kabupaten Merauke, akumulasi kasus telah mencapai 3.049 kasus pada Mei 2025.[57]

Di Kabupaten Kepulauan Yapen juga terjadi tren peningkatan kasus yang konsisten dan memprihatinkan. Pada Maret 2024 tercatat ada 1.904 kasus yang mengalami peningkatan menjadi 2.036 kasus pada September 2024. Meningkatnya jumlah kasus juga terjadi pada Maret 2025 dengan 2.761 kasus, lalu kembali naik menjadi 2.767 kasus pada Juni 2025, dimana hamper 90 persen korban adalah warga asli Papua.[58] Lonjakan signifikan dalam kurun waktu satu tahun tersebut memperlihatkan bahwa laju

---

[55] Lihat https://jubi.id/opini/2025/jangan-tutup-mata-permasalahan-hiv-aids-di-papua-butuh-aksi-nyata/, diakses pada 23 Februari 2026.

[56] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/penderita-hiv-aids-di-kabupaten-jayapura-capai-5-985-kasus, diakses pada 23 Februari 2026.

[57] Lihat https://suara.merauke.go.id/post/4331/kasus-hivaids-merauke-meningkat-perlu-langkah-preventif.html#:~:text=Merauke%20%2D%20Perlu%20langkah%20preventif%20untuk,melanggar%20perintah%20Tuhan%20adalah%20dosa.&text=6.%20Ketahuilah%20status%20HIV%20anda,pada%20rumah%20sakit%20atau%20puskesmas, diakses pada 23 Februari 2026.

[58] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/132-kasus-baru-hiv-aids-dalam-6-bulan-di-kepulauan-yapen/; https://jubi.id/penkes/2025/kasus-hiv-aids-di-kepulauan-yapen-terus-meningkat/, diakses pada 23 Februari 2026.

penambahan kasus yang berdampak pada orang asli Papua, masih berlangsung aktif dan memungkinan adanya akumulasi kasus akibat pembiaran yang sistemik.

Sebaran kasus serupa juga terjadi di Papua Tengah pada triwulan pertama 2025. Menurut Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah, Freny Anow, angka HIV AIDS di Papua Tengah telah mencapai 23.188 kasus yang tersebar di 8 Kabupaten, dimana Kabupaten Nabire menjadi penyumbang angka epidemi terbesar yakni 10.705 kasus, disusul Kabupaten Mimika di angka 8.021 kasus. Sementara itu, kabupaten lain seperti Paniai (2.480), Deiyai (2.063), dan Puncak Jaya (949) juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sebaliknya, wilayah seperti Intan Jaya (19 kasus) dan Puncak (67 kasus) mencatat angka yang jauh lebih rendah.[59] Di balik deretan angka tersebut, kitab isa menemukan adanya pola penyebaran yang terkonsentrasi di wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi dan mobilitas penduduk yang lebih tinggi. Hal serupa juga terlihat di Provinsi Papua, dimana Kota Jayapura sebagai pusat ibu kota provinsi menjadi pemuncak klasemen di angka 9.816 kasus per Juni 2025.[60]

Data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2025, juga mencatat adanya kesenjangan yang cukup tinggi terkait kasus HIV/AIDS; mulai jumlah total kasus, kasus aktif, dan pasien yang menjalani terapi. Dari 21.129 total kasus HIV/AIDS, terdapat 18.892 kasus aktif. Namun, hanya 4.192 pasien yang menjalani pengobatan antiretroviral (ARV).[61] Kesenjangan ini memperlihatkan sistem layanan kesehatan tidak berjalan efektif. Secara proporsional, jumlah pasien yang rutin berobat masih jauh di bawah jumlah kasus aktif sehingga ada potensi penularan dan risiko kematian yang terus meningkat di beberapa wilayah terdampak.

Dalam kaitannya dengan upaya vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah selama ini, Bruder Agustinus Adil OFM sebagai pengelola rumah singgah Surya Kasih bagi ODHA yang ada di Waena,

---

[59] Lihat https://www.tadahnews.com/2025/08/data-kpa-papua-tengah-freny-anouw-kasus.html, diakses apda 23 Februari 2026.

[60] Lihat Cenderawasihposreal (5 Desember 2025), https://www.instagram.com/reel/DR3wkKjESf3/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada 23 Februari 2026.

[61] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/dari-18-892-pasien-hiv-aids-di-provinsi-papua-hanya-4192-jalani-pengobatan-arv/, diakses pada 23 Februari 2026.

menyampaikan perlu adanya kewaspadaan dan antisipasi terkait kemungkinan penghentian pasokan obat kesehatan yang bersumber dari pendanaan Amerika Serikat; terutama obat-obatan untuk penderita HIV-AIDS. Sebenarnya produksi obat-obatan untuk HIV/AIDS sudah bisa dilakukan dalam negeri, tetapi bahan bakunya masih dari luar, yakni Amerika. Apabila distribusi obat-obatan tersebut dihentikan oleh Amerika, maka sudah pasti pertumbuhan kasus akan semakin meningkat dan sulit diatasi.[62]

Tanpa ada langkah tegas dan terukur, angka kematian di Papua menjadi berlipat ganda dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, populasi manusia Papua akan terus berada dalam kondisi yang semakin rentan di tengah tingginya angka penderita HIV yang belum atau tidak menjalani terapi. Sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi sehingga tidak segera mengakses layanan pengobatan. Di sisi lain, stigmatisasi berlebihan terhadap ODHA sebagai ancaman sosial, turut menghambat keberanian untuk memeriksakan diri dan menjalani terapi. Situasi ini kemudian diperparah lagi oleh pola penanganan yang masih parsial dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Dari rangkaian data yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa HIV/AIDS lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi termarginalkan serta dimiskinkan oleh tata kelola pemerintahan yang lemah, korup dan abai terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Papua, epidemi HIV/AIDS secara mencolok berdampak besar pada Orang Asli Papua (OAP). Ketika kelompok OAP masih mendominasi angka penyakit dan kematian, persoalan HIV/AIDS di Papua tidak lagi netral secara sosial dan berpotensi menjadi rasialisasi epidemi.

Dalam konteks pemikiran yang demikian, kompleksitas persoalan HIV/AID di Papua harus dipahami dalam konteks sejarah kolonialisme internal melalui proyek transmigrasi di era Orde Baru hingga gelombang migrasi baru tahunan yang kian menjamur di atas Tanah Papua. Migrasi

[62] Lihat Cenderawasih Pos (03/03/2025).

besar-besaran ke Tanah Papua selama ini tidak hanya membawa pengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi, sosial dan budaya mapun marginalisasi OAP, tetapi juga ikut menyuburkan penyebaran HIV secara massif. Dan apabila setiap hitungan analisis terhadap akumulasi angka HIV/AIDS di Papua tidak pernah dikaitkan dengan konteks sejarah kolonialisme internal yang dimaksud, Papua akan selalu berpotensi menjadi korban diskriminasi dalam hal rasialisasi epidemi, di mana Papua akan selalu menjadi rujukan utama ketika orang membincangkan kasus HIV/AIDS dalam debat-debat kusir.

Sebagai misal, alih-alih memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Kepulauan Yapen pada 15-19 Juli 2025,[63] membiarkan minuman beralkohol beredar bebas di toko-toko maupun tempat hiburan, adalah perjuangan yang utopis. Menyitir Karl Marx, membayangkan masyarakat ideal yang bebas dari HIV/AIDS hanya berlandaskan pada imajinasi moral dan fantasi politik, agar masyarakat hidup tertib sesuai norma-norma yang berlaku tanpa ada analisis ilmiah terhadap dampak dari struktur ekonomi kapitalisme dan relasi kekuasaan yang timpang, adalah pendekatan *problem solving* yang terlalu normatif dan ahistoris.[64]

Inilah yang disebut Farmer sebagai kekerasan struktural (*structural violence*)[65] yang terselubung, terlembaga, tidak terlihat, tetapi mematikan. HIV akan terus menyebar tanpa henti dalam ruang-ruang hidup yang diciptakan oleh kebijakan yang represif, diskriminatif, parsial, dan tidak tepat sasaran, sementara angka kematian juga terus meningkat mengikuti garis ketimpangan struktural yang sistemik. Dengan demikian, rasialisasi epidemi bukan lagi tentang masalah biologis, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dan diskriminasi ikut membingkai angka penyakit dan kematian orang Papua.

---

[63] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/kpa-yapen-gandeng-komunitas-peduli-hiv-aids-perkuat-pencegahan-di-sekolahan, diakses pada 23 Februari 2026.

[64] Engels, F. (1880). *Sosialisme Utopis dan Sosialisme Ilmiah* (T. Sprague, Trans.). *Marx & Engels Collected Works*, Vol. 24, 281–325, diakses dari https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1880/utopi-ilmu/index.htm

[65] Farmer, P. (2003). *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. University of California Press, p. 31.

Malaria di Bawah Bayang-Bayang Ekosida

Djaafara et al. (2025) dalam "*Spatiotemporal Heterogeneity in Malaria Transmission Across Indonesia: Analysis of Routine Surveillance Data 2010–2019*", menunjukkan bahwa meskipun secara nasional angka kejadian malaria menurun di enam dari tujuh wilayah Indonesia, di Papua tetap terjadi penularan malaria yang tinggi, terutama terjadi pada anak-anak. Meskipun wilayah Papua hanya mencakup sekitar 2% dari total populasi nasional, kontribusinya terhadap total kasus malaria nasional mengalami peningkatan dari 40% menjadi sekitar 90% selama periode 2010–2019.[66]

Sampai dengan tahun 2025, malaria masih menjadi permasalahan kesehatan, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, kasus malaria mengalami peningkatan dari 418.546 kasus pada tahun 2023 menjadi 543.965 kasus pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 persen lebih kasus ditemukan di wilayah Papua, dengan rincian sekitar 229.000 kasus di Provinsi Papua, 168.000 kasus di Provinsi Papua Tengah, 57.000 kasus di Provinsi Papua Selatan, 38.000 kasus di Provinsi Papua Pegunungan, 7.800 kasus di Provinsi Papua Barat, dan 7.200 kasus di Provinsi Papua Barat Daya.[67] Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bahkan mengklaim bahwa pada tahun 2025, sudah ada sekitar 79% (476 dari total 514 kabupaten/kota) kabupaten/kota di Indonesia telah berstatus bebas malaria, tetapi wilayah endemik tertinggi tetap berada di Papua. Kini, Papua menjadi pusat perhatian nasional dalam upaya pemberantasan malaria karena masih menanggung 93% kasus malaria.[68]

Di Papua, malaria masih menjadi momok bagi jutaan masyarakat setempat. Sejumlah faktor, seperti akses kesehatan yang tidak merata, kemiskinan, karakteristik wilayah, hingga minimnya jumlah tenaga kesehatan di Tanah Papua yang wilayahnya sangat luas, didentifikasi sebagai penghambat utama dalam upaya memberantas malaria di Papua. Ditambah lagi, ketidakstabilan politik dan konflik lokal di Tanah Papua

---

[66] Djaafara, B. A., et al. (2025). Spatiotemporal Heterogeneity in Malaria Transmission Across Indonesia: Analysis of Routine Surveillance Data 2010–2019. *BMC Medicine, 23*, 136. https://doi.org/10.1186/s12916-025-03902-9

[67] Lihat Bidang Kesra, Komisi IX. (2025). *Strategi Eliminasi Malaria di Papua*. Badan Keahlian DPR RI.

[68] Lihat https://theconversation.com/sulitnya-memberantas-malaria-di-tanah-papua-apa-masalahnya-254933, diakses pada 23 Februari 2026.

yang terus bergejolak, dan memicu arus pengungsian serta membatasi mobilitas dan keamanan petugas kesehatan, ikut menciptakan kantong-kantong penularan yang sulit dijangkau.[69]

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, menargetkan eliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030 sebagai program prioritas nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghapus transmisi malaria melalui pendekatan yang sistematis, terukur, serta berbasis pada sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan.[70]

Meskipun demikian, dalam seluruh uraian tentang peraturan yang dimaksud maupun dokumen-dokumen resmi lainnya, tidak ada regulasi yang membahas tentang malaria sebagai salah satu dampak lain dari perubahan iklim yang lahir dari praktik buruk developmentalisme atas nama globalisasi. Dr. Greg Devine, Direktur Senior Entomologi Lapangan World Mosquito Program, mengungkapkan bahwa selain kenaifan imunologi (kondisi tubuh yang belum "mengenali" ancaman penyakit dan belum memiliki antibodi yang siap merespons virus secara cepat dan efektif); peningkatan malaria juga dipicu oleh perubahan iklim, dan meningkatnya globalisasi.[71] Dalam konteks ini, malaria di Papua tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Pembukaan lahan besar-besaran, deforestasi, proyek ekstraktif, serta perubahan tata ruang, juga ikut memperluas habitat vektor malaria.

Selama periode 1990–2022, Papua menunjukkan tren deforestasi yang konsisten dan signifikan. Luas deforestasi selama 32 tahun tercatat mencapai 256.065 hektare, dengan rata-rata tahunan sebesar 8.002 hektare. Sementara itu, degradasi hutan mencapai angka yang lebih tinggi yaitu 965.955 hektare, dengan laju tahunan sebesar 30.186 hektare.[72] Yayasan

---

[69] *Ibidem*.

[70] Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, Pasal 5, ayat 1,2, dan 3; bdk. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1988/2024 tentang Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia Tahun 2025–2045.

[71] Lihat https://id.worldmosquitoprogram.org/news-stories/world-mosquito-day-2025-global-health-crisis#, diakses pada 23 Februari 2026.

[72] Lihat Laurents, & Sadina. (2025). Deforestasi di Papua: Dampak Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Global Research and Innovation Journal, 1(2),* 1026–1032. https://journaledutech.

Pusaka Bentala Rakyat juga mencatat 45 ribu hektare lebih hutan di Tanah Papua hilang akibat deforestasi di balik kepentingan proyek strategis nasional pada tahun 2025.[73]

Dalam konteks ini, malaria bukan sekadar masalah nyamuk, kelambu, dan obat-obatan. Malaria di Papua adalah refleksi pembangunan yang timpang. Selain persoalan deforestasi, kondisi lingkungan di wilayah perkotaan seperti kepadatan hunian, banyaknya genangan air akibat sistem drainase yang buruk, hingga sampah yang terus menumpuk, juga berkontribusi besar terhadap berkembangnya vektor malaria.[74] Karena itu, persoalan Ekosida di Papua, harus menjadi bahan evaluasi utama dalam setiap ruang rapat para elit di menara gading. Jika negara lebih memilih melindungi kepentingan investasi dibandingkan kesehatan komunitas adat, maka malaria bukan lagi tentang persoalan pola hidup bersih dan sehat orang asli Papua, tetapi sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan tidak presisi.

Kematian Ibu dan Anak adalah Manifestasi Kekerasan Struktural

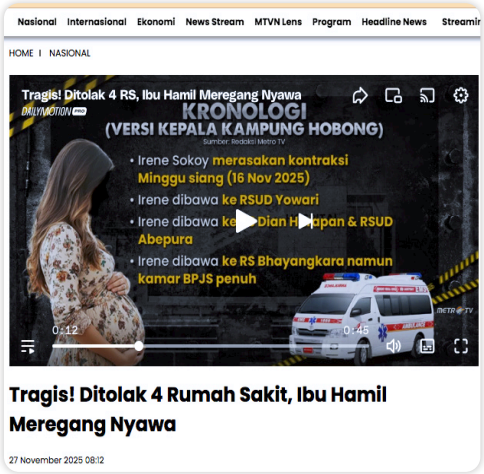
Bobroknya sistem layanan kesehatan di Papua kembali menjadi sorotan publik pasca meninggalnya Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya pada 17 November 2025. Menurut keterangan keluarga sebagaimana yang dirangkun BBC News, Irene adalah warga Kampung Kensio, Danau Sentani. Karena tidak ada fasilitas kesehatan di kampung itu, keluarga membawa Irene menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari dengan jarak tempuh sekitar 30 kilometer. Di Yowari, Irene sempat mendapatkan pertolongan awal, tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan karena dokter kandungan tidak berada di tempat, sementara ia harus menjalani operasi caesar setelah dinyatakan abir ketuban pecah dan detak jantung janinnya melemah. Setibanya di Rumah

com/index.php/great/article/view/255

[73] Lihat https://jubi.id/lingkungan/2026/catatan-tahunan-pusaka-2025-deforestasi-di-tanah-papua-capai-45-ribu-hektare/, bdk. https://pusaka.or.id/news/tren-dan-pendorong-pembukaan-lahan-di-papua-2024-2025/, diakses pada 23 Februari 2026.

[74] Rumaseb, E., *et al*. (2025). Pengaruh Gaya Hidup, ingkungan dan Kebiasaan Masyarakat Terhadap Penyebaran Malaria di Kampung Dosay, Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, 5*(3), 616–626. https://doi.org/10.55606/jikki.v5i3.8350

Sakit Dian Harapan, Ia tak mendapatkan pertolongan dengan alasan ruang kelas 3 BPJS penuh. Keluarga kemudian beranjak menuju RSUD Abepura, tetapi kembali tidak mendapat tindakan karena ruang operasi sedang direnovasi. Perjalanan dilanjutkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura. Di sana Irena kembali ditolak dengan alasan serupa: ruangan kelas 3 BPJS penuh dan hanya tersedia ruang VIP. Untuk bisa mendapatkan pertolongan di ruangan tersebut, keluarga harus membyar uang muka sebesar 4 juta rupiah sebagai jaminan. Karena keluarga tak punya uang yang cukup, Irene akhirnya dilarikan lagi untuk kelima kalinya menuju RSUD Dok II Jayapura. Dalam perjalanan ke sana, kondisi Irene terus menurun. Ia kehilangan kesadaran dan akhirnya meninggal dunia.[75]



Berita Ibu Hamil yang meninggal dunia karena tidak ditolong
(Sumber: metrotvnews)

Cerita tentang Irene di atas adalah kasus terbaru yang turut memperkuat justifikasi masyarakat tentang adanya pembiaran sistemik terkait buruknya sistem layanan kesehatan di Papua. Benar bahwa apa yang dikatakan Advokat dan pembela HAM, Yan Christian Warinussy; kematian Ibu Irene merupakan pelanggaran HAM. Ia menyebut kasus yang diduga melibatkan kelalaian tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit sebagai "kematian sia-sia" yang melanggar hak hidup ibu hamil sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 52 ayat (2), yang menjamin perlindungan khusus bagi perempuan dalam situasi kehamilan. Dugaan pelanggaran makin kuat karena kasus tersebut juga bersinggungan dengan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur larangan terhadap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. Menurutnya Perempuan hamil adalah subjek yang wajib dilindungi secara hukum.[76]

[75] Lihat https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr7lrl0vrvjo, diakses pada 27 Februari 2026.
[76] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/warinussy-kematian-irene-sokoy-dan-bayinya-penuhi-unsur-

Tentang kasus kematian ibu dan anak di Papua, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2020 menunjukkan lonjakan angka kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*/MMR) dari 289 menjadi 565 per 100.000 kelahiran hidup dalam rentang waktu 2017–2020, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Menurut dr. Arsen S. Krey, dokter sekaligus aktivis kesehatan, hingga 2025, Papua masih tercatat sebagai wilayah dengan angka kematian ibu tertinggi di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Krisis serupa juga tampak pada angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR) di Papua yang berada di angka 38 kematian per 1.000 kelahiran hidup, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang mencapai 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup.[77]

Berkaitan dengan itu, Jurnal Perempuan mencatat, di sejumlah wilayah Papua, 14,63 hingga 60 persen puskesmas tidak memiliki dokter, dengan situasi terburuk terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, di mana 62,57 persen puskesmas beroperasi tanpa dokter. Hingga akhir 2024, tercatat lebih dari 120–250 puskesmas di Papua tidak memiliki tenaga dokter; sebuah kondisi yang jauh dari standar pelayanan kesehatan dasar.[78]

Laporan jurnalistik tentang lumpuhnya pelayanan kesehatan di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, adalah salah satu contoh nyata betapa buruknya tata kelola dan distribusi layanan kesehatan di wilayah Papua. Di sana, Rumah Sakit Elvrida Sara dan sejumlah puskesmas kekurangan obat serta tenaga medis, sehingga banyak warga tidak mendapat layanan dasar di tengah banyaknya penyakit dan meningkatnya angka kematian. Warga setempat menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap kondisi warganya. "Hari ini pemerintah hanya tutup telinga dan mata, sibuk dengan kepentingan sendiri, sementara masyarakat sangat membutuhkan pelayanan Kesehat-

pelanggaran-ham/, diakses pada 27 Februari 2026.

77 https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html; https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/dari-rahim-ke-statistik-krisis-kesehatan-ibu-dan-anak-di-tanah-papua, diakses pada 27 Februari 2026.

78 *Ibidem*.

an", ujar Remes Ubruangge, tokoh pemuda yang memimpin aksi pemalangan terhadap RS Elvrida Sara pada 28 Agustus 2025.[79]

Dari sejumlah ketimpangan yang ada, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura justru mengklaim telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 9 miliar di tahun 2025 untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal melalui 12 indikator pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, serta pelayanan usia produktif, lanjut usia, hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, tuberkulosis, dan pelayanan HIV serta screening kesehatan umum. Selain itu, pemerintah setempat juga akan menyiapkan Rp 1,8 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026, untuk pembiayaan kesehatan komplementer bagi orang asli Papua yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.[80]Selain itu, Gubernur Papua, Matius Fakhiri juga menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran dalam jajaran rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua. Langkah awal yang diambil adalah dengan merombak total manajemen rumah sakit yang selama ini bekerja tidak maksimal.[81]

Di titik ini, kita sampai pada suatu hipotesis bahwa persoalan kesehatan di Papua adalah bagian dari manisfestasi kekerasan struktural yang selama ini bekerja secara sistemik melalui tata kelola kesehatan yang timpang, birokrasi yang kaku, dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Dengan kata lain, layanan kesehatan tidak lagi mempertimbangkan aspek penyembuhan dan pemulihan kemanusiaan karena besarnya anggaran kesehatan yang dialokasikan tidak berbading lurus dengan realitas hidup orang Papua. Pelayanan kesehatan berubah barang dagangan yang memakai logika komodifinasi. Padahal, pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang secara moral dan politik harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara adil dan beradab. Patologi terbesar bukan pada

[79] Lihat https://jubi.id/lapago/2025/pelayanan-kesehatan-di-nduga-lumpuh-warga-palang-rs-elvrida-sara/, diakses pada 27 Februari 2026.
[80] Lihat https://jubi.id/penkes/2025/dinkes-jayapura-siapkan-rp18-miliar-untuk-biaya-kesehatan-oap/, diakses pada 27 Februari 2026.
[81] Lihat https://jubi.id/provinsi-papua/2025/gubernur-papua-komitmen-benahi-rumah-sakit-pemerintah-provinsi/, diakses pada 27 Februari 2026.

tubuh orang Papua, tetapi pada struktur kekuasaan yang mengatur hidup mereka. Itulah sebabnya Papua selalu menjadi kelompok marginal yang terus dibiarkan ada dalam kerentanan.

Oleh karena itu, kebijakan kesehatan di negeri ini perlu direformasi secara radikal. Layanan kesehatan yang ditopang oleh anggaran yang besar bukan lagi tentang bantuan karitatif pemerintah bagi rakyatnya, tetapi sebagai bagian dari pengakuan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Kesehatan adalah persoalan hak dan keadilan sosial, bukan sekadar layanan teknis. Setiap kebijakan yang dibuat harus merujuk pada kebutuhan masyarakat, bukan lahir sebagai reaksi terhadap kasus-kasus tertentu dengan memakai pola tambal-sulam. Dalam hal ini, menambah anggaran kesehatan tanpa menyentuh akar persoalan seperti birokrasi pelayanan yang korup maupun distribusi sumber daya yang tidak merata, justru memperluas kubangan luka di Papua. Yang lebih dibutuhkan hari ini adalah perubarah kebijakan dan komitmen politik yang berpihak pada orang asli Papua.

Penutup

Dari keseluruhan uraian, terlihat bahwa persoalan kesehatan di Tanah Papua tidak dapat direduksi menjadi sekadar masalah layanan medis atau keterbatasan fasilitas. Tingginya angka HIV/AIDS, meluasnya malaria, serta tingginya kematian ibu dan anak menunjukkan adanya pola yang konsisten: kerentanan kesehatan selalu berkelindan dengan ketimpangan struktural yang lebih luas.

Dalam konteks ini, apa yang disebut sebagai "patologi" tidak lagi semata-mata berada pada tubuh manusia, tetapi justru pada struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan mereka. Ketika kebijakan pembangunan bersifat eksploitatif, distribusi sumber daya tidak adil, dan layanan publik dikelola secara tidak akuntabel, maka penyakit dan kematian menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Inilah yang oleh Paul Farmer disebut sebagai kekerasan struktural—sebuah kekerasan yang tidak selalu tampak, tetapi bekerja secara sistemik dan mematikan.

Situasi ini menuntut perubahan cara pandang sekaligus perubahan kebijakan yang mendasar. Kesehatan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai layanan teknis atau proyek anggaran semata, melainkan sebagai hak asasi yang harus dijamin secara adil dan bermartabat. Tanpa keberanian untuk membenahi akar persoalan—mulai dari tata kelola pemerintahan, arah pembangunan, hingga distribusi sumber daya—berbagai intervensi yang dilakukan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh inti masalah.

Pada akhirnya, wajah kesehatan di Papua adalah cermin dari wajah kekuasaan itu sendiri. Jika kekuasaan terus berjalan tanpa keberpihakan pada kemanusiaan, maka krisis kesehatan akan terus berulang. Sebaliknya, jika kekuasaan diarahkan untuk melindungi kehidupan, menjamin keadilan, dan menghormati martabat manusia, maka kesehatan tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua.

Daftar Pustaka

BBC News Indonesia. (2025, November 22). Ibu dan Bayi di Kandungan Meninggal Usai Ditolak Empat Rumah Sakit: Inilah Bobrok Pelayanan Kesehatan di Papua. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr7lrl0vrvjo

Badan Pusat Statistik. (2020). Angka Kematian Ibu (AKI) Maternal Mortality Rate (MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi 2020. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Komisi IX DPR RI. (2025). *Strategi Eliminasi Malaria di Papua*. Badan Keahlian DPR RI.

Djaafara, B. A., et al. (2025). Spatiotemporal Heterogeneity in Malaria Transmission Across Indonesia: Analysis of Routine Surveillance Data 2010–2019. *BMC Medicine, 23*, 136. https://doi.org/10.1186/s12916-025-03902-9

Engels, F. (1880/2000). Sosialisme Utopis dan Sosialisme Ilmiah (T. Sprague, Trans.). *Marx & Engels Collected Works* (Vol. 24, pp. 281–325). https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1880/utopi-ilmu/index.htm

Farmer, P. (2003). *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and The New War on The Poor*. University of California Press.

Jubi. (2025). Dari 18.892 Pasien HIV/AIDS di Provinsi Papua, Hanya 4.192 Jalani Pengobatan ARV. https://jubi.id/penkes/2025/dari-18-892-pasien-hiv-aids-di-provinsi-papua-hanya-4192-jalani-pengobatan-arv/

Jubi. (2025). Jangan Tutup Mata, Permasalahan HIV/AIDS di Papua Butuh Aksi Nyata. https://jubi.id/opini/2025/jangan-tutup-mata-permasalahan-hiv-aids-di-papua-butuh-aksi-nyata/

Jubi. (2025). Kematian Irene Sokoy dan Bayinya Penuhi Unsur Pelanggaran HAM. https://jubi.id/penkes/2025/warinussy-kematian-irene-sokoy-dan-bayinya-penuhi-unsur-pelanggaran-ham/

Jubi. (2025). Kasus HIV/AIDS di Kepulauan Yapen Terus Meningkat. https://jubi.id/penkes/2025/kasus-hiv-aids-di-kepulauan-yapen-terus-meningkat/

Jubi. (2025). KPA Yapen Gandeng Komunitas Peduli HIV/AIDS Perkuat Pencegahan di Sekolahan. https://jubi.id/penkes/2025/kpa-yapen-gandeng-komunitas-peduli-hiv-aids-perkuat-pencegahan-di-sekolahan

Jubi. (2025). Pelayanan Kesehatan di Nduga Lumpuh, Warga Palang RS Elvrida Sara. https://jubi.id/lapago/2025/pelayanan-kesehatan-di-nduga-lumpuh-warga-palang-rs-elvrida-sara/

Jubi. (2025). Dinkes Jayapura Siapkan Rp1,8 Miliar untuk Biaya Kesehatan OAP. https://jubi.id/penkes/2025/dinkes-jayapura-siapkan-rp18-miliar-untuk-biaya-kesehatan-oap/

Jubi. (2025). Gubernur Papua Komitmen Benahi Rumah Sakit Pemerintah Provinsi. https://jubi.id/provinsi-papua/2025/gubernur-papua-komitmen-benahi-rumah-sakit-pemerintah-provinsi/

Laurents, & Sadina. (2025). Deforestasi di Papua: Dampak Lingkungan dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia. *Global Research and Innovation Journal, 1*(2), 1026–1032. https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/255

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1988/2024 tentang Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia Tahun 2025–2045.

Rumaseb, E., et al. (2025). Pengaruh Gaya Hidup, Lingkungan dan Kebiasaan Masyarakat terhadap Penyebaran Malaria di Kampung Dosay, Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, 5*(3), 616–626. https://doi.org/10.55606/jikki.v5i3.8350

Suara Merauke. (2025). Kasus HIV/AIDS Merauke Meningkat, Perlu Langkah Preventif. https://suara.merauke.go.id/post/4331/kasus-hivaids-merauke-meningkat-perlu-langkah-preventif.html

Tadah News. (2025). Data KPA Papua Tengah: Kasus HIV/AIDS Meningkat. https://www.tadahnews.com/2025/08/data-kpa-papua-tengah-freny-anouw-kasus.html

The Conversation Indonesia. (2026). Sulitnya Memberantas Malaria di Tanah Papua, Apa Masalahnya? https://theconversation.com/sulitnya-memberantas-malaria-di-tanah-papua-apa-masalahnya-254933

World Mosquito Program. (2025). World Mosquito Day 2025: Global Health Crisis. https://id.worldmosquitoprogram.org/news-stories/world-mosquito-day-2025-global-health-crisis

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. (2026). Catatan Tahunan Pusaka 2025: Deforestasi di Tanah Papua Capai 45 Ribu Hektare. https://jubi.id/lingkungan/2026/catatan-tahunan-pusaka-2025-deforestasi-di-tanah-papua-capai-45-ribu-hektare/

Jurnal Perempuan. (2025). Dari Rahim ke Statistik: Krisis Kesehatan Ibu dan Anak di Tanah Papua. https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/dari-rahim-ke-statistik-krisis-kesehatan-ibu-dan-anak-di-tanah-papua

Kronik Kesehatan dan HIV AIDS

08 Januari

Untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM melalui 12 indikator pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Jayapura akan mengalokasikan dana sebesar Rp 9 miliar tahun ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura, Edward Manik Sihotang, saat ditemui di Kantor Dinkes Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu (8/01). Edward menyebut, pihaknya diwajibkan memenuhi target pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura melalui 12 indikator pelayanan kesehatan, yakni pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, serta pelayanan usia produktif pada umur 15 sampai 29 tahun, lanjut usia (lansia), hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, tuberkulosis (TBC), dan pelayanan HIV serta screening kesehatan umum. "*Semua indikator itu wajib diselesaikan 100 persen atau tuntas paripurna, itu yang kami prioritaskan dalam anggaran untuk membiayai baik puskesmas dan Dinkes, biayanya sekitar Rp9 miliar untuk tahun 2025. Itu wajib kami laporkan secara online kepada Kementerian Dalam Negeri sebanyak 4 kali setiap tahun,"* katanya. Ia mengatakan mulai Januari 2025, sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Jayapura memulai pelayanan kesehatan kepada masyarakat menggunakan biaya bantuan operasional kesehatan (BOK) dari pusat, dan dana SPM dari Dinkes (https://jubi.id/mamta/2025/dinkes-alokasikan-dana-spm-rp9-miliar-bagi-22-puskesmas-di-kabupaten-jayapura/).

11 Februari

Dinas Kesehatan atau Dinkes Kepulauan Yapen mengintensifkan pemantauan dan penanggulangan penularan HIV/AIDS. Upaya tersebut menyusul makin meningkatnya warga yang terinfeksi virus mematikan tersebut. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kepulauan Yapen Yohanes S Woisiri mengatakan berdasarkan pendataan terakhir mereka, terdapat sekitar 2.000 orang dengan HIV/AIDS di kabupaten tersebut. Angkanya meningkat sebanyak 132 orang daripada

pendataan sebelumnya, yakni sekitar 1.900 orang. *"Pendataan terbaru pada September 2024, terdapat 2.036 orang dengan HIV/AIDS. Pendataan sebelumnya pada Maret 2024, terdapat 1.904 orang,"* kata Woisiri, Selasa (11/02). Dia melanjutkan sebagian besar atau hampir 90 persen orang dengan HIV/AIDS tersebut ialah warga asli Papua. Mereka rata-rata berdomisili di Kota Serui, Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Anotaurei (https://jubi.id/penkes/2025/132-kasus-baru-hiv-aids-dalam-6-bulan-di-kepulauan-yapen/).

15 Februari

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan hingga kini terdapat 18.892 pasien kasus aktif HIV/AIDS, dan yang menjalani pengobatan Antiretroviral atau ARV berjumlah 4.192 pasien. Hal itu disampaikan Kepala Seksi HIV/AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Rindang Pribadi Marahaba di Kota Jayapura, Papua, pada Jumat (14/2/2025). *"Yang rutin ambil obat ARV 4.192 pasien,"* katanya. Rindang mengatakan pasien yang menjalani pengobatan ARV tersebar di Kota Jayapura (1.741 orang), Kabupaten Jayapura (1.189 orang), Kabupaten Biak Numfor (470 orang), Kabupaten Kepulauan Yapen (462 orang). Pasien yang menjalani pengobatan ARV juga berada di Kabupaten Keerom (97 orang), Kabupaten Waropen (71 orang), Kabupaten Supiori (71 orang), Kabupaten Sarmi (63 orang), dan Kabupaten Mamberamo Raya (28 orang). Rindang menyebutkan setidaknya sudah 144 pelayanan ARV yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, ada 59 layanan tes HIV. *"Layanan pengobatan sudah sampai ke Puskesmas,"* ujarnya (https://jubi.id/penkes/2025/dari-18-892-pasien-hiv-aids-di-provinsi-papua-hanya-4192-jalani-pengobatan-arv/).

03 Maret

Pemerintah perlu waspada dan mengantisipasi terkait kemungkinan penghentian pasokan obat-obatan untuk kesehatan yang bersumber dari pendanaan Amerika Serikat. Terutama untuk ketersediaan obat-obatan untuk penderita HIV-AIDS dan juga TBC. Hal itu diungkapkan, Bruder Agustinus Adil OFM sebagai pengelola rumah singgah Surya Kasih di

Waena, Sabtu (01/03). Dia mengungkapkan produksi obat-obat untuk menghambat pertumbuhan virus, HIV-AIDS khususnya, sebenarnya sudah bisa dilakukan di dalam negeri. Hanya saja untuk pasukan bahan bakunya tetap dari Amerika Serikat. *"Sebenarnya produksi di dalam negeri ini sudah bisa, tetapi bahan bakunya masih dari luar, yang buat bahan baku itu siapa, itu Amerika,"* ungkapnya. Dia menyampaikan kekhawatirannya terhadap penanganan HIV AIDS yang terjadi saat ini. Baik secara nasional Indonesia, maupun secara khusus di Provinsi Papua. Apabila obat HIV AIDS ini dihentikan, maka itu akan mengancam populasi manusia, karena sudah pasti pertumbuhan kasus akan lebih meningkat dan sulit diatasi. Karena itu, dia berharap walaupun kebijakan Amerika Serikat itu belum benar-benar dilakukan, tetapi pernyataan yang sudah disampaikan oleh Donald Trump itu wajib diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dan juga perlu mencari alternatif supaya penanganan HIV-AIDS dan juga TBC ini tidak terhenti karena kurangnya pasukan obat (Cenderawasih Pos).

15 Maret

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, dari 13 puskesmas di Kota Jayapura, Puskesmas Elly Uyo Polimak memiliki kasus HIV paling tinggi pada tahun 2024. *"Catatan kami ada sebanyak 84 kasus HIV di Puskesmas Elly Uyo pada tahun [2024] lalu. Angka itu yang paling tinggi dari catatan sebaran kasus HIV di puskesmas lainnya,"* katanya melalui pesan instan kepada Jubi di Kota Jayapura pada Sabtu (15/03). Sementara itu, puskesmas lainnya dengan jumlah kasus HIV berturut-turut, sebagai berikut, Puskesmas Waena (79 kasus), Puskesmas Jayapura Utara (58 kasus), Puskesmas Abepura (51 kasus), Puskesmas Imbi Kota (46 kasus), Puskesmas Yoka (45 kasus), Puskesmas Abepante (38 kasus), Puskesmas Kotaraja (37 kasus), Puskesmas Tanjung Ria (33) kasus, Puskesmas Twano (30 kasus), dan Puskesmas Emereuw dengan 29 kasus. *"Selanjutnya, Puskesmas Hamadi 23 kasus, Puskesmas Koya Barat 14 kasus, Puskesmas Skow sebanyak lima kasus HIV. Jumlah kasus [HIV] terendah tahun 2024 lalu adalah yang terdata dari Puskesmas Skouw,"* katanya (https://jubi.id/penkes/2025/ini-puskesmas-dengan-kasus-hiv-tertinggi-di-kota-jayapura/).

17 Maret

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, mencatat perkembangan penyakit malaria dari tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang menjelaskan jumlah pasien malaria ditahun 2023 mencapai 45.462, dari jumlah tersebut paling banyak didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 26.000 sementara perempuan 19.000 pasien. *"Sementara data ditahun 2024 dari Januari-Desember tercatat angka kasus malaria meningkat 50.529 pasien,"* katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (18/03) kemarin. Diakuinya, dari jumlah tersebut pasien laki-laki lebih banyak yakni 30.000 pasien dan perempuan 20.000 lebih pasien. Upaya ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, kalau dilihat angka tertinggi terdapat di Distrik Sentani Barat, contohnya di Kampung Dosai, kurang lebih ada 5.550 pasien. Sementara didaerah lainnya seperti Yapsi, Lere dan daerah lainnya masih jauh dari kasus malaria di Distrik Sentani Barat, sementara jumlah penduduk di Sentani Barat justru tidak sebanyak daerah-daerah tersebut (Cenderawasih Pos).

17 April

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga 31 Desember 2024 secara keseluruhan tercatat ada 21.129 kasus HIV/AIDS di Papua. Dari angka tersebut tercatat pengidap HIV/AIDS berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.644 orang sedangkan untuk laki-laki berjumlah 9.463 orang dan tidak di ketahui 22 orang (Cenderawasih Pos).

23 Mei

Sebanyak 55 Orang masyarakat Papua meninggal dunia dari distrik Nipsan dan Distrik Talambo, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kematian ini bermula dari sejumlah penyakit yang diidap oleh masyarakat di dua distrik tersebut. Sebanyak 55 orang ini meninggal dalam rentang waktu sangat singkat yaitu dari bulan Maret 2025 hingga bulan Mei yang sedang berjalan. Jumlah ini dihimpun Jubi dari tim medis yang terdiri dari staf Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Kepala Puskesmas Nipsan, Kepala Pustu Talambo, intelektual dan

masyarakat dari kedua distrik yang tergabung dalam TIM "Forum Peduli Kemanusiaan distrik Nipsan dan Talambo" Kabupaten Yahukimo. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Kamis (22/05) di Kota Dekai, Jubi melakukan konfirmasi atas informasi yang telah dihimpun. Kepala Pusat Kesehatan Masyarkat (Puskesmas) Nipsan, Hosea Wesabla membenarkan informasi tersebut. Wesabla mengatakan ada sejumlah penyakit yang menyebabkan 55 orang masyarakat meninggal dunia. Kejadian itu terjadi dalam rentang waktu dua bulan dua minggu sejak Maret hingga Mei 2025 (https://jubi.id/penkes/2025/dalam-2-bulan-55-orang-meninggal-dunia-di-dua-distrik-di-kabupaten-yahukimo-karena-sejumlah-penyakit/).

02 Juni

Mantan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Papua dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, kurangnya program pencegahan selama lima tahun terakhir menyebabkan lonjakan signifikan kasus baru, yang mencapai lebih dari 56 ribu kasus hingga akhir 2024 (Cenderawasih Pos).

05 Juni

Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua mencatat total jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA di sana yang belum mendapat pengobatan hingga 31 Maret 2025 sebanyak 2.212 orang. Kepala Seksi (Kasie) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kepulauan Yapen, Yohanes S Woisiri mengatakan dari jumlah itu, Odha yang belum mendapat pengobatan didominasi oleh orang asli Papua. Data terkahir Dinkes Kepulauan Yapen mencatat, Odha orang asli Papua di wilayah itu ada 2.094, dan 1.430 di antaranya telah mendapat pengobatan. Masih ada 664 Odha lainnya yang belum diobati. Sementara jumlah Odha non asli Papua 118 orang. Yang telah diobati 73 orang dan yang belum diobati 45 orang. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kasus Odha tertinggi di Kebupaten

Kepulaun Yapen adalah orang asli Papua (https://jubi.id/penkes/2025/orang-asli-papua-dominasi-kasus-odha-di-kepulauan-yapen/).

21 Juni

Manajemen Rumah Sakit Dian Harapan atau RSDH Waena, Kota Jayapura, Papua akan menerapkan pengantaran obat ke rumah pasien. Pernyataan itu disampaikan Wakil Direktur Umum RSDH, Dr. drg. Aloysius Giyai, di sela-sela peresmian Gedung Santo Pius, kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN KRIS di Rumah Sakit Dian Harapan, Kota Jayapura Papua, Sabtu (21/06). Giay mengatakan, kedepan pasien RSDH tidak perlu lagi menunggu lama untuk mengambil obat di apotek rumah sakit. Sebab, pihak rumah sakit akan mengantar obat ke rumah pasien. *"Kekurangan [di rumah sakit] sedikit kami di RSDH ini respons. Waktu tunggu di unit gawat darurat atau UGD dan farmasi. Kami direksi dan Yayasan RSDH kedepan bergerak cepat, pengambilan obat yang menunggu lama tidak perlu lagi, karena RSDH akan mengantarkan ke masing-masing rumah pasien,"* kata Aloysius Giay. Menurutnya, kedepan pasien yang berobat di RSDH tidak harus menunggu pemanggilan atau antrean untuk mengambil obat. Mereka akan diarahkan untuk pulang, sebab pihaknya akan mengantarkan obat ke rumah pasien. *"Pasien yang datang untuk berobat, setelah dapat edukasi mekanisme waktu minum obat, dan cara minum obat langsung pulang. Nanti pihak RSDH akan antar. Jadi mekanisme pengantaran akan diatur,"* ujarnya (https://jubi.id/mamta/2025/rsdh-akan-terapkan-pengantaran-obat-ke-rumah-pasien/).

20 Juli

Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menggandeng komunitas peduli HIV/AIDS memperkuat upaya pencegahan penyebaran Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS lewat sosialisasi. Sasaran sosialisasi adalah siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMA/SMK pada tujuh sekolah di wilayah itu. Sosialisasi digelar pada 15 Juli 2025 sampai 19 Juli 2025. Sekolah yang menjadi sasaran adalah SMA YPK Penabur Serui, SMA Negeri 1 Serui, SMA Yapis

Serui, SMA PGRI Serui, SMK Muhammadiyah Serui, SMA Kasih Bangsa Serui, SMKS YPK TIK Serui. Sekretaris KPA Kabupaten Kepulauan Yapen, Andi Raya Sarjatno mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyakarat, termasuk siswa tujuh SMA/SMK di sana, sebagai gerakan pencegahan cepat atas meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di kabupaten itu (https://jubi.id/penkes/2025/kpa-yapen-gandeng-komunitas-peduli-hiv-aids-perkuat-pencegahan-di-sekolahan/).

21 Juli

Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menyatakan kasus HIV/AIDS di wilayah itu terus meningkat. Data Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat hingga 30 Juni 2025, kasus HIV/AIDS di sana mencapai 2.767 kasus atau bertambah 96 kasus dari jumlah sebelumnya 2.761 kasus pada 31 Maret 2025. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kepulauan Yapen, Yohanes S Woisiri mengatakan, pihaknya menghimpun data dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada 16 distrik di Kepulauan Yapen. Dari data itu, diketahui kasus HIV/AIDS tertinggi ada di Distrik Anotaurei, yaitu 1. 816 kasus. Angka itu meningkat dari jumlah sebelumnya 1.768 kasus. Distrik dengan kasus HIV/AIDS tertinggi kedua adalah Yapen Selatan dengan 551 kasus itu meningkat dari jumlah sebelumnya 540 kasus, disusul Distrik Angkaisera dengan 95 kasus dan Distrik Yapen Utara 45 kasus (https://jubi.id/penkes/2025/kasus-hiv-aids-di-kepulauan-yapen-terus-meningkat/).

24 Agustus

- Ketua Komisi Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Papua Tengah. Freny Anow mengatakan triwulan pertama tahun 2025 di Papua Tengah angka HIV AIDS mencapai 23.188 kasus yang tersebar di delapan Kabupaten. KPA berinisiatif membuat modul pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah sekolah-sekolah tentang bahaya HIV AIDS. Hal itu disampaikan Ketua KPA Freny Anouw kepada Media di Ballroom, Kantor Gubernur Bandara Lama, Distrik Nabire,

Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Sabtu (23/08). Freny Anouw mengatakan virus yang sedang tersebar ini yang paling tinggi adalah di Kabupaten Nabire mencapai angka 10.705 kasus. Sedangkan urutan yang kedua Kabupaten Mimika mencapai angka 8.021 kasus HIV AIDS. Dua Kabupaten ini menjadi penyumbang utama kasus HIV di Papua Tengah. *"Kalau Kabupaten Deiyai 2.063 kasus, Dogiyai 689 kasus, Intan Jaya 19 kasus, Puncak 67 kasus, Puncak Jaya 949 kasus dan Paniai 2.480 kasus. Jumlahnya tadi sudah disebutkan itu 23.188 kasus HIV AIDS di Papua Tengah,"* katanya (https://www.tadahnews.com/2025/08/data-kpa-papua-tengah-freny-anouw-kasus.html).

- Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus Sumule mengatakan kalau berbicara HIV AIDS itu bicara tentang empat hal yaitu absensia, be faithfull, kondom, dan obat. Penularan HIV AIDS di Papua Tengah, 93 persen karena hubungan seks. Hal itu disampaikan dr. Silwanus Sumule di Ballroom Kantor Gubernur, Bandara Lama, Nabire, Papua Tengah pada Sabtu (23/08). Silwanus mengatakan selain itu HIV ditularkan melalui obat-obatan yaitu pengguna-pengguna narkoba, transfusi darah dan penularan dari ibu ke bayi melalui air susu ibu. Menurutnya seorang ibu hamil yang positif HIV, jika tidak ada intervensi medis di situ, maka itu dengan pasti sekitar 50 persen akan menularkan ke bayinya data membuktikan hal itu. *"Apa yang kita harus kita lakukan, saya pikir moment pada hari ini adalah hal yang sangat pas melalui FGD ini dapat menyusun satu modul pembelajaran untuk edukasi dan sosialisasi HIV AIDS kepada pelajar,"* katanya (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dr-silwanus-sumule-93-persen-penularan-hiv-aids-karena-hubungan-seks/).

29 Agustus

Pelayanan kesehatan di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah dilaporkan lumpuh. Rumah Sakit Elvrida Sara dan sejumlah puskesmas kekurangan obat serta tenaga medis, membuat banyak warga tidak mendapat layanan dasar. Tokoh pemuda Nduga, Remes Ubruangge, menegaskan pihaknya telah menutup RS

Elvrida Sara sejak tiga hari lalu. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum memberi tanggapan. *"Kami sudah tutup RS Elvrida Sara sampai hari ketiga. Inipun Pemerintah Kabupaten Nduga, dinas terkait tidak menanggapi maksud dan tujuan kami,"* ujarnya, Rabu (28/08). Remes menyebut pemalangan ini bertujuan mendesak Pemkab Nduga segera turun tangan. *"Saya berdiri di depan salah satu puskesmas di Kenyam, agar persoalan kesehatan segera ditangani. Ada banyak penyakit yang muncul, angka kematian pun meningkat karena warga tidak bisa berobat,"* katanya. Ia menilai pemerintah Nduga menutup mata terhadap kondisi warganya. *"Hari ini pemerintah hanya tutup telinga dan mata, sibuk dengan kepentingan sendiri, sementara masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan,"* tegasnya (https://jubi.id/lapago/2025/pelayanan-kesehatan-di-nduga-lumpuh-warga-palang-rs-elvrida-sara/).

16 September

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya, DPR Papua Tengah menekankan pentingnya pembangunan rumah singgah sebagai program prioritas daerah. Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene, mendorong agar program tersebut masuk dalam APBD Induk 2026, terutama untuk Kabupaten Nabire dan Mimika. Hal itu disampaikan Anis Labene usai melakukan kunjungan kerja ke dinas ke mitra (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Papua Tengah). Rumah singgah ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. *"Saya harap perencanaan di APBD Induk 2026, semoga rumah singgah ini menjadi prioritas dinas sosial, khususnya untuk dua daerah terbuka, seperti Kabupaten Nabire dan Mimika,"* kata Labene kepada Jubi di Nabire, Papua Tengah, (16/09). Komisi V menilai kebutuhan rumah singgah sudah sangat dibutuhkan di dua kabupaten, Timika dan Nabire, Di dua kabupaten ini, banyak ditemui anak-anak muda yang dibawa umur sudah banyak yang terjerumus dengan kenakalan remaja, dengan hal-hal yang negatif (https://jubi.id/tanah-papua/2025/komisi-v-dpr-papua-tengah-dorong-pembangunan-rumah-singgah-di-nabire-dan-timika/).

03 November

Gubernur Papua, Matius Fakhiri menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran dalam jajaran rumah sakit (RS) milik Pemerintah Provinsi Papua. Langkah awal yang diambil adalah dengan merombak total manajemen rumah sakit yang selama ini bekerja tidak maksimal. Gubernur Fakhiri menyatakan selama dirinya melakukan kampanye banyak terdapat masalah serius pada manajemen RS pemerintah, sehingga menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. *"Yang saya tahu dan saya dengar, manajemen RS pemerintah yang buruk. Tentunya itu bagian yang mau Pemerintah Provinsi benahi,"* kata Gubernur Fakhiri di Kota Jayapura, Senin (03/11). Menurut Fakhiri, saat ini dirinya sedang menunggu hasil audit yang sementara berjalan. Ia memastikan bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, akan ada direktur rumah sakit milik pemerintah yang diganti. *"Pergantian ini tidak hanya menyasar pimpinan tertinggi (direktur), tetapi juga merombak total semua manajemen sampai dengan tingkat bawah,"* ucapnya. Fakhiri menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Ia mengkritik praktik yang mempersulit warga dengan berbagai persyaratan administrasi (https://jubi.id/provinsi-papua/2025/gubernur-papua-komitmen-benahi-rumah-sakit-pemerintah-provinsi/).

25 November

- Advokat dan pembela HAM, Yan Christian Warinussy menilai kematian Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya di Jayapuram Papua pada Senin (17/11) sebagai peristiwa yang memenuhi unsur pelanggaran HAM. Ia menyebut kasus yang diduga melibatkan kelalaian tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit itu sebagai "kematian sia-sia" yang melanggar hak hidup ibu hamil sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. *"Kasus ini jelas melanggar hak hidup seorang ibu dan anak dalam kandungan,"* tegas Warinussy. Ia merujuk langsung pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan khusus bagi perempuan dalam situasi

kehamilan. Warinussy menambahkan bahwa dugaan pelanggaran makin kuat karena kasus ini juga menyentuh unsur Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) UU yang sama, yang mengatur larangan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. *"Perempuan hamil adalah subjek yang wajib dilindungi secara hukum. Kematian ini menunjukkan kelalaian yang serius,"* ujarnya (https://jubi.id/penkes/2025/warinussy-kematian-irene-sokoy-dan-bayinya-penuhi-unsur-pelanggaran-ham/).

- Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan menurunkan tim pemeriksaan khusus yang beranggotakan delapan orang, untuk menginvestigasi meninggalnya seorang ibu hamil di Papua, bersama bayi dalam kandungannya pada pekan lalu. Tim investigasi itu akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di lokasi kejadian, dimulai pada Rabu, 26 November 2025. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rolekson Simatupang menjelaskan, kedatangan timnya merupakan tindak lanjut dari permintaan informasi dari inspektorat provinsi dan Gubernur Papua terkait kasus kematian ibu hamil. *"Kami sudah banyak menerima informasi, namun kami perlu melakukan klarifikasi langsung kepada Gubernur. Besok kami baru akan melakukan pemeriksaan, ada delapan orang yang akan turun untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,"* kata Rolekson di Kota Jayapura, Selasa (25/11) (https://jubi.id/polhukam/2025/itjen-kemendagri-turunkan-tim-khusus-investigasi-kematian-ibu-hamil-di-papua/).
- Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Jayapura, Papua menyiapkan Rp1,8 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026, untuk pembiayaan kesehatan komplementer bagi orang asli Papua atau OAP. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote mengatakan anggaran itu bersumber dari dana Otonomi Khusus atau Otsus. *"[Anggaran kesehatan] komplementer, kami siapkan Rp1,8 miliar. Kami mulai start tahun depan,"* kata Anton Mote usai pertemuan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari di Doyo Baru, Distrik Waibu, Senin

(24/11). Menurut Mote, ada anggaran khusus untuk biaya kesehatan masyarakat asli Papua, sehingga patut dipertanyakan apabila hingga kini orang asli Papua masih membayar biaya saat berobat (https://jubi.id/penkes/2025/dinkes-jayapura-siapkan-rp18-miliar-untuk-biaya-kesehatan-oap/).

01 Desember

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura, Papua menyatakan HIV/AIDS masih menjadi masalah serius di wilayah itu. Data Pemkab Jayapura mencatat, ada 5.995 orang terinveksi HIV/AIDS di sana, 740 di antaranya meninggal dunia. Pelaksana tugas Sekda Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, penyebaran HIV/AIDS di wilayah itu berada di semua distrik. Pernyataan itu disampaikan Yusuf Yambe Yabdi saat membacakan sambutan Bupati Jayapura, Yunus Wonda pada peringatan hari AIDS sedunia, di lampu merah Pasar Lama, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (01/12). *"Kasus HIV/AIDS sudah tersebar di seluruh distrik. [Yang terinfeksi] tidak hanya kelompok usia dewasa, juga anak-anak muda,"* kata Yusuf Yambe Yabdi. Menurutnya, tantangan utama penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura adalah rendahnya layanan komprehensif dan keberlanjutan pengobatan, serta masih kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. Pemkab Jayapura berupaya memperkuat layanan, mulai dari akses pengobatan sedini mungkin, pendampingan, hingga pemenuhan gizi bagi ODHA (https://jubi.id/penkes/2025/penderita-hiv-aids-di-kabupaten-jayapura-capai-5-985-kasus/).

02 Desember

Pihak DPR Kabupaten Jayapura meminta para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, memperbaiki sistem rujukan antar fasilitas kesehatan. Perbaikan sistem rujukan itu harus meliputi mekanisme rujukan dari tingkat puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Yowari di Kabupaten Jayapura, hingga rujukan ke rumah sakit lainnya. Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar menyatakan permintaan bagi para pemang-

ku kepentingan pelayanan kesehatan untuk memperbaiki sistem rujukan antar fasilitas kesehatan itu telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPR Kabupaten Jayapura dengan Direktur RUSD Yowari di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, pada Selasa (25/11) pekan lalu. Menurut Akbar, Rapat Dengar Pendapat pekan lalu itu menyoroti sistem rujukan antar fasilitas kesehatan yang masih berjalan secara manual. Sistem rujukan yang dijalankan secara manual itu dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang ibu dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia saat dirujuk RSUD Yowari ke fasilitas kesehatan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. *"Rapat Dengar Pendapat yang kemarin bertepatan dengan ada aksi demonstrasi oleh masyarakat soal kejadian di RSUD Yowari. Akhirnya kami diskusi bersama untuk mencari solusi terbaik,"* ujar Akbar di Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Sentani, Selasa (02/12) (https://jubi.id/jayapura-membangun/2025/dpr-kabupaten-jayapura-minta-sistem-rujukan-antar-fasilitas-kesehatan-diperbaiki/).

03 Desember

Wakil Ketua III DPR Kabupaten Jayapura dari Fraksi Kelompok Khusus, Nelson Yohosua Ondi menyatakan pihaknya meminta alokasi Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua senilai Rp 10 miliar untuk Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Jayapura 2026 dialihkan. Fraksi Kelompok Khusus menilai manajemen RSUD Yowari tidak layak mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Otsus Papua. Menurut Nelson Yohosua Ondi, pada RAPBD Kabupaten Jayapura 2026, RSUD Yowari mendapat alokasi kucuran Dana Otsus Papua senilai Rp 10 miliar. Fraksi Kelompok Khusus DPR Kabupaten Jayapura meminta alokasi itu dialihkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, agar dapat dikucurkan kepada semua puskesmas di Kabupaten Jayapura. Ondi menegaskan permintaan itu telah menjadi rekomendasi resmi Fraksi Kelompok Khusus dalam pandangan akhir fraksi pada sidang paripurna DPR Kabupaten Jayapura tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang APBD 2026 pada 28 November 2025

(https://jubi.id/jayapura-membangun/2025/fraksi-kelompok-khusus-dpr-kabupaten-jayapura-minta-alokasi-dana-otsus-untuk-rsud-yowari-dialihkan/).

11 Desember

Salah satu pemateri dalam diskusi yang diselenggarakan BEM Uncen Jayapura, drg. Aloysius Giyai dalam pemaparannya menyatakan ketimpangan akses layanan kesehatan memperburuk kondisi di masyarakat Papua. Seminar itu digelar di Auditorium Uncen, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (11/12). Aloysius Giyai mengatakan, ketimpangan sosial dan ekonomi berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketimpangan tersebut pun menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penyakit dan lemahnya penanganan kesehatan di berbagai wilayah. Menurutnya, kesenjangan terjadi karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses terhadap teknologi, pendidikan, maupun fasilitas kesehatan yang memadai (https://jubi.id/penkes/2025/ketimpangan-akses-layanan-kesehatan-perburuk-kondisi-masyarakat-papua/).

BAB VIII

"SEKOLAH DIBAKAR, GURU DITEMBAK": POLITIK KEAMANAN DAN KRISIS KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI TANAH PAPUA

(Oleh Apriani Anastasia Amenes)

Pendahuluan

"Sekolah dibakar, guru ditembak." Ungkapan ini bukan sekadar metafora yang menggambarkan kekerasan, melainkan realitas yang berulang kali terjadi dalam konflik bersenjata di Tanah Papua. Sepanjang tahun 2025, media massa lokal maupun nasional mencatat dan mendokumentasikan berbagai peristiwa konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti perselisihan politik, ekonomi, identitas, serta dinamika kekuasaan yang telah berlangsung lama. Penggunaan kekerasan dalam konflik ini semakin memperburuk situasi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat sipil yang hidup di wilayah konflik.

Kronik konflik bersenjata sepanjang tahun 2025 menunjukkan terjadinya berbagai kasus penembakan, pembakaran, pembunuhan, serta perebutan dan pendudukan fasilitas umum. Konflik tersebut membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat sipil, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga terhambatnya akses terhadap layanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, pangan, dan lingkungan hidup. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil sering kali menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampak dari kekerasan yang terjadi di tengah pertarungan antara aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata.

Namun demikian, membicarakan Papua dengan segala dinamika konflik yang terjadi di dalamnya sering kali tidak dianggap sebagai isu yang penting bagi sebagian orang. Ada kecenderungan untuk bersikap apatis dan menganggap persoalan Papua hanya menjadi perhatian para aktivis hak asasi manusia, aktivis lingkungan, atau organisasi masyarakat sipil. Padahal, di balik sikap masa bodoh tersebut terdapat realitas kemanusiaan yang sangat serius: rumah-rumah dibakar, sekolah dan fasilitas kesehatan rusak, serta masyarakat terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di tempat lain, bahkan hingga ke hutan-hutan belantara demi menghindari kekerasan bersenjata.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Tanah Papua bukan sekadar peristiwa kekerasan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas. Eskalasi konflik antara pasukan keamanan Indonesia (TNI–POLRI) dan kelompok bersenjata Papua, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), terus menghadirkan ancaman serius bagi keamanan manusia di Papua. Jaleswari Pramodhawardani (2025) melihat bahwa konflik Papua bukan hanya berkaitan dengan kekerasan atau perebutan sumber daya semata, tetapi merupakan manifestasi dari struktur kuasa yang lebih dalam, di mana kepentingan politik dan ekonomi sering kali berjalan beriringan di balik narasi pembangunan dan stabilitas.

Bertolak dari situasi tersebut, tulisan ini membahas konflik bersenjata di Tanah Papua dengan menyoroti dinamika pertarungan antara pasukan keamanan negara dan kelompok bersenjata Papua, serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya bagi masyarakat sipil. Analisis ini juga memetakan lokasi konflik, faktor-faktor yang memicu kekerasan, aktor-aktor yang terlibat, serta berbagai bentuk stigmatisasi yang muncul di antara pihak-pihak yang berkonflik.

TNI–POLRI VS TPNPB: "Siapa yang Menang?"

Dalam dinamika konflik yang berlangsung di Tanah Papua, pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu konsekuensi yang paling menonjol. Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari (2025) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 situasi HAM di Tanah Papua, khususnya yang berkaitan dengan Orang Asli Papua, masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Berbagai laporan dari lembaga advokasi HAM menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara, seperti penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan ruang sipil (Wonda & Nope, 2026). Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan aparat TNI–POLRI di Papua telah terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir.

Meenakshi Ganguly, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, menyatakan bahwa militer Indonesia memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM di Papua dengan risiko khusus bagi masyarakat adat. Situasi tersebut masih tercermin dalam laporan Human Rights Monitor (2025) yang menunjukkan bahwa kondisi HAM di Tanah Papua pada periode April hingga Juni 2025 masih didominasi oleh operasi pasukan keamanan di wilayah Pegunungan Tengah.

Dalam periode tersebut, laporan Human Rights Monitor juga mencatat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran HAM, termasuk penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan penganiayaan. Tingkat kekerasan terhadap warga sipil juga tergolong tinggi. Misalnya, serangan di Kabupaten Puncak pada Juni 2025 disertai dengan pembakaran rumah-rumah warga, sementara operasi militer di Intan Jaya pada Mei 2025 diduga menyebabkan pembunuhan dan penghilangan paksa terhadap belasan warga desa.

Pembaruan Juli 2025: Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua[1], Indonesia - Meliputi Peristiwa dari 1 April hingga 30 Juni 2025 (2nd Kuartal 2025)

Pelanggaran	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Penyiksaan	11 korban dalam 3 kasus	9 korban dalam 7 kasus	24 korban dalam 13 kasus	4 korban dalam 3 kasus
Kebebasan berekspresi	18 korban dalam 8 kasus	2 korban dalam 2 kasus	Lebih dari 3 korban dalam 3 kasus	Lebih dari selusin dalam 3 kasus
Pembunuhan	6 korban dalam 4 kasus	7 korban dalam 6 kasus	6 korban dalam 6 kasus	16 korban dalam 9 kasus
Penghilangan paksa	-	2 korban dalam 2 kasus	-	8 korban dalam 1 kasus
Pengancaman & Intimidasi	13 korban dalam 5 kasus	2 korban dalam 2 kasus	Puluhan korban dalam 3 kasus	Lebih dari 19 korban dalam 5 kasus
Kriminalisasi	-	-	-	Lebih dari 17 korban dalam 4 kasus
Penganiayaan	54 korban dalam 13 kasus	Lebih dari 38 korban dalam 12 kasus	11 korban dalam 8 kasus	Lebih dari 35 korban dalam 14 kasus
Hak budaya	Puluhan korban dalam 3 kasus	Puluhan korban dalam 1 kasus	Puluhan korban dalam 3 kasus	Lebih dari selusin korban dalam dua kasus
Penahanan sewenang-wenang	233 korban dalam 9 kasus	65 korban dalam 9 kasus	81 korban dalam 11 kasus	29 korban dalam 9 kasus
Kebebasan berkumpul	Lebih dari 279 korban dalam 13 kasus	Lebih dari 87 korban dalam 6 kasus	Lebih dari 68 korban dalam 7 kasus	Lebih dari 30 korban dalam 3 kasus
JUMLAH	**Lebih dari 313 korban dalam 33 kasus**	**Lebih dari 122 korban dalam 23 kasus**	**Lebih dari 118 korban dalam 30 kasus**	**Lebih dari 118 korban dalam 31 kasus**

Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal. Simbol "+" setelah angka menunjukkan jumlah pasti (angka yang diberikan) ditambah jumlah tambahan yang kurang tepat (misalnya, puluhan, beberapa). Setiap kolom merupakan set independen, mencerminkan kemungkinan adanya pelanggaran ganda per korban atau kasus. Total mewakili jumlah unik per kolom, bukan jumlah agregat. Anda dapat melakukan pencarian dan analisis sendiri di basis data kasus kami di https://humanrightsmonitor.org/cases/.

Sumber: Laporan Human Rights Monitor 2025. https://humanrightsmonitor.org/wp-content/uploads/2025/08/HRM-Quarterly-Report_2_2025_id.pdf

Selain itu, berbagai bentuk represi negara seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan kebebasan berkumpul secara damai, serta kriminalisasi terhadap aktivis politik dan pembela HAM juga masih terus terjadi.

Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai aktor non-negara yang memperjuangkan kemerdekaan Papua juga berperan dalam eskalasi konflik bersenjata. Aktivitas mereka, termasuk serangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil, turut memperpanjang siklus kekerasan di wilayah tersebut.

Beberapa bentrokan bersenjata tercatat terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak. Human Rights Monitor (2025) mencatat bahwa dalam periode tersebut terdapat 18 warga sipil tewas dan empat orang luka-luka akibat aksi yang dilakukan oleh TPNPB. Pada April 2025,

TPNPB juga mengklaim bahwa dalam kurun waktu empat hari sebanyak 17 pendulang emas terbunuh di Yahukimo.

Pertempuran antara aparat negara dan kelompok perlawanan bersenjata ini pada akhirnya menempatkan warga sipil sebagai pihak yang paling rentan. Selain korban dari kalangan sipil, laporan juga mencatat tujuh anggota pasukan keamanan tewas dan 13 lainnya terluka. Dari pihak TPNPB, dilaporkan terdapat 10 kombatan tewas dan tujuh orang terluka.

Eskalasi konflik semakin meningkat pada Maret 2025 setelah terungkapnya jalur penyelundupan senjata yang melibatkan oknum aparat, serta penemuan ladang ganja seluas 5.000 meter persegi yang diduga menjadi salah satu sumber pendanaan kelompok bersenjata. Memasuki April hingga Mei 2025, TPNPB secara terbuka menyatakan perang terhadap TNI dan mengerahkan sekitar 13 batalion pasukannya. Respons pemerintah berupa peningkatan operasi keamanan menunjukkan kecenderungan pendekatan yang semakin militeristik (Pramodhawardani, 2025).

Melihat berbagai fakta tersebut, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya menang dalam konflik ini? Apakah TNI–POLRI atau TPNPB? Kenyataannya, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Konflik bersenjata justru meninggalkan dampak kemanusiaan yang besar, baik bagi para kombatan maupun bagi masyarakat sipil yang sebagian besar merupakan Orang Asli Papua.

Human Rights Watch menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib mematuhi hukum humaniter internasional. Hukum tersebut mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil serta mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan kerugian terhadap masyarakat sipil dan objek sipil seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Namun dalam praktiknya, masyarakat sipil tetap menjadi kelompok yang paling rentan terdampak konflik. “Sekolah Dibakar, Puskesmas Dihancurkan…” “Sekolah dibakar, puskesmas dihancurkan, gereja diserang, guru ditembak, trus su trada tempat aman lagi?”



Warga mengungsi akibat dampak konflik bersenjata di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang. (Sumber: Jubi)

Ungkapan tersebut menggambarkan kenyataan pahit yang dialami oleh para korban konflik bersenjata antara pasukan keamanan TNI–POLRI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Konflik yang berlangsung di berbagai wilayah Tanah Papua tidak hanya menghadirkan kekerasan bersenjata, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas bagi masyarakat sipil.

Laporan Human Rights Watch (2025) mencatat bahwa operasi militer di wilayah Pegunungan Tengah telah menyebabkan puluhan warga sipil terluka maupun meninggal dunia. Serangan yang dilakukan melalui pesawat nirawak (*drone*), serta penggunaan amunisi secara tidak terkontrol, turut memicu gelombang pengungsian besar-besaran di kalangan masyarakat Papua. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak konflik bersenjata di Tanah Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang biasa atau bersifat insidental.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua (2025), konflik bersenjata yang berlangsung di Tanah Papua dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang memerlukan penyelesaian serius. Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa masyarakat Papua saat ini tidak semata-mata membutuhkan percepatan pembangunan wilayah, melainkan penyelesaian konflik bersenjata yang telah berlangsung lama.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Jubi (2025), ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik

tersebut serta melanjutkan proses penyelesaian nonyudisial bagi para korban pelanggaran HAM berat di Papua.

Desakan serupa juga disampaikan oleh pegiat HAM Papua, Pastor John Jonga. Menurutnya, penyelesaian konflik Papua memerlukan keberanian politik sekaligus kehati-hatian dalam membaca situasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog kemanusiaan serta pendekatan budaya sebagai jalan keluar yang lebih konstruktif. Pendekatan keamanan yang selama ini ditempuh justru dinilai berpotensi memperuncing konflik bersenjata di Tanah Papua. "*Semakin banyak pasukan militer, kondisi Papua justru semakin parah,"* ujarnya (Jubi, 2025).

Untuk memahami lebih jauh skala konflik tersebut, data yang dirangkum Jubi.id (2025) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2018–2025 konflik bersenjata terus berlangsung setiap tahun dengan fluktuasi jumlah kasus yang berbeda-beda. Puncak eskalasi konflik terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 92 kasus. Bentuk korban yang tercatat juga sangat beragam, mulai dari korban meninggal dunia, luka-luka, korban penyanderaan, korban hilang, hingga pengungsi.

Jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata sejak tahun 2018 hingga Oktober 2025 tercatat mencapai 103.218 orang. Para pengungsi tersebut berasal dari berbagai wilayah konflik di Tanah Papua, antara lain:

- Papua Tengah (Intan Jaya, Puncak, Paniai)
- Papua Pegunungan (Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo)
- Papua Barat Daya (Maybrat)
- Papua Barat (Teluk Bintuni)

Selain menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian, konflik bersenjata juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik serta terganggunya layanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keagamaan menjadi sektor yang sangat terdampak.

Kronik konflik bersenjata tanggal 19 Januari 2025 mencatat serangkaian aksi pembakaran fasilitas umum di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Berdasarkan data Polres Puncak, pembakaran tersebut menimpa

beberapa fasilitas pendidikan, antara lain SMA Negeri 1 Sinak dan SMP Negeri 1 Sinak. Gedung SMA Negeri 1 Sinak dibakar pada 21 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, sementara gedung SMP Negeri 1 Sinak dibakar pada 22 November 2024 sekitar pukul 02.30 WIT. Polisi mengidentifikasi para pelaku sebagai kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Kalenak Murib.

Kelompok yang sama juga diduga merusak mobil operasional Puskesmas Sinak, serta melakukan pembakaran terhadap gudang logistik di Bandara Tapulinik pada 3 Februari dan kantor Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) pada 14 Agustus. Dalam beberapa kasus lainnya, pelaku pembakaran fasilitas publik bahkan belum dapat diidentifikasi secara pasti (Jubi, 2025).

Peristiwa pembakaran sekolah tersebut menimbulkan dampak serius terhadap sektor pendidikan. Banyak fasilitas pendidikan tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Anak-anak yang seharusnya belajar dengan tenang kehilangan ruang belajar mereka, sementara para guru terpaksa meninggalkan daerah tugas dan mengungsi ke kota karena situasi keamanan yang tidak kondusif.

Situasi ini berimplikasi langsung terhadap masa depan generasi muda Papua. Eka Kristina Yeimo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Tengah, yang melihat secara langsung kondisi para korban konflik bersenjata, menilai bahwa krisis pendidikan yang terjadi di wilayah konflik dapat berujung pada hilangnya satu generasi Papua apabila tidak segera ditangani secara serius (NU Online, 2025).

Di sisi lain, penggunaan fasilitas publik sebagai pos keamanan oleh aparat negara juga memunculkan persoalan baru dalam konteks hak asasi manusia. Komnas HAM menilai bahwa penggunaan sekolah, kantor distrik, maupun gereja sebagai pos militer berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap fasilitas sipil.

Laporan Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus menyebutkan bahwa di Kabupaten Maybrat, pasukan TNI–POLRI mendirikan 11 pos keamanan setelah penyerangan terhadap Pos Koramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021. Dari jumlah tersebut, dua pos keamanan diketahui menempati gedung sekolah.

Sementara itu, laporan dari Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang menyatakan bahwa TNI juga menggunakan Kantor Distrik Oksop dan Gereja GIDI Efesus Sape sebagai pos keamanan sejak akhir November 2024. Kehadiran pasukan keamanan di wilayah tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga dan memicu gelombang pengungsian baru (Jubi, 2025).

Human Rights Watch (2025) juga melaporkan bahwa operasi militer di beberapa wilayah diduga menyebabkan pembakaran kampung-kampung serta serangan terhadap tempat ibadah.

Selain kerusakan fasilitas publik, konflik bersenjata juga berdampak langsung pada warga sipil yang sama sekali tidak terlibat dalam pertikaian. Salah satu peristiwa tragis terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, ketika kelompok bersenjata TPNPB menyerang guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di wilayah tersebut.

Berdasarkan kronik 24 Maret 2025, serangan tersebut menyebabkan seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia, sementara enam orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka antara lain Doinisia Taroci More, Vantiana Kambu, Paskalia Peni Tere Liman, Fidelis De Lena, Kosmas Paga, serta Irawati Nebobohan yang merupakan tenaga kesehatan.



Sebanyak 400 'Pasukan Setan' TNI
dikirim ke Papua tahun 2021. (Sumber: detiknews)

Komnas HAM menilai bahwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat keji karena para korban bukanlah bagian dari aparat militer, melainkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi masyarakat Papua.

Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang terluka, kemudian dievakuasi ke Kota Jayapura untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut (Cenderawasih Pos, 2025).

Selain dampak fisik, konflik bersenjata juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban, terutama perempuan dan anak-anak. Kehidupan di pengungsian yang serba terbatas, ketidakpastian masa depan, serta rasa takut yang terus membayangi menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Anak-anak tidak lagi dapat bermain dengan bebas sebagaimana anak-anak pada umumnya. Mereka harus bertahan hidup di tempat pengungsian yang sering kali hanya memberikan rasa aman yang semu dan sementara. Perempuan-perempuan di pengungsian juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka harus mengelola kehidupan keluarga dalam kondisi serba terbatas, dengan fasilitas yang minim. Kebutuhan khusus perempuan, seperti kebutuhan saat menstruasi atau ketika sedang hamil, sering kali tidak terpenuhi secara memadai. Situasi-situasi tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi para perempuan yang hidup dalam kondisi pengungsian, hal-hal tersebut menjadi persoalan yang sangat nyata dan mengguncang secara psikologis.

Konflik Bersenjata di Papua: PR untuk Siapa?

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata di Tanah Papua, muncul pertanyaan reflektif yang patut kita renungkan bersama: siapakah yang bertanggung jawab menciptakan "tempat aman" bagi masyarakat sipil? Siapakah yang menjamin keselamatan anak-anak yang ingin bersekolah ketika gedung sekolah mereka hangus dibakar dan

para guru ditembak? Siapakah yang menjamin pelayanan kesehatan bagi mereka yang sakit atau terluka ketika fasilitas kesehatan tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Atau bagi mereka yang ingin bersekutu dengan Tuhan, ketika rumah-rumah ibadah justru dijadikan markas oleh para pemegang senjata?



Pasukan TPNPB OPM Kodap III D wilayah Dulla. (Sumber: Jubi)

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar konflik Papua yang hingga kini belum terselesaikan. Ketika menelisik kembali penyebab konflik bersenjata di Tanah Papua, kita akan dibawa pada realitas historis konflik yang telah berlangsung lama dan terus meninggalkan luka kolektif. Konflik yang mengakar ini turut memicu hilangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, terutama karena negara dinilai belum berhasil menyelesaikan berbagai "pekerjaan rumah" terkait kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Tanah Papua.

Berbagai kebijakan percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah, bahkan dengan pergantian kepemimpinan nasional dari waktu ke waktu, belum serta-merta menjadi jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Bagi banyak masyarakat Papua, yang lebih dibutuhkan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya serius untuk

menyelesaikan konflik bersenjata yang terus berlangsung. Catatan kronik konflik bersenjata yang dihimpun JPIC OFM Papua menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, dari Januari hingga Desember, konflik bersenjata masih terus menelan korban jiwa.

Dalam upaya mengatasi konflik tersebut, pemerintah selama ini cenderung mengedepankan pendekatan keamanan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan situasi di wilayah konflik serta menghadapi kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Namun, intensitas pengerahan aparat militer ke sejumlah wilayah konflik di Papua tampaknya belum mampu meredam, apalagi menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

Situasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Papua membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga perlu mengembangkan strategi lain yang lebih dialogis dan humanis, seperti membangun dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, memperkuat penegakan hukum secara transparan, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia secara lebih serius.

Pengerahan pasukan militer dalam jumlah besar yang terus berlangsung juga dinilai sebagai salah satu faktor yang memperpanjang konflik. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk mengendalikan pengerahan pasukan militer di Papua dan mengedepankan langkah-langkah yang lebih terukur dan proporsional guna menghindari jatuhnya korban serta trauma di kalangan masyarakat sipil (Harbowo & Ritonga, 2026). Kebijakan yang terlalu menekankan pendekatan militeristik juga dikhawatirkan mengulang pola kekerasan struktural negara yang pernah terjadi di masa lalu, seperti dalam kasus "Paniai Berdarah" dan "Wamena Berdarah" (Pramodhawardani, 2025).

Eskalasi kekerasan yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua menunjukkan bahwa warga sipil sering kali menjadi korban utama dalam konflik ini. Di satu sisi, pemerintah memandang pendekatan keamanan sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di daerah-daerah rawan konflik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi

Gunawan, yang menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pengamanan di wilayah rawan di Papua agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal, sekaligus meminta dukungan masyarakat agar tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang melakukan kekerasan di Papua (polkam.go.id, 2025).

Namun demikian, keyakinan bahwa peningkatan jumlah personel militer di wilayah konflik akan secara otomatis menciptakan keamanan sering kali dipandang sebagai ilusi. Kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar justru dapat menimbulkan rasa tertekan dan trauma di kalangan masyarakat sipil. Bagi banyak warga, kedatangan pasukan berseragam loreng yang membawa senjata ke kampung-kampung mereka tidak selalu dimaknai sebagai perlindungan, melainkan sebagai sumber ketakutan baru.

Kondisi ini juga kerap diikuti dengan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat, seperti pemberlakuan jam malam atau pembatasan mobilitas setelah sore hari. Di beberapa wilayah, bahkan muncul pembagian zona-zona khusus yang menandai tingkat kerawanan keamanan. Misalnya, di beberapa wilayah Kabupaten Mimika yang ditetapkan sebagai zona merah setelah bandara-bandara kecil yang biasa melayani penerbangan ke daerah terpencil tidak lagi beroperasi karena kekhawatiran terhadap serangan kelompok bersenjata. Akibatnya, akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar—seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan pemerintahan, hingga distribusi logistik bahan makanan—menjadi semakin terbatas.

Situasi tersebut juga diperparah oleh munculnya berbagai bentuk stigmatisasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Human Rights Watch (2025) melaporkan bahwa sejumlah aktivis dan pemuka gereja di Papua menyampaikan bahwa pasukan pemerintah kerap memperlakukan orang asli Papua yang membawa panah untuk berburu sebagai pihak yang dicurigai sebagai kombatan. Dalam kondisi demikian, aktivitas berburu yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat dapat dengan mudah disalahartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan kelompok bersenjata.

Sebaliknya, bagi pihak TPNPB, masyarakat pendatang dari wilayah lain di Indonesia yang berpenampilan non-Papua sering dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan. Situasi ini diperumit oleh pelabelan kelompok TPNPB sebagai "teroris" oleh pemerintah. Akibatnya, identitas etnis, penampilan fisik, maupun aktivitas sehari-hari seseorang dapat dengan mudah dijadikan dasar kecurigaan atau bahkan menjadi alasan terjadinya kekerasan.



Kondisi Sekolah Dasar YPK Metanoia di Distrik Dekai, Yahukimo diklaim dibakar oleh TPNPB. (Sumber: Jubi)

Di tengah situasi tersebut, persoalan lain yang turut mempengaruhi dinamika konflik adalah eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua. Klaim serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam terus berlangsung dan sering kali menjadi bagian dari dinamika perebutan kepentingan yang memperpanjang konflik. Aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan hidup—yang selama ini menjadi ruang penghidupan masyarakat adat—serta proyek-proyek besar di sektor pertanian skala industri, juga dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup berbagai suku di Tanah Papua.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang parsial. Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menemukan pola penyelesaian yang lebih inovatif, adil, dan komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan historis, perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan.

Penutup

Akar konflik yang belum diselesaikan, hilangnya kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah, kehadiran militer dalam jumlah besar, pembangunan batalyon dan markas militer di berbagai wilayah Papua, klaim serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah operasi TPNPB, serta maraknya perdagangan senjata api dan amunisi ilegal merupakan sebagian dari faktor-faktor yang memperpanjang konflik bersenjata di Tanah Papua. Konflik ini dapat dipahami sebagai bentuk konflik struktural yang telah berlangsung lama dan dalam banyak hal terlembaga melalui kebijakan maupun praktik negara, sehingga memunculkan ketidakadilan sistemik dalam ranah politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dalam konteks tersebut, kebijakan pembangunan yang digagas pemerintah belum sepenuhnya mampu meredakan ketegangan dan konflik antara aparat keamanan TNI–POLRI dan kelompok bersenjata TPNPB.

Pendekatan keamanan yang cenderung militeristik dan represif juga menimbulkan berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pegiat HAM telah mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan, seperti penembakan, pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, penangkapan sewenang-wenang, perampasan lahan dan tanah adat, serta pembatasan ruang sipil yang melibatkan aparat keamanan. Situasi tersebut tidak hanya memperdalam luka sosial masyarakat Papua, tetapi juga semakin memperkuat ketidakpercayaan terhadap negara.

Konflik bersenjata yang belum terselesaikan ini terus menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat sipil serta merusak berbagai fasilitas layanan publik. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, antara lain melalui dialog yang terbuka antara Indonesia dan Papua, serta perubahan struktural dalam bidang politik, ekonomi, dan penegakan hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan dan meminimalkan perlawanan politik maupun bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dan kelompok bersenjata TPNPB.

Daftar Pustaka

Jubi.id. (2025). *LP3BH Manokwari Catat Situasi HAM di Tanah Papua 2025 Buruk, Pengungsi Meningkat.* Desember 31, 2025. https://jubi.id/polhukam/2025/lp3bh-manokwari-catat-situasi-ham-di-tanah-papua-2025-buruk-pengungsi-meningkat/

--------- (2025). *12 Jenazah Pendulang Emas Berhasil Dievakuasi dan Diidentifikasi*. April, 14 2025. https://jubi.id/lapago/2025/12-jenazah-pendulang-emas-berhasil-dievakuasi-dan-diidentifikasi/

--------- (2025). *Komnas HAM Papua Desak Prabowo Bentuk Tim Khusus Atasi Konflik Senjata*. Januari 15, 2025. https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-papua-desak-prabowo-bentuk-tim-khusus-atasi-konflik-senjata/

Harbowo Nikolaus dan Machradin Wahyudi Ritonga. (2026). *Tangani Konflik Papua, Pemerintah Diminta Hentikan Pendekatan Keamanan.* Februari, 10, 2026. https://www.kompas.id/artikel/tangani-konflik-papua-pemerintah-diminta-hentikan pendekatan-keamanan

Human Rights Monitor. (2025). *Papua Monitor: Kuartal 2/2025*. https://humanrightsmonitor.org/wp-content/uploads/2025/08/HRM-Quarterly Report_2_2025_id.pdf

Human Rights Watch. (2025). *Indonesia: Pertempuran Mengancam Warga Sipil di Papua Barat.* https://www.hrw.org/id/news/2025/05/30/indonesia-renewed-fighting-threatens-west-papua-civilians

KontraS. (2020). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Papua*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

NU Online. (2025). *Senator Sebut Konflik Bersenjata Picu Krisis Pendidikan di Papua*. Desember, 16, 2025. https://nu.or.id/nasional/senator-sebut-konflik-bersenjata-picu-krisis pendidikan-di-papua-O4j4K

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (2025). *Pemerintah Mengutuk Keras Aksi Kekerasan di Kab. Yahukimo Papua.* 11 April 2025. Humas Kemenko Polhukam RI. https://polkam.go.id/pemerintah-mengutuk-keras-aksi-kekerasan-di-kab-yahukimo-papua/

Pramodhawardani Jaleswari. (2025). ***Kekerasan di Papua: Ketika Dialog melalui Moncong Senjata***. Laboratorium Indonesia 2045. https://www.lab45.id/detail/326/kekerasan-di-papua-ketika-dialog-melalui-moncong-senjata

Wonda N. Nadia & Lady I. Nope. (2026). *Analisis Konflik Struktural dalam Isu Kekerasan Bersenjata di Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM.* Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 4 No. 2, e-ISSN 3026-3808. http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/1477/1184

Kronik Konflik Bersenjata dan Dampaknya

15 Januari

Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua. Mereka juga meminta Prabowo segera menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Tanah Papua. Kepala Kantor Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan Rakyat Papua saat ini tidak membutuhkan percepatan pembangunan wilayah. Yang mereka butuhkan, ialah penyelesaian konflik bersenjata. *"Kami harap Prabowo konsen dalam memerhatikan penyelesaian konflik [bersenjata] di Tanah Papua. Kami juga berharap Prabowo melanjutkan upaya [proses] nonyudisial untuk korban-korban pelanggaran berat HAM [di Tanah Papua],"* kata Ramandey, Selasa (14/01). Berdasarkan pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terjadi 70 kasus kekerasan dalam 51 konflik bersenjata di Tanah Papua pada Desember 2023 hingga November 2024. Tindak kekerasan tersebut menewaskan 21 orang, dan melukai 36 lainnya. Para pelakunya diduga dari TNI dan Polri serta Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Sementara itu, berdasarkan pemantauan Komnas HAM Papua, terdapat 114 orang korban kekerasan bersenjata di Tanah Papua sepanjang tahun lalu. Mereka terdiri atas 71 korban tewas, dan 43 luka-luka. "*Konflik bersenjata juga mengakibatkan [aktivitas pembangunan] hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak berjalan baik di Tanah Papua. Itu berdampak terhadap ketertinggalan [kesejahteraan rakyat] di Tanah Papua,"* kata Ramandey (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-papua-desak-prabowo-bentuk-tim-khusus-atasi-konflik-senjata/).

19 Januari

Serangkaian pembakaran terhadap fasilitas umum melanda Distrik Sinak di Kabupaten Puncak pada tahun lalu. Aksi tersebut merugikan masyarakat karena mengganggu layanan publik. Anggota DPR Papua Tengah Anis Labene mengatakan Sinak menjadi daerah tumpuan bagi sejumlah distrik di sekitarnya. Beberapa layanan publik di wilayah tersebut terpusat di Sinak. "Saya benar-benar kecewa [atas aksi

pembakaran tersebut]. Layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terhambat di Sinak," kata Labene, Kamis (16/01). Berdasarkan data Polres Puncak, aksi pembakaran terhadap fasilitas publik, di antaranya menimpa gedung SMA Negeri 1 Sinak, dan gedung SMP Negeri 1 Sinak. Gedung SMA Negeri 1 dibakar pada 21 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 Waktu Papua. Adapun Gedung SMP Negeri 1 Sinak dibakar pada 22 November 2024, sekitar pukul 02.30 Waktu Papua. Polisi mengidentifikasi para pelaku pembakaran sebagai kelompok bersenjata pimpinan Kalenak Murib. Kelompok yang sama pun diduga merusak mobil operasional Puskesmas Sinak. Pembakaran juga menyasar gudang logistik di Bandara Tapulinik pada 3 Februari, dan Kantor Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) pada 14 Agustus. Pelaku pembakarannya belum teridentifikasi (https://jubi.id/polhukam/2025/aksi-pembakaran-perburuk-kondisi-layanan-publik-di-sinak/).

23 Januari

Komnas HAM RI menyatakan pemakaian fasilitas publik seperti sekolah, kantor distrik, maupun gereja sebagai pos aparat keamanan TNI/Polri di Tanah Papua melanggar HAM. TNI dan Polri diminta memindahkan pos keamanan mereka di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, maupun Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dari sejumlah fasilitas publik. Hal itu disampaikan Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Kamis (23/01). *"[Penggunaan fasilitas publik sebagai pos aparat keamanan itu] mengganggu berjalannya pelayanan publik sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM,"* ujarnya. Laporan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus, menyatakan di Kabupaten Maybrat pasukan TNI dan Polri telah mendirikan 11 pos keamanan pascapenyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, pada 2 September 2021. Di antara 11 pos keamanan itu, terdapat dua pos yang menempati gedung sekolah. Laporan Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang menyatakan TNI

juga menjadikan Kantor Distrik Oksop dan Gereja GIDI Efesus Sape di Kampung Mimin sebagai pos aparat keamanan sejak akhir November 2024. Kehadiran pasukan TNI di Distrik Oksop membuat warga ketakutan dan mengungsi (https://jubi.id/polhukam/2025/penggunaan-fasilitas-publik-sebagai-pos-keamanan-tentara-dan-polisi-melanggar-ham/).

30 Januari

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Komando Daerah Pertahanan Kodap XVI, Yahukimo di bawah Pimpinan Batalion Yamue mengaku siap bertanggung jawab atas pembakaran satu unit mobil Avanza milik militer Indonesia. Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Elkius Kobak, Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo pada Selasa (28/01). *"Bahwa pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo di bawah pimpinan Homy Heluka, Komandan Batalion Yamue telah berhasil membakar satu unit mobil Avanza milik anggota militer Indonesia di Jalan Paradiso, Kompleks Perumahan Sosial KM 4, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo pada hari ini Selasa, 28 Januari 2025 pukul 14:19 siang dini hari,"* kata Sebby Sambom dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (29/01) (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-bertanggung-atas-pembakaran-mobil-militer-di-yahukimo/).

31 Januari

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan seorang agen intelejen militer Pemerintah Indonesia. Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengatakan, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolim pada Jumat (31/01), pukul 07.00 pagi, bahwa TPNPB bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap seorang agen intelejen militer Pemerintah Indonesia pada Kamis (30/01), di Jalan Gunung, Kali Ponto Lamah sekitar pukul 05.20 pagi. *"Dalam laporan lebih lanjut yang disampaikan oleh Komandan Operasi Batalion Sisibia, Mayor Kempes Matuan mengatakan bahwa*

sejak kemarin pagi hingga sore kami sedang melakukan operasi di Yahukimo dan kedapatan dua orang mata-mata; satu asal Papua dan seorang lainnya orang Indonesia sedang berboncengan menggunakan sepeda motor di Jalan Gunung," kata Sebby Sambom dikutip dari siaran pers kepada *Jubi* di Jayapura, Papua, Jumat (31/01). Atas kejadian tersebut, katanya, Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo Elkius Kobak siap bertanggung jawab dan menyampaikan kepada aparat militer Pemerintah Indonesia, untuk tidak menangkap dan menembak warga sipil yang tak bersalah atas kejadian tersebut. Terkait dengan hal tersebut, katanya, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyampaikan bahwa seluruh pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo sedang melakukan operasi di wilayah perang setelah kejadian pembakaran mobil Avanza milik aparat militer pemerintah Indonesia di Yahukimo sejak 28 Januari 2025 lalu. *"Maka, disampaikan kepada semua pihak dan terlebih khusus orang imigran Indonesia untuk segera keluar dari Yahukimo, karena Anda dicap sebagai agen intelejen Indonesia di daerah konflik bersenjata,"* katanya (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-yahukimo-mengaku-bunuh-agen-militer-indonesia/).

25 Februari

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Komando Daerah Pertahanan Kodap VIII Intan Jaya, mengaku bertanggung jawab atas penyerangan pos aparat militer (TNI/Polri) selama tiga hari di Sugapa, Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut dikatakan Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom, seperti ikutip *Jubi* dalam siaran pers, yang diterima di Jayapura, Papua, Selasa (25/02). Sambom mengatakan, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, Brigjen Undius Kogoya dan Kolonel Apeni Kobogau sebagai wakil panglima, pada Senin (24/02). *"Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan TPNPB, di bawah pimpinan Mayor Joni Botak, Agus Kobogau dan Enos Tipagau selama tiga hari berturut-turut, 21–23 Februari 2025 di Sugapa, Intan Jaya, seperti di Pos Polisi di J2 dan Pos Maleo TNI di Mamba, sekitar pukul 15.01 itu atas perintah kami,"* kata Sebby Sambom. Dalam penyerangan selama tiga hari, TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, dengan ini mengeluarkan pernyataan sikap resmi bahwa;

Kami dengan tegas menolak pembangunan batalyon dan markas militer di Silatugapa, Bulapa, Hitadipa, dan Beoga, wilayah perbatasan Intan Jaya – Puncak Papua; Dengan tegas kami menolak Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke sekolah-sekolah, gereja dan di rumah-rumah oleh aparat militer; TPNPB dengan tegas menolak PT Blok B Wabu, yang rencana melakukan operasi di Intan Jaya; Rencana kehadiran pejabat negara kolonial Indonesia setingkat menteri di Intan Jaya, dalam rangka pembahasan PT Blok B Wabu dan rencana pembentukan DOB di wilayah operasi TPNPB, kami siap tembak (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-serang-pos-militer-di-intan-jaya-selama-tiga-hari/).

27 Februari

Kamis, 27 Februari 2025, sekitar pukul 03.15 WIT, terjadi baku tembak antara TPNPB OPM dengan TNI di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Saat kejadian, masyarakat setempat sedang menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Pada pukul 03.20 WIT, korban, Goliat Sani, bersama masyarakat lainnya sedang bermain sepak bola di halaman Gereja Katolik Mamba, Intan Jaya. Suara tembakan yang semakin intens membuat masyarakat panik dan menyelamatkan diri ke tempat perlindungan terdekat. Setelah sekitar satu jam, suara tembakan mereda, dan masyarakat mulai kembali ke rumah masing-masing. Goliat Sani, yang juga berlindung bersama masyarakat lainnya, memutuskan untuk kembali ke rumahnya melalui jalan kecil. Tanpa diketahui, di tengah perjalanan, pasukan TNI dari Yonif 509 telah bersiaga dengan senjata terarah. Saat korban melintas, ia ditembak yang diduga oleh pasukan TNI dari Yonif 509 hingga meninggal di tempat kejadian. Jenazah korban kemudian dibawa dari Kampung Mamba ke RSUD Yokatapa Sugapa, dengan pengawalan ketat menggunakan kendaraan militer. Keesokan harinya, Jumat (01/03), sekitar pukul 10.30 WIT, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga Sani di Kampung Mamba, Intan Jaya. Korban merupakan anak dari almarhum Bernabas Sani dan Mama Rupina Maiseni. Goliat Sani lahir di Kampung Mamba, Intan Jaya, pada tahun 2003 dan berusia 21 tahun saat kejadian. Korban pernah menempuh pendidikan di SD Inpres Mamba, tetapi terpaksa putus sekolah dan tidak

melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Goliat Sani adalah warga sipil yang berdomisili di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas kelompok bersenjata seperti OPM. Ia selalu tinggal bersama keluarganya dan menjalani kehidupan sebagai masyarakat sipil (https://jubi.id/rilis-pers/2025/mahasiswa-manado-minta-hentikan-kekerasan-militer-di-intan-jaya/).

06 Maret

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Kodap III Ndugama Derakma, di bawah pimpinan Batalion Yuguru menegaskan kepada militer Indonesia, bahwa wilayah Yuguru bukan wilayah perang, tetapi wilayah pengungsi. Maka dari itu, militer Indonesia didesak segera meninggalkan kawasan Yuguru. *"Apabila pemberitahuan kedua kali kami TPNPB Kodap lll Ndugama Derakma Batalion Yuguru tidak diindahkan oleh petinggi militer Indonesia, maka kalian Pos Militer Tim Taipur Yuguru adalah makanan kami, karena kalian datang jual diri di tanah kami, wilayah kami, rumah kami dan dusun kami di Yuguru,"* kata Jubir TPNPB Sebby Sambom, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Kamis (06/03). Sebby mengatakan, kehadiran militer di sana meresahkan dan mengganggu masyarakat sipil, serta membuat masyarakat Yuguru trauma. Sambom mengatakan, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Mayor Soa Soa Karunggu, Komandan Operasi Batalion Yuguru TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Rabu (05/03) (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-siap-eksekusi-tni-di-nduga-jika-kuasai-wilayah-pengungsi/).

12 Maret

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar mengatakan penangkapan dua mantan anggota TNI Kodam XVII/Kasuari, Yuni Enumbi dan Eko Sugiyono, menunjukkan adanya dugaan perdagangan senjata api dan amunisi yang berulang terjadi di Tanah Papua memakai jaringan TNI. *"Aparat penegak hukum harus serius mengungkap aktor penyedia senjata api, amunisi, dan sumber dananya,"*

kata Anum kepada Jubi, Rabu (12/03). Apabila mantan anggota TNI terlibat, kata Anum, maka jaringan terdekatnya dari lingkaran TNI juga. Berdasarkan laporan AlDP dari hasil investigasi terhadap berbagai kasus perdagangan senjata api dan amunisi ilegal pada periode 2011 hingga 2021, dari 51 orang yang dipidana karena memperdagangkan senjata api dan amunisi di Papua terdapat 14 tentara. *"Jadi yang pertama harus dicek adalah jaringan TNI, karena dari beberapa kasus sebelumnya, apabila mantan TNI maka jaringana terdekatnya dari lingkaran TNI juga. Jadi patut diduga bahwa transaksi melibatkan anggota TNI lainnya, termasuk apakah ini transaksi pertama kali atau kesekian kali,"* ujarnya. Pada 06 Maret 2025, Satgas Damai Cartenz Papua dan tim Opsnal Kepolisian Daerah Papua menangkap Yuni Enumbi alias Yuni Masok di KM 76 Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Dari Yuni Enumbi polisi menyita 2 senjata api laras panjang, 4 pucuk pistol G2 Pindad, 632 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 250 butir amunisi kaliber 9 mm, dan 1 pucuk senapan angin, serta bukti lainnya. Polisi juga menyita uang sebesar Rp 369,9 juta. Senjata-senjata itu dibeli dengan harga Rp 1,3 miliar (https://jubi.id/mamta/2025/perdagangan-senjata-api-di-papua-diduga-melalui-jaringan-tni-aktivis-harus-diungkap/).

24 Maret

Kelompok bersenjata TPNPB menyerang guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinis Papua Pegunungan, pada Jumat dan Sabtu (22/03) pekan lalu. Seorang guru meninggal dunia, dan enam orang lainnya terluka. Komnas HAM menyatakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan itu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan kekerasan yang dilakukan TPNPB di Distrik Anggruk itu menyebabkan guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia. Selain itu, sejumlah enam guru dan tenaga kesehatan terluka, yaitu Doinisia Taroci More (guru), Vantiana Kambu (guru), Paskalia Peni Tere Liman (guru), Fidelis De Lena (guru), Kosmas Paga (guru), dan Irawati Nebobohan (tenaga kesehatan). *"Itu adalah tindakan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer. Mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua,"* kata Faizal

Ramadhani dalam keterangan pers tertulisnya pada Minggu (23/03). Faizal mengatakan seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun yang terluka telah dievakuasi ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Minggu. Mereka yang terluka menjalani perawatan di RSAD Marthen Indey (Cenderawasih Pos, https://jubi.id/polhukam/2025/tpnpb-serang-guru-dan-tenaga-kesehatan-di-yahukimo-1-tewas-dan-6-terluka/).

03 April

Pasca insiden penyerangan yang terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah setempat memutuskan menarik semua tenaga pengajar dan kesehatan. Tak hanya di Anggruk yang menjadi lokasi kejadian melainkan di sejumlah distrik. Hingga kini tak ada pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berjalan. Hal ini membuat warga di kampung cukup mengalami kesulitan dan satu persatu mulai mengeluh. Wenfrit Pahabol, melalui ponselnya mengutarakan di kampungnya di Pronggoli sejatinya bangunan sekolah dan tempat pelayanan kesehatan sudah cukup baik namun saat ini tidak ada petugas sehingga masyarakat merasa ada yang kurang (Cenderawasih Pos).

09 April

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui komando nasionalnya menyatakan bertanggung jawab atas dua insiden penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Papua pada awal April 2025. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom, disebutkan bahwa Panglima Kodap Yambi, Yoniro Enumby, bersama pasukannya, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang anggota intelijen militer Indonesia di wilayah Yambi, Puncak Jaya, pada Senin, 7 April 2025. Menurut TPNPB, korban telah diikuti selama beraktivitas di wilayah yang diklaim sebagai zona konflik bersenjata. Kelompok ini juga mengeluarkan peringatan keras kepada warga sipil yang disebut sebagai "imigran Indonesia" untuk meninggalkan daerah konflik agar tidak menjadi target operasi. Selain itu, TPNPB juga melaporkan bahwa dua helikopter militer Indonesia

dilaporkan telah menyerang wilayah sipil di Kampung Timopur, Distrik Sinak Barat, dengan menembakkan bom. Namun, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Menanggapi serangan udara itu, TPNPB mendesak Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Polri untuk menghentikan penggunaan bom terhadap warga sipil. *"Jika kalian memang jagoan, mari kita bertarung di medan perang,"* kata mereka dalam pernyataan itu. Sementara itu, pada 8 April 2025, TPNPB kembali mengeluarkan siaran pers kedua, yang kali ini berasal dari Kodap XVI Yahukimo. Panglima Kodap, Brigjen Elkius Kobak, menyatakan bahwa pasukannya telah mengeksekusi mati 11 orang yang diduga anggota TNI yang menyamar sebagai pendulang emas di wilayah Yahukimo. Aksi ini dilakukan oleh Batalion Yamue dan Batalion WSM yang diperbantukan dari Kodap III Ndugama Derakma, dalam operasi selama tiga hari, dari 6 hingga 8 April 2025. Selain 11 korban tewas, tiga orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. TPNPB menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan balasan terhadap pernyataan Panglima TNI yang mengakui bahwa personel yang menyamar sebagai warga sipil adalah bagian dari TNI. *"Maka sesuai dengan pengakuan tersebut, kami telah eksekusi mereka,"* ujar mereka (https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnpb-klaim-bertanggung-jawab-atas-dua-insiden-penyerangan-di-papua/ dan Cenderawasih Pos).

11 April

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, mengklaim kurun waktu empat hari, sebanyak 17 pendulang emas yang terbunuh di Yahukimo. Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, selain memenuhi unsur pelanggaran HAM, Komnas HAM juga mengkategorikan sebagai kejahatan kriminal luar biasa (Cenderawasih Pos).

13 dan 14 April

- Tim gabungan Satgas Damai Cartenz dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah menemukan 11 jenazah pendulang emas yang di dibunuh TPNPB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal itu disampaikan Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025,

Kombes Pol Yusuf Sutejo di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu (12/04). Pada 6-8 April 2025, TPNPB mengatakan membunuh 11 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang diduga sebagai mata-mata militer Indonesia. Pembunuhan itu dilakukan pasukan Komando Daerah Pertahanan XVI Yahukimo dan Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Derakma. Yusuf mengatakan sebelas jenazah ini ditemukan di lokasi yang berbeda diantaranya satu jenazah ditemukan di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu dua jenazah ditemukan di Camp 22, Yahukimo, "satu jenazah ditemukan di Muara Kum, Yahukimo. Lima jenazah ditemukan di Kampung Bingki, Yahukimo dan dua jenazah ditemukan di Tanjung Pamali, Kabupaten Yahukimo. Yusuf mengatakan 3 jenazah telah berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai, Yahukimo, dan 1 jenazah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Selain itu 7 jenazah lainnya direncanakan akan dievakuasi hari ini [Sabtu] ke RSUD Dekai, Yahukimo. *"Tim evakuasi bermalam di lokasi dan direncanakan melakukan evakuasi hari ini,"* ujar Yusuf dalam keterangan tertulisnya. Yusuf mengatakan hingga Sabtu (12/04) tiga jenazah sudah di otopsi oleh Tim DVI RS Bhayangkara Jayapura dan RSUD Dekai. Dua jenazah telah diidentifikasi identitasnya yaitu Wawan dari lokasi Mining 22 dan Stenli dari lokasi Muara Kum. Sementara satu jenazah yang juga ditemukan di lokasi Mining 22 belum diidentifikasi karena masih mencari data antemortem dari para keluarga korban. *"Setelah tiga jenazah teridentifikasi hari ini akan segera diserahkan ke keluarga. Jika tidak ada keluarga maka akan langsung kebumikan di Yahukimo karena kondisi jenazah semakin membusuk dan mengeluarkan cairan,"* katanya. Yusuf mengatakan 307 anggota TNI/Polri dilibatkan dalam proses evakuasi korban. Terdiri atas 167 anggota polisi, 50 anggota tentara dari Kodim Yahukimo, 40 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI AU, dan 50 anggota mariner (https://jubi.id/lapago/2025/11-jenazah-pendulang-emas-yang-dibunuh-tpnpb-di-yahukimo-telah-ditemukan/).

- Hingga Minggu (13/04) Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI berhasil menemukan 13 jenazah pendulang emas yang dibunuh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 13 jenazah ini, termasuk 11 jenazah yang ditemukan sebelumnya. Operasi pencarian dan evakuasi korban pendulang emas yang dibunuh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat masih terus dilakukan tim gabungan polisi dan tentara. Hal itu disampaikan Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Minggu (13/04). *"13 jenazah telah ditemukan [dan] tentara dan polisi masih di lokasi untuk proses pencarian [jenazah pendulang emas] dan evakuasi,"* kata Yusuf pada Minggu malam. Pada 6-9 April 2025, TPNPB mengatakan membunuh 17 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang diduga sebagai mata-mata militer Indonesia. Pembunuhan itu dilakukan pasukan Komando Daerah Pertahanan XVI Yahukimo dan Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Derakma. Yusuf mengatakan 12 jenazah pendulang emas telah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. Yusuf mengatakan 1 jenazah belum bisa dievakuasi karena alasan cuaca. *"Sebelum ditemukan kami belum bisa komentar [terkait 17 korban pembunuhan oleh TPNPB]. Yang penting kami tetap cari terus,"* ujarnya. Yusuf melanjutkan, 12 jenazah yang berhasil diidentifikasi itu atas nama Wawan Tangahu, Stenli Humena, Suardi Laode alias Kaswadi, Yuda Lesmana, Safaruddin, dan Riki Rahmat. Korban lainnya yang atas nama Muhammad Arif, Abdur Raffi Batu Bara, Stefanus Gisbertus, Zamroni, Ariston Kamma dan Rusli (https://jubi.id/lapago/2025/12-jenazah-pendulang-emas-berhasil-dievakuasi-dan-diidentifikasi/).

15 April

- Tim gabungan Satgas Damai Cartenz 2025, Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berhasil mengevakuasi 15 jenazah pendulang emas yang dibunuh oleh TPNPB hingga Senin (14/04). Dari jumlah tersebut, 12 jenazah telah berhasil

diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Pada 6–9 April 2025, TPNPB mengklaim telah membunuh 17 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mereka tuduh sebagai mata-mata militer Indonesia. Aksi pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama Derakma. Kelima belas jenazah ditemukan di berbagai titik wilayah pendulangan emas, yaitu 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah dari dua titik di Kampung Bingki, 3 jenazah dari Area 22, 1 jenazah dari Area 33, 1 jenazah di Muara Kum, 1 jenazah dari Area Kepala Air Mumok, 1 jenazah di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Adarma Sinaga, menyatakan bahwa proses evakuasi berjalan aman dengan melibatkan 307 personel gabungan TNI dan Polri. *"Kami juga akan terus berupaya menemukan sisa korban lainnya serta terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku,"* ujar Adarma dalam keterangan tertulisnya, Senin malam (14/04). Adarma menambahkan bahwa 12 jenazah yang telah diidentifikasi sebelumnya ditangani oleh Tim Dokkes Polri dan DVI Polri. Sementara tiga jenazah lainnya yang ditemukan di Area 22, Area 33, dan Tanjung Pamali pada Senin masih berada di RSUD Dekai untuk proses identifikasi lanjutan. Selain itu, dua orang korban, yakni Johanis Adu dan Suwito, ditemukan dalam keadaan selamat di Tanjung Pamali. Keduanya telah dievakuasi ke Dekai dan kini mendapat perawatan medis serta pendampingan psikologis. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa 12 jenazah yang telah diidentifikasi telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Yusuf juga menegaskan bahwa proses identifikasi melibatkan pihak keluarga secara aktif. Adapun nama-nama korban yang telah diserahkan antara lain: Wawan Tangahu, Suardi Laode alias Kaswadi, Stenli Humena, Yuda Lesmana, Riki Rahmat, Muhammad Arif, Safaruddin, Abdur Raffi Batu Bara, Stefanus Gisbertus, Zamroni, Ariston Kamma dan Rusli. *"Hingga saat ini, 12 dari 15 jenazah telah kami serahkan ke pihak keluarga. Kami*

juga memberikan pendampingan secara menyeluruh bagi keluarga korban," kata Yusuf, Senin malam (https://jubi.id/lapago/2025/15-jenazah-dievakuasi-12-diserahkan-ke-keluarga/).

- Aksi penganiyaan terhadap warga sipil terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah menimbulkan ketegangan yang cukup massive. Warga ada yang memilih mengungsi. La Elo, seorang warga sipil mengalami luka bacok di bagian wajah. Sempat ditangani petugas medis namun akhirnya dilaporka meninggal dunia ketika berada di dalam perjalanan menuju Nabire. Belum ada statemen resmi dari pihak kepolisian namun ada video lain menunjukan jika masyarakat setempat mulai berjaga-jaga sambal melengkapi diri dengan peralatan perang (Cenderawasih Pos).
- Kontak senjata kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Kontak senjata ini terjadi antara TPNPB OPM dan aparat TNI di wilayah Tatigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam baku tembak tersebut Sertu Haris Syafii dari Satgas Pamtas Yon 500 mengalami luka tembak dibagian perut. Namun dalam kondisi sadar (Cenderawasih Pos).

18 April

Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyatakan pembunuhan pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan oleh TPNPB itu melanggar HAM. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat diminta untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap warga di Tanah Papua. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Kota Jayapura, Provinsi Papua. "*Komnas mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan sadis yang melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM,"* kata Ramandey. Pada 6–9 April 2025, TPNPB menyatakan membunuh 17 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mereka tuduh sebagai mata-mata militer Indonesia. Aksi pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama Derakma. Ramandey mengatakan pembunuhan pendulang emas itu merupakan tindakan yang sadis. Ramandey mengatakan pembunuhan itu telah memenuhi unsur

pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM karena telah mengakibatkan hak hidup orang hilang atau meninggal dunia. Hingga Rabu (16/04), tim gabungan polisi dan tentara telah mengevakuasi 16 jenazah pendulang emas yang dibunuh TPNPB tersebut. *"Unsur [pelanggaran HAM] terpenuhi karena mengakibatkan hak hidup orang hilang. [Pembunuhan] ini adalah tindakan sadisme yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata [TPNPB], atau siapalah kelompoknya. Tapi yang pasti sudah ada kelompok yang mengaku mereka bertanggung jawab terhadap pembunuhan sadis ini,"* ujar Ramandey kepada Jubi, pada Kamis (17/04) (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-sebut-pembunuhan-pendulang-emas-di-yahukimo-langgar-ham/).

21 April

Upaya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh KKB di lokasi pendulangan emas, Kabupetn Yahukimo, Papua Pegunungan, resmi dinyatakan tuntas. Operasi yang dilakukan sejak 9 April hingga 17 April 2025 oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 bersama tim gabungan TNI-Polri telah berhasil mengevakuasi 25 korban, 16 diantaranya meninggal dunia, 9 orang lainnya korban selamat (Cenderawasih Pos).

23 April

Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin mengungkapkan bahwa wilayah zona merah dalam wilayah hukum Polda Papua mengalami pergeseran. Jika sebelumnya Kabupaten Nduga mnejadi focus perhatian, kini Kabupaten Yahukimo mulai menunjukan peningkatan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) (Cenderawasih Pos).

30 April

Warga Amumngme dari empat distrik yakni Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, Distrik Jila, dan Distrik Alama melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Selasa (29/04). Koorlap aksi, Eli Dolame menyebutkan selama akses penerbangan ditutup, masyarakat di wilayah pegunungan dari 47 kampung di 4 distrik ini

kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan bahkan bahan makanan. Selain menuntut penerbangan kembali dibuka, mereka juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengembalikan stigma zona merah di 4 wilayah tersebut menjadi zona hijau (Cenderawasih Pos).

15 Mei

Kontak tembak antara TNI dengan TPNPB OPM membuat warga panik. Tak ayal kontak tembak ini berdampak pada ketakutan warga yang kemudian memilih mengungsi. Sementara dari informasi yang beredar, dari kontak tembak ini jatuh korban. Pihak TNI menyebut bahwa pihaknya berhasil menewaskan 18 anggota TPN OPM sementara dari kelompok TPN OPM mengklaim telah menembak anggota TNI. Insiden kontak tembak ini terjadi di sejumlah kampong antara lain Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama dan Zanamba (Cenderawasih Pos).

21 Mei

"TNI Amankan Intan Jaya, 18 OPM Berhasil Dilumpuhkan", demikian judul siaran pers yang dikeluarkan Pusat Penerangan Markas Besar TNI di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025. Siaran pers menyebutkan, peristiwa kontak senjata antara TNI dengan TPNPB-OPM itu terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu, 14 Mei 2025 pada pukul 4 hingga 5 pagi. Siaran pers tersebut dengan cepat menyebar menjadi berita di banyak media di Indonesia. Beberapa jam kemudian, TPNPB dari Kodap III D Dulla mengeluarkan surat pernyataan. Pernyataan yang dikirimkan kepada pers itu menyebutkan seorang kolonelnya bernama Ndundu Mirip (48 tahun) tewas ketika kontak tembak dengan TNI. Pernyataan itu disusul dengan siaran pers dari Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM yang menyatakan lima anggotanya menjadi korban dari serangan TNI. Tiga di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya terluka. TPNPB juga menyebutkan belasan korban lainnya yang meninggal dan luka-luka akibat serangan TNI merupakan warga sipil. Terkait peristiwa kontak

senjata di wilayahnya, Bupati Intan Jaya Aner Maisini pada Rabu, 14 Mei 2025 mengeluarkan surat keputusan penetapan status tanggap darurat bencana daerah nonalam. Namun, di surat itu bupati menyebutkan peristiwa kontak senjata terjadi pada 12 Mei 2025 (Senin), bukan Rabu, 14 Mei 2025 seperti disebutkan Puspen TNI atau berbeda dua hari. Lokasinya dalam keputusan bupati disebut di Distrik Hitadipa, bukan Distrik Sugapa. Bupati menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari (14-27 Mei 2025) dan dapat diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Status tanggap darurat disebutkan akibat operasi penegakan hukum tegas dan terukur oleh aparat keamanan terhadap KKSB/TPNPB-OPM di wilayah Distrik Hitadipa (https://jubi.id/indepth-stories/2025/tni-sebut-tewaskan-18-anggota-opm-tpnpb-membantah-apa-yang-sebenarnya-terjadi-di-intan-jaya/).

22 Mei

Proses operasi terhadap tiga korban luka tembak saat konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB-OPM di Intan Jaya, Papua telah berjalan lancar. Para korban telah dioperasi oleh tim. Tiga korban luka tembak atas nama Minus Jegesani (terluka di telinga), Junite Janambani (luka tembak di lengan kanan) dan Openi Wandagau (luka tembak di tangan kiri) (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya atau KOMISI, menggelar mimbar bebas di halaman Asrama Intan Jaya, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/05). Dalam mimbar bebas itu, mahasiswa mengecam pembunuhan yang diduga dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap warga sipil, saat kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Salah satu orator mimbar bebas, Marthen Weya menyatakan beberapa kejadian di Intan Jaya menyebabkan terbunuhnya beberapa warga sipil. Pada 13 Mei 2025, terjadi pembunuhan terhadap Elisa Wandagau (75 tahun) yang merupakan seorang hamba Tuhan Gereja GKII Anugerah

Sugapa Lama, Ruben Wandagau (35 tahun) adalah Kepala Kampung Hitadipa, Mono Takamina Tapani (40 tahun), dan Hetina Mirip (24 tahun) yang merupakan warga Kampung Sugapa Lama. "*Jasat [Hetina Mirip] baru ditemukan setelah 12 hari di sekitar halamannya tepatnya atau pada.23 mei 2025,"* kata Weya saat diwawancarai Jubi usai aksi mimbar bebas. Selain itu menurut Weya, beberapa warga juga terluka ketika TNI/Polri melakukan penyisiran di Kampung Hitadipa, Titigi, Sugapa Lama, Janamba, Jaindapa, Ndugusig, Soagama (https://jubi.id/polhukam/2025/gelar-mimbar-bebas-mahasiswa-intan-jaya-kecam-aparat-keamanan-atas-tewasnya-warga-sipil/).

02 Juni

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, secara tegas membantah tuduhan bahwa TNI terlibat dalam pembunuhan warga sipil bernama Hertina Murip di Intan Jaya, Papua Pegunungan. Ia menyatakan bahwa aksi brutal tersebut justru dilakukan oleh kelompok separatis OPM dan kini menuding aparat yang melakukan. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan OPM yang menyalahkan TNI atas kematia Hertina Murip (Cenderawasih Pos).

03 Juni

Situasi keamanan daerah di Jayawijaya Papua Pegunungan memanas. Setelah sebelumnya seorang anggota Polisi Bripda Marsidon Debataraja terluka karena ditembak di halaman rumah sakit, kini dua pekerja bangunan gereja yang menjadi sasaran. Kedua korban tersebut adalah Rahmat Hidayat (45) dan Saepudi (39). Keduanya merupakan warga sipil asal Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian saat sedang mengerjakan pembagunan Gereja GKI Imanuel di Kampung Kwantapo, Distrik Asotipo pada Rabu (04/06). Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menyebut bahwa kelompok pelaku kuat diduga merupakan bagian dari jaringan KKB pimpina Egianus Kogoya (Cenderawasih Pos).

08 Juni

Tentara Nasional Indonesia diduga membunuh Abral Wandikbo (27 tahun), warga asal Kampung Yuguru, Distrik Mebarok Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI juga diduga merusak 12 rumah warga dan Puskesmas, gedung sekolah dan Kantor Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga dijadikan pos keamanan. Warga meminta agar tentara keluar dari kampung mereka. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia atau YKKM Papua, Theo Hesegem mengatakan Abral Wandikbo ditangkap dan dibawa ke pos TNI pada 22 Maret 2025. Ia lalu mengalami penyiksaan, dan ditemukan meninggal dunia pada 26 Maret 2024. *"Memang dibunuh oleh TNI. Dia ditangkap, dibawa ke pos, disiksa. Mengalami tindakan kekerasan fisik, telinga, testa, mulut dipotong. Mutilasi. Kekerasan seperti ini pernah terjadi di Timika,"* kata Hesegem kepada Jubi, pada Jumat (25/04). Hesegem mengatakan Abral Wandikbo merupakan warga sipil, dan bukan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Hesegem mengatakan warga sipil harus mendapatkan perlindungan dan beraktivitas secara aman, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. *"Dia masyarakat sipil bukan TPNPB. Jangan menangkap sewenang-wenang, interogasi atau dipukul atau disiksa dan dibunuh. Tidak usah membunuh masyarakat. Hal-hal ini tidak boleh tidak terjadi. Masyarakat sipil harus dilindungi. [Jangan] emosi lampiaskan ke masyarakat sipil,"* ujarnya (https://jubi.id/lapago/2025/tni-diduga-bunuh-abral-wandikbo-warga-kampung-yuguru-nduga/).

16 Juni

Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat, ada 40 kasus kekerasan sipil dan politik atau sipol di Tanah Papua selama 2025. Kasus itu didominasi peristiwa kontak senjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, dan penembakan atau serangan tunggal. Kepala kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey mengatakan, ini berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, pemberitaan media dan data Sistem Pengaduan HAM atau SPH yang diterima pihaknya, selama 1

Januari 2025 – 12 Juni 2025. Kasus itu, misalnya kelompok sipil bersenjata menyerang pos-pos militer, satuan-satuan polisi atau tentara dan atau sebaliknya. Tentara dan polisi menyerang markas-markas kelompok sipil bersenjata (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-papua-catat-kasus-kekerasan-sipol-di-tanah-papua-didominasi-kontak-senjata/).

18 Juni

- Hari itu mendung menyelimuti Kota Nabire di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di Kompleks Kimi yang terletak di Jalan Sinak, beberapa anak terlihat berkeliaran. Dari rumah bermaterial setengah semen dan setengah kayu, tiga perempuan asli Papua pun keluar. Mereka sama-sama menggendong seorang anak dan menyandang noken. Ketiga perempuan itu merupakan pengungsi dari Distrik Pogama di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Mereka mengungsi sejak hampir lima bulan lalu, tepatnya sejak awal Februari 2025 setelah aparat TNI masuk ke kampung mereka menyerang TPNPB-OPM. *"Kami mengungsi sejak aparat keamanan datang ke Kampung Timobut, Distrik Sinak Barat pada 5 Februari 2025,"* kata Yomi Murib, satu dari tiga perempuan itu. Distrik Pogoma dan Timobut bersebelahan. Sebelum aparat TNI menguasai Pogoma, penduduknya sudah mengungsi duluan. *"TNI masuk datang bunyikan tembakan, baik TPNPB maupun TNI sama-sama masih ada [di Pogoma] sehingga kami yang harus keluar dari kampung halaman kami,"* ujarnya. Prajurit TNI, kata Murib, datang dalam jumlah besar dengan helikopter. Karena penduduk mengungsi, semua aktivitas di Pogoma terhenti. Kebun terbengkalai, sekolah tutup, dan tempat ibadah kosong. *"Aparat TNI masuk ke halaman gereja GKI di Pogoma dan duduk di gereja tersebut. TNI membuat tungku api dan tinggal di gereja sampai sekarang,"* ujarnya. Warga Pogama, termasuk Yomi Murib bersama suami dan empat anaknya, mengungsi dari rumah dengan berjalan kaki. Mereka menyeberangi Kali Sinak menuju Kembru, lalu turun ke Distrik Sinak. Sebagian warga lainnya ada yang turun ke Distrik Sinak melalui jalan raya. *"Saya dengan suami saya, seorang pendeta, membawa dua anak kami yang masih balita melanjutkan perjalanan turun*

mengungsi ke Nabire pada 16 Februari 2025. Sedangkan dua anak saya yang lebih besar masih tinggal di Distrik Sinak," katanya. Sebagian pengungsi menetap di Sinak dan sebagian lain, selain mengungsi ke Nabire juga ada yang mengungsi ke Timika dan Jayapura. Para pengungsi tidak hanya berasal dari Distrik Pogoma, tetapi juga dari Distrik Sinak Barat. *"Setelah kami, pada 16 Februari 2025 ada lagi sekitar 20 orang yang mengungsi ke Nabire,"* ujarnya (https://jubi.id/headline/2025/derita-pengungsi-dari-kabupaten-puncak-kami-seperti-berada-di-dalam-api-naraka/).

- Dua warga sipil menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh KKB di Kampung Samboga, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin (16/06). Dari keduanya salah satunya yang bernama Udin, asal Sidrap, Makassar meregang nyawa dengans sejumlah luka bacok. Sementara Edi, warga asal Banyuwangi, mengalami luka serius akibat dua anak panah yang tertancap di kepalanya. Ia juga mengalami luka bacok di bagian pipi dan kepala. Dan saat ini, Edi tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Dekai (Cenderawasih Pos).

19 Juni

- Pada Selasa (17/06) di Intan Jaya, dua warga sipil dilaporkan tewas diterjang peluru. Pihak TPNPB-OPM menyatakan bahwa kedua orang ini ditembak aparat TNI. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak TNI terkait tudingan tersebut. Kejadian tewasnya dua warga sipil ini terjadi di Kampung Bulapa dan Yoparu, DIstrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sejatinya ada tiga korban namun salah satunya diduga terlibat sebagai simpatisan ataupun anggota TPNPB OPM. Korban yang meninggal adalah Isak Kobogau (43), Yohanes Tipagau (40) dan Alphon Kobogau (20) yang disebut sebagai anggota TPNPB OPM (Cenderawasih Pos).
- Ketua Yayasan Serafim, Nehes Jon Fallo, mengungkapkan bahwa pasca penyerangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 21 Maret 2025 lalu, proses pembelajaran di wilayah tersebut tidak

berjalan normal. Situasi keamanan yang belum kondusif menjadi alasan utama dihentikannya aktivitas belajar mengajar secara langsung. Para siswa tetap diberi tugas dan materi belajar melalui WhatsApp agar nilai akhir tetap bisa diperoleh (Cenderawasih Pos).

21 Juni

Kasus tentara dan polisi terlibat perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Tanah Papua berulang kali terjadi. Meski bukan satu-satunya sumber, pasokan senjata api dan amunisi dari aparat keamanan itu ikut melumasi eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Kasus terbaru perdagangan amunisi ilegal yang melibatkan prajurit TNI terjadi pada 24 Mei 2025. Di terminal kargo Bandara Mozes Kilangan, 15 butir peluru kaliber 5,56 milimeter disembunyikan dalam bungkus rokok ditemukan saat pemeriksaan x-ray. Rencananya, belasan butir peluru yang diselundupkan petugas keamanan bandara berinisial AF itu akan dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Saat diperiksa, AF mengaku belasan peluru itu titipan dari A, seorang sopir truk tangki bahan bakar di bandara tersebut. A mengaku mendapatkan amunisi itu dari prajurit TNI AD berinisial S dan AM. Kasus itu pun ditangani Polisi Militer TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, Mayjen Rudi Puruwito mengatakan kasus itu ditangani langsung oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan III. *"Itu bukan anggota Kodam XVII/Cenderawasih. Yang menangkap dan menangani saat itu adalah POM AU dari Lanud Yohanes Kapiyau. Jadi semua [laporan] prosesnya tidak dilaporkan ke saya, tetapi ke Kogabwilhan III. Lebih tepat ditanyakan ke Kogabwilhan III,"* kata Rudi kepada Jubi pada Jumat (20/06) (https://jubi.id/polhukam/2025/lagi-lagi-kasus-tentara-dan-polisi-jual-senjata-api-dan-amunisi-di-tanah-papua/).

22 Juni

Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pengunungan meminta TNI/Polri dan TPNPB OPM tidak melibatkan warga sipil di Yahukimo dalam konflik kedua pihak. Pernyataan itu

disampaikan mahasiswa dalam konferensi pers setelah diskusi publik terkait konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan TPNPB OPM di Distrik Kurima dan Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diskusi digelar, Sabtu (21/06). *"Tentara Pembebasan Nasional Papua- Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM dan TNI [Polri] agar tidak melibatkan warga sipil [dalam konflik bersenjata antara kedua pihak], sebab warga sipil yang justru menjadi korban dalam kontak tembak. Warga sipil justru wajib dilindungi,"* kata Hiskia Hilapok. Mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik prajurit TNI dan personel Polri non-organik dari Distrik Kurima dan Distrik Tangma. *"[Kami juga minta] setop kriminalisasi, intimindasi dan pembunuhan terhadap warga sipil di Kurima, Tangma, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Maybrat dan seluruh Tanah Papua,"* ucapnya (https://jubi.id/lapago/2025/mahasiswa-yahukimo-tni-polri-dan-tpnpb-opm-jangan-libatkan-warga-sipil/).

24 Juni

Konflik berdarah di Tanah Papua akibat baku tembak antara TNI-Polri dan TPNPB di beberapa kabupaten di Tanah Papua terus berlanjut hingga memakan korban di kedua kubu, bahkan warga sipil pun turut korban terkena peluru. Baik di kabupaten Puncak maupun Intan Jaya, Papua Tengah, kontak tembak masih terjadi. Aksi sporatis belum berakhir. Terakhir, tiga dari lima warga sipil di kampung Bulapa, Galunggama,Galamagae, Yoparu, distrik Sugapa, Intan Jaya, tewas dari depan halaman rumah mereka pada Rabu (18/06) pagi. Mereka diduga kuat tewas terkena peluru aparat gabungan yang hendak menyergap markas TPNPB. Tiga warga sipil yang tewas tertembak itu yakni Alfons Kobogau (20), Isak Kobogau (43), dan Yohanes Tipagau (40). Menanggapi kasus penembakan warga sipil tersebut, Thobias Bagubau, anggota DPRP Papua Tengah, menegaskan kepada kedua belah pihak segera mengakhiri aksi baku kejar hingga baku tembak yang menyebabkan warga sipil terus berjatuhan. Keberadaan pasukan non-organik yang ditugaskan di Intan Jaya, Puncak maupun kabupaten lainnya juga wajib segera ditarik demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. *"Kontak tembak antara dua kelompok bersenjata itu harus segera diakhiri. Pasukan non-organik juga segera*

ditarik dari Tanah Papua. Masyarakat dan kita semua mau daerah ini kembali pulih dan normal, tidak ada kejadian penembakan hingga operasi militer. Aktivitas sehari-hari sudah sangat terganggu, tidak bisa dilakukan karena situasinya sangat tidak aman. Kapan baru mau berkembang kalau situasinya begitu terus? Harap tidak ada pertumpahan darah. Warga sipil harus dilindungi, bukan justru dijadikan sasaran tembak," ujarnya dengan nada tegas, Selasa (24/06) (https://suarapapua.com/2025/06/24/jakarta-didesak-tarik-pasukan-non-organik-dari-papua/).

25 Juni

Dampak dari kontak tembak yang terjadi antara TNI Polri dengan TPNPB membuat ratusan warga panik. Tercatat sekitar 600 warga di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan mengungsi ke Gereja Halihalo. Adapun insiden kontak tembak terjadi di Kampung Arulu Desa Yeleas, Distrik Tangma pada 15 Juni 2025, sekitar pukul 11.00-01.00 WIT menewaskan seorang sipil bernama Mesak Asipalek (45) serta anggota TPNPB bernama Prek Sarera (Cenderawasih Pos).

03 Juli

Komnas HAM RI menyatakan telah menerima 104 aduan isu konflik di Tanah Papua selama 2024. Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan aduan itu mulai dari isu konflik agraria hingga kekerasan oleh aparat keamanan. Pernyataan itu disampaikan Anis Hidayah dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM yang bertajuk "Menyuarakan Keadilan dan HAM di Tahun Politik 2024" yang disiarkan melalui kanal YouTube Komnas HAM, Rabu (02/07). Katanya, fokus pengamatan situasi di Tanah Papua adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, DOB, penanganan pengungsi, dan penangangan kasus kekerasan. Selain itu beberapa kasus yang menjadi fokus atau dipantau Komnas HAM RI antara lain, adalah kontak tembak antara Satgas Pamtas Yonif 303/SSM dengan TPNPB-OPM pimpinan Kenelak Murib di Kampung Pamebeut, Distrik Yugumuak. *"Kami merekomendasikan kepada Panglima TNI untuk menghindari seluruh kegiatan operasi militer*

di [Tanah] Papua [terutama] di wilayah pemukiman [penduduk] untuk mencegah korban jiwa dari warga sipil," kata Anis Hidayah (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-ri-terima-104-aduan-isu-konflik-di-tanah-papua-selama-2024/).

08 Juli

Kelompok TPNPB yang merupakan bagian dari OPM, melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah bangunan di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Minggu (06/07). Dilaporkan bahwa bangunan yang dibakar antara lain rumah pribadi milik Bupati Puncak Elvis Tabuni, gedung SD Pinapa beserta rumah para guru, serta Kantor Distrik Omukia. Aksi ini dilakukan karena OPM menduga bangunan-bangunan tersebut dijadikan sebagai pos pertahanan militer Indonesia (Cenderawasih Pos).

12 Juli

Suasana di Pasar Sentral, Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, mendadak mencekam setelah terdengar suara tembakan pada Sabtu malam (12/07) sekitar pukul 19.29 WIT. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang warga sipil bernama Edi Hermanto (33), warga asal Probolinggo, yang berdomisili di Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjedn Pol. Faizal Ramadhani, meneyebut peristiwa ini diduga kuat berkaitan dengan aktivitas KKB yang selama ini aktif di wilayah Kota Mulia (Cenderawasih Pos).

16 Juli

Dua warga sipil dilaporkan tewas dalam dua isnisden berbeda di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang terjadi pada Sabtu (13/07). Kepolisian memastikan bahwa aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh KKB pimpinan Lekagak Telenggen (Cenderawasih Pos).

23 Juli

Saat ini di Intan Jaya disebut ada ribuan warga terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman. Ini tak lepas dari konflik bersenjata antara aparat keamanan dan KKB. Menurut data yang disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni,

pada Minggu, 06 Juli 2025 di Ilaga, ribuan pengungsi berasal dari sejumlah antara lain DIstrik SInak Barat, Bina, Pogoma, Gome, Gome Utara dan Omukia. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak, perempuan dan lansia yang mengungesi karena merasa terancam oleh konflik bersenjata yang terus berlanjut (Cenderawasih Pos).

26 Juli

Seorang warga sipil bernama Joni Hendra dilaporkan tewas ditembak oleh anggota KKB di Kios Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Jumat (25/07) sekitar pukul 13.40 WIT. Pelaku diidentifikasi bernama Yonial Kobogau, anggota KKB pimpinan Apen Kobogau (Cenderawasih Pos).

20 Agustus

Dua tukang ojek di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh KKB Nokai Deiyai, Kodap XXXI, pimpinan Panglima Jhon Badii, Senin (18/08). Akibat peristiwa tersebut, satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka serius (Cenderawasih Pos).

24 Agustus

Pada Jumat, 8 Agustus 2025 sekitar pukul 04.35 WIT, militer Indonesia melakukan operasi militer di Distrik Mewoluk. Aparat mengepung pemukiman warga sipil dan melakukan penembakan brutal. Akibatnya tiga anak di bawah umur menjadi korban; Jhon Gire (2 tahun) – luka tembak pada paha. Yoniton Kogoya (13 tahun) – luka tembak pada kaki. Tritera Walia (15 tahun) – luka tembak pada kaki. Saat ini dua korban dirawat secara tradisional di hutan belantara, karena warga terpaksa mengungsi, sementara satu korban dirujuk ke RS Dian Harapan, Waena, Jayapura. Selain itu, aparat juga melakukan operasi udara dengan helikopter untuk pendaratan pasukan, disertai penembakan dan penangkapan warga sipil. Hingga kini jumlah pasti korban tambahan belum dapat dipastikan. Erdy Wonda salah satu mahasiswa Puncak Jaya mengatakan, kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi negara, justru menjadi korban utama operasi

militer (https://suarapapua.com/2025/08/24/tiga-remaja-tertembak-di-puncak-jaya-pangdam-diminta-tarik-pasukan-non-organik/).

25 Agustus

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Papua, mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Jumat (22/08). Dalam operasi pengamanan persiapan HUT ke-80 RI, seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial MY ditemukan dalam kondisi luka tembak pada bagian paha kanan, hingga akhirnya dilarikan ke RSUD Mulia (Cenderawasih Pos).

26 Agustus

Ribuan warga Distrik Lumo dan Mewoholu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan mengungsi ke berbagai tempat, diduga akibat penyerang yang dilakukan oleh Komando Operasi Satuan Tugas atau Satgas Habema di wilayah permukiman mereka dalam beberapa hari terakhir. Koordinator umum mahasiswa Puncak Jaya di Kota Jayapura, Papua, Erdy Wonda mengatakan situasi di Distrik Lumo dan Mewoholu kini sedang tidak aman bagi warga. Seab, terjadi operasi militer dan pengerahan pasukan non organik dalam beberapa hari terakhir, yang menimbulkan rasa takut bagi masyarakat di sana. *"Operasi militer [mulai dilakukan] pada 7 Agustus 2025, pukul 03.00 atau jam tiga subuh di Distrik Mewoholu dan Lumo. Kemudian pagi hari penyerangan terhadap warga dilakukan lewat darat dan udara mengakibatkan dua rumah terbakar, Komando Operasi Satgas Habema lakukan operasi di permukiman warga,"* kata Erdy Wonda saat menggelar konferensi pers di Kantor LBH Papua di Kampkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Senin (25/8/2025). Menurutnya, selain menyebabkan ribuan warga dua distrik mengungsi, penyerangan itu juga menyebabkan tiga anak mengalami luka tembak. Korban adalah JG (2 tahun) luka tembak pada Paha YK (13 tahun) luka tembak di kaki kanan, dan TW (15 tahun) luka tembak pada kaki (https://jubi.id/lapago/2025/ribuan-warga-puncak-jaya-dilaporkan-mengungsi-akibat-penyerangan-militer/).

02 September

Jubir JDP, Yan Christian Warinussy, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa konflik panjang di Tanah Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata. Negara harus berani membuka ruang pengungkapan kebenaran, membentuk KKR, serta mendirikan Pengadilan HAM di Papua sebagai langkah konkret menuju penyelesaian damai. JDP sebagai pihak yang konsisten terlibat dalam upaya membangun Papua Tanah Damai (PTD) merasa perlu memberi catatan kritis terhadap situasi sosial dan politik di Tanah Papua saat ini. *"Kami juga ingin menekankan kembali pentingnya ide dasar untuk membangun Papua Tanah Damai dengan berangkat dari hasil penelitian dan rekomendasi ilmiah yang pernah dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),"* kata Yan Christian Warinussy dalam keterangan persnya. "*Penelitian LIPI mengenai konflik Papua berhasil mengidentifikasi empat akar masalah yang hingga kini masih relevan dan belum terselesaikan, yaitu soal marjinalisasi dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP). Sejak 1970-an, pembangunan ekonomi yang timpang, konflik politik yang tak berkesudahan, dan migrasi besar-besaran dari luar Papua telah menyingkirkan orang Papua dari tanahnya sendiri. Akibatnya, OAP semakin terpinggirkan di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Solusinya jelas: negara wajib menjalankan kebijakan afirmatif yang mengakui hak OAP dan memberdayakan mereka secara nyata,"* tegas Yan.melalui pesan WhatsApp Kepada Jubi, (02/09) (https://jubi.id/polhukam/2025/jaringan-damai-papua-saatnya-negara-pilih-jalan-kebenaran-bukan-senjata/).

10 September

Ikatan Mahasiswa Yahukimo di Manokwari, Papua Barat, mendesak Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mencopot Kapolres Yahukimo dari jabatannya. Perwakilan mahasiswa Yahukimo di Manokwari, Berto mengatakan, tuntutan mahasiswa Yahukimo berkaitan dengan kematian Victor B. Deal. Menurut Berto kematian Victor B. Deal merupakan bukti brutalitas aparat. *"Polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, namun justru merampas nyawa saudara kami Victor B. Deal, Tobias Silak, dan juga warga sipil di Yahukimo,"* katanya dikutip dari

siaran pers yang diterima Suara Papua di Jayapura, Papua, Rabu (09/09). Disebutian bahwa Victor B. Deal (27) tewas karena dianiaya aparat. Peristiwa ini berawal di depan Polsek Dekai, Kota Yahukimo, sekitar 30 meter dari pos polisi. Saat itu, Viktor keluar rumah untuk membeli rokok. Dalam perjalanan, ia sempat melontarkan kata "Papua Merdeka." Ucapan tersebut membuat beberapa anggota polisi yang melihatnya bereaksi. Viktor, kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian, dan dinaikkan ke mobil patroli sekitar pukul, 03.00 WP. Setelah ditangkap, Viktor mengalami penganiayaan berat di dalam mobil patroli Polres Yahukimo. *"Proses penyiksaan itu berlangsung cukup lama, sekitar 1 hingga 3 jam, bahkan hingga menjelang paginya. Sekitar pukul 05.00, Viktor dibawa dengan konvoi kendaraan yang terdiri dari mobil Dalmas Polres Yahukimo, tiga unit kendaraan Brimob, mobil komando, dari Kodim 1715-01, serta kendaraan taktis bersenjata lainnya,"* katanya. Dia mengatakan, konvoi tersebut berkeliling Kota Dekai sambil membawa Viktor yang sudah tidak bernyawa akibat penganiayaan (https://suarapapua.com/2025/09/10/mahasiswa-yahukimo-desak-kapolda-papua-copot-kapolres-yahukimo/).

24 September

Sebanyak lima orang yang diduga pekerja tambang di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Elkius Kobak dan Kopi Tua Heluka. Jumlah ini terjadi [ada hari yang berbeda. Sebelumnya dua korban yang diklaim oleh pelaku sebagai anggota intelejend dibunuh kemudian jenasahnya diletakkan di pinggir jalan, kini tiga penambang lainnya ikut dibantai (Cenderawasih Pos).

25 September

Klaim pihak KKB jika korban penembakan di Kampung Ulakin, Distrik Kolf Brazar, Kabupaten Asmat bernama Indra Guruwardana (24) adalah aparat keamanan dibantah pihak Kepolisian Resor Asmat. Dihubungi media ini, Kapolres Asmat melalui Labag Ops AKP Okto A. Samosir menegaskan, korban pembantaian KKB tersebut murni warga sipil (Cenderawasih Pos).

30 September

- Sejumlah dua fraksi DPR Papua Tengah, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Fraksi Kelompok Khusus Jalur Pengangkatan, menyoroti penanganan konflik bersenjata dan pengungsi di Papua Tengah. Mereka mengingatkan pembangunan di Provinsi Papua Tengah tidak akan berjalan dengan baik jika konflik bersenjata yang berkepanjangan terus terjadi. Anggota Fraksi PDIP, Maksimus Takimai mengatakan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Papua Tengah 2025 dinilai belum maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Di Provinsi Papua Tengah, konflik bersenjata itu terjadi di beberapa kabupaten. *"APBD Perubahan itu belum berdampak kepada masyarakat yang berdampak konflik seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai,"* kata Takimai dalam pandangan umum Fraksi PDIP pada rapat paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Senin (29/09). Rapat paripurna itu membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Maksimus Takimai mengatakan banyak warga sipil mengungsi dari Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, maupun beberapa daerah konflik lainnya. Kebanyakan warga sipil itu mengungsi ke Kabupaten Mimika dan Nabire (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dpr-papua-tengah-soroti-penanganan-konflik-bersenjata-dan-pengungsi-di-papua-tengah/).
- Kali ini kelompok Lamek Taplo melakukan aksinya di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap XV Ngalum Kupel itu membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok beserta rumah dinas tenaga kesehatan. Peristiwa yang terjadi pada Senin (29/09) sekitar pukul 06.20 WIT ini memicu aksi kontak tembak antara aparat gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz dengan KKB. (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

- Dua gedung SMP Negeri Kiwirok di Kampung Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dibakar pasukan TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel pimpinan Brigjen Lamek Alipky Taplo, Selasa (07/10) pagi. Siaran pers TPNPB yang disebarkan ke wartawan oleh juru bicara Sebby Sambom, mengatakan, sekolah tersebut dibakar pada Selasa, 7 Oktober 2025 sekitar jam 07.30 WIT. *"Pembakaran ini terpaksa kami lakukan karena aparat militer Indonesia menjadikannya sebagai pos militer, sehingga tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar di sana. SMP Negeri Kiwirok sebelum dibakar, aparat militer Indonesia selalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pelajar dan mengecek isi dalam tas, bahkan banyak terdapat sejumlah pelajar diinterogasi oleh aparat militer Indonesia untuk mencari tahu keberadaan pasukan TPNPB,"* urainya (https://suarapapua.com/2025/10/08/dijadikan-pos-militer-lamek-taplo-mengaku-bakar-gedung-smp-n-kiwirok/ dan Cenderawasih Pos).
- Anggota Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Intan Jaya, Bartolomeus Mirip mengkritik penempatan aparat keamanan dari luar Tanah Papua di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dalam jumlah yang berlebihan. Menurutnya, pendekatan keamanan yang dipakai pemerintah telah menambah jumlah pos aparat keamanan di berbagai kampung dan distrik, dan membuat warga takut serta tidak bebas beraktivitas. *"Penempatan pasukan dalam jumlah yang besar, itu benar [terjadi. Aparat keamanan] mulai membuka pos-pos di tingkat kampung di berbagai distrik. Ada di Distrik Sugapa, Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Homeyo, itu yang ada,"* kata Mirip di Nabire, Papua Tengah pada (06/10). Bartolomeus Mirip mengatakan penempatan aparat keamanan dalam jumlah berlebihan itu justru tidak membawa kedamaian bagi warga. Mirip menyatakan jika warga tidak merasa bebas untuk pergi ke kebun atau mencari hasil-hasil hutan, bagaimana mereka akan mendapatkan penghidupan mereka. Ia juga mengingatkan anak-anak tidak bisa bersekolah dengan tenang.

"Di kota saja, ruang geraknya tutup. Kami mau berbicara di masyarakat [di kampung], untuk bekerja [di] kebun, sudah tidak tampak, sudah lama lama tidak bekerja. Anak-anak sekolah tidak sekolah," katanya. Mirip menyatakan situasi seperti itu telah berlangsung sejak 2019 (https://jubi.id/polhukam/2025/jumlah-aparat-keamanan-yang-berlebihan-malah-membuat-warga-takut-beraktivitas/).

09 Oktober

Seorang pekerja jalan bernama Anselmus Arfin (25) tewas usai ditembak KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (08/10). Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 WIT. Saat itu korban bersama empat rekannya karyawan PT TJP sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning (Cenderawasih Pos).

12 Oktober

- Keselamatan warga sipil di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat harus menjadi prioritas utama pasca peristiwa baku tembak antara TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya dengan Satgas Yonif 410/Alugoro, Sabtu (11/10). Dalam peristiwa itu, satu anggota TNI meninggal dunia, satu pucuk senapan anggota hilang, dan ratusan warga sipil mengungsi. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, melalui siaran pers, Sabtu (11/10). *"Kami menerima informasi bahwa telah terjadi penyerangan di Kampung Moyeba yang mengakibatkan satu prajurit TNI tewas dan tiga lainnya kritis dan Kelompok penyerang yang diduga bagian dari TPNPB disebut membawa kabur satu pucuk senjata organik laras panjang milik aparat,"* ungkap Warinussy. Ia menyebut bahwa pasca peristiwa tersebut, situasi di lapangan sangat mencekam dan Informasi yang diperoleh LP3BH menunjukkan bahwa puluhan hingga ratusan warga sipil kini melarikan diri ke hutan di wilayah Distrik Moskona Utara untuk menyelamatkan diri dari potensi operasi militer, setelah kontak tembak tersebut. *"Kami sangat khawatir*

dengan keselamatan masyarakat sipil di Moyeba dan sekitarnya. Mereka bukan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata namun justru sering menjadi korban" katanya. ia meminta otoritas sipil dan militer di Teluk Bintuni harus segera mengambil langkah langkah konkret untuk menjamin keselamatan warga sipil (https://jubi.id/polhukam/2025/satu-tni-gugur-warga-mengungsi-lp3bh-soroti-keamanan-warga-sipil-di-moskona-utara/).

- Praka Amin Nurohman Gugur saat baku tembak antara TNI dengan Kelompok TPNPB OPM di Distrik Moskona Timur, Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Sabtu (11/10). Selain itu, satu pucuk senapan almarhum dirampas oleh Kodap IV TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya. Kepala Pusat Penerangan Kodam XVIII Kasuari, Kolonel Inf J Daniel Manalu mengatakan peristiwa baku tembak terjadi saat Tim Satgas sedang melaksanakan kegiatan anjangsana kepada warga di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. *"Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar pukul 13.30 telah terjadi penyerangan dan penembakan oleh TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya, pimpinan Demi Moss terhadap Tim Pos Moyeba Satgas Yonif 410/Alugoro yang sedang melaksanakan kegiatan anjangsana,"* kata Kapendam. Kapendam menegaskan, aksi tersebut menunjukkan bentuk kekejaman yang kerap dilakukan oleh kelompok TPNPB OPM. "*Hal ini merupakan bentuk kekejaman dan kekejian yang kerap dilakukan oleh TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya terhadap TNI, Polri maupun masyarakat umum. Oleh karenanya Kodam XVIII/Ksr berkomitmen akan mengejar dan menangkap pelaku penembakan yang dilakukan TPNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya, para pelaku penyerangan bersenjata,"* tegasnya (https://jubi.id/polhukam/2025/praka-amin-nurohman-gugur-saat-kontak-tembak-antara-tpnpb-di-teluk-bintuni/).

17 Oktober

- Sebanyak 15 orang meninggal dunia dalam operasi Satuan Tugas atau Satgas Rajawali I, II Habema dan Satgas 712/WT di Kampung Janamba, dan Soanggama Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (15/10). Ketua Tim Mediasi Konflik Intan

Jaya, Yoakim Mujizau menjelaskan bahwa timnya telah turun ke Kampung Soanggama dan mengidentifikasi korban serta mengumpulkan informasi dari masyarakat yang menjadi saksi mata persitiwa tersebut. Tim juga mendapat informasi dari anggota TNI yang ada bertugas di sana. *"Korban 15 orang ini tidak semua anggota [Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat] atau TPNPB OPM. Tetapi ada juga masyarakat sipil, seorang mono [bisu tuli] dan satu orang Ibu rumah tangga ,"* kata Yoakim melalui rilis pers yang diterima Jubi di Nabire, Papua Tengah, Jumat (17/10/2025). Yoakim memastikan sembilan orang adalah warga, *"Untuk korban meninggal dunia atas nama Agus Kogoya itu masyarakat sipil, sedangkan Agus Kogoya yang anggota OPM dia masih hidup,"* katanya (https://jubi.id/polhukam/2025/15-orang-tewas-dalam-operasi-satgas-tim-mediasi-tidak-semua-tpnpb-opm/).

- Sebanyak 14 anggota kelompok OPM Kodap VIII/Soanggama, dilaporkan tewas dalam kontak senjata dengan pasukan Komando Operasi Habema Kogabwilhan III di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Rabu (15/10) (Cenderawasih Pos).

18 Oktober

- Komnas HAM RI menyoroti krisis kemanusiaan yang dialami lebih dari 9.000 pengungsi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, akibat eskalasi konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir sembilan bulan. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mendesak penarikan bertahap pasukan non-organik dan mendorong dialog kemanusiaan agar warga dapat kembali dengan aman ke kampung halamannya. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan memang Komnas HAM dalam seminggu ini turun ke beberapa wilayah di Papua Tengah terutama di Kabupaten Puncak, Ilaga dimana pengungsi berada, di Nabire dan Timika. *"Ini luar biasa, karena dari sisi statistik tampaknya ini paling besar, karena 9.261 orang yang ada di tenda-tenda dan 61 ribu orang lebih yang terdampak dari pengungsian ini sudah berjalan cukup lama, hampir 9 bulan dan kondisi pengungsi juga sangat memprihatinkan,"* kata Anis Hidayah di Nabire pada Kamis (16/10). Anis Hidayah

mengatakan dalam kunjungan Komnas HAM RI selama sepekan, mereka menemukan banyak pengungsi yang sakit, perempuan, anak-anak, lalu tidak ada layanan khusus. Para pengungsi mengalami trauma dan sangat ingin kembali ke kampung halamannya tetapi di sisi yang lain mereka juga trauma karena pos-pos keamanan non-organik yang dibentuk di beberapa checkpoint di kampung-kampung (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-desak-penarikan-pasukan-non-organik-di-puncak-9-000-warga-masih-mengungsi/).

- Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Nabire tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabuoaten Nabire Juma (17/10) sekitar pukul 10.00 WIT. Insisden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Masturiyadi (50) (Cenderawasih Pos).

27 Oktober

Pasca operasi militer yang terjadi pada 5 Oktober 2025 di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama tim kemanusiaan memasang sejumlah baliho berisi pesan larangan perang di area sipil di lima distrik terdampak konflik bersenjata. Pemasangan baliho dilakukan pada 25 Oktober 2025 di Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage, dan Goa Balim, sebagai bentuk seruan agar aparat TNI/Polri dan TPNPB menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif kemanusiaan untuk melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah tersebut. *"Kami tidak menghalangi tugas aparat maupun perjuangan pihak lain, tapi ingin memastikan bahwa masyarakat sipil tidak menjadi korban. Baliho ini adalah tanda bahwa daerah sipil bukan zona perang,"* kata Hesegem melalui pernyataan persnya yang dikirim ke Jubi, Senin (27/10) (https://jubi.id/rilis-pers/2025/ykkmp-pasang-baliho-larangan-perang-di-area-sipil-pasca-operasi-militer-di-melagi/).

31 Oktober

Ratusan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Militer (KOMAM) Paniai menggelar demonstrasi menuntut penarikan pasukan militer nonorganik yang ditempatkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat (31/10). Mereka menilai Paniai bukan daerah konflik sehingga kehadiran militer tidak tepat. Aksi itu dilakukan dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai. Korlap Umum, Geitogo Gobai menjelaskan tepat pada selasa (28/10) sekitar pukul 03.00 WP, masyarakat sipil Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai dikagetkan dengan kedatangan ratusan anggota Marinir atau Angkatan Laut berseragam loreng dan bersenjata lengkap. Mereka secara sepihak, lalu mengambil alih di Puskesmas, kantor Distrik, dan pemukiman warga. Tiga bulan lalu, tepatnya pada Agustus 2025, Paniai kedatangan Pasukan Rajawali yang kemudian menduduki di dusun-dusun, bukit kutik, rawa rawa hingga menduduki fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, gereja, serta pemukiman warga untuk dijadikan tempat tinggal mereka. *"Kondisi ini betul-betul meresahkan warga sipil di Paniai. Seluruh aktivitas publik macet, sekolah yang tadinya aktif, kini tidak berjalan. Pelayanan Puskesmas tidak berjalan. Karena tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ketakutan dan menghilang entah kemana, akibat masifnya pendoropan militer secara yang berlebihan memakai fasilitas umum,"* katanya (https://jubi.id/meepago/2025/warga-paniai-desak-penarikan-pasukan-nonorganik-dari-wilayah-nonkonflik/).

06 November

Sejumlah masyarakat dari tujuh kampung di Distrik Jila mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika selasa (04/11). Kedatangan mereka terkait dengan penembakan yang terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 31 Oktober lalu. Warga masyarakat Distrik Jila menuntut agar aparat TNI segera ditarik dari wilayah itu. Mereka juga meminta agar Dandim 1710/Mimika segera menarik pasukan TNI tambahan di Distrik Jila, Karena dengan

penambahan pasukan TNI tersebut menyebabkan peristiwa penembakan (Cenderawasih Pos).

10 November

- Seruan untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan martabat kemanusiaan kembali menggema dari Gereja Katolik di Tanah Papua. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua, melalui pertemuan para direktur di Timika pada awal November 2025, mengeluarkan pernyataan publik berjudul *"Hentikan Kekerasan dan Pulihkan Martabat Kemanusiaan di Tanah Papua."* Melalui siaran pers yang diterima Jubi.id, Senin (10/11), mereka menegaskan: konflik bersenjata, ketimpangan ekonomi, dan krisis sosial yang menahun telah menjadikan Papua sebagai wilayah penderitaan yang belum berakhir. SKP menyebut kekerasan di Tanah Papua bukan lagi peristiwa biasa, melainkan sistem yang terstruktur. Dari data pastoral yang mereka himpun, sedikitnya 4.469 warga di Puncak Papua dan 1.231 warga di Intan Jaya masih hidup dalam pengungsian akibat operasi militer yang berkepanjangan (https://jubi.id/rilis-pers/2025/skp-se-tanah-papua-desak-negara-hentikan-kekerasan-dan-pulihkan-martabat-kemanusiaan/).
- Ribuan massa aksi demo damai Mahasiswa, Pelajar, masyarakat dan mama-mama yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIMWP) yang menggelar aksi demo damai dari beberapa titik kumpul seperti di USWIM Nabire, Jepara, Karang Tumaritis, dan Siriwini. Lalu masa long march dari setiap titik tersebut menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) di Jl. Mandala Atas, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Senin (19/11/2025). Massa menuntut MRP-PT membuka mata untuk sikapi atas situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua secara khusus di Papua Tengah (https://jubi.id/meepago/2025/darurat-militer-dan-krisis-kemanusiaan-di-papua-tengah-ribuan-massa-aksi-demo-datangi-mrp-pt/).

20 November

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Munafrizal Manan menegaskan spiral kekerasan di Papua harus dihentikan agar tidak terus terjadi pengungsian. Manan, dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan kekerasan bersenjata yang terus berulang dari berbagai pihak hanya memperburuk situasi dan menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berkesudahan (https://jubi.id/menyapa-nusantara/2025/kemenham-spiral-kekerasan-di-papua-harus-dihentikan/).

21 November

- Yarti Gwijangge, salah seorang perempuan asal Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengungsi ke daerah Ilekma, Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menceritakan bagaimana awal ia bersama ribuan warga Nduga meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kisah itu diceritakan Yarti Gwijangge saat menjadi Narasumber pada Festival Literasi dan Resiliensi 'Merawat Ingatan Melalui Kata', yang diselenggarakan Dewan Gereja Papua bekerja sama dengan Pusat Studi HAM Sosial dan Pastoral Pastoral STT Walter Post Jayapura di Kota Jayapura, Papua, Jumat (21/11) (https://jubi.id/polhukam/2025/kisah-pengungsi-di-tanah-papua-yang-tak-kunjung-diselesaikan/).
- Dewan Gereja Papua mencatat, hingga Oktober 2025, pengungsi di berbagai daerah di Tanah Papua mencapai 103.218 orang. Mayoritas pengungsi adalah orang asli Papua. Mereka mengungsi ke wilayah lain yang dianggap aman, karena operasi militer dan konflik bersenjata antara militer dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Staf Dewan Gereja Papua, Eneko Pahabol, mengatakan operasi militer dan konflik bersenjata mengganggu kehidupan dan pelayanan sipil. Menyebabkan munculnya pengungsi baru di Tanah Papua. Dampak terbesar dari Konflik bersenjata terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah di mana operasi militer memaksa seluruh desa mengungsi (https://jubi.id/polhukam/2025/dewan-gereja-papua-catat-ada-103-218-pengungsi-di-tanah-papua/).

25 November

Pemerintah pusat dan daerah didesak segera menarik pasukan keamanan organik dan non organik yang selama ini dikirim ke Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Desakan itu disampaikan Tim Peduli Kemanusiaan dan Alam Paniai, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai atau FKM-KP Kota Studi Jayapura. Tim Peduli Kemanusiaan dan Alam Paniai berpendapat, keberadaan pasukan organik dan non organik di wilayah itu, justru memperburuk situasi keamanan masyarakat, dengan meningkatnya operasi militer di sana (https://jubi.id/meepago/2025/pemerintah-didesak-tarik-pasukan-keamanan-dari-kabupaten-paniai/).

27 November

Amnesty Internasional Indonesia mendesak pelaku serangan drone di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diusut tuntas. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya mengecam serangan yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai satu lainnya, Selasa (25/11) malam (https://jubi.id/rilis-pers/2025/amnesty-internasional-desak-pelaku-serangan-drone-di-yahukimo-diusut/).

28 November

Mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan yang sedang menempuh studi di Kota Jayapura mengecam kejadian yang terjadi pada, 25 November 2025, dimana aparat keamanan diduga melepaskan bom saat melakukan pengejaran terhadap KKB. Dan akibatnya dua orang menjadi korban dimana satunya bernama Listin Atis Sam yang berstatus pelajar meninggal dunia sedangkan satunya lagi dalam kondisi kritis (Cenderawasih Pos).

29 November

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI telah menerima 60 pengaduan kasus dari Tanah Papua, selama periode Januari 2025 hingga November 2025. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian mengatakan,

kasus itu terdiri dari delapan kasus dugaan pelanggaran hak ekosob dan 12 kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Katanya, jumlah kasus yang diadukan itu tidak merefleksikan total dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, karena berbasis pada aduan serta potensi aduan baru, dan masih banyak kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua yang belum diadukan (https://jubi.id/polhukam/2025/selama-2025-komnas-ham-ri-terima-60-pengaduan-kasus-dari-tanah-papua/).

11 Desember

Komite Nasional Papua Barat Wilayah Sorong Raya menegaskan bahwa Papua resmi memasuki fase darurat kemanusiaan, ditandai ledakan jumlah pengungsi, intensifikasi operasi militer, serta pembungkaman ruang sipil yang semakin brutal (https://jubi.id/domberai/2025/papua-darurat-ham-knpb-sorong-negara-bantai-warga-demi-lindungi-industri-ekstraktif/).

16 Desember

Enam helikopter milik TNI dikabarkan melakukan penyerangan jalur udara terhadap markas anggota TPNPB, di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/12) lalu. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Pembela HAM di Tanah Papua, Theo Hesegem mengatakan penyerangan dilakukan sekitar pukul 05.00 WIT. *"Akibatnya beberapa rumah warga sipil rusak,"* kata Theo. Lanjut Theo menerangkan, selain melakukan penyerangan, helicopter juga melakukan pendropan pasukan di daerah tersebut. Theo juga mengatakan, akibat penyerangan itu, masyarakat setempat memilih mengungsi keluar dari Distrik Gearek dan kini menuju ke Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan (Cenderawasih Pos).

17 Desember

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI meluncurkan laporan "Papua dalam Cengkeraman Operasi Militer". Laporan itu memotret dampak operasi militer terhadap kehidupan masyarakat sipil di Tanah Papua dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Peluncuran

laporan "Papua dalam Cengkeraman Operasi Militer" dilakukan secara live streaming di YouTube YLBHI, Selasa (16/12) (https://jubi.id/polhukam/2025/ylbhi-luncurkan-laporan-papua-dalam-cengkeraman-operasi-militer/).

29 Desember

Tim Kemanusiaan Distrik Gearek menduga telah terjadi penghilangan paksa terhadap seorang anak di bawah umur dalam operasi militer yang berlangsung di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada 12 Desember 2025 lalu. Dugaan tersebut muncul setelah korban bernama Arestina Giban (7) dilaporkan tertembak hingga tewas dan hingga kini jasadnya belum ditemukan. Dalam laporan investigasi awal, tim kemanusiaan mengungkapkan kesaksian Wina Kerebea (35), ibu korban, yang juga mengalami luka akibat serpihan mortar (Cenderawasih Pos).

Kronik Peredaran Senjata Api

10 Maret

Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus melakukan pengembangan kasus penyelundupan senjata api dan amunisi ke KKB Puncak Jaya Lerimayu Telengen. Tersangka dalam kasus ini adalah YE (28), seorang mantan anggota TNI AD yang dipecat pada tahun 2022 karena terlibat dalam kasus jual beli senjata. Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige Renwarin, menegaskan bahwa penyelundupan Senmu ini tidak ada kaitannya dengan politik, khususnya Pilkada Puncak Jaya. Pernyataan ini menanggapi isu yang beredar bahwa penyelundupan tersebut terkait dengan aksi saling serang antara pendukung pasangan calon Bupati di Puncak Jaya. "Kami pastikan penyelundupan ini murni tindakan tersangka, tidak ada kaitannya dengan Pilkada Puncak Jaya," tegas Patrige pada Sabtu (9/2). Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 3 pucuk senjata api laras

panjang, 4 pucuk senjata api laras pendek, dan 882 butir amunisi kaliber 9 mm dan 5,6 mm (Cenderawasih Pos).

12 Maret

- Buah sinergitas dan koordinasi antara empat polda yakni Polda Papua bersama Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap jaringan penyelundupan senjata dan amunisi yang rencananya akan disuplai kepada KKB di Puncak Jaya, Papua. Kasus ini sebelumnya terungkap setelah pelaku YE yang merupakan eks prajurit Kodam XVII Kasuari ditangkap di Kabupaten Keerom beberapa hari lalu. Usai diamankan, YE kemudian "bernyanyi" dan menyebut beberapa sosok lainnya yang membantu menyediakan senjata api plus amusini. Operasi yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Maret 2025 ini berhasil menangkap dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Dari tangan mereka, Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata api, amunisi, serta peralatan pendukung lainnya. Kapolda Papua, Irjend Pol Patrige Renwarin kepada waratwan menjelaskan bahwa kasus ini diungkap bersama jajaran serta Polda Papua Barat, Polda Jatim dan Polda DIY mengungkapkan hasil pengembangan pihaknya menangkap 6 tersangka baru yakni Teguh Wiyono, Moch Herianto, Muhammad Kamaludin, Pujiono, Eko Sugiyono, dan Adi Pamungkas (Cenderawasih Pos).
- Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar mengatakan penangkapan dua mantan anggota TNI Kodam XVII/Kasuari, Yuni Enumbi dan Eko Sugiyono, menunjukkan adanya dugaan perdagangan senjata api dan amunisi yang berulang terjadi di Tanah Papua memakai jaringan TNI. *"Aparat penegak hukum harus serius mengungkap aktor penyedia senjata api, amunisi, dan sumber dananya,"* kata Anum kepada Jubi, Rabu (12/03). Apabila mantan anggota TNI terlibat, kata Anum, maka jaringan terdekatnya dari lingkaran TNI juga. Berdasarkan laporan AlDP dari hasil investigasi terhadap berbagai kasus perdagangan senjata api dan amunisi ilegal pada periode 2011 hingga 2021, dari 51 orang yang dipidana karena

memperdagangkan senjata api dan amunisi di Papua terdapat 14 tentara. *"Jadi yang pertama harus dicek adalah jaringan TNI, karena dari beberapa kasus sebelumnya, apabila mantan TNI maka jaringana terdekatnya dari lingkaran TNI juga. Jadi patut diduga bahwa transaksi melibatkan anggota TNI lainnya, termasuk apakah ini transaksi pertama kali atau kesekian kali,"* ujarnya (https://jubi.id/mamta/2025/perdagangan-senjata-api-di-papua-diduga-melalui-jaringan-tni-aktivis-harus-diungkap/).

13 Maret

Satgas Ops Damai Cartenz 2025 bersama Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda DIY berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senjata api dan amunisi ilegal yang diduga akan disuplai kepada Kelompok Bersenjata di Papua. Operasi yang berlangsung pada 6-9 Maret 2025 ini berhasil mengamankan tujuh tersangka beserta berbagai barang bukti, termasuk 17 pucuk senjata api dan lebih dari 3.500 butir amunisi. Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, dalam keterangannya pada Selasa (11/03), mengungkapkan keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama lintas kepolisian di berbagai wilayah. "*Kami berhasil menangkap tujuh tersangka yang terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata api untuk kelompok bersenjata. Ini adalah bukti komitmen kami dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua,"* ujar Renwarin dalam rilis pers yang diterima Jubi, Kamis (13/03). Ketujuh tersangka yang berhasil diamankan memiliki peran berbeda dalam jaringan penyelundupan ini. YE (Yuni Enumbi), mantan personel TNI, bertindak sebagai penyandang dana dan pembeli senjata di Puncak Jaya, Papua. TW (Teguh Wiyono) di Bojonegoro, Jawa Timur, berperan sebagai pemasok dan distributor senjata serta amunisi, dibantu oleh MH (Moch. Herianto) yang bertugas mengemas dan mengirimkan senjata (https://jubi.id/rilis-pers/2025/polisi-gagalkan-penyelundupan-senjata-api-ke-kelompok-bersenjata-di-papua-tujuh-tersangka-ditangkap/).

14 Maret

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Faizal Ramdhani, menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2025, pihaknya telah berhasil mengamankan 79 senjata api organik, 5 senjata api rakitan, dan 6.838 amunisi. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan selama operasi di wilayah rawan, serta bukti yang disita dari tersangka kasus penyelundupan senjata ke Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB). Faizal menjelaskan, pada tahun 2020, sebanyak 16 senjata api dan 198 butir amunisi berhasil diamankan. Kemudian, pada tahun 2021, pihaknya mengamankan 22 butir amunisi. Selanjutnya, pada tahun 2022, dua pucuk senjata api dan 803 amunisi berhasil disita. Tahun 2023 menjadi tahun dengan temuan terbanyak, yaitu 32 senjata api dan 1.282 amunisi (Cenderawasih Pos).

17 Maret

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faisal Ramdhani, mengungkapkan bahwa penyidik Polda Papua saat ini tengah mendalami perkembangan kasus penyelundupan senjata api dan amunisi yang melibatkan jaringan Yuni Enumbi. Adapun penyidikan difokuskan pada nilai jual senjata api dan amunisi yang diduga kana dijual kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk mengungkap asal-usul dana sebesar Rp 396,6 juta yang berhasil disita dari rekening Yuni Enumbi. *"Kami saat ini sedang mendalami sumber dan aliran dana dari jaringan ini,"* ujar Faisal Kamis (13/03). Dalam perkembangan awal, Yuni Enumbi diketahui membeli 6 pucuk senjata api dan dengan dana sebesar 882 amunisi di Surabaya Rp 1,3 miliar. Dugaan sementara, dana tersebut berasal dari organisasi tertentu. *"Kami belum dapat memastikan asal dana Rp1,3 miliar tersebut, namun penyidikan sudah mengarah ke sana,"* jelas Faisal. Senjata dan amunisi tersebut rencananya akan dijual kepada KKB pimpinan Lerimayu Kelengen, yang diduga terafiliasi dengan kelompok KKB pimpinan Lekagak. Lekagak sendiri memiliki koneksi dengan sejumlah KKB di wilayah tersebut. *"Kami sedang memverifikasi asal dana Rp1,3 miliar ini darimana,"* tambah Faisal (Cenderawasih Pos).

29 Maret

Komnas HAM mencatat lebih dari 200 pucuk senjata serbu berada di tangan KKB (TPNPB) yang tersebar di seluruh tanah Papua yang memiliki 32 Kodap. Ratusan senjata serbu yang dimiliki KKB saat ini merupakan hasil rampasan milik anggota TNI-Polri dan hasil penyelundupan melalui jalur-jalur tertentu. Inilah kemudian yang membuat konflik bersenjata terus tumbuh subur. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengaku pihaknya juga sudah mengindentifikasi jalur distribusi senjata dimana ada dua lokasi yang kerap digunakan yaitu lewat Timika Provinsi Papua Tengah, Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. *"Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan pasar terbesar bisnis jual beli senjata. Sedangkan Papua Barat Daya, Papua Induk dan Papua Barat merupakan wilayah penyangga suport,"* terang Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/03). Kata Komnas HAM, ada tiga pihak yang terlibat dalam pusaran bisnis jual beli senjata di tanah Papua. Potensi penyalahgunaan dana kampung, aktor non negara atau orang-orang yang punya kepentingan politik dan bisnis dan yang direncanakan oleh kelompok sipil bersenjata (Cenderawasih Pos).

19 Mei

Kasus jual beli amunisi berhasil dibongkar personel Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2025 Kring Wamena bersama Satgas Tindak ODC-2025 Unit Lanny Jaya dan personel Opsnal Polres Jayawijaya. Tim gabungan mengamankan seorang pelaku berinisial PW, ini terjadi pada Kamis (15/05). Dalam penangkapan ini aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 20 butir amunisi tajam caliber 5.56 mm serta sejumlah barang lainnya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan seorang anggota Polisi dari Polres Lanny Jaya berinisial LS yang diduga kuat terlibat dalam transaksi amunisi tersebut (Cenderawasih Pos).

21 Juni

Kasus tentara dan polisi terlibat perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Tanah Papua berulang kali terjadi. Meski bukan satu-satunya sumber, pasokan senjata api dan amunisi dari aparat keamanan

itu ikut melumasi eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Kasus terbaru perdagangan amunisi ilegal yang melibatkan prajurit TNI terjadi pada 24 Mei 2025. Di terminal kargo Bandara Mozes Kilangan, 15 butir peluru kaliber 5,56 milimeter disembunyikan dalam bungkus rokok ditemukan saat pemeriksaan x-ray. Rencananya, belasan butir peluru yang diselundupkan petugas keamanan bandara berinisial AF itu akan dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Saat diperiksa, AF mengaku belasan peluru itu titipan dari A, seorang sopir truk tangki bahan bakar di bandara tersebut. A mengaku mendapatkan amunisi itu dari prajurit TNI AD berinisial S dan AM. Kasus itu pun ditangani Polisi Militer TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, Mayjen Rudi Puruwito mengatakan kasus itu ditangani langsung oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan III. *"Itu bukan anggota Kodam XVII/Cenderawasih. Yang menangkap dan menangani saat itu adalah POM AU dari Lanud Yohanes Kapiyau. Jadi semua [laporan] prosesnya tidak dilaporkan ke saya, tetapi ke Kogabwilhan III. Lebih tepat ditanyakan ke Kogabwilhan III,"* kata Rudi kepada Jubi pada Jumat (20/06) (https://jubi.id/polhukam/2025/lagi-lagi-kasus-tentara-dan-polisi-jual-senjata-api-dan-amunisi-di-tanah-papua/).

19 September

Dua pria asal Australia didakwa di pengadilan karena diduga menyelundupkan senjata api dan amunisi kepada kelompok pemberontak bersenjata di Papua Barat, setelah kelompok itu menculik seorang pilot asal Selandia Baru dan menyanderanya hampir dua tahun. Kedua pria tersebut, masing-masing berasal dari Queensland (QLD) dan New South Wales (NSW), dituduh memasok senjata kepada TPNPB. Demikian dilaporkan jubi.id mengutip laman RNZ Pasifik, Jumat (19/09). Kepolisian Federal Australia (AFP) menyatakan penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang yang melibatkan berbagai lembaga. Penyelidikan dimulai setelah anggota TPNPB menculik pilot Selandia Baru, Phillip Mehrtens, pada Februari 2023 saat ia mendarat di sebuah landasan udara terpencil di Papua Barat, Indonesia. Mehrtens, yang saat itu sedang

bertugas sebagai pilot, disandera selama 592 hari sebelum akhirnya dibebaskan pada September 2024 (https://jubi.id/pasifik/2025/dua-wn-australia-didakwa-dalam-kasus-perdagangan-senjata-terkait-penculikan-pilot-selandia-baru-dan-pemberontak-papua-barat/).

Kronik Pengungsian Warga

07 Januari

Hingga 2024, baru 202 kepala keluarga pengungsi dari Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang telah pulang ke kampung mereka. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada 2023 yang menyatakan ada 706 keluarga asal Maybrat mengungsi. Pemerintah Kabupaten Maybrat diminta memperhatikan kondisi dan kebutuhan para pengungsi yang telah pulang. Para pengungsi itu adalah bagian dari warga sipil Maybrat yang mengungsi untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021. Ribuan warga Maybrat mengungsi ke berbagai lokasi, menjadi pengungsi di kabupaten/kota yang lain, atau mengungsi dengan masuk jauh ke dalam hutan sehingga kehilangan akses pelayanan publik. Sejak 2021 hingga kini, baru 202 kepala keluarga (KK) yang telah kembali ke kampung asal mereka. Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus atau SKPKC OSA, Pastor Heribertus Lobya OSA mengatakan warga Maybrat itu pulang ke kampung halaman mereka mulai 2023 hingga 2024. Menurut Lobya pemulangan warga itu hasil kerja sama berbagai pihak, khususnya kepala kampung dan kepala distrik. Ratusan kepala keluarga warga Maybrat yang telah kembali itu berasal dari Distrik Aifat Timur Tengah yakni Kampung Ayata (45 KK), Kampung Aiwesa (15 KK), Kampung Tiam (17 KK), Kampung Aikus (16 KK), Kampung Aifam (10 KK), Kampung Mupas (13 KK), Kampung Saud (15 KK), Kampung Frambu (14 KK) dan Kampung Faan Kahrio (21 KK). Adapun 36 kepala keluarga warga Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan juga telah kembali ke kampung

mereka. *"Mereka ini [mulai banyak] kembali sejak ada pemilihan legislatif dan presiden [Pemilu 2024],"* kata Lobya pada Selasa (07/01) (https://jubi.id/polhukam/2025/baru-202-kepala-keluarga-pengungsi-maybrat-yang-telah-pulang-ke-kampungnya/).

10 Januari

Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM, Yones Douw mengatakan kasus warga sipil yang mengungsi karena konflik bersenjata semakin banyak. Operasi militer yang digelar TNI tidak menyelesaikan konflik bersenjata, dan justru membuat kontak senjata/baku tembak terus terjadi. Douw menjelaskan warga Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah misalnya, harus mengungsi untuk menghindari konflik bersenjata di Intan Jaya. Mereka harus meninggalkan kampungnya, karena kontak tembak/baku tembak antara aparat keamanan TNI/Polri dan kelompok TPNPB juga terjadi di kampung mereka. Warga sipil di wilayah konflik juga tidak bisa beraktivitas dengan bebas, karena selalu ditanyai aparat TNI/Polri. *"Mereka mau pergi ke kebun saja aparat mengikuti, dan aparat bertanya. Mereka pergi cari kayu bakar juga diikuti dan ditanya. Misalnya ada keluarga yang dari kampung lain datang, juga diikuti dan ditanya-tanya oleh militer, lalu ada yang ditangkap dan dibunuh,"* kata Yones Douw dalam diskusi dan peluncuran film "Merajut Harapan dari Intan Jaya" pada siniar Jubi Tv di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (09/01). Douw mengatakan baginya berbicara tentang HAM dan pengungsi adalah berbicara fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan. *"Apa yang saya bicara ini apa yang saya lihat, apa yang saya raba, ada apa yang saya saksikan. Jadi pengungsi yang terjadi di lapangan itu di Intan Jaya, warga sipil yang mengungsi. Jumlahnya kisaran 8.600 lebih yang mengungsi keluar dari Intan Jaya"* (https://jubi.id/polhukam/2025/warga-sipil-di-daerah-konflik-sering-diintimidasi-dan-jadi-korban/).

17 Januari

Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum atau JPIC OFM Papua dan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura menyatakan bahwa terjadi darurat kemanusiaan di Distrik Oksop, Kabupaten

Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam investigasi tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua, ditemukan adanya pengungsian massal warga Distrik Oksop, akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Direktur JPIC OFM Papua RP Alexandro Rangga OFM mengatakan, temuan di lapangan pada akhir November 2024, warga dari lima kampung di Distrik Oksop melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer di wilayah mereka. *"Ketakutan akan terjadinya konflik bersenjata mendorong masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu Distrik Oksibil,"* kata Rangga dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (17/01). Hingga saat ini, lanjutnya, diperkirakan sekitar 327 orang mengungsi, dengan sebagian besar lainnya memilih untuk bersembunyi di hutan. Terdapat data rinci mengenai jumlah pengungsi, termasuk berdasarkan gender, usia, dan asal kampung (https://jubi.id/rilis-pers/2025/jpic-ofm-papua-sebut-darurat-kemanusiaan-di-distrik-oksop/).

25 Februari

Hingga kini, sejumlah 707 warga Distrik Oksop di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, masih mengungsi ke hutan sejak November 2024 lalu. Pemerintah daerah diminta mengembalikan para pengungsi itu ke kampung halaman mereka. Hal itu disampaikan Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil, Pastor Kletus Togodli Pr pada Senin (24/2/2025). *"Hari Kamis dan Jumat pekan lalu kami ada naik ke Oksop, mengantar bantuan. Masyarakat sampaikan masih ada 707 orang di hutan,"* ujar Pastor Kletus Togodli saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin. Pada 28 November 2024 warga dari lima kampung di Distrik Oksop mengungsi ke hutan dan ke Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka mengungsi karena takut akan kehadiran prajurit TNI yang melakukan penyisiran mencari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di sekitar kampung mereka. Kelima kampung itu adalah Kampung Mimin, Kampung Oksop, Kampung Atener, Kampung Alutbakon, dan Kampung Oktumi. Laporan Justice, Peace and the Integrity of Creation Order of Friars Minor atau JPIC OFM Papua menyatakan ada 327 jiwa

dari lima kampung di Distrik Oksop terpaksa mengungsi ke Oksibil. Pengungsi yang terdiri dari 151 laki-laki dan 176 perempuan itu telah pulang pada Desember 2024. Akan tetapi, Pastor Togodli mengatakan ada 707 warga dari Kampung Alutbakon dan Kampung Mimin yang masih bertahan di dalam hutan. Mereka terdiri dari anak-anak maupun orang dewasa. Terdapat 251 pengungsi yang berusia 0 tahun hingga 10 tahun. Selain itu, juga terdapat 456 orang yang berusia berumur 11 tahun hingga dewasa. *"Ini warga yang mengungsi di hutan,"* katanya (https://jubi.id/polhukam/2025/707-warga-distrik-oksop-di-pegunungan-bintang-masih-mengungsi-ke-hutan/).

05 Juni

Menteri HAM RI, Natalius Pigai mengatakan bahwa pihaknya serius dalam mengurusi pengungsi akibat konflik di Tanah Papua demi memastikan terpenuhinya hak warga sipil dalam hal pemulihan dan pemukiman kembali (resettlement). *"Soal penanganan pengungsi menjadi salah satu atensi kami, dan kami melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk melakukan resettlement maupun pemulihan-pemulihan pengungsi,"* kata Pigai saat jumpa pers usai mendengarkan aspirasi mahasiswa Papua di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada Selasa (03/06). Pigai menyatakan bahwa komitmen itu bukan sekadar janji. Bahkan, jajarannya telah turun ke berbagai daerah pengungsi di Tanah Papua. Pada beberapa bulan terakhir, Kementerian HAM telah mengecek kondisi pengungsi di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan dan Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan turun ke Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Papua Tengah. *"Intan Jaya dan Puncak kami akan lakukan. Mungkin beberapa pejabat akan turun juga identifikasi pengungsi untuk menangani korban sipil akibat konflik,"* tuturnya (https://jubi.id/nasional-internasional/2025/kementerian-ham-serius-urus-pengungsi-akibat-konflik-di-tanah-papua/).

16 Juni

Hari itu mendung menyelimuti kota Nabire di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di Kompleks Kimi yang terletak di Jalan Sinak,

beberapa anak terlihat berkeliaran. Dari rumah bermaterial setengah semen dan setengah kayu, tiga perempuan asli Papua pun keluar. Mereka sama-sama menggendong seorang anak dan menyandang noken. Ketiga perempuan itu merupakan pengungsi dari Distrik Pogama di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Mereka mengungsi sejak hampir lima bulan lalu, tepatnya sejak awal Februari 2025 setelah aparat TNI masuk ke kampung mereka menyerang TPNPB-OPM. *"Kami mengungsi sejak aparat keamanan datang ke Kampung Timobut, Distrik Sinak Barat pada 5 Februari 2025,"* kata Yomi Murib, satu dari tiga perempuan itu. Distrik Pogoma dan Timobut bersebelahan. Sebelum aparat TNI menguasai Pogoma, penduduknya sudah mengungsi duluan. *"TNI masuk datang bunyikan tembakan, baik TPNPB maupun TNI sama-sama masih ada [di Pogoma] sehingga kami yang harus keluar dari kampung halaman kami,"* ujarnya. Prajurit TNI, kata Murib, datang dalam jumlah besar dengan helikopter. Karena penduduk mengungsi, semua aktivitas di Pogoma terhenti. Kebun terbengkalai, sekolah tutup, dan tempat ibadah kosong (https://jubi.id/headline/2025/derita-pengungsi-dari-kabupaten-puncak-kami-seperti-berada-di-dalam-api-naraka/).

20 Juni

Sebanyak delapan warga Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dilaporkan meninggal di lokasi pengungsian di hutan yang ada di sana. Salah satu sumber Jubi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, warga yang meninggal di pengungsian berasal dari beberapa kampung di Distrik Oksob. Menurut sumber itu, warga meninggal di lokasi pengungsian di hutan karena sakit, kedinginan dan kelaparan. Warga Distrik Oksop telah mengungsi sejak Desember 2024 lalu hingga kini. Katanya, warga yang meninggal di pengungsian adalah Paulina Lepki (58 tahun) asal Kampung Ngangom, meninggal pada 25 Desember 2024. Poropina Kalaka (69 tahun) dari Kampung Ngotokpom meninggal pada 7 Januari 2025. Lokana Sasaka (54 tahun) meninggal pada 23 Januari 2025 karena sakit, Ronal Mimin (20 tahun) meninggal pada 10 April 2025, karena sakit, Ateli Mimin (57 tahun), warga kampung Alutbakon meninggal pada 8 Februari 2025 karena sakit.

Rastin Mol Peya Mimin (7 tahun) meninggal pada 4 Mei 2025, karena sakit, Nonince Mimin (14 tahun) meninggal pada 12 Juni 2025, karena sakit dan seorang lainnya adalah gembala bernama Hef Kasipka (68 tahun) (https://jubi.id/polhukam/2025/delapan-warga-pegunungan-bintang-dilaporkan-meninggal-di-pengungsian/).

21 Juni

Bidang Pendidikan Pemuda Katolik Komisariat Daerah atau Komda Papua Tengah, menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat (20/06). Ketua Bidang Pendidikan Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Hengky Yeimo mengatakan penerima bantuan di Sinak, adalah warga yang mengungsi dari Distrik Sinak Barat dan Distrik Pogoma akibat pengiriman militer ke wilayah mereka. *"Hari Jumat 20 Juni 2025, jam 12.00 Waktu Papua, bertepatan dengan hari pengungsi internasional. Saya sebagai Ketua Bidang Pendidikan Pemuda Katolik Komda Papua Tengah telah menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga Papua di Sinak, Kabupaten Puncak yang mengungsi akibat pendropan militer di Distrik Sinak Barat, dan Distrik Pogoma,"* ujar Yeimo kepada Jubi melalui aplikasi pesan singkatnya, Sabtu (21/06). Menurut Yeimo, bantuan diterima langsung oleh perwakilan pengungsi di Bandara Tapulinik Sinak, Kabupaten Puncak. Bantuan akan didistribusikan kepada pengungsi yang berada di Distrik Sinak (https://jubi.id/meepago/2025/pemuda-katolik-komda-papua-tengah-salurkan-bantuan-kepada-warga-puncak/).

30 Juni

- Himpunan Mahasiswa Yahukimo atau HMY kota studi Wamena, Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan kepada 698 pengungsi di Kampung Halihalo, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (27/06). Koodinator relawan mahasiswa ,Wolman Wolom menjelaskan, HMY melakukan penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan bagi warga yang mengungsi di Yahukimo. Penggalangan dana berlangsung pada 23 dan 24 Juni 2025. *"Puji Tuhan, dari hasil penggalangan dana tersebut kami*

mendapatkan sekitar Rp13 huta. Karena kebutuhan yang mendesak bagi warga pengungsi sehingga kami belanja bahan makan seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan sejumlah kebutuhan lain, kemudian kami kirim ke Yahukimo," kata Wolamn Wolon kepada Jubi melalui panggilan telepon, Senin (30/06). Menurutnya, penyaluran bantuan yang dilakukan mahasiswa itu didampingi Direktur Eksekutif Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem. *"Kami membawa bantuan itu langsung ke sana dan memberikannya kepada warga pengungsi. Kami juga memberikan dukungan dan semangat kepada warga pengungsi. Kami juga berdiskusi dengan mereka sambil memberikan penguatan,"* ucapnya (https://jubi.id/lapago/2025/mahasiswa-yahukimo-salurkan-bahan-makanan-ke-pengungsi/).

- Sekitar 900 warga dari sejumlah kampung di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dipulangkan ke kampungnya, Jumat (27/06). Ratusan warga itu mengungsi ke Distrik Sugapa, ibu kota Intan Jaya sejak dua bulan lalu, akibat konflik bersenjata antara TPNPB-OPM yang menyebabkan aparat keamanan melakukan penyisiran di berbagai kampung di Intan Jaya. Koodinator Tim Mediasi Konflik Hitadipa, Enius Zanambani mengatakan, pihaknya bersama pemerintah distrik, serta para intelektual dari Distrik Hitadipa berkomitmen mengantarkan warga sipil itu kembali ke kampungnya masing-masing. *"Warga sipil yang terdampak konflik secara langsung itu antara lain [dari] Kampung Sugapa Lama, Kampung Jaindapa, Hitadipa, Janamba, Soangama dan kampung lain yang terdampak. Jadi sekitar ada 800-900 masyarakat sipil yang mengungsi yang ada di ibu kota itu. Ini yang kami antara mereka ke Distrik Hitadipa dari Ibu Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya,"* kata Enius Zanambani kepada Jubi melalui telepon selelurnya, Senin (30/06) (https://jubi.id/meepago/2025/ratusan-warga-pengungsi-intan-jaya-dipulangkan-ke-kampungnya/).

11 Juli

Tim Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) tiba di lokasi pengungsian di halaman Gereja Kingmi Yeriko Halihalo,

Kampung Yeleas, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (10/07) pukul 13.30 WP. Mereka memfasilitasi prosesi pemulangan ratusan pengungsi ke kampung masing-masing, yang diawali dengan ibadah bersama dan ditutup dengan tradisi bakar batu sebagai wujud syukur dan rekonsiliasi warga bersama tokoh masyarakat setempat. *"Kami lakukan bakar batu supaya mereka bisa pulang ke kampung masing-masing, berkebun, beraktivitas seperti biasa,"* kata Hesegem dalam rilis yang diterima Jubi Jumat (11/07). Prosesi adat ini dilakukan sebagai penanda bahwa masing-masing pihak, TNI maupun TPNPB tidak melakukan kontak tembak di dalam kampung lagi. *"Dengan demikian di kemudian hari tidak boleh ada masyarakat yang menerima kelompok TPNPB-OPM dan TNI di daerah Tangma. Kalau mau berperang, di hutan-hutan sana! Bukan di dalam kampung, sehingga Masyarakat jadi korban,"* katanya. Selanjutnya, YKKMP akan melakukan advokasi dan upaya pendekatan kepada para pengambil kebijakan, terutama tentang penarikan pasukan nonorganik di gunung Ongolo, Distrik Tangma Kabupaten Yahukimo (https://jubi.id/polhukam/2025/ykkmp-dampingi-pemulangan-pengungsi-tangma-warga-gelar-ibadah-dan-bakar-batu/).

26 Juli

Ada sebanyak 6000 warga Aifat di Kabupaten Maybrat yang masih mengungsi dari kampung halaman mereka atau pengungsi internal (Internally Displaced People – IDPs) karena konflik pada 2021 antara TPNPB OPM di Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan itu disampaikan Pastor Heribertus Lobya, Direktur SKPKC OSA Papua Indonesia di Sorong kepada Suara Papua pada, Kamis (24/07). Pastor Heri mengatakan pengungsi Maybrat kini tinggal di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Maybrat, Tambrauw, dan Bintuni. *"Ya benar, masih ada warga Maybrat (Aifat dan sekitar yang masih mengungsi). Mulai dari Wilayah Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Maybrat, Tambrauw, dan Bintuni. Alasan mereka masih bertahan di Pengungsian karena situasi belum begitu nyaman dan hak-hak mereka sebagai pengungsi belum dijamin. Jumlahnya sekitar 6000 orang,"* jelas Pastor Heri. Mereka pada posisinya terus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dengan berkebun seadanya di

mana mereka tinggal. *"Kondisi pengungsi saat ini masih terus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka yakni dengan berkebun di wilayah-wilayah pengungsian, supaya bisa makan dan juga menjual hasil kebun untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu untuk menunjang kebutuhan akan kesehatan mereka,"* katanya (https://suarapapua.com/2025/07/26/situasi-belum-aman-6000-warga-maybrat-memilih-tinggal-di-pengungsian/).

19 Agustus

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna Penetapan Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan untuk delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. Penetapan Pansus itu berlangsung di Ruang Rapat Utama kantor DPR Drs. Carel Gobai, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa (19/08). Wakil Ketua II DPR Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty mengatakan penetapan pansus kemanusiaan ini merupakan satu pengejewantahan realisasi dari pada tugas dan tanggung jawab anggota legislatif dalam hal ini DPR Papua Tengah. Karena sejak dilantik 6 November 2024, sebenarnya dari anggota DPR dari masing-masing dapil untuk melihat apa yang terjadi hal kemanusiaan di Papua Tengah. *"Karena keprihatinan dan tragedi kemanusiaan yang merugikan masyarakat. Menurut anggota dewan ini sangat butuh perhatian antara lain terjadi pengungsian dan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,"* ujarnya. Menurut Petrus sebenarnya terkait Pansus Kemanusiaan ini sudah disampaikan berkali-kali untuk dibentu. Setelah melewati rapat internal beberapa waktu lalu, akhirnya Pansus terbentuk. Hari ini, hanya menetapkan saja dalam surat keputusan (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dpr-papua-tengah-bentuk-pansus-kemanusiaan-untuk-delapan-kabupaten/).

23 Agustus

Anggota DPR Papua Pegunungan, Mile Gwijangge menyerahkan alat kerja kepada pengungsi dari Distrik Mebarok Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang berada di Kampung Molepaga, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (22/08). Pengungsi Nduga di kampung ini merupakan rombongan pengungsi gelombang ke lima, sejak gelombang

pertama pengungsian yang terjadi pada akhir 2018. Rombongan ini meninggalkan kampung halamannya di Kabupaten Nduga pada awal Januari 2025, dan tiba di Kampung Molepaga pada awal Juni 2025 (6 bulan). Mereka belum memiliki honai sendiri untuk mereka tinggali. *"Sesuai data, dipastikan pengungsi Nduga di dalam negara ini 5 kali terjadi. Mereka keluar dari rumah ke kampung tetangga yang dianggap aman"* kata Mile yang merupakan anggota DPR Papua Pegunungan dari daerah pemilihan atau Dapil 3 Wilayah Nduga. Mile mengatakan pengungsi dari Distrik Mebarok merupakan gelombang pengungsian paling terakhir dari sekian distrik. *"Mereka rombongan yang terakhir mengungsi"* katanya (https://jubi.id/lapago/2025/anggota-dpr-papua-pegunungan-bantu-alat-kerja-untuk-pengungsi-nduga/).

30 September

Dua fraksi DPR Papua Tengah, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Fraksi Kelompok Khusus Jalur Pengangkatan, menyoroti penanganan konflik bersenjata dan pengungsi di Papua Tengah. Mereka mengingatkan pembangunan di Provinsi Papua Tengah tidak akan berjalan dengan baik jika konflik bersenjata yang berkepanjangan terus terjadi. Anggota Fraksi PDIP, Maksimus Takimai mengatakan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Papua Tengah 2025 dinilai belum maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Di Provinsi Papua Tengah, konflik bersenjata itu terjadi di beberapa kabupaten. *"APBD Perubahan itu belum berdampak kepada masyarakat yang berdampak konflik seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai,"* kata Takimai dalam pandangan umum Fraksi PDIP pada rapat paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Senin (29/09). Rapat paripurna itu membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Maksimus Takimai mengatakan banyak warga sipil mengungsi dari Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, maupun beberapa daerah konflik lainnya.

Kebanyakan warga sipil itu mengungsi ke Kabupaten Mimika dan Nabire. Ia menilai hingga saat ini belum ada upaya serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menangani para pengungsi. *"Kami Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya perhatian dan penanganan serta relokasi khusus bagi pengungsi yang ada di daerah pengungsian,"* kata Takimai (https://jubi.id/papua-tengah/2025/dpr-papua-tengah-soroti-penanganan-konflik-bersenjata-dan-pengungsi-di-papua-tengah/).

18 Oktober

Komnas HAM RI menyoroti krisis kemanusiaan yang dialami lebih dari 9.000 pengungsi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, akibat eskalasi konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir sembilan bulan. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mendesak penarikan bertahap pasukan non-organik dan mendorong dialog kemanusiaan agar warga dapat kembali dengan aman ke kampung halamannya. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan memang Komnas HAM dalam seminggu ini turun ke beberapa wilayah di Papua Tengah terutama di Kabupaten Puncak, Ilaga dimana pengungsi berada, di Nabire dan Timika. *"Ini luar biasa, karena dari sisi statistik tampaknya ini paling besar, karena 9.261 orang yang ada di tenda-tenda dan 61 ribu orang lebih yang terdampak dari pengungsian ini sudah berjalan cukup lama, hampir 9 bulan dan kondisi pengungsi juga sangat memprihatinkan,"* kata Anis Hidayah di Nabire pada Kamis (16/10). Anis Hidayah mengatakan dalam kunjungan Komnas HAM RI selama sepekan, mereka menemukan banyak pengungsi yang sakit, perempuan, anak-anak, lalu tidak ada layanan khusus. Para pengungsi mengalami trauma dan sangat ingin kembali ke kampung halamannya tetapi di sisi yang lain mereka juga trauma karena pos-pos keamanan non-organik yang dibentuk di beberapa checkpoint di kampung-kampung (https://jubi.id/polhukam/2025/komnas-ham-desak-penarikan-pasukan-non-organik-di-puncak-9-000-warga-masih-mengungsi/).

06 November

Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mendesak Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, agar membuka mata terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di wilayah Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saat ini terdapat sekitar 86 warga sipil kini hidup dalam pengungsian, setelah situasi keamanan di wilayah itu terus memburuk akibat operasi militer dan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. *"Sebagai pemimpin bangsa, Wapres Gibran harus turun tangan langsung memberikan jaminan keselamatan bagi para pengungsi dan Mereka bukan musuh negara, mereka warga negara Indonesia yang berhak hidup aman, sehat, dan bermartabat,"* ujar Warinussy, Selasa (04/11). Warinussy menegaskan dala kunjungan Wapres Gibran ke Manokwari 4-5 November 2025, Wapres bukan sekadar seremoni politik, melainkan momentum penting untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang terjebak di tengah konflik bersenjata (https://jubi.id/domberai/2025/86-warga-mengungsi-warinussy-minta-gibran-tanggap-krisis-di-moskona-utara/).

November

- Yarti Gwijangge, salah seorang perempuan asal Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengungsi ke daerah Ilekma, Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menceritakan bagaimana awal ia bersama ribuan warga Nduga meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kisah itu diceritakan Yarti Gwijangge saat menjadi Narasumber pada Festival Literasi dan Resiliensi 'Merawat Ingatan Melalui Kata', yang diselenggarakan Dewan Gereja Papua bekerja sama dengan Pusat Studi HAM Sosial dan Pastoral Pastoral STT Walter Post Jayapura di Kota Jayapura, Papua, Jumat (21/11) (https://jubi.id/polhukam/2025/kisah-pengungsi-di-tanah-papua-yang-tak-kunjung-diselesaikan/).
- Dewan Gereja Papua mencatat, hingga Oktober 2025, pengungsi di berbagai daerah di Tanah Papua mencapai 103.218 orang. Mayoritas pengungsi adalah orang asli Papua. Mereka mengungsi ke wilayah

lain yang dianggap aman, karena operasi militer dan konflik bersenjata antara militer dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Staf Dewan Gereja Papua, Eneko Pahabol, mengatakan operasi militer dan konflik bersenjata mengganggu kehidupan dan pelayanan sipil. Menyebabkan munculnya pengungsi baru di Tanah Papua. Dampak terbesar dari Konflik bersenjata terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah di mana operasi militer memaksa seluruh desa mengungsi (https://jubi.id/polhukam/2025/dewan-gereja-papua-catat-ada-103-218-pengungsi-di-tanah-papua/).

25 November

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP menyatakan warga Kampung Wunabunggu, Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan yang mengungsi ke Yigemili, kampung lain di Distrik Melagi ingin segera kembali ke kampung mereka. Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem mengatakan beberapa hari lalu pihaknya mengunjungi pengungsi dari Kampung Wunabunggu, yang ada di Kampung Yigemili (https://jubi.id/rilis-pers/2025/pengungsi-di-lanny-jaya-ingin-pulang-ke-kampungnya/)

02 Desember

Dewan Gereja Papua bersama Pusat Studi HAM, Sosial dan Pastoral STT Walter Post Jayapura atau STTWPJ menyerukan agar perayaan Natal 2025 di Tanah Papua dilakukan secara sederhana, sambil mengalihkan anggaran perayaan bagi kebutuhan lebih dari 103.218 pengungsi internal dari berbagai wilayah konflik, mulai Nduga hingga Maybrat yang hingga kini hidup tanpa perlindungan memadai akibat operasi keamanan dan perang bersenjata. Sebanyak 103.218 warga Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Bintuni dan seluruh Tanah Papua kini sedang mengungsi dan hidup tanpa perlindungan yang memadai akibat operasi keamanan dan konflik bersenjata. Demikian seruan itu disampaikan Moderator Dewan Gereja Papua (DGP) Dr. Pdt. Benny Giyai dalam konferensi pers di Sekretariat DGP Jalan Post 7, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua

pada Selasa (02/12) (https://jubi.id/polhukam/2025/dewan-gereja-papua-serukan-natal-sederhana-anggarkan-untuk-103-ribu-pengungsi/).

23 Desember

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari menyalurkan bantuan makanan (Bama) bagi para pengungsi internal dari Distrik Moskona yang saat ini masih menetap di Bintuni, ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. Penyaluran bantuan dilepas oleh Ketua STIH Dr. Filep Wamafma di Kampus Sanggeng Manokwari, Senin (22/12). DPR Otsus mengatakan ini kado natal buat warganya tak dibantu pemerintah daerah. Sejumlah warga di Distrik Moskona Timur dan Moskona Barat belum kembali ke kampung halamannya sejak peristiwa penembakan anggota TNI. Para pengungsi untuk pertama kali merayakan ibadah Natal di luar kampung mereka. Bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan juga makanan bayi dan paket alat tulis bagi anak-anak sekolah (https://jubi.id/bomberai/2025/kampus-stih-manokwari-salurkan-bama-bagi-pengungsi-moskona-bintuni/).

24 Desember

Setelah TNI melakukan pemboman, melalui udara di Distrik Gearek, pada 12 Desember 2025 lalu, masyarakat mulai mengungsi keluar dari kampung mereka dan tinggal di beberapa tempat, diantaranya di Kampung Yunusugu, Kabupaten Asmat dan Kota Keneyam, ibukota Kabupaten Nduga. Namun para pengungsi di kampung Yunusugu Kabupaten Asmat telah berangsur kembali pada 18 Desember 2025 ke Distrik Pasir Putih, dan mengisi kembali di rumah-rumah mereka. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyebutkan pada 22 Desember 2025, sekitar pukul 14,30 Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Peyon, telah bertemu dengan 71'pegungsi dari Distrik Gearek yang sedang menempati SD Inpres Keneyam, Kabupaten Nduga. Dalam kunjungan tersebut salah seorang ibu pengungsi yang tidak menyebutkan namanya menjelaskan kronologi penyerangan yang dilakukan Aparat TNI, pada tanggal 12 Desember 2025 secara detail kepada Bupati. Ia juga menyampaikan bahwa mereka tidak mau mengikuti ibadah Natal di

Keneyam. Mereka ingin mengikuti Natal di kampung mereka (https://jubi.id/lapago/2025/pengungsi-dari-keneyam-dan-yunusugu-kembali-ke-distrik-gearek/).

31 Desember

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari mencatat dalam sepanjang tahun 2025, situasi hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua dan terkait Orang Papua Asli senantiasa buruk. Keburukan ini diakibatkan pula oleh keberadaan lembaga negara seperti TNI dan Polri yang belum mampu menempatkan diri sebagai lembaga pengayom rakyat Papua Asli. Terbukti gelombang pengungsian cukup signifikan di seluruh Tanah Papua. Hal itu disampaikan Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy dalam catatan akhir tahun Lembaga tersebut (https://jubi.id/polhukam/2025/lp3bh-manokwari-catat-situasi-ham-di-tanah-papua-2025-buruk-pengungsi-meningkat/).

PENUTUP

Kesimpulan

Temuan utama buku ini menunjukkan bahwa situasi Papua sepanjang tahun 2025 tidak dapat dipahami sebagai kumpulan peristiwa yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari **krisis struktural yang saling terkait**. Militerisasi yang semakin intensif tidak hanya memperbesar risiko kekerasan, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat: pengungsian, keterbatasan akses layanan dasar, trauma sosial, hingga menyempitnya ruang demokrasi.

Pada saat yang sama, ekspansi proyek-proyek ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam memperlihatkan bahwa konflik di Papua juga berakar pada **ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya**. Ketika pembangunan dijalankan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat, maka yang terjadi bukanlah kesejahteraan, melainkan marginalisasi yang semakin dalam.

Krisis ini diperparah oleh lemahnya tata kelola pemerintahan, yang tercermin dalam praktik korupsi, rendahnya akuntabilitas, serta ketidakmampuan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga. Dalam konteks ini, dampak kemanusiaan—terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial—menjadi manifestasi paling nyata dari kegagalan struktural tersebut.

Dengan demikian, Papua 2025 memperlihatkan satu gambaran besar: **sebuah ruang di mana kekerasan, eksploitasi, dan kegagalan tata kelola bertemu, dan secara bersama-sama menghasilkan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut**.

Rekomendasi Strategis

1. **Pendekatan Keamanan: Demiliterisasi dan Akuntabilitas**
   a. Menghentikan pendekatan keamanan yang berorientasi militer dalam penanganan konflik sipil.
   b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pasukan non-organik.
   c. Menjamin mekanisme akuntabilitas yang independen terhadap pelanggaran HAM.
2. **Penyelesaian Konflik: Dialog Inklusif dan Berkeadilan**
   a. Mendorong dialog damai yang melibatkan:
      - Pemerintah pusat
      - Pemerintah daerah
      - Perwakilan masyarakat adat
      - Kelompok sipil Papua.
   b. Menjadikan dialog sebagai proses politik yang setara, bukan sekadar formalitas.
3. **Tata Kelola Pemerintahan: Reformasi Struktural**
   a. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus
   b. Mendorong reformasi birokrasi berbasis integritas
   c. Memastikan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan
4. **Ekonomi dan Lingkungan: Keadilan Ekologis**
   a. Meninjau ulang proyek strategis nasional yang berdampak pada masyarakat adat.
   b. Mengakui dan melindungi hak atas tanah adat.
   c. Mengembangkan model pembangunan berbasis komunitas dan keberlanjutan.
5. **Penguatan Masyarakat Sipil**
   a. Mendukung keberlanjutan LSM lokal melalui:
      - skema pendanaan alternatif
      - penguatan kapasitas organisasi.
   b. Menjamin kebebasan sipil dan ruang advokasi.

6. Perlindungan Kelompok Rentan

a. Memastikan layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan di wilayah konflik
b. Memberikan perhatian khusus pada:
    - perempuan
    - anak-anak
    - pengungsi internal.
c. Mengintegrasikan pendekatan trauma healing dalam kebijakan sosial.

BIODATA PENULIS

Alexandro Rangga OFM

Alexandro Rangga OFM adalah direktur JPIC OFM Papua. Dua bukunya yang telah diterbitkan oleh JPIC OFM Papua adalah *Fenomena Papua* (kumpulan esai-esai sosial) (2018) dan *Tindakan Politik Bagi Papua: Relevansi Pemikiran Hannah Arendt (2020)*. Karyanya yang terbaru ialah *Pastoral Digital: Pendekatan Komunikasi dan Teologi Pastoral* (KanisiusMedia, 2024). Saat ini menjadi editor tetap seri *Memoria Passionis* dan *Memoria Resurrectionis.*

Apriani Anastasia Amenes

Apriani Anastasia Amenes adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Jayapura. Ia aktif meneliti isu kesetaraan gender, masyarakat adat, dan keadilan lingkungan. Sejak 2026 menjadi peneliti JPIC OFM Papua.

Bernadus B. Koten

Bernadus B. Koten bergabung dengan JPIC OFM Papua sejak 2011. Sejak bergabung, Bernadus melanjutkan tradisi menulis dan menerbitkan buku Seri Memoria Passionis. Selain itu, Bernadus banyak terlibat dalampembuatan film dokumenter bersama *Papuan Voices*. Kini ia bertanggung jawab sebagai Manager Program di JPIC OFM Papua.

Goklian PH Lumban Gaol

Goklian bergabung dengan JPIC OFM Papua sejak Januari 2024. Saat ini menjadi Koordinator Divisi Advokasi dan Animasi. Goklian juga

merupakan seorang lawyer dan Instruktur Nasional Kementrian Agama RI untuk moderasi beragama di wilayah Indonesia Timur.

Handrianus K. Belolon

Handrianus K. Belolon adalah penulis dan sineas muda asal Flores Timur. Ia mengajar di Universitas Okmin Papua dan fokus pada isu pendidikan serta film dokumenter. Sejak 2026 bergabung sebagai peneliti JPIC OFM Papua.

Hans G. Yosua

Hans G. Yosua adalah peneliti yang berfokus pada isu hukum dan hak asasi manusia. Ia menyelesaikan Magister Hukum dengan peminatan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Indonesia. Kini bekerja di divisi Riset dan Dokumentasi KontraS.

Ignasius Ngari OFM

Ignasius Ngari OFM adalah seorang Bruder Fransiskan yang memiliki hobi filsafat. Ia mengajar filsafat di STFT Fajar Timur dan Universitas Cenderawasih. Ignasius aktif menulis artikel tentang filsafat, teologi, dan budaya, serta berkontribusi dalam jurnal akademik di bidang tersebut.

Yuliana Langowuyo

Yuliana Langowuyo bekerja di JPIC OFM Papua sejak tahun 2010 dan sejak 2025 bergabung bersama Landesa Indonesia menjadi Policy Officer untuk Pulau Papua. Ia dikenal sebagai “iron lady” yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia di Papua. Yuliana sering menjadi pembicara terkait situasi HAM di Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Memoria Passionis bukan sekadar dokumentasi peristiwa, melainkan upaya merawat ingatan kolektif atas penderitaan yang terus berlangsung di Tanah Papua. Seri ini lahir dari kesadaran bahwa di balik angka-angka kronik, terdapat kehidupan manusia—komunitas, keluarga, dan individu—yang mengalami kehilangan, ketidakpastian, dan keterpinggiran secara terus-menerus. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya mencatat apa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tetapi juga berupaya membaca makna di balik peristiwa-peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas: politik, ekonomi ,dan kemanusiaan.

Berbeda dari laporan kronologi biasa, buku ini disusun dengan pendekatan tematik-analitis yang menempatkan militerisasi, kekerasan, dan krisis kemanusiaan sebagai poros utama. Pilihan ini didasarkan pada temuan bahwa sepanjang tahun 2025, peningkatan kehadiran aparat keamanan, operasi militer, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya menjadi fenomena yang paling sering terjadi, tetapi juga menjadi simpul yang menghubungkan berbagai persoalan lain di Papua. Dari pengungsian internal hingga pembatasan ruang sipil, dari trauma kolektif hingga terhambatnya layanan dasar—semuanya berkelindan dalam konteks militerisasi yang semakin menguat.

Buku Memoria Passionis No. 44 diharapkan tidak hanya menjadi arsip penderitaan, tetapi juga menjadi dokumen reflektif dan advokatif yang mampu mendorong perubahan. Ingatan yang dirawat dalam buku ini bukan untuk membekukan masa lalu, melainkan untuk membuka kemungkinan masa depan—masa depan di mana keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di Tanah Papua benar-benar dihormati dan diwujudkan.

Justice, Peace And Integrity of Creation
Ordo Fratrum Minorum